



**ANALISIS FUNGSI DAN KATEGORI SINTAKSIS KALIMAT
MAJEMUK BERTINGKAT PADA OPINI JAWAPOS.COM EDISI 2020**

SKRIPSI

**ARIS WIPA
NPM 17410151**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

2022



**ANALISIS FUNGSI DAN KATEGORI SINTAKSIS KALIMAT
MAJEMUK BERTINGKAT PADA OPINI JAWAPOS.COM EDISI 2020**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni
Universitas PGRI Semarang untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Derajat Sarjana Pendidikan**

**ARIS WIPA
NPM 17410151**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
2022**

SKRIPSI

**ANALISIS FUNGSI DAN KATEGORI SINTAKSIS KALIMAT
MAJEMUK BERTINGKAT PADA OPINI JAWAPOS.COM EDISI 2020**

yang disusun dan diajukan oleh

**ARIS WIPA
NPM 17410151**

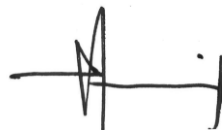
**telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan
di hadapan Dewan Penguji
pada tanggal 21 Januari 2022**

Pembimbing I,



**Nanik Setyawati, S.S., M.Hum.
NPP 997101150**

Pembimbing II,



**Eva Ardiana Indrariansi, S.S., M.Hum.
NPP 118701358**

SKRIPSI

**ANALISIS FUNGSI DAN KATEGORI SINTAKSIS KALIMAT
MAJEMUK BERTINGKAT PADA OPINI JAWA POS.COM EDISI 2020**

yang disusun dan diajukan oleh

ARIS WIPA

NPM 17410151

telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

pada tanggal

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

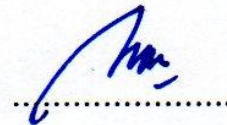
Dewan Penguji,

Sekretaris,

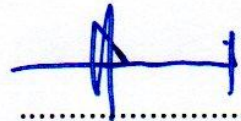


Eva Ardiana Indrariansi, S.S., M.Hum.
NPP 118701358

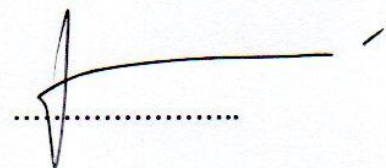
Penguji I
Nanik Setyawati, S.S., M.Hum.
NPP 997101150



Penguji II
Eva Ardiana Indrariansi, S.S., M.Hum.
NPP 118701358



Penguji III
Arisul Ulumuddin, S.Pd., M.Pd.
NPP 108701307



MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto:

1. Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda. - Albert Einstein
2. Pilihan yang kamu tentukan bukanlah suatu kebetulan. Ilmu yang kamu dapat kemarin, hari ini, dan besok adalah bekal masa depan. –Aris Wipa

Persembahan:

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayah dan ibuku yang selalu menyayangiku dan memperhatikanku.
2. Kakakku Aris Wida, Adib Setiawan, dan adikku Ilham Alim Kusuma yang mendukungku.
3. Universitas PGRI Semarang, almamaterku.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Skripsi yang berjudul *Analisis Fungsi dan Kategori Sintaksis Kalimat Majemuk Bertingkat pada Opini JawaPos.Com Edisi 2020* ini ditulis untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan.

Dukungan keluarga dan handai taulan juga sangat berarti dalam menumbuhkan semangat penulis. Terus terang, penulis mengakui bahwa dalam mempersiapkan, melaksanakan penelitian, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepantasnyalah pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, di antaranya:

1. Dr. Muhdi, S.H., M.Hum., sebagai Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas PGRI Semarang.
2. Dr. Asropah, M.Pd., sebagai Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
3. Eva Ardiana Indrariansi, S.S., M.Hum., sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah menyetujui usulan topik skripsi penulis, sekaligus pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dengan penuh ketekunan dan kecermatan.
4. Raden Yusuf Sidiq Budiawan, S.Pd., M.A., sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sekaligus wali kelas penulis yang telah memberi semangat menyelesaikan tugas akhir dan kegiatan keaktifan mahasiswa.
5. Nanik Setyawati, S.S., M.Hum., sebagai dosen pembimbing I yang telah membimbing dengan sabar dan lembut.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FPBS Universitas PGRI Semarang yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh studi.
7. Sahabat-sahabatku Shofiatul Ulya, Himmatul A'la, Sayekti Brotojoyo, Ulin Nikmah, dan Lailatul Fadhillah yang telah memberi semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu pada kesempatan ini.

Semoga skripsi ini ada manfaat bagi pembaca budiman dan bisa turut mengisi atau menambah referensi, itu merupakan tujuan penulis. Penulis menyambut baik segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini dengan tangan terbuka.

Semarang, 11 Maret 2022

Penulis

ABSTRAK

Aris Wipa, NPM 17410151. Betapa pentingnya kalimat majemuk bertingkat pada opini guna menjelaskan pandangan-pandangan penulis mengenai suatu hal. Penjabaran melalui kalimat majemuk bertingkat tersebut menghilangkan multitafsir hal yang dibahas. Selain itu, penelitian mengenai fungsi dan kategori sintaksis pada kalimat majemuk bertingkat di opini masih jarang dibahas. Oleh karena itu, kalimat dalam opini JawaPos.com akan dianalisis berdasarkan fungsi dan kategori sintaksis dari kalimat majemuk bertingkat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu 1) bagaimanakah fungsi sintaksis kalimat majemuk bertingkat pada opini JawaPos.com edisi 2020? 2) bagaimanakah kategori sintaksis kalimat majemuk bertingkat pada opini JawaPos.com edisi 2020? Adapun tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui fungsi sintaksis kalimat majemuk bertingkat pada opini JawaPos.com edisi 2020. 2) untuk mengetahui kategori sintaksis kalimat majemuk bertingkat pada opini JawaPos.com edisi 2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penyediaan data menggunakan metode menyimak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode agih. Teknik analisis data menggunakan teknik bagi unsur langsung (BUL). Teknik lanjutan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik permutasi atau teknik balik dan teknik ganti. Metode penyajian hasil analisis data adalah metode penyajian informal. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan fungsi sintaksis kalimat majemuk bertingkat S-P Konjungtor S-P dan berkategori sintaksis FN, FV, konjungtor, FN, FAdj.

Kata kunci: fungsi, kategori, kalimat majemuk bertingkat, jawapos.com

ABSTRACT

This research is based on the number of compound sentences, especially multilevel compound sentences in opinion. How important multi-faceted sentences are in opinions to explain the author's views on a matter. The description through the multilevel compound sentence also eliminates the multi-interpretation of the things discussed. The topics or content of opinions JawaPos.com during the 2020 edition are the Covid-19 pandemic, economic problems during pandemics, vaccinations and others. Therefore, sentences in JawaPos.com opinion will be analyzed based on the function and syntactic categories of multilevel compound sentences.

The problem in this study is two. First, how does the syntax function of multilevel compound sentences in the opinion of JawaPos.com the 2020 edition? Second, what are the stratified categories of compound sentences in opinion JawaPos.com the 2020 edition? The purpose of this study is to find out the function and syntactic categories of multilevel compound sentences in the opinion of JawaPos.com the 2020 edition.

This research uses a qualitative research. The method of providing data using the listening method. The method used in this study is the agih method. Data analysis techniques use techniques for direct elements (BUL). Advanced techniques used in this study are permutation techniques or reverse techniques and replacement techniques. The method of presenting the results of data analysis is an informal presentation method.

From the research conducted found the syntax function of graded compound sentences S-P Kojungtor S-P and syntax category FN, FV, conjunctor, FN, FAdj.

Keywords: functions, categories, multilevel compound sentences, jawapos.com

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Penegasan Istilah	4
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN KERANGKA BERPIKIR	
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.2 Landasan Teori	9
1. Fungsi Sintaksis.....	10
2. Kategori Kata atau Frasa Pengisi Unsur Klausa	15
3. Kalimat Majemuk Bertingkat	17
4. Opini.....	23
2.3 Kerangka Berpikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	26
3.2 Sumber Data dan Data.....	26
3.3 Populasi dan Sampel	28
3.4 Metode dan Teknik Penyediaan Data.....	28
3.5 Metode dan Teknik Analisis Data	29
3.6 Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data.....	29

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Temuan..... 30
4.2	Pembahasan..... 33
BAB V PENUTUP	
5.1	Simpulan..... 61
5.2	Saran..... 62
DAFTAR PUSTAKA..... 63	
LAMPIRAN..... 67	

DAFTAR SINGKATAN

1. S : subjek
2. P : predikat
3. O : objek
4. Pel. : pelengkap
5. Ket. : keterangan
6. N : nominal
7. V : verbal
8. Num. : numeralia
9. Pron. : pronominal
10. Adv. : adverbial
11. FN : frasa nominal
12. FV : frasa verbal
13. FNum. : frasa numeralia
14. FPrep. : frasa preposisional
15. FAdj. : frasa adjektival
16. FS : fungsi sintaksis
17. KS : kategori sintaksis

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Analisis Fungsi dan Kategori Sintaksis Kalimat Majemuk Bertingkat pada Opini JawaPos.com Edisi 2020.....	25
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rician Pola Kalimat Majemuk Bertingkat pada Opini JawaPos.com Edisi 2020	30
Tabel 4. 2 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat	33
Tabel 4. 3 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (2)	33
Tabel 4. 4 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (3)	34
Tabel 4. 5 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (4)	35
Tabel 4. 6 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (5)	35
Tabel 4. 7 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (6)	36
Tabel 4. 8 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (7)	37
Tabel 4. 9 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (8)	37
Tabel 4. 10 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (9)	38
Tabel 4. 11 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (10)	39
Tabel 4. 12 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (11)	39
Tabel 4. 13 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (12)	40
Tabel 4. 14 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (13)	41
Tabel 4. 15 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (14)	41
Tabel 4. 16 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (15)	42
Tabel 4. 17 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (16)	43
Tabel 4. 18 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (17)	43
Tabel 4. 19 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (18)	44
Tabel 4. 20. Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (19)	45
Tabel 4. 21 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (20)	45
Tabel 4. 22. Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (21)	46
Tabel 4. 23 Analisis FS dan KS Kalimat majemuk Bertingkat (22).....	47
Tabel 4. 24 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (23)	47
Tabel 4. 25 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (24)	48
Tabel 4. 26 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (25)	49
Tabel 4. 27 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (26)	49
Tabel 4. 28 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (27)	50
Tabel 4. 29 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (28)	51
Tabel 4. 30 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (29)	51
Tabel 4. 31 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (30)	52

Tabel 4. 32 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (31)	52
Tabel 4. 33 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (32)	53
Tabel 4. 34 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (33)	54
Tabel 4. 35 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (34)	54
Tabel 4. 36 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (35)	55
Tabel 4. 37 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (36)	56
Tabel 4. 38 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (37)	56
Tabel 4. 39 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (38)	57
Tabel 4. 40 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (39)	58
Tabel 4. 41 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (40)	59
Tabel 4. 42 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (41)	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Kalimat Majemuk Bertingkat Opini <i>JawaPos.com</i>	68
Lampiran 2. Teks Opini JawaPos.com Edisi 2020	90
Lampiran 3. Lembar Usulan Tema dan Pembimbingan	203
Lampiran 4. Rekapitulasi Pembimbingan Proposal Skripsi.....	204
Lampiran 5. Rekapitulasi Pembimbingan Skripsi.....	206
Lampiran 6. Lembar Pengajuan Ujian Skripsi.....	208
Lampiran 7. Lembar Berita Acara Ujian Skripsi	209
Lampiran 8. Pernyataan Keaslian Tulisan	210

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kalimat tidak jauh beda dari klausa. Keduanya sama-sama konstruksi sintaksis yang mengandung unsur subjek dan predikat (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:74). Fungsi dalam kalimat bukan hanya subjek predikat saja. Fungsi objek, pelengkap, atau keterangan dapat masuk ke dalam kalimat.

Kalimat ditinjau dari beberapa jenis dan dibedakan berdasarkan kriteria. Jenis kalimat yang dibedakan berdasarkan jumlah klausa dan jenis klausa pembentuknya adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kedua jenis kalimat tersebut masih memiliki jenis kalimat lain berdasarkan unsur pembentuknya. Misalnya kalimat majemuk yang terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat.

Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terbentuk dari dua klausa yang tidak setara (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:93). Artinya, kalimat tersebut saling mengisi dan memiliki peran sebagai induk dan anak kalimat atau inti dan bawahan kalimat. Kalimat majemuk bertingkat memiliki jenis yang banyak. Mulai dari kalimat majemuk bertingkat makna hubungan waktu, makna hubungan lebih, makna hubungan perbandingan, dll.

Sintaksis bahasa Indonesia memiliki beberapa hal yang dapat dianalisis. Hal tersebut meliputi satuan bahasa terbesar hingga terkecil, maupun struktur atau kategorinya. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai fungsi dan kategori sintaksis. Fungsi sintaksis meliputi pola subjek (S), predikat (P), objek (O), pelengkap (Pel), keterangan (Ket). Kategori sintaksis dapat berada pada setiap kalimat yang memiliki fungsi. Kategori sintaksis tersebut meliputi nomina (N), verba (V), adjektiva (A), adverbialia (Adv), numeralia, (Num), preposisi (Prep), konjungsi (Konj), Pronomina (Pron), dll.

Ragam bahasa dibedakan berdasarkan sarananya. Dari sarananya ada dua jenis, yaitu ragam lisan atau ujaran, dan ragam tulisan. Ragam lisan digunakan untuk berkomunikasi secara langsung. Misalnya saat berhadapan dengan mitra tutur. Sedangkan ragam tulisan digunakan saat mitra tutur tidak ada. Biasanya ragam tulisan digunakan untuk surat kabar cetak atau surat kabar elektronik media massa tertentu.

Salah satu media massa cetak dan elektronik adalah JawaPos.com. JawaPos.com merupakan media massa yang dapat digunakan untuk menyampaikan berita atau peristiwa sehari-hari. JawaPos.com dapat menjadi sarana komunikasi antara penulis dan pembaca. Melalui media massa tersebut masyarakat dapat mengetahui peristiwa di sekitarnya tanpa melihat langsung. Selain itu, media massa juga berperan penting dalam kehidupan masyarakat, salah satunya menyebarkan informasi terkait pemerintahan. Di media massa terdapat banyak kolom tulisan yang berisikan berbagai hal.

Kolom tulisan yang dapat menarik perhatian adalah Opini atau tajuk rencana. Opini merupakan gagasan seseorang terhadap berbagai peristiwa terkini yang sedang mencuat di publik. Menurut Wismanto dan Ulumuddin (2015:25) opini berupa tulisan pendapat atau perasaan penulisnya disertai fakta yang menjadi penguat atau dukungan terhadap opini tersebut.

Bahasa tulis harus memperhatikan tata cara penulisan mulai dari pemilihan kata, dan susunan kata yang menjadi kalimat. Alwi dkk. (2010:7) mengatakan bahwa kalimat dalam ragam tulis harus lebih cermat termasuk fungsi gramatikal, seperti subjek, predikat, dan objek, serta hubungan antarfungsi tersebut. Selain itu, yang membedakan ragam tulisan dari ragam lisan adalah tinggi rendahnya dan panjang pendek suara yang tidak bisa dilambangkan dalam ejaan. Tanpa memperhatikan hal tersebut, kalimat akan menjadi rancu atau bahkan dapat menimbulkan ambiguitas. Maka, kesalahpahaman tidak dapat dihindari.

Kalimat yang digunakan dalam opini bisa berupa kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat majemuk sendiri terdiri atas berbagai jenis berdasarkan sifat hubungan antarklausa. Antara lain kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Pada masing-masing jenis kalimat tersebut memiliki ciri utama yang dapat dibedakan. Misalnya melalui konjungsi yang menjadi penghubung antarkata dan klausa. Hubungan antarklausa bertingkat membentuk kalimat majemuk bertingkat (Sukini dalam Hasan, 2012:6). Pada opini JawaPos.com dijumpai banyak kalimat majemuk, khususnya kalimat majemuk bertingkat. Betapa pentingnya kalimat majemuk bertingkat pada opini guna menjelaskan pandangan-pandangan penulis mengenai suatu hal. Penjabaran melalui kalimat majemuk bertingkat tersebut pun menghilangkan multitafsir hal yang dibahas. Selain itu, penelitian fungsi dan kategori

sintaksis masih jarang dilakukan. Pemilihan opini JawaPos.com karena JawaPos.com setiap hari mengunggah opini selama edisi 2020 dengan begitu data penelitian yang diperoleh lebih banyak dan bervariasi. Oleh karena itu, kalimat dalam opini JawaPos.com akan dianalisis berdasarkan fungsi dan kategori sintaksis dari kalimat majemuk bertingkat. Topik atau isi opini JawaPos.com selama edisi 2020 adalah pandemi Covid-19, masalah ekonomi selama pandemi, vaksinasi dan lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fungsi sintaksis kalimat majemuk bertingkat pada opini JawaPos.com edisi 2020?
2. Bagaimana kategori sintaksis kalimat majemuk bertingkat pada opini JawaPos.com edisi 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui fungsi sintaksis kalimat majemuk bertingkat pada opini JawaPos.com edisi 2020.
2. Untuk mengetahui kategori sintaksis kalimat majemuk bertingkat pada opini JawaPos.com edisi 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap proses penelitian akan menghasilkan manfaat yang baik untuk khalayak ramai. Manfaat tersebut dapat sebagai referensi atau sebagai ilmu baru yang dapat diperoleh. Berikut manfaat penelitian kategori sintaksis kalimat majemuk bertingkat pada opini JawaPos.com edisi 2020:

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis dapat membantu perkembangan bahasa Indonesia khususnya fungsi dan kategori sintaksis kalimat majemuk bertingkat.

Adapun temuan-temuan fungsi dan kategori sintaksis kalimat majemuk bertingkat dapat dijadikan sebagai contoh pembelajaran.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Mahasiswa PBSI FPBS Universitas PGRI Semarang

Untuk memperdalam pengetahuan mengenai fungsi dan kategori sintaksis sehingga menjadi bekal calon guru mata pelajaran Bahasa Indonesia.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti terutama mengenai fungsi dan kategori sintaksis kalimat majemuk bertingkat. Dengan begitu penelitian dapat berkembang lebih besar dan cakupan penelitian lebih luas.

1.5 Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran mengenai penulisan judul skripsi “Kategori Sintaksis Kalimat Majemuk Bertingkat pada Opini JawaPos.com Edisi 2020”

1. Analisis Sintaksis adalah kegiatan untuk mendiskripsikan pola-pola yang mendasari satuan-satuan sintaksis (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:03).
2. Kategori sintaksis adalah jenis kata atau frasa yang menjadi pengisi dari fungsi sintaksis (Chaer, 2009:27).
3. Kalimat majemuk bertingkat adalah gabungan kalimat tunggal yang membentuk kalimat lebih besar (Putrayasa dalam Hasan, 2012:06).
4. Opini merupakan tulisan pendapat atau perasaan penulisnya disertai fakta yang menjadi penguat atau dukungan terhadap opini tersebut (Wismanto dan Ulumuddin, 2015:25).
5. Jawa Pos merupakan salah satu media massa yang hadir dan dikenal masyarakat. Jawa Pos berpusat di Surabaya, Jawa Timur. Sirkulasi Jawa Pos menyebar ke seluruh provinsi Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, dan DIY. Surat kabar Jawa Pos hadir dalam bentuk daring www.jawapos.com. (jawapos.com/aboutus).

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi dengan judul “Analisis Fungsi dan Kategori Sintaksis Kalimat Majemuk Bertingkat pada Opini JawaPos.com Edisi 2020” sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori. Pada tinjauan pustaka berisi sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Landasan teori berisi jumlah teori yang digunakan untuk melakukan analisis kategori sintaksis kalimat majemuk bertingkat. Analisis kategori kalimat majemuk bertingkat meliputi fungsi sintaksis dan kategori sintaksis. Fungsi sintaksis meliputi Subjek, Predikat, Objek, Pelengkap, dan Keterangan. Kategori sintaksis meliputi Nominal, Frasa Nominal, Verbal, Frasa Verbal, Frasa Preposisional, Adjektival, Frasa Adjektival, dan Numeralia. Selain itu, analisis kalimat majemuk bertingkat guna menentukan konjungtor subordinatif.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi pendekatan penelitian, sumber data dan data, populasi dan sampel, metode dan teknik penyediaan data, metode dan teknik analisis data, dan metode dan teknik penyajian hasil analisis data.

Bab IV Temuan dan Pembahasan, bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian mengenai fungsi dan kategori sintaksis kalimat majemuk bertingkat pada opini media massa JawaPos.com edisi 2020.

Bab V Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian fungsi dan kategori sintaksis kalimat majemuk bertingkat pada opini JawaPos.com edisi 2020.

DAFTAR PUSTAKA meliputi nama-nama penulis buku, sumber artikel penelitian, sumber opini, dan *website* jawapos.com

LAMPIRAN berisi data kalimat majemuk bertingkat, teks opini jawapos.com, lembar usulan tema dan pembimbingan, lembar pembimbingan proposal skripsi, lembar pembimbingan skripsi, pernyataan keaslian tulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan sehingga menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini menggunakan acuan dengan keterkaitan teori dari penelitian terdahulu. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan.

Pertama, Hasan (2012) melalui topik *Relasi Temporal Antarklausa dalam Kalimat Majemuk Bertingkat pada Koran Kompas Periode September-Oktober 2011*. Metode penyediaan data penelitian yang digunakan simak dan catat, metode analisis data ada 5 metode yaitu; teknik urai, permutasi, substitusi, delesi, perluasan.

Klausa memiliki peranan penting untuk membuat kalimat. Pada kalimat majemuk dibutuhkan dua klausa. Kedudukan dua klausa tersebut sangat penting untuk membentuk kalimat majemuk setara atau pun kalimat majemuk bertingkat. Penulis memaparkan penanda relasi temporal antarklausa dalam kalimat majemuk bertingkat. Selain itu, mendeskripsikan distribusi penanda relasi temporal antarklausa dan kalimat majemuk bertingkat.

Hasil temuan dari penelitian itu adalah 1) penanda relasi temporal permulaan, bersamaan, berurutan, batas akhir, 2) relasi temporal yang mendominasi, 3) tidak semua penanda relasi temporal pada kalimat majemuk bertingkat mendistribusi pada awal dan tengah kalimat, 4) tidak semua penanda relasi temporal dapat saling menggantikan.

Kedua, Hamsiah Djafar (2017) dengan topik *Penggunaan Kalimat Majemuk dalam Karya Tulis Mahasiswa Fakultas Tarbiyyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik penyediaan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah triangulasi.

Penyajian data mengorganisasikan, pola, dan struktur kalimat. Melihat kembali data melalui verifikasi data.

Kalimat dalam penulisan ilmiah haruslah sesuai dengan kaidahnya. Salah satunya penggunaan kalimat majemuk yang penting dalam penulisan ilmiah. Kaidah penulisan yang benar meliputi kelengkapan unsur yang dimiliki, kesesuaian dengan EYD, penulisan kata sesuai dengan KBBI, dan keefektifan kalimat.

Ada faktor yang dapat mempengaruhi mahasiswa dalam menulis. Salah satunya metode pembelajaran yang digunakan. Penggunaan kalimat majemuk yang digunakan oleh mahasiswa tidak beraturan. Seperti kalimat tidak memiliki subjek, kalimat tidak berpredikat, dan tidak efektif. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk mengetahui penggunaan kalimat majemuk dalam karya tulis mahasiswa.

Dalam hasil penelitian, ditemukan bahwa karya tulis mahasiswa terdapat kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Adapun kesalahan-kesalahan yang ditemukan berupa tanda baca, kesalahan ejaan, adanya kalimat majemuk bertingkat yang memiliki dua konjungsi di anak kalimat.

Ketiga, Syafruddin (2017) melalui topik *Relasi Temporal Antarklausa dalam Kalimat Majemuk Bertingkat pada Koran AMANAH*. Penelitian tersebut termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Desain penelitian kualitatif disusun berdasarkan karakteristik penelitian "*Gounded Theory*". Adapun teknik penelitian adalah dokumentasi dan teknik simak. Teknik analisis data yang digunakan teknik pilah, langsung, permutasi, substitusi, delesi atau pelepasan, perluasan. Instrumen penelitian tersebut adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan dan bertindak mengumpulkan data.

Hasil penelitian yang diperoleh penanda relasi temporal antarklausa koran AMANAH adalah penanda relasi temporal permulaan meliputi konjungtor *sejak*. Penanda relasi bersamaan meliputi konjungtor *saat, ketika, sementara, selama, selagi, sewaktu*. Penanda relasi temporal berurutan meliputi konjungtor *setelah, sebelum, se usai, begitu, sehabis, dan sesudah*. Penanda relasi temporal batas akhir dengan konjungtor *sampai dan sehingga*.

Tidak semua relasi temporal pada kalimat majemuk bertingkat selalu ada pada awal dan tengah kalimat. Tidak semua relasi temporal dapat saling

menggantikan, seperti relasi temporal bersamaan, permulaan, berurutan, atau batas akhir.

Keempat, Rahmadani dkk. (2019) melalui topik *Kalimat Majemuk dalam Judul Serial Sinetron AZAB di Indosiar dan Implementasi pembelajarannya di SMA*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun penggunaan metode penyediaan data dengan metode simak. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik BUL (bagi unsur langsung) dan teknik lanjutan baca markah untuk mencari hubungan makna dalam kalimat.

Pembelajaran bahasa Indonesia mencakup empat aspek yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis (Imam dalam Rahmadani dkk, 2019:137). Menulis merupakan salah satu keterampilan yang sering digunakan dalam pembelajaran. Selain itu, menulis juga dapat membuat peserta didik menjadi aktif dan kreatif untuk menciptakan sebuah karya tulis. Keterampilan menulis juga dapat kurang baik jika kalimat yang digunakan tidak tertata.

Salah satu hal yang menarik perhatian penulis adalah judul sinetron AZAB yang dapat digunakan sebagai patokan dalam membuat teks ceramah. Judul dari sinetron AZAB yang panjang tidak menutup kemungkinan ada kalimat majemuk. Dalam judul tersebut siswa dapat menghubungkan peristiwa-peristiwa di sekitarnya sekaligus menjadi refleksi. Judul sinetron AZAB tersebut dijadikan bahan penelitian dari segi jenis, struktur, dan hubungan makna.

Hasil penelitian meliputi; berdasarkan jenisnya ditemukan kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Berdasarkan hubungan maknanya ditemukan 6 hubungan makna. Kalimat majemuk dalam judul sinetron AZAB di Indosiar dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di SMA. Kalimat majemuk di judul sinetron AZAB dapat digunakan sebagai materi ajar dengan pendekatan saintifik.

Kelima, Dinda Aisyahara Della (2020) melalui topik *Analisis Kalimat Majemuk Setara dalam Cerpen Nayla Karya Djenar Maesa Ayu*. Penelitian tersebut menganalisis kalimat majemuk setara yang terdapat dalam cerpen *Nayla*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pusataka dan teknik simak-catat. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian tersebut terdapat kalimat majemuk setara dalam cerpen *Nayla*. Kalimat majemuk setara tersebut meliputi kalimat majemuk setara sebab-akibat; kalimat majemuk setara sejalan atau menggabungkan; kalimat majemuk setara berlawanan atau bertentangan. Kalimat majemuk setara yang banyak ditemukan dalam cerpen tersebut adalah kalimat majemuk setara sejalan.

Ditemukan perbedaan dari kelima penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian pertama mengenai relasi temporal antarklausa koran *KOMPAS*. Hasil yang diperoleh berupa relasi temporal permulaan; berurutan; batas akhir, relasi temporal yang mendominasi, tidak semua relasi temporal dapat mendistribusi. Penelitian kedua kalimat majemuk bertingkat pada karya tulis mahasiswa. penelitian ketiga mengenai relasi temporal kalimat majemuk pada koran *AMANAHAH*. Penelitian keempat mengenai kalimat majemuk bertingkat yang diperoleh dari judul sinetron *AZAB* yang dapat dihubungkan dengan pembelajaran di SMA. Adapun hasilnya adalah kalimat majemuk bertingkat; kalimat majemuk setara; kalimat majemuk campuran ditemukan dalam judul sinetron *AZAB*, ada 6 hubungan makna. Penelitian kelima menganalisis kalimat majemuk setara pada cerpen *Nayla*.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu tidak ada fungsi dan kategori sintaksis, sedangkan penelitian ini akan menganalisis fungsi dan kategori sintaksis. Fungsi sintaksis meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kategori sintaksis yang dimaksud berupa verba, nomina, frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, frasa keterangan, frasa numeralia, frasa preposisi, frasa pronomina pada opini JawaPos.com edisi 2020.

2.2 Landasan Teori

Pada subbab ini dikemukakan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan dan konsep yang akan dipakai dalam penelitian. Landasan teori merupakan teori yang relevan yang digunakan sebagai dasar menjelaskan variabel penelitian untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan. Uraian berikut dapat memperjelas hal tersebut.

Alwi dkk. (2010:7) mengatakan bahwa kalimat dalam ragam tulis harus lebih cermat termasuk fungsi gramatikal, seperti subjek, predikat, dan objek, serta hubungan antarfungsi tersebut. Selain itu, yang membedakan ragam tulisan dari ragam lisan adalah tinggi rendahnya dan panjang pendek suara yang tidak bisa dilambangkan dalam ejaan.

Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk beluk konstruksi berupa frasa, klausa, dan kalimat Ramlan (dalam Damaianti dan Sitaresmi, 2005:1). Menurut Arifin dan Junaiyah (dalam Susandhika dkk, 2016:21), sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang membicarakan tuturan. Kategori sintaksis berkenaan dengan nomina (N), verba (V), adjektiva (A), adverbial (Adv), preposisi (Prep), konjungsi (Konj), pronominal (Pron).

Secara fungsional unsur inti klausa adalah predikat (P) dan subjek (S). Unsur lain seperti objek (O) dan pelengkap (Pel), dan keterangan (KET) boleh ada dalam klausa boleh juga tidak (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:33). Berikut penjabaran mengenai fungsi, kategori dan kalimat majemuk bertingkat:

1. Fungsi Sintaksis

a. Predikat (P)

Predikat adalah bagian dari klausa yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek (S). predikat harus mengandung unsur verbal (Kridalaksana dalam Damaianti dan Sitaresmi, 2005:34). Untuk menentukan predikat (P) dapat menggunakan pertanyaan bagaimana, mengapa, di mana, dari mana, bilamana, berapa, dan apa tentang subjek (S) (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:34).

Contoh:

(01) Paman saya sakit keras.

(02) Aminah sedang membaca.

Predikat pada klausa (01) diisi oleh frasa *sakit keras*. Frasa tersebut menjadi jawaban dari pertanyaan *bagaimana keadaan paman saya?* Predikat pada klausa (02) adalah frasa *sedang membaca*. Frasa tersebut menjadi jawaban dari pertanyaan *apa yang dilakukan Aminah?*

Kata tanya *bagaimana* dapat digunakan untuk menentukan predikat berupa kata atau frasa adjektival. Kata tanya *mengapa* dapat digunakan untuk menentukan predikat berupa kata atau frasa verbal yang menanyakan sebab dan perbuatan. Kata tanya *di mana* digunakan untuk menentukan predikat berupa frasa preposisional berupa tempat. Kata tanya *berapa* dapat digunakan menentukan predikat berupa numeralia. Kata tanya *apa* dapat digunakan menentukan predikat berupa kata atau frasa nominal.

b. Subjek (S)

Kridalaksana dalam Damaianti dan Sitaresmi (2005:35) menyatakan bahwa subjek (S) merupakan bagian klausa yang berwujud nomina atau frasa nominal. Untuk mencari subjek dapat digunakan kata tanya *apa* dan *siapa*. Subjek (S) merupakan jawaban dari pertanyaan *apa* dan *siapa* tentang predikat (P) (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:34).

Contoh:

(03) Adik saya pandai.

(04) Buku dibuang kakak saya.

Subjek (S) pada klausa (03) diisi oleh frasa *adik saya* sekaligus menjadi jawaban dari pertanyaan *siapa yang pandai?* Subjek (S) pada klausa (04) diisi kata *buku* dan merupakan jawaban dari *apa yang dibuang kakak saya?*

Kata tanya *siapa* digunakan menentukan subjek yang diisi kata atau frasa nominal yang menanyakan Tuhan, malaikat, dan manusia. Kata tanya *apa* digunakan untuk menentukan subjek yang diisi frasa nominal yang menanyakan benda, tumbuhan, dan hewan. Subjek dapat diikuti kata *ini* dan *itu* apabila kata atau frasa masih bersifat umum (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:36).

Contoh:

(05) Gunung itu tinggi.

(06) Perusahaan ini maju pesat.

Subjek klausa (05) adalah *gunung itu* (terdapat penanda kata *itu*). Subjek klausa (06) adalah *perusahaan ini* (terdapat penanda kata *ini*).

c. Objek (O)

Objek adalah nomina atau kelompok nomina yang melengkapi verba tertentu (Kridalaksana dalam Damaianti dan Sitaresmi, 2005:36). Objek selalu berada di belakang predikat. Jika klausa aktif diubah ke klausa pasif, kata atau frase yang menduduki fungsi objek (O) berganti menduduki fungsi subjek (S) (Ramlan dalam Sitaresmi dan Damaianti, 2005:36).

Contoh:

(07) Kakakku membangun rumah.

(08) Ibu membeli baju baru.

Objek (O) pada klausa (07) diisi oleh kata *rumah*, pada klausa (08) diisi oleh frasa *baju baru*. Kata tanya *apa* dapat menentukan objek yang menanyakan benda, tumbuhan, dan hewan. Kata tanya *siapa* dapat menentukan objek yang menanyakan Tuhan, malaikat, dan manusia.

d. Pelengkap (Pel)

Pelengkap memiliki sifat yang sama dengan objek, yaitu selalu berada di belakang predikat yang berkategori verba. Pelengkap terdapat dalam klausa yang tidak dapat diubah ke dalam bentuk klausa pasif. Apabila terdapat objek dan pelengkap di belakang predikat kalimat aktif, maka yang menjadi subjek adalah objek bukan pelengkap (Kridalaksana dalam Damaianti dan Sitaresmi, 2005:37).

Contoh:

(09) Orang itu selalu berbuat kebajikan.

(10) Banyak orang asing belajar Bahasa Indonesia.

Pelengkap (Pel) klausa (09) diisi oleh kata *kebajikan*, sedangkan pelengkap klausa (10) diisi oleh frasa *Bahasa Indonesia*. Pelengkap dapat berada di belakang predikat setelah objek bila predikat diisi oleh verba dwitransitif.

e. Keterangan

Keterangan adalah unsur klausa yang dapat berada di depan, tengah, atau di belakang klausa, kecuali antara predikat (P) dan objek (O) atau di antara predikat (P) dan pelengkap (Pel) (Ramlan dalam Damaianti dan Sitaresmi, 2005:38). Keterangan dapat berwujud kata

atau frasa yang dipakai untuk meluaskan atau membatasi makna subjek (Kridalaksana dalam Damaianti dan Sitaresmi, 2005:38). Fungsi keterangan dapat diklasifikasikan menjadi sembilan. Antara lain keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan cara, keterangan penyerta, keterangan perbandingan, keterangan sebab, keterangan kesalingan. Berikut penjelasan jenis keterangan:

- 1) **Keterangan tempat** ditandai dengan preposisi *di, ke, dari, (di) dalam, dan pada* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:39).

Contoh:

(11) Aminah pergi ke rumah orang tuanya.

(12) Dita baru datang dari ciamis.

Keterangan tempat pada klausa (11) diisi oleh frasa preposisional *ke rumah orang tuanya*, fungsi keterangan klausa (12) diisi oleh frasa preposisional *dari ciamis*.

- 2) **Keterangan waktu** berupa kata tunggal, frasa nominal, dan frasa preposisional. Keterangan waktu dalam kata tunggal meliputi *kemarin, sekarang, kini, lusa, tadi, dan besok*. Keterangan waktu frasa nominal ditandai dengan *kemarin pagi, malam tadi, sore ini, minggu depan, dll*. Keterangan waktu frasa preposisional diawali preposisi *pada, sebelum, sesudah, dalam, sampai, di, dari, dan sejak*. Kemudian diikuti nomina yang menyatakan waktu, *kamis, minggu, selasa, hari, tanggal* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:39-40).

Contoh:

(14) Pemerintah menaikkan harga BBM itu *kemarin*.

(15) *Besok pagi* seluruh keluarga berlibur.

(16) *Sejak tahun lalu* dia hidup sendiri.

Keterangan waktu pada klausa (14) berupa kata tunggal *kemarin*. Keterangan waktu pada klausa (15) berupa frasa nominal *besok pagi*. Keterangan waktu klausa (16) berupa frasa preposisional *sejak tahun lalu*.

- 3) **Keterangan alat** menggunakan preposisi *dengan* dan *tanpa* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:40).

Contoh:

(17) Lina mewarnai dengan krayon.

(18) Bu Ratna pergi tanpa supirnya.

Keterangan alat klausa (17) dan (18) adalah preposisi *dengan* dan *tanpa*.

- 4) **Keterangan tujuan** ditandai dengan preposisi *agar*, *supaya*, *bagi*, *untuk*, *demi*, dan *buat* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:40).

Contoh:

(19) Kita *harus* makan empat sehat lima sempurna.

(20) *Supaya* sehat kita harus berolahraga.

Keterangan tujuan klausa (19) ditandai preposisi *harus*, keterangan tujuan klausa (20) ditandai preposisi *supaya*.

- 5) **Keterangan cara** berbentuk kata tunggal, kata ulang, dan frasa preposisional. Keterangan cara berbentuk kata tunggal *meliputi* *seenaknya*, *semaumu*, *secepatnya*, *sepenuhnya*, atau *sebaliknya*. Keterangan cara berbentuk kata ulang meliputi perulangan adjektiva, misalnya *cepat-cepat*, *tinggi-tinggi*, *pelan-pelan*. Keterangan cara berbentuk frasa preposisional ditandai dengan preposisi *secara*, *dengan*, atau *tanpa* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005: 40-41).

Contoh:

(21) Dia tidak bisa pergi *semaunya*.

(22) Layangan itu mengudara *tinggi-tinggi*.

(23) Anak itu berbicara *secara baik-baik*.

Keterangan cara klausa (21) ditandai oleh kata tunggal *semaunya*. Keterangan cara klausa (22) ditandai oleh kata ulang *tinggi-tinggi*. Keterangan cara klausa (23) ditandai oleh frasa preposisi *secara baik-baik*.

- 6) **Keterangan penyerta** ditandai oleh preposisi *bersama*, *beserta*, *dengan*, atau *tanpa* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:41).

Contoh:

(24) Dita *bersama* adik kembarnya pergi berenang.

(25) Alim mengerjakan tugas sekolah *dengan* kelompoknya.

Keterangan cara klausa (24) ditandai oleh preposisi *bersama*.
Keterangan cara klausa (25) ditandai oleh preposisi *dengan*.

- 7) **Keterangan perbandingan** ditandai preposisi *sebagaimana*, *seperti*, dan *laksana* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:41).

Contoh:

(26) Rumah itu besar seperti istana.

(27) Sebagaimana amanat ayahnya, dia berusaha keras.

Keterangan perbandingan klausa (26) dan (27) ditandai preposisi *seperti* dan *sebagaimana*.

- 8) **Keterangan sebab** ditandai dengan preposisi *karena*, *sebab*, atau *akibat* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005: 41).

Contoh:

(28) Orang itu tidak bisa berjalan karena tabrak lari.

(29) Sebab orang tuanya bercerai, dia merasa sedih.

Keterangan sebab klausa (28) ditandai oleh preposisi *karena*, dan keterangan sebab klausa (29) ditandai preposisi *sebab*.

- 9) **Keterangan kesalingan** ditandai oleh preposisi *satu sama lain* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:41).

Contoh:

(30) *Satu sama lain* kita saling menghormati.

(31) Mereka akrab *satu sama lain*.

Keterangan kesalingan klausa (30) dan (31) adalah *satu sama lain*.

2. Kategori Kata atau Frasa Pengisi Unsur Klausa

Kategori kata atau frasa yang mengisi unsur klausa tidaklah sama. Kategori fungsi subjek umumnya diisi oleh kata atau frasa pronominal, kategori fungsi predikat diisi oleh (1) kata atau frasa verbal, (2) kata atau frasa adjektival, (3) kata atau frasa nominal, (4) kata atau frasa numeralia, (5) kata atau frasa preposisional. Kategori pengisi objek adalah kata atau frasa nominal. Kategori pengisi pelengkap diisi oleh kata atau frasa nominal, verbal, adjektival, dan numeralia. Kategori pengisi keterangan diisi kata atau frasa nominal, adverbial, dan frasa preposisional

(Damaianti dan Sitaresmi, 2005:42-44). Berikut penjabaran mengenai kategori kata atau frasa:

a. Kategori Pengisi Subjek

Fungsi subjek umumnya diisi oleh kata atau frasa nominal. Selain nomina, subjek dapat berupa verba atau adjektiva disertai kata penunjuk *itu* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:42-43)

Contoh:

(32) Kami sudah menghadap ketua jurusan tadi pagi.

(33) Gadis itu sangat ramah.

(34) Merokok itu tidak baik bagi kesehatan.

(35) Kasar itu tidak selalu jahat.

Subjek klausa (32) diisi oleh kata *kami*. Subjek klausa (33) diisi oleh frasa *gadis itu*. Subjek klausa (34) diisi oleh frasa verba *merokok itu*, subjek klausa (35) diisi oleh frasa adjektiva *kasar itu*.

b. Kategori Pengisi Predikat

Secara kategorial fungsi predikat diisi oleh (1) kata atau frasa verbal, (2) kata atau frasa adjektival, (3) kata atau frasa nominal, (4) kata atau frasa numeralia, dan (5) frasa preposisional (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:43).

Contoh:

(36) Adik *bermain-main* di halaman.

(37) Saya *sedang menulis* surat.

(38) Gadis itu *pandai*.

(39) Anak itu *sangat gemuk*.

(40) Mereka *penyair*.

(41) Wanita itu *saudara kandungku*.

Predikat klausa (36) diisi kata verba *bermain-main*. Predikat klausa (37) diisi frasa verba *sedang menulis*. Predikat klausa (38) diisi kata adjektiva *pandai*. Predikat klausa (39) frasa adjektival *sangat gemuk*. Predikat klausa (40) diisi oleh nomina *penyair*. Predikat klausa (41) diisi oleh frasa nominal *saudara kandungku*.

c. Kategori Pengisi Objek

Secara kategorial, fungsi objek umumnya diisi oleh kata atau frasa nominal (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:43).

Contoh:

(42) Yanti membeli baju kemarin.

(43) Laras mengunjungi pak Hikmat.

Objek klausa (42) diisi oleh kata nomina *baju*. Objek klausa (43) frasa nominal *pak Hikmat*.

d. Kategori Pengisi Pelengkap

Secara kategorial fungsi pelengkap dapat diisi oleh kategori kata atau frasa nominal, verbal, adjektival, preposisional dan numeralia (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:44).

Contoh:

(44) Dani berdagang barang-barang elektronik.

(45) Ali sudah berhenti merokok.

(46) Orang itu bertubuh besar sekali.

Pelengkap klausa (44) diisi oleh frasa nominal *barang-barang elektronik*. Pelengkap klausa (45) diisi oleh kata verba *merokok*. Pelengkap klausa (46) diisi oleh frasa adjektival *besar sekali*.

e. Kategori Pengisi Keterangan

Secara kategorial fungsi keterangan dapat diisi oleh kategori kata atau frasa nominal, kata adverbial, dan frasa preposisional (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:44).

Contoh:

(47) Kita akan menjemput mereka *sekarang*.

(48) *Minggu depan* keluarga kami akan bertamasya.

(49) Dia pergi *cepat-cepat*.

Keterangan klausa (47) diisi oleh kata nomina *sekarang*. Keterangan klausa (48) diisi oleh frasa nominal *minggu depan*. Keterangan klausa (49) diisi oleh kata adverbial *cepat-cepat*.

3. Kalimat Majemuk Bertingkat

Kalimat majemuk bertingkat adalah hubungan antarklausa bertingkat sehingga membentuk kalimat majemuk bertingkat (Sukini dalam Hasan, 2012:06). Kalimat majemuk dibedakan menjadi dua, kalimat koordinatif atau majemuk setara dan kalimat subordinatif atau kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah gabungan kalimat

tunggal yang membentuk kalimat lebih besar (Putrayasa dalam Hasan, 2012:06).

Ada banyak jenis kalimat majemuk bertingkat. Antara lain kalimat majemuk bertingkat makna hubungan lebih, makna hubungan waktu, makna hubungan perbandingan, makna hubungan sebab, makna hubungan akibat, makna hubungan tak bersyarat, makna hubungan pengandaian, makna hubungan harapan, makna hubungan penerang, makna hubungan isi, makna hubungan cara, makna hubungan pengecualian, dan makna hubungan kegunaan.

Setiap kalimat majemuk bertingkat dapat diketahui berdasarkan jenisnya. Melalui konjungsi yang menghubungkan antarklausa itulah yang menjadi kunci kalimat majemuk bertingkat. Setiap konjungsi memiliki makna hubungan. Berikut penjabaran mengenai kalimat majemuk bertingkat berdasarkan hubungan makna:

a. Hubungan Waktu

Pada kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan hubungan waktu, klausa terikat menyatakan waktu peristiwa atau keadaan yang dinyatakan pada klausa bebas. Hubungan waktu dapat dibagi menjadi empat bagian (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:99).

1) Waktu Batas Permulaan

Hubungan waktu batas permulaan biasanya menggunakan konjungsi subordinatif *sejak* dan *sedari*.

Contoh:

- (50) Laras selalu tertarik pada roda yang berputar, *sejak* ia mulai belajar merangkak.
- (51) Sedari masih anak-anak, saya sudah terbiasa hidup sederhana.

2) Waktu Bersamaan

Hubungan waktu bersamaan menyatakan bahwa peristiwa yang dinyatakan di klausa bebas bersamaan atau hampir dengan yang dinyatakan di klausa terikat. Sebagai penanda dapat menggunakan konjungtor subordinatif (*se*)*waktu*, *tatkala*, *seraya*, *serta*, *selagi*, *sementara*, *selama*, *sambil*, dan *ketika* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:100).

Contoh:

- (52) Debat sengit berlangsung terus *selama* sidang itu berlangsung.
- (53) Peristiwa itu terjadi (*se*)*waktu* keluargaku dalam suasana berkabung.
- (54) Ilham belajar membaca ketika kakak makan.

3) Waktu Berurutan

Hubungan waktu berurutan menunjukkan bahwa yang dinyatakan klausa bebas lebih dulu dari klausa terikat. Konjungtor subordinatif yang digunakan adalah *sebelum*, *sesudah*, *setelah*, *seusai*, *begitu*, dan *sehabis* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:101).

Contoh:

- (55) *Setelah* membersihkan kamar, Agus mencuci baju.
- (56) *Sebelum* berangkat sekolah, dia sarapan nasi goreng.
- (57) *Seusai* mandi, dia melaksanakan salat mahrib.

4) Waktu Batas Akhir

Hubungan waktu batas akhir dipakai untuk menyatakan akhir suatu proses. Konjungsi subordinatif yang digunakan meliputi *hingga*, dan *sampai* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:101)

Contoh:

- (58) Dia selalu bermain judi *hingga* harta bendanya terjual habis.
- (59) Yuna belajar dengan giat *sampai* benar-benar paham.

b. Hubungan Syarat

Hubungan syarat dalam kalimat majemuk bertingkat menyatakan bahwa syarat terlaksananya apa yang ada di klausa bebas. Biasanya menggunakan konjungsi subordinatif *jika(lau)*, *seandainya*, *andaikata*, *andaikan*, *asal(kan)*, *kalau*, *apabila*, *bila*, *bilamana*, dan *manakala*.

Contoh:

- (60)*Jika* mau mendengarkannya, saya tentu senang sekali menceritakannya.
- (61)Ini hanya dilakukan dalam keadaan darurat *kalau* waktu memang mendesak.

(62) *Seandainya* dia mau bekerja, hidupnya akan lebih baik.

c. Hubungan Tujuan

Hubungan tujuan terdapat dalam kalimat majemuk bertingkat saat klausa terikat menyatakan tujuan dari klausa bebas. Konjungsi yang biasa digunakan adalah *agar*, *supaya*, *untuk*, dan *biar*.

Contoh:

(63) Saya bekerja keras *supaya* kebutuhan hidup terpenuhi.

(64) *Biar* lekas sembuh, bawalah dia ke dokter.

(65) *Untuk* mendapatkan nilai bagus, dia belajar.

d. Hubungan Konsentif

Hubungan konsentif dalam kalimat majemuk bertingkat menyatakan klausa terikat tidak mengubah apa yang dinyatakan klausa bebas. Konjungsi subordinatif yang digunakan adalah *walaupun*, *meskipun*, *sekalipun*, *biarpun*, *kendatipun*, *sungguhpun* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:102)

Contoh:

(66) *Walaupun* hatiku sangat sedih, aku tidak pernah menangis di hadapannya.

(67) *Meskipun* hutan sangat deras, dia tetap mencari nafkah.

(68) Perjuangan berjalan terus *kendatipun* musuh telah menduduki hampir semua kota besar.

e. Hubungan Perbandingan

Hubungan perbandingan dalam kalimat majemuk bertingkat terdapat pada klausa terikat yang menyatakan perbandingan dari klausa bebas. Konjungsi subordinatif yang digunakan adalah *seperti*, *bagaikan*, *laksana*, *alih-alih*, *daripada*, dan *sebagaimana* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:102)

Contoh:

(69) Dia berbuat baik *seperti* ayahnya dulu.

(70) *Daripada* menganggur bantulah ibumu menjaga warung.

(71) *Alih-alih* naik kereta api, dia naik bus.

f. Hubungan Sebab

Hubungan sebab dalam kalimat majemuk bertingkat yang klausa terikat menyatakan sebab atau alasan dari klausa bebas. Konjungsi

subordinatif yang digunakan adalah *sebab, karena, lantaran,* dan *akibat* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:102).

Contoh:

(72)*Karena* rajin belajar, Yuni jadi juara kelas.

(73)Dia berhenti bekerja *sebab* melahirkan bayi.

(74)*Akibat* hujan deras semalam, desa ini kebanjiran.

g. Hubungan Akibat

Klausa terikat menyatakan akibat dari pernyataan di klausa bebas sehingga ada hubungan akibat. Konjungsi subordinatif yang digunakan adalah *sehingga, sampai(sampai),* dan *maka* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:103).

Contoh:

(75)Perselisihan antara paman dan bibi semakin memuncak *sehingga* tidak ada kerukunan dalam keluarga.

(76)Doni telat mengerjakan tugas *maka* tidak mendapat nilai.

h. Hubungan Cara

Hubungan cara pada kalimat majemuk bertingkat terdapat pada klausa terikat yang menyatakan cara dari pernyataan klausa bebas. Konjungsi subordinatif yang digunakan adalah *dengan, tanpa, sambil, seraya,* dan *sembari* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:103).

Contoh:

(77)Laki-laki itu minum *sambil* tertawa terbahak-bahak.

(78)Dia mengangkat bahu *seraya* menoleh ke belakang.

(79)Suaminya merokok *sembari* menatap langit-langit rumah.

i. Hubungan Sangkalan

Hubungan sangkalan adalah klausa terikat menyatakan kenyataan yang berlawanan dengan keadaan sebenarnya. Konjungsi subordinatif yang digunakan adalah *seakan(-akan), seolah(-olah)* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:103).

Contoh:

(80) Hubungan keduanya tidak baik *seakan-akan* tidak saling kenal.

(81) Yanti membeli baju mahal *seolah-olah* punya banyak uang.

j. Hubungan Alat

Hubungan alat dalam kalimat majemuk bertingkat terdapat pada klausa terikat yang menyatakan alat. Konjungsi subordinatif yang digunakan adalah *dengan* dan *tanpa* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:104).

Contoh:

(82) Ani memotong wortel *dengan* pisau.

(83) Ayu berangkat sekolah *tanpa* sopir.

k. Hubungan Hasil

Hubungan hasil terdapat pada klausa terikat yang menyatakan hasil perbuatan yang dinyatakan klausa bebas. Konjungsi subordinatif yang digunakan adalah *maka(nya)*, *sampai*, dan *sehingga* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:104).

Contoh:

(84) Hari ini benar-benar panas *makanya* dia menyalakan dua kipas.

(85) Intan banyak berhutang ke rentenir *sampai-sampai* menggadaikan sawah.

(86) Dia giat belajar *sehingga* menang olimpiade.

l. Hubungan Komplementasi

Hubungan komplementasi terdapat pada kalimat majemuk bertingkat saat klausa terikat melengkapi apa yang dinyatakan klausa bebas. Konjungsi subordinatif yang digunakan adalah *bahwa* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:104)

Contoh:

(87) Aksa tidak tahu *bahwa* ibunya meninggal minggu lalu.

(88) Andi mengabarkan *bahwa* dia baik-baik saja.

(89) Pengumuman itu menyampaikan *bahwa* sekolah libur.

m. Hubungan Atributif

Hubungan atributif pada kalimat majemuk bertingkat saat klausa terikat menyatakan keadaan atau perbuatan nomina tertentu pada klausa bebas. Konjungsi subordinatif yang biasa digunakan adalah *yang* (Damaianti dan Sitaresmi, 2005:104).

Contoh:

(90) Azil *yang* menyapu halaman pagi dan sore hari.

(91)Mita membaca puisi *yang* bertema nusantara.

4. Opini

Menurut Wismanto dan Ulumuddin (2015:25) opini merupakan tulisan pendapat atau perasaan penulisnya disertai fakta yang menjadi penguat atau dukungan terhadap opini tersebut. Opini atau tajuk rencana berisi artikel penulis disertai pendapat, fakta, dan bukti-bukti yang dapat mempengaruhi pembaca sehingga dapat diterima (Tukan dalam Fatima, 2016:6). Pendapat yang terdapat dalam opini biasanya mengacu pada peristiwa-peristiwa di masyarakat sebagai bentuk kritik, pujian, atau dukungan. Opini berisi latar belakang yang ada kaitannya dengan berita beserta faktor yang mempengaruhinya.

3. Kerangka Berpikir

Pada subbab ini dikemukakan ulasan secara teoretis tentang keterkaitan yang dapat menghubungkan antara tindakan yang digunakan untuk memecahkan masalah nyata dan kontribusi yang disumbangkan.

Kalimat majemuk bertingkat pada opini JawaPos.com edisi 2020 diturunkan berdasarkan judul skripsi pada penelitian ini yaitu Analisis Fungsi dan Kategori Sintaksis Kalimat Majemuk Bertingkat pada Opini JawaPos.com Edisi 2020. Setiap kalimat majemuk dianalisis berdasarkan fungsi dan kategori yang menjadi pengisinya. Pada kalimat majemuk terdiri dari dua klausa yang dihubungkan oleh konjungtor. Setiap klausa dapat diisi oleh fungsi di bawah ini, tetapi tidak semua kalimat tersusun dari fungsi berikut.

1. S-P
2. S-P-O
3. S-P-Pel
4. S-P-O-Pel
5. S-P-K.

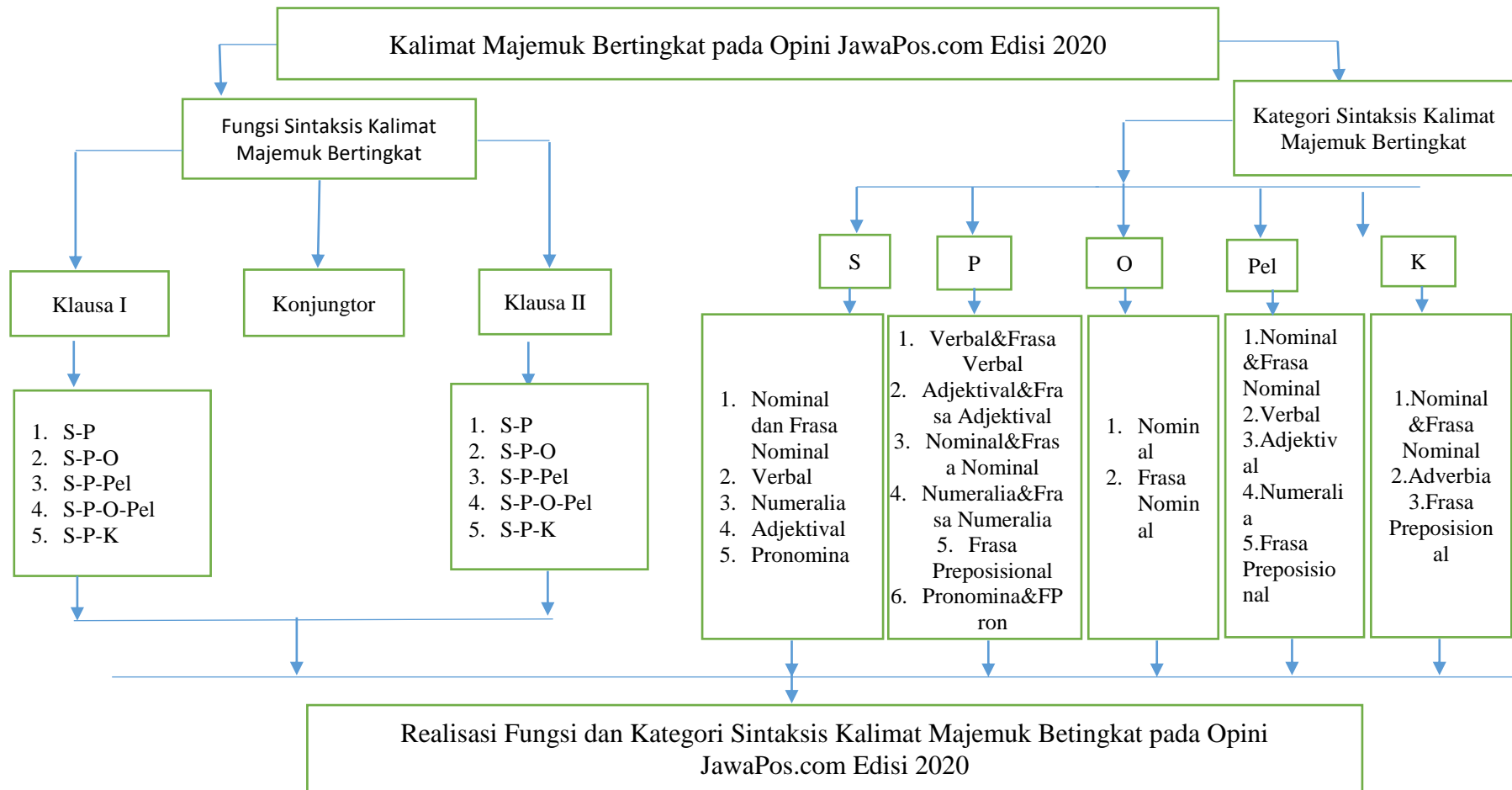
Setelah dianalisis berdasarkan fungsi sintaksis, kategori sintaksis menjadi pengisi di dalam fungsi sintaksis. Kategori sintaksis meliputi:

1. Kategori pengisi subjek yaitu nominal, frasa nominal, verbal, numeralia, adjektival, pronominal, pronominal.
2. Kategori pengisi predikat yaitu verbal, frasa verbal, adjektival, frasa adjektival, nominal, frasa nominal, numeralia, farsa numeralia, frasa preposisional, pronominal.
3. Kategori pengisi objek yaitu nominal dan farsa nominal.
4. Kategori pengisi pelengkap yaitu nominal, frasa nominal, verbal, adjektiva, numeralia, dan farsa preposisional.
5. Kategori pengisi keterangan yaitu farsa nominal, adverbial, dan frasa preposisional.

Setelah melakukan analisis data menggunakan metode yang sesuai maka akan terealisasi fungsi dan kategori sintaksis kalimat majemuk bertingkat pada opini JawaPos.com edisi 2020.

Teks berbahasa Indonesia yang menjadi objek penelitian ini adalah opini JawaPos.com. Opini merupakan gagasan atau pendapat seseorang mengenai masalah atau peristiwa faktual di masyarakat. Opini dipilih karena berisi argumen yang tentunya tersusun atas kalimat kalimat tunggal atau kalimat majemuk. Penelitian akan difokuskan untuk menganalisis kalimat majemuk bertingkat. Penemuan kalimat majemuk bertingkat akan dianalisis sesuai dengan fungsi dan kategori sintaksis. Kemudian, analisis data menggunakan metode agih dan teknik BUL. Teknik lanjutan yang digunakan adalah teknik balik dan teknik ganti. Berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini:

Kerangka Berpikir Fungsi dan Kategori Sintaksis Kalimat Majemuk Bertingkat pada Opini JawaPos.com Edisi 2020



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Analisis Fungsi dan Kategori Kalimat Majemuk Bertingkat pada Opini JawaPos.com Edisi 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah menganalisis dan memahami data yang dijadikan objek penelitian (Sudaryanto dalam Hasan, 2012:10). Penelitian kualitatif digunakan untuk penelitian yang bersifat deskriptif untuk menjabarkan fungsi dan kategori sintaksis opini Jawa Pos.com edisi 2020 yang telah dilakukan berdasarkan temuan-temuan peneliti terhadap sampel penelitian.

3.2 Sumber Data dan Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari subjek data tersebut. Sumber data adalah objek yang digunakan sebagai bahan untuk diteliti. Sumber data penelitian diperoleh dari opini JawaPos.com edisi 2020. Ada beberapa opini sebagai berikut:

1. Korona, Pemerintah, dan Era Digital oleh Kacung Marijan.
2. Tempat-tempat berisiko Penularan Covid-19 oleh Ari Baskoro.
3. Demonstran Masa Kini adalah Polisi Masa Depan oleh Reza Indragiri A.
4. Sisi Lain Pandemi Covid-19 Momentum Berbenahnya Layanan Kesehatan oleh Dwikora Novembri U.
5. Luas dan Luwes dalam Beragama oleh Biyanto.
6. Menghadirkan Kembalinya Kasih Ibu oleh Aristiana Rahayu.
7. Pembelajaran Daring untuk Siswa oleh Rita Pranawati.
8. Etika Tenaga Penjual dan Persepsi Konsumen terhadap Perusahaan oleh Hastutu Naibaho.
9. Jalan Panjang Islamofilia oleh Pradana
10. Memutus Rantai Politik Gentong Babi oleh Ribut Lupiyanto.
11. Wabah dan Ujian Nalar oleh Okky Madasari.
12. Ironi Hari Anti Korupsi oleh Dani Asmara.
13. Sasaran Bantuan Perlu Diperluas oleh Tauhid Ahmad.

14. Kebangkitan Nasional Melawan Virus Korona oleh Jagadditho P.
15. Memperkuat Persatuan dan Menghormati Perbedaan oleh Khofifah Indar P.
16. Ditipu Seragam oleh Eka Kurniawan.
17. RS Harus Siap, Individu Harus Jaga Stamina oleh Prof. dr. Nasronudin, SpPD-KPTI FINASIM.
18. PSBB Ketat Kembali, Perlukah? Oleh Laura Navika Y.
19. Menerjemahkan Hasil Pertama Vaksin Covid-19 oleh Domicus Husada.
20. Kemerdekaan Belajar yang Terkoyak oleh NG Tirti Adi M.P.
21. Wawancara Kursi Kosong Najwa Shihab: Kegagalan Jurnalis? oleh Kardono Setyorakhmadi.
22. Dokter Nasionalis Tantangan Profesi di Tengah Pandemi oleh Muh. Abid Khumaidi.
23. Virus Bermutasi Manusia Beradaptasi oleh Prof. Rhenald Kasali.
24. Gangguan Mental Perawat Saat Pandemi oleh A.H Yusuf.
25. Siasat Kebudayaan Baru dari Desa oleh Ryan Sugiyarto.
26. Penegakan Protokol Kesehatan oleh Soekarwo.
27. Tantangan Buka Sekolah saat Pandemi oleh Brahmana Askandar.
28. Memkasimalkan Peluang untuk Berlari oleh Hendra Saparini.
29. Memupuk Harapan Membangun Kepastian oleh Bambang Soesatyo.
30. Nahdlatul Entrepreneur oleh Candra Malik.
31. Kesejahteraan Bersama di Taman Nasional Komodo oleh Dewa Gde S.
32. Vaksin Covid-19 oleh M.H. Said Abdullah.
33. Kembali Sekolah di Tengah Pandemi oleh Brahmana Askandar.
34. Harapan Baru Pariwisata Indonesia oleh Dewa Gde S.
35. Menyoal Dana Kampanye Nol Rupiah oleh Gugun El Guyani.
36. Akhlak Kepemimpinan oleh Biyanto.
37. Perlukah Pembinaan Pancasila oleh Achmad Munjid.

Dalam sumber data tersebut terdapat data yang dianalisis untuk menjawab permasalahan. Data penelitian ini adalah kalimat majemuk

bertingkat yang terdapat di Jawa Pos.com edisi 2020 yang akan dianalisis berdasarkan fungsi dan kategori sintaksis.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2001:55) adalah keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya oleh peneliti. Populasi dari penelitian ini adalah opini Jawa Pos.com dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Sampel adalah sebagian dari populasi yang digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian (Sugiyono, 2001:56). Untuk jenis sampel, peneliti menggunakan sampel purposif yaitu sampel yang diambil berdasarkan ciri tertentu yang telah ditentukan untuk penelitian (Sugiyono, 2001:61).

Menurut Kuncoro (2010:134) pengambilan sampel didasarkan pada jumlah subjek. Apabila subjek kurang dari 100, maka keseluruhan subjek dapat dijadikan sampel. Akan tetapi, jika jumlah subjek lebih besar dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih dari populasi yang ada.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka sampel dalam penelitian ini diambil 10% dari keseluruhan hari pada tahun 2020 yaitu 37 opini JawaPos.com edisi 2020.

3.4 Metode dan Teknik Penyediaan Data

Metode penyediaan data menggunakan metode menyimak. Mahsun dalam Hasan (2012:10) mengungkapkan bahwa metode menyimak juga digunakan untuk ragam tulisan. Said (dalam Rahmadani dkk, 2019:140) menyatakan menyimak tidak hanya berkaitan dengan lisan, namun juga tulisan. Menurut Sudaryanto (2015:203) metode simak adalah menyimak bahasa yang digunakan. Peneliti menyimak setiap kalimat yang terdapat dalam opini Jawa Pos.com.

Teknik penyediaan data adalah mencatat data yang dilanjutkan dengan klasifikasi (Sudaryanto, 2015:205). Kalimat majemuk bertingkat yang sudah

ditentukan dari opini diketik atau ditulis sehingga memudahkan dalam melakukan analisis fungsi dan kategori sintaksis.

3.5 Metode dan Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode agih dan teknik analisis data menggunakan teknik BUL dengan dua teknik lanjutan yaitu teknik balik dan teknik ganti. Pengertian dari metode dan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Menurut Sudaryanto (2015:19) metode agih adalah metode yang menggunakan bahasa sebagai alat penentu, dapat mengenai nomina atau kata benda dan satuan lingual yang lain.
2. Teknik analisis data menggunakan teknik bagi unsur langsung (BUL). Teknik bagi unsur langsung adalah membagi satuan lingual menjadi beberapa unsur yang dapat membentuk satuan lingual tersebut (Sudaryanto, 2015:37).
3. Teknik balik adalah berubahnya wujud satuan lingual karena unsur yang berpindah dalam susunan beruntun (Sudaryanto, 2015:44).
4. Teknik ganti adalah mengganti unsur satuan lingual dengan unsur lingual lain di luar satuan lingual yang bersangkutan (Sudaryanto, 2015:43).

3.6 Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data

Metode penyajian hasil analisis data adalah metode penyajian informal. Menurut Sudaryanto (2015:241) metode penyajian informal merupakan penyajian hasil analisis menggunakan kata-kata. Penelitian ini mendeskripsikan hasil analisis fungsi dan kategori sintaksis kalimat majemuk bertingkat pada opini Jawa Pos.com 2020.

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
ANALISIS FUNGSI DAN KATEGORI SINTAKSIS KALIMAT MAJEMUK
BERTINGKAT PADA OPINI JAWA POS.COM EDISI 2020

Pada Bab IV ini akan peneliti kemukakan temuan dan pembahasan fungsi sintaksis (selanjutnya disingkat FS) dan kategori sintaksis (selanjutnya disingkat KS) dalam kalimat majemuk bertingkat pada opini Jawa Pos.com edisi 2020.

4.1 Temuan

Tabel 4. 1 Rincian Pola Kalimat Majemuk Bertingkat pada Opini JawaPos.com Edisi 2020

No	Judul Opini	Pola Kalimat Majemuk Bertingkat	Banyak Data
1	Korona, Pemerintah, dan Era Digital	S-P Konjungtor S-P	1
2	Luas dan Luwes dalam Beragama		1
3	Menghadirkan Kembalinya Kasih Ibu		1
4	Menyoal Dana Kampanye Nol Rupiah		1
5	Jalan Panjang Islamofilia	S-P Konjungtor S-P-Pel	1
6	Demonstran Masa Kini adalah Polisi Masa Depan	S-P-Pel Konjungtor S-P-O	1
7	Pembelajaran Daring untuk Siswa	S-P Konjungtor Ket-S-P	1
8	Luas dan Luwes dalam Beragama	S-P Konjungtor S-P-O	1
9.	Kebangkitan Nasional Melawan Virus Korona		1
10	Tempat-tempat Berisiko Penularan		1
11	Etika Tenaga Penjual dan Persepsi Konsumen terhadap Perusahaan	S-P-O Konjungtor S-P-O	1
12	Sisi Lain Pandemi Covid-19 Momentum Berbenahnya Layanan Kesehatan	S-P-Ket Konjungtor P-O-Pel-Ket	1
13	Memutus Rantai Politik Gentong Babi	S-P Konjungtor P-O	1
14	Wawancara kursi kosong Najwa Shihab	S-P-O-Pel Konjungtor P-O-Pel	1

No	Judul Opini	Pola Kalimat Majemuk Bertingkat	Banyak Data
15	Kemerdekaan Belajar Terkoyak	S-P Konjungtor P-O-Pel	1
16	Wabah dan Ujian Nalar	S-P Konjungtor S-P-O-Pel	1
17	Tantangan Buka Sekolah saat Pandemi		1
18	Kembali ke Sekolah di Tengah Pandemi		1
19	RS Harus Siap, Individu Harus Jaga Stamina	Ket-P-S Konjungtor P-O	1
20	Ironi Hari Anti Korupsi	P-O Konjungtor S-P-O	1
21	Sasaran Bantuan Perlu Diperluas	S-P-O Konjungtor S-P	1
22	Menguatkan Persatuan dan Menghormati Perbedaan	Ket-S-P Konjungtor P-O	1
23	Ditipu Seragam	S-P-O Konjungtor S-P-O-Pel	1
24	Menerjemahkan Hasil Pertama Vaksin Covid-19	S-P-O Konjungtor P-O-Pel	1
25	Dokter Nasionalis Tantangan Profesi di Tengah Pandemi		1
26	Kesejahteraan Bersama di Taman Nasional Komodo	S-P-Ket Konjungtor P-O	1
27	PSBB Ketat Kembali, Perlukah?	S-P-O Konjungtor P-O	1
28	Luas dan Luwes Beragama	S-P-Pel Konjungtor P-O	1
29	Korona, Pemerintah, dan Era Digital		1
30	Memupuk Harapan Membangun Kepastian		1
31	Akhlak Kepemimpinan		1
32	Penegakan Protokol Kesehatan		1
33	Menguatkan Persatuan dan Menghormati Perbedaan		1
34	Virus Bermutasi Manusia Beradaptasi	Ket-S-P Konjungtor S-P	1
35	Gangguan Mental Perawat saat Pandemi	S-P-Pel Konjungtor P-Pel-Ket	1
36	Siasat Kebudayaan Baru dari Desa	S-P-O Konjungtor S-P-Pel	1
37	Memkasimalkan Peluang untuk Berlari		1

No	Judul Opini	Pola Kalimat Majemuk Bertingkat	Banyak Data
38	Nahdlatul Entrepreneur	S-P-O-Pel Konjungtor S-P-O	1
39	Vaksin Covid-19	S-P-O-Pel Konjungtor P-O	1
40	Harapan Baru Pariwisata Indonesia	S-P-Pel Konjungtor Ket-P-O-Pel	1
41	Perlukah Pembinaan Ideologi Pancasila?	S-P-Pel Konjungtor P-O-Pel	1
Jumlah			41

4.2 Pembahasan

Pada subbab ini akan penulis uraikan fungsi dan kategori sintaksis kalimat majemuk bertingkat pada opini jawapos.com edisi 2020.

4.2.1 Fungsi Kalimat S-P konjungtor S-P

- (1) Situasi semacam itu tentu tidak bisa berlanjut, **karena** pandemi korona dan implikasinya sangat luar biasa. (KPED, P.8, K.1)

Tabel 4. 2 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat

Kalimat	situasi semacam itu	tentu tidak bisa berlanjut	karena	pandemi korona dan implikasinya	sangat luar biasa
FS	S	P	Konj.	S ₂	P ₂
KS	FN	FV	Konj.	FN	FAdj.

Kalimat (1) terdiri dari dua klausa. Klausa pertama adalah *Situasi semacam itu tentu tidak bisa berlanjut*, dan klausa kedua adalah *pandemi korona dan implikasinya sangat luar biasa*. Kedua klausa dihubungkan oleh konjungtor *karena*. Pada klausa pertama terbagi dari unsur *situasi semacam itu* sebagai S diisi kategori FN dan unsur *tentu tidak bisa berlanjut* sebagai P diisi kategori FV. Pada klausa kedua terbagi dari unsur *pandemi korona dan implikasinya* sebagai S₂ diisi kategori FN dan unsur *sangat luar biasa* sebagai P₂ diisi kategori FAdj.

Kalimat (1) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan sebab. Ditandai konjungtor subordinatif *karena*. Konjungtor subordinatif kalimat (1) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *karena* dapat berada di depan kalimat diikuti klausa terikat. Kalimat (1) menggunakan konjungtor subordinatif *karena* dapat disubstitusi dengan konjungtor *lantaran*.

- (2) Alm. Abdul Malik Fajar pernah mengatakan **bahwa** beragama itu luas dan luwes. (LLB, P.1, K.1)

Tabel 4. 3 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (2)

Kalimat	Alm. Abdul Malik Fajar	pernah mengatakan	bahwa	beragama itu	luas dan luwes
FS	S	P	Konj.	S ₂	P ₂
KS	FN	FV	Konj.	FN	FAdj.

Kalimat (2) terdiri dari dua klausa. Kalusa pertama adalah *Alm. Abdul Malik Fajar pernah mengatakan*. Klausa kedua adalah *beragama itu luas dan luwes*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *bahwa*. Pada klausa pertama

terdiri dari unsur *Alm. Abdul Malik Fajar* sebagai S diisi kategori FN dan unsur *pernah mengatakan* sebagai P diisi kategori FV. Klausa kedua terdiri dari unsur *beragama itu* sebagai S₂ diisi kategori FN dan unsur *luas dan luwes* sebagai P₂ diisi kategori FAdj.

Kalimat (2) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan komplementasi. Ditandai konjungtor subordinatif *bahwa*. Konjungtor subordinatif kalimat (2) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor subordinatif *bahwa* di awal kalimat (2) tidak lazim sehingga membuat makna kalimat menjadi rancu. Konjungtor *bahwa* tidak dapat disubstitusikan dengan konjungtor lainnya karena konjungtor *bahwa* menjelaskan klausa bebas.

(3) Survei menemukan bahwa 21 persen ayah tidak pernah mendampingi anak belajar. (MKKI, P.9, K.1)

Tabel 4. 4 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (3)

Kalimat	survei	menemukan	bahwa	21 persen ayah	Tidak pernah mendampingi anak belajar
FS	S	P	Konj.	S ₂	P ₂
KS	N	V	Konj.	FNum	FV.

Kalimat (3) memiliki dua klausa. Klausa pertama adalah *survei menemukan*. Klausa kedua adalah *21 persen ayah tidak pernah mendampingi anak belajar*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *bahwa*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *surei* sebagai S diisi kategori N dan unsur *menemukan* sebagai P diisi kategori V. Pada klausa kedua terdiri dari unsur *21 persen ayah* sebagai S₂ diisi kategori FNum dan unsur *tidak pernah mendampingi anak belajar* sebagai P₂ diisi kategori FV.

Kalimat (3) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan komplementasi. Ditandai konjungtor subordinatif *bahwa*. Konjungtor subordinatif kalimat (3) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor subordinatif *bahwa* di awal kalimat diikuti klausa terikat tidak bisa dilakukan karena mempengaruhi makna kalimat. Substitusi konjungtor *bahwa* tidak dapat digantikam konjungtor lainnya.

- (4) Rezim UU Pilkada mengatur **bahwa** dana kampanye bukan hanya uang. (MDKNR, P7, K.1)

Tabel 4. 5 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (4)

Kalimat	rezim UU pilkada	mengatur	bahwa	dana kampanye	bukan hanya uang
FS	S	P	Konj.	S ₂	P ₂
KS	FN	V	Konj.	FN	FN

Kalimat (4) terdiri dari dua klausa. Klausa pertama adalah *rezim uu pilkada mengatur*. Klausa kedua adalah *dana kampanye bukan hanya uang*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *bahwa*. Klausa pertama terdiri dari unsur *rezim uu pilkada* sebagai S diisi kategori FN dan unsur *mengatur* sebagai P diisi kategori V. Klausa kedua terdiri dari unsur *dana kampanye* sebagai S₂ diisi kategori FN dan unsur *bukan hanya uang* sebagai P₂ diisi kategori FN.

Kalimat (4) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan komplementasi. Ditandai konjungtor subordinatif *bahwa*. Permutasi konjungtor subordinatif *bahwa* di awal kalimat tidak lazim. sehingga membuat makna kalimat menjadi rancu. Konjungtor *bahwa* tidak dapat disubstitusikan dengan konjungtor lainnya karena konjungtor *bahwa* menjelaskan klausa bebas.

4.2.2 Fungsi Kalimat S-P Konjungtor S-P-Pel

- (5) Dengan latar belakang seperti ini tidaklah mengherankan **jika** laicite sering dianggap sebagai versi sekularisme yang anti agama. (JPI, P.12, K.3)

Tabel 4. 6 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (5)

Kalimat	dengan latar belakang seperti ini	tidaklah mengherankan	jika	laicite	sering dianggap	sebagai versi sekularisme yang anti agama
FS	S	P	Konj.	S ₂	P ₂	Pel
KS	FN	FV	Konj.	N	FV	FN

Kalimat (5) terdiri dari dua klausa. klausa pertama adalah *dengan latar belakang seperti ini tidaklah mengherankan*. Klausa kedua adalah *liacite sering dianggap sebagai versi sekularisme yang anti agama*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *jika*. Klausa pertama terdiri dari unsur *dengan latar*

belakang seperti ini sebagai S diisi kategori FN, unsur *tidaklah mengherankan* sebagai P diisi kategori FV. Klausa kedua terdiri dari unsur *laicite* sebagai S₂ diisi kategori N, unsur *sering dianggap* sebagai P₂ diisi kategori FV, dan unsur *sebagai versi sekularisme yang anti agama* sebagai Pel diisi kategori FN.

Kalimat (5) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan syarat. Ditandai konjungtor subordinatif *jika*. Konjungtor subordinatif (5) terletak tengah kalimat. Permutasi konjungtor subordinatif *jika* di awal kalimat diikuti klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *jika* dapat disubstitusi dengan konjungtor *kalau*.

4.2.3 Fungsi Sintaksis S-P-Pel Konjungtor S-P-O

- (6) Situasi unjuk rasa makin penuh tantangan **karena** masyarakat demonstiran yang dihadapi Polri adalah kaum muda. (DMKPMD, P.1, K.1)

Tabel 4. 7 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (6)

Kalimat	situasi unjuk rasa	makin penuh	tantangan	karena	masyarakat demonstiran yang dihadapi Polri	adalah	kaum muda
FS	S	P	Pel ₁	Konj	S ₂	P ₂	O
KS	FN	FAdj	N	Konj	FN	V	FN

Kalimat (6) terdiri dari dua klausa. Klausa pertama adalah *situasi unjuk rasa makin penuh tantangan*, dan klausa kedua adalah *masyarakat demosntran yang dihadapi Polri adalah kaum muda*. Pada kalimat tersebut terdapat konjungtor *karena*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *situasi unjuk rasa* sebagai S diisi kategori FN, unsur *makin penuh* sebagai P diisi kategori FAdj dan unsur *tantangan* sebagai Pel diisi kategori N. Pada klausa kedua terdiri dari unsur *masyarakat yang dihadapi Polri* sebagai S₂ diisi kategori FN, unsur *adalah* sebagai P₂ diisi kategori V, dan unsur *kaum muda* sebagai O diisi kategori FN.

Kalimat (6) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan sebab. Ditandai konjungtor subordinatif *karena*. Konjungtor subordinatif kalimat (6) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *karena* di awal kalimat diikuti klausa terikat sudah tepat dan tidak mempengaruhi makna klaimat. Konjungtor *karena* dapat disubstitusi dengan konjungtor *lantaran*.

4.2.4 Fungsi Kalimat S-P Konjungtor Ket-S-P

- (7) Anak-anak perlu menghentikan, **jika** tiba-tiba ada pop-up iklan yang mengandung unsur pornografi. (PDS, P.12, K.3)

Tabel 4. 8 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (7)

Kalimat	anak-anak	perlu menghentikan	jika	tiba-tiba	ada <i>pop-up</i> iklan yang mengandung	unsur pornografi
FS	S	P	Konj.	Ket. Cara ₁	S ₂	P ₂
KS	FN	FV	Konj.	Adv.	FN	FN

Kalimat (7) terdiri dari dua klausa. Klausa pertama adalah *anak-anak perlu menghentikan*. Klausa kedua adalah *tiba-tiba ada pop-up iklan yang mengandung unsur pornografi*. Konjungtor pada kalimat tersebut adalah *jika*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *anak-anak* sebagai S diisi kategori FN dan unsur *perlu menghentikan* sebagai P diisi kategori FV. Pada klausa kedua terdiri dari unsur *tiba-tiba* sebagai Ket. cara diisi kategori Adv, unsur *ada pop-up iklan yang mengandung* sebagai S₂ diisi kategori FN dan *unsur pornografi* sebagai P₂ diisi kategori FN.

Kalimat (7) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan syarat. Ditandai konjungtor subordinatif *jika*. Di kalimat (7) konjungtor subordinatif *jika* terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *jika* di awal kalimat diikuti klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor subordinatif *jika* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *bilamana*.

4.2.5 Fungsi Sintaksis S-P Konjungtor S-P-O

- (8) Karakter luas dan luwes ini penting **karena** setiap umat beragama menghadapi tantangan yang sama yakni pluralitas agama dan paham keagamaan. (LLB, P.2, K1)

Tabel 4. 9 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (8)

Kalimat	karakter luas dan luwes ini	penting	karena	setiap umat beragama	menghadapi	tantangan yang sama yakni pluralitas agama dan paham keagamaan
FS	S	P	Konj.	S ₂	P ₂	O
KS	FN	Adj.	Konj.	FN	V	FN

Kalimat (8) terdiri dari dua klausa. Klausa pertama adalah *karakter luas dan luwes ini penting*, dan klausa kedua adalah *setiap umat beragama*

menghadapi tantangan yang sama yakni pluralitas agama dan paham keagamaan. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *karena*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *karakter luas dan luwes ini* sebagai S diisi kategori FN, unsur *penting* sebagai P diisi kategori Adj. Pada klausa kedua terdiri dari unsur *setiap umat beragama* sebagai S₂ diisi kategori FN, unsur *menghadapi* sebagai P₂ diisi kategori V, dan *tantangan yang sama yakni pluralitas agama dan paham keagamaan* sebagai O diisi kategori FN.

Kalimat (8) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan sebab. Ditandai dengan konjungtor *karena*. Pada kalimat (8) konjungtor subordinatif *karena* terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *karena* di awal kalimat diikuti klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *karena* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *sebab*.

(9) Mereka percaya **bahwa** pendidikan bumi putra merupakan kunci masa depan bangsa. (KNMVK, P.11, K.2)

Tabel 4. 10 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (9)

Kalimat	mereka	percaya	bahwa	pendidikan bumi putra	merupakan	kunci masa depan
FS	S	P	Konj.	S ₂	P ₂	O
KS	Pron.	V	Konj.	FN	V	FN

Kalimat (9) terdiri dari dua klausa. Klausa pertama adalah *mereka percaya* dan klausa kedua adalah *pendidikan bumi putra merupakan kunci masa depan bangsa*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *bahwa*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *mereka* sebagai S diisi kategori Pron. dan unsur *percaya* sebagai P diisi kategori V. Pada klausa kedua terdiri dari unsur *pendidikan bumi putra* sebagai S diisi kategori FN, *merupakan* sebagai P₂ diisi kategori V, dan *kunci masa depan* sebagai O diisi kategori FN.

Kalimat (9) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan komplementasi, ditandai konjungtor subordinatif *bahwa*. Pada kalimat (9) konjungtor subordinatif *bahwa* terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor subordinatif *bahwa* di awal kalimat tidak lazim sehingga membuat makna kalimat menjadi rancu. Konjungtor subordinatif *bahwa* menjelaskan isi pernyataan dari klausa bebas.

- (10) Hal itu bukan sesuatu yang mengherankan **karena** Covid-19 merupakan penyakit baru. (TBPC, P.2, K.2)

Tabel 4. 11 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (10)

Kalimat	hal itu	bukan sesuatu yang mengherankan	karena	covid-19	merupakan	penyakit baru
FS	S	P	Konj.	S ₂	P ₂	O
KS	FN	FN	Konj.	FN	V	FN

Kalimat (10) terdiri dari dua klausa. Klausa pertama adalah *hal itu bukan sesuatu yang mengherankan*, dan klausa kedua adalah *covid-19 merupakan penyakit baru*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *karena*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *hal itu* sebagai S diisi kategori FN dan unsur *bukan sesuatu yang mengherankan* sebagai P diisi kategori FN. Pada klausa kedua terdiri dari unsur *covid-19* sebagai S₂ diisi kategori FN dan *merupakan* sebagai P₂ diisi kategori V *penyakit baru* sebagai O diisi kategori FN.

Kalimat (10) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan sebab. Ditandai konjungtor subordinatif *karena*. Konjungtor subordinatif kalimat (10) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *karena* di awal kalimat diikuti klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *karena* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *lantaran*.

4.2.6 Fungsi Sintaksis Sintaksis S-P-O Konjungtor S-P-O

- (11) Konsumen akan memiliki persepsi positif akan perusahaan **jika** tenaga penjual menunjukkan perilaku etis dalam menawarkan produk. (ETPPKP, P.3, K.3)

Tabel 4. 12 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (11)

Kalimat	konsumen	akan memiliki	persepsi positif akan perusahaan	jika	tenaga penjual	menunjukkan perilaku etis dalam menawarkan	produk
FS	S	P	O	Konj.	S ₂	P ₂	O ₂
KS	N	FV	FN	Konj.	FN	FV	N

Kalimat (11) terdiri dari dua klausa. Kalusa pertama adalah *konsumen akan memiliki persepsi positif akan perusahaan*. Klausa kedua adalah *tenaga penjual menunjukkan perilaku etis dalam menawarkan produk*. Kedua kluasa dihubungkan konjungtor *jika*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *konsumen* sebagai S diisi kategori N, unsur *akan memiliki* sebagai P diisi

kategori FV, unsur *pesepsi positif akan perusahaan* sebagai O diisi kategori FN. Pada klausa kedua terdiri dari unsur *tenaga penjual* sebagai S₂ diisi kategori FN, unsur *menunjukkan perilaku positif dalam menawarkan* sebagai P₂ diisi kategori FV, dan unsur *produk* sebagai O₂ diisi kategori N.

Kalimat (11) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan syarat. Ditandai konjungtor subordinatif *jika*. Konjungtor subordinatif kalimat (11) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *jika* di awal kalimat diikuti klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *jika* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *asalkan*.

4.2.7 Fungsi Sintaksis S-P-Ket Konjungtor P-O-Pel-Ket

(12) Tak sedikit masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri **karena** menganggap pelayanan serta kulaitas pengobatan di luar negeri lebih unggul. (SLPCMBLK, P.6, K3)

Tabel 4. 13 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (12)

Kalimat	tak sedikit	masyarakat Indonesia yang berobat	ke luar negeri	karena	menganggap	pelayanan serta kulaitas	pengobatan	di luar negeri lebih unggul
FS	S	P	Ket. tempat	Konj.	P ₂	O ₂	Pel	Ket. tempat
KS	FAdj.	FN	FPrep.	Konj.	V	FN	N	FPrep.

Kalimat (12) terdiri dari dua klausa. Kalusa pertama adalah *tak sedikit masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri*. Klausa kedua adalah *menganggap pelayanan serta kualitas pengobatan di luar negeri lebih unggul*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *karena*. Klausa pertama terdiri dari unsur *tak sedikit* sebagai S diisi kategori FAdj, unsur *masyarakat Indonesia yang berobat* sebagai P diisi kategori FN, unsur *ke luar negeri* sebagai Ket. tempat diisi kategori FPrep. Klausa kedua terdiri dari unsur *menganggap* sebagai P₂ diisi kategori V, unsur *pelayanan serta kualitas* sebagai O₂ diisi kategori FN, unsur *pengobatan* sebagai Pel diisi kategori N, dan unsur *di luar negeri lebih unggul* sebagai Ket tempat diisi kategori FPrep.

Kalimat (12) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan sebab. Ditandai konjungtor subordinatif *karena*. Konjungtor subordinatif kalimat (12) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *karena* di awal kalimat

diikuti klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *karena* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *lantaran*.

4.2.8 Fungsi Sintaksis S-P Konjungtor P-O

- (13) Kepolisian dan kejaksaan dapat turun tangan **jika** mengarah pada tindak pidana. (MRPGB, P.11, K.2)

Tabel 4. 14 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (13)

Kalimat	kepolisian dan kejaksaan	dapat turun tangan	jika	mengarah	pada tindak pidana
FS	S	P	Konj.	P ₂	O
KS	FN	FV	Konj.	V	FN

Kalimat (13) terdiri dari dua klausa. Klausa pertama adalah *kepolisian dan kejaksaan*. Klausa kedua adalah *mengarah pada tindak pidana*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *jika*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *kepolisian dan kejaksaan* sebagai S diisi kategori FN dan unsur *dapat turun tangan* sebagai P diisi kategori FV. Klausa kedua terdiri dari unsur *mengarah* sebagai P₂ diisi kategori V dan unsur *pada tindak pidana* sebagai O diisi kategori FN.

Kalimat (12) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan syarat. Ditandai konjungtor subordinatif *jika*. Konjungtor subordinatif kalimat (13) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *jika* di awal kalimat diikuti klausa terikat tidak mengubah makna kalimat. Konjungtor *jika* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *manakala*.

4.2.9 Fungsi Sintaksis S-P-O-Pel Konjungtor P-O-Pel

- (14) Dia meminta Menkes Terwan hadir **untuk** menjawab keresahan publik yang diserapnya. (WKKNSKJ, P.11, K.2)

Tabel 4. 15 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (14)

Kalimat	dia	meminta	Menkes Terwan	hadir	untuk	menjawab	keresahan	publik yang diserapnya
FS	S	P	O	Pel	Konj.	P ₂	O ₂	Pel ₂
KS	Pron	V	FN	V	Konj.	V	N	FN

Kalimat (14) terdiri dari dua klausa. Kalusa pertama adalah *dia meminta menkes Terwan hadir*. Klausa kedua adalah *menjawab keresahan publik yang diserapnya*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *untuk*. Pada klausa

pertama terdiri dari unsur *dia* sebagai S diisi kategori Pron, unsur *meminta* sebagai P diisi kategori V, *Menkes Terawan* sebagai O diisi kategori FN, dan unsur hadir sebagai Pel diisi kategori V. Pada klausa kedua terdiri dari unsur *menjawab* sebagai P₂ diisi kategori V, unsur *keresahan* sebagai O₂ diisi kategori N, dan unsur *publik yang diserapnya* sebagai Pel₂ diisi kategori FN.

Kalimat (14) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan tujuan. Ditandai dengan konjungtor subordinatif *untuk*. Di kalimat (14) konjungtor subordinatif *untuk* terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *untuk* di awal kalimat diikuti klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *untuk* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *agar*.

4.2.10 Fungsi Sintaksis S-P Konjungtor P-O-Pel

(15) Sekolah terpaksa/dipaksa **untuk** menyiapkan infrastruktur PJJ, termasuk jaringan internet. (KBT, P.5, K.4)

Tabel 4. 16 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (15)

Kalimat	sekolah	terpaksa/dipaksa	untuk	menyiapkan	Insfrastruktur PJJ	termasuk jaringan internet
FS	S	P	Konj.	P ₂	O	Pel
KS	N	FV	Konj.	V	FN	FN

Kalimat (15) terdiri dari dua klausa. Kalusa pertama adalah *sekolah terpaksa/dipaksa*. Klausa kedua adalah *menyiapkan insrastruktur PJJ termasuk jaringan internet*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *untuk*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *sekolah* sebagai S diisi kategori N, unsur *terpaksa/dipaksa* sebagai P diisi kategori FV. Klausa kedua terdiri dari unsur *menyiapkan* sebagai P₂ diisi kategori V, unsur *insfrastruktur PJJ* sebagai O diisi kategori FN, unsur *termasuk jaringan internet* sebagai Pel₁ diisi kategori FN.

Kalimat (15) adalah majemuk bertingkat makna hubungan tujuan. Ditandai konjungtor subordinatif *untuk*. Konjungtor subordinatif kalimat (15) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *untuk* di awal kalimat diikuti klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *untuk* dapat disubstitusikan dnegan konjungtor *agar*.

4.2.11 Fungsi Sintaksis S-P Konjungtor S-P-O-Pel

- (16) Kebijakan itu dikeluarkan sesaat **setelah** WHO meningkatkan status wabah Wuhan sebagai bahaya Internasional. (WUN, P.4, K.2)

Tabel 4. 17 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (16)

Kalimat	kebijakan itu	dikeluarkan	sesaat setelah	WHO	meningkatkan	status wabah Wuhan	sebagai bahaya Internasional
FS	S	P	Konj.	S ₂	P ₂	O	Pel
KS	FN	V	Konj.	N	V	FN	FPrep.

Kalimat (16) terdiri dari dua klausa. Klausa pertama adalah *kebijakan itu dikeluarkan*. Klausa kedua adalah *WHO meningkatkan status wabah Wuhan sebagai bahaya Internasional*. Konjungtor kalimat tersebut adalah *sesaat*. Klausa pertama terdiri dari unsur *kebijakan itu* sebagai S₁ dan FN, unsur *dikeluarkan* sebagai P₁ dan V. Klausa kedua terdiri dari unsur *WHO* sebagai S₂ dan N, unsur *meningkatkan* sebagai P₂ dan V, unsur *status wabah Wuhan* sebagai O₁ dan FN, dan unsur *sebagai bahaya Internasional* sebagai Pel₁ dan FPrep.

Kalimat (16) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan waktu terjadi setelah. Ditandai konjungtor subordinatif *setelah*. Konjungtor subordinatif *setelah* kalimat (16) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *setelah* di awal kalimat diikuti oleh klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *setelah* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *sehabis*.

- (17) Hal ini menunjukkan **bahwa** usia anak sekolah tetap mempunyai risiko terpapar Covid-19. (TBSP, P.3, K.2)

Tabel 4. 18 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (17)

Kalimat	hal ini	menunjukkan	bahwa	usia anak sekolah	tetap mempunyai	risiko	terpapar Covid-19
FS	S	P	Konj	S ₂	P ₂	O	Pel
KS	FN	V	Konj	FN	FV	N	FV

Kalimat (17) memiliki dua klausa. Klausa pertama adalah *hal ini menunjukkan*. Klausa kedua adalah *usia anak sekolah tetap mempunyai risiko terpapar Covid-19*. Konjungtor subordinatif kalimat tersebut adalah *bahwa*. Klausa pertama terdiri dari unsur *hal itu* sebagai S₁ dan FN dan unsur

menunjukkan sebagai P₁ dan V. Klausa kedua terdiri dari unsur *usia anak sekolah* sebagai S₂ dan FN, unsur *tetap mempunyai* sebagai P₂ dan FV, unsur *risiko* sebagai O₁ dan N, dan unsur *terpapar Covid-19* sebagai Pel₁ dan FV.

Kalimat (17) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan komplementasi. Ditandai konjungtor subordinatif *bahwa*. Konjungtor subordinatif kalimat (17) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *bahwa* di awal kalimat tidak lazim dilakukan dan tidak bisa. Hal itu karena konjungtor *bahwa* menjelaskan isi dari klausa bebas. Konjungtor *bahwa* tidak dapat disubstitusikan dengan konjungtor lainnya.

(18) Hal itu menunjukkan **bahwa** para orang tua masih khawatir sekolah mempunyai risiko penularan. (KSTP, P.1, K.3)

Tabel 4. 19 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (18)

Kalimat	hal itu	menunjukkan	bahwa	para orang tua	masih khawatir	sekolah	mempunyai risiko penularan
FS	S	P	Konj.	S ₂	P ₂	O	Pel ₁
KS	FN	V	Konj.	FN	FV	N	FV

Kalimat (18) memiliki dua klausa. Klausa pertama adalah hal itu menunjukkan. Klausa kedua adalah para orang tua masih khawatir sekolah mempunyai risiko penularan. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *bahwa*. Klausa pertama terdiri dari unsur hal itu sebagai S diisi kategori FN dan unsur *menunjukkan* sebagai P diisi kategori V. Klausa kedua terdiri dari unsur *para orang tua* sebagai S₂ diisi kategori FN, unsur *masih khawatir* sebagai P₂ diisi kategori FV, unsur *sekolah* sebagai O diisi kategori N, dan unsur *mempunyai risiko penularan* sebagai Pel diisi kategori FV.

Kalimat (18) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan komplementasi. Ditandai konjungtor subordinatif *bahwa*. Konjungtor subordinatif kalimat (18) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *bahwa* di awal kalimat tidak lazim dilakukan dan tidak bisa. Hal itu karena konjungtor *bahwa* menjelaskan isi dari klausa bebas. Konjungtor *bahwa* tidak dapat disubstitusikan dengan konjungtor lainnya.

4.2.12 Fungsi Sintaksis Ket-P-S Konjungtor P-O

(19) Hingga kini belum ada vaksin **untuk** mencegah virus Corona. (RSHSIHJS, P.11, K.1)

Tabel 4. 20. Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (19)

Kalimat	hingga kini	belum ada	vaksin	untuk	mencegah	virus corona
FS	Ket. waktu batas akhir	P	S	Konj.	P ₂	O
KS	FN	FV	N	Konj.	V	FN

Kalimat (19) memiliki dua klausa. Klausa pertama adalah *hingga kini belum ada vaksin*. Klausa kedua adalah *mencegah virus Corona*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *untuk*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *hingga kini* sebagai Ket. waktu batas akhir diisi kategori FN, unsur *belum ada* sebagai P diisi kategori FV, dan unsur *vaksin* sebagai S diisi kategori N. Pada klausa kedua terdiri dari unsur *mencegah* sebagai P₂ diisi kategori V dan unsur *virus corona* sebagai O₂ diisi kategori FN.

Kalimat (19) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan tujuan. Ditandai konjungtor subordinatif *untuk*. Konjungtor subordinatif *untuk* kalimat (19) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *untuk* di awal kalimat diikuti klausa terikat tidak mengubah makna kalimat. Konjungtor *untuk* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *agar*.

4.2.13 Fungsi Sintaksis P-O Konjungotr S-P-O

(20) Menurut data **sejak** masa reformasi tidak kurang dari 82 politikus serta 362 kepala daerah telah terjerat lembaga anti rasuah itu. (IHAK, P.3, K.3)

Tabel 4. 21 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (20)

Kalimat	menurut	data	sejak	masa reformasi	tidak kurang dari 82 politikus serta 362 kepala daerah telah terjerat	lembaga anti rasuah itu
FS	P	O	Konj.	S	P ₂	O
KS	V	N	Konj.	FN	FV	FN

Kalimat (20) terdiri dari dua klausa. Kalusa pertama adalah *menurut data*. Klausa kedua adalah *masa reformasi tidak kurang dari 82 politikus serta 362 kepala daerah telah terjerat lembaga anti rasuah itu*. Kedua konjungtor dihubungkan konjungtor *sejak*. Pada kluasa pertama terdiri dari unsur *menurut* sebagai P diisi kategori V, *data* sebagai O diisi kategori N. Klausa kedua terdiri dari unsur *masa reformasi* sebagai S diisi kategori FN, unsur *tidak kurang dari 82 politikus serta 362 kepala daerah telah terjerat* sebagai

P₂ diisi kategori FV, dan unsur *lembaga anti rasuah itu* sebagai O diisi kategori FN.

Kalimat (20) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan waktu batas permulaan. Ditandai konjungtor subordinatif *sejak*. Konjungtor subordinatif *sejak* kalimat (20) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *sejak* di awal kalimat diikuti oleh klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *sejak* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *sedari*.

4.2.14 Fungsi Sintaksis S-P-O Konjungtor S-P

(21) Keputusan OJK memperpanjang masa restrukturisasi kredit **hingga** 31 Maret 2020 untuk berjaga. (SBPD, P.1, K.2)

Tabel 4. 22. Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (21)

Kalimat	keputusan OJK	memperpanjang	masa restrukturisasi kredit	hingga	31 Maret 2020	untuk berjaga
FS	S	P	O ₁	Konj.	S ₂	P ₂
KS	FN	V	FN	Konj.	FNum.	FPrep.

Kalimat (21) memiliki dua klausa. Klausa pertama adalah *keputusan OJK memperpanjang masa restrukturisasi kredit*. Klausa kedua adalah *31 Maret 2020 untuk berjaga*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *hingga*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *keputusan OJK* sebagai S diisi kategori FN, unsur *memperpanjang* sebagai P diisi kategori V, dan unsur *masa kredit* sebagai O diisi kategori FN. Pada klausa kedua terdiri dari unsur *31 Maret 2020* sebagai S₂ diisi kategori FNum dan unsur *untuk berjaga* sebagai P diisi kategori FPrep.

Kalimat (21) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan waktu batas akhir. Ditandai konjungtor subordinatif *hingga*. Konjungtor subordinatif *hingga* kalimat (21) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *hingga* di awal kalimat diikuti oleh klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *hingga* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *sampai*.

4.2.15 Fungsi Sintaksis Ket-S-P Konjungtor P-O

(22) Kala itu, orang tua malu **ketika** memiliki anak prempuan. (MPMP, P.10, K.2)

Tabel 4. 23 Analisis FS dan KS Kalimat majemuk Bertingkat (22)

Kalimat	kala itu	orang tua	malu	ketika	memiliki	anak perempuan
FS	Ket. waktu	S	P	Konj.	P ₂	O
KS	FN	FN	V	Konj.	V	FN

Kalimat (22) terdiri dari dua klausa. Klausa pertama adalah *kala itu orang tua malu*. Klausa kedua adalah *memiliki anak perempuan*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *ketika*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *kala itu* sebagai Ket. Waktu diisi kategori FN, unsur *orang tua* sebagai S diisi kategori FN, dan unsur *malu* sebagai P diisi kategori V. Klausa kedua terdiri dari unsur *memiliki* sebagai P₂ diisi kategori V dan unsur *anak perempuan* sebagai O diisi kategori FN.

Kalimat (22) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan waktu bersamaan. Ditandai konjungtor subordinatif *ketika*. Konjungtor subordinatif *ketika* kalimat (22) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *ketika* di awal kalimat diikuti oleh klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *ketika* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *sewaktu*.

4.2.16 Fungsi Sintaksis S-P-O Konjungtor S-P-O-Pel

(23) Orang lain bisa menganggapnya sebagai ulama **ketika** seseorang mengenakan jubah putih dengan sorban. (DS, P.13, K.2)

Tabel 4. 24 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (23)

Kalimat	seseorang	mengenakan	jubah putih dengan sorban	ketika	orang lain	bisa menganggap	-nya	sebagai ulama
FS	S	P	O ₁	Konj.	S ₂	P ₂	O ₂	Pel
KS	N	V	FN	Konj.	FN	FV	N	FPrep.

Kalimat (23) memiliki dua klausa. Klausa pertama adalah *seseorang mengenakan jubah putih dengan sorban*. Klausa kedua adalah *orang lain bisa menganggapnya sebagai seorang ulama*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *ketika*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *seseorang* sebagai S diisi kategori N, unsur *mengenakan* sebagai P diisi kategori V, dan unsur *jubah putih dengan sorban* sebagai O diisi kategori FN. Pada klausa kedua terdiri dari unsur *orang lain* sebagai S₂ diisi kategori FN, unsur *bisa menganggap* sebagai P₂ diisi kategori FV, unsur pronominal *-nya* sebagai O₂ diisi kategori N, dan unsur *sebagai ulama* sebagai Pel diisi kategori Fprep.

Kalimat (23) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan waktu batas bersamaan. Ditandai konjungtor subordinatif *ketika*. Konjungtor subordinatif *ketika* kalimat (23) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *ketika* di awal kalimat diikuti oleh klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *ketika* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *sewaktu*.

4.2.17 Fungsi Sintaksis S-P-O Konjungtor P-O-Pel

(24) Perusahaan pembuat sedang mengembangkan kemasan khusus **untuk** memperpanjang usia vaksin. (MHPVC, P.6, K.4)

Tabel 4. 25 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (24)

Kalimat	perusahaan pembuat	sedang mengembangkan	kemasan khusus	untuk	memperpanjang	usia	vaksin
FS	S	P	O	Konj	P ₂	O ₂	Pel
KS	FN	FV	FN	Konj	V	N	N

Kalimat (24) memiliki dua klausa. Klausa pertama adalah *perusahaan pembuat sedang mengembangkan kemasan khusus*. Klausa kedua adalah *memperpanjang usia vaksin*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *untuk*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *perusahaan pembuat* sebagai S diisi kategori FN, unsur *sedang mempersiapkan* sebagai P diisi kategori FV, dan unsur *kemasan khusus* sebagai O diisi kategori FN. Klausa kedua terdiri dari unsur *memperpanjang* sebagai P₂ diisi kategori V, unsur *usia* sebagai O₂ diisi kategori N, dan unsur *vaksin* sebagai Pel diisi kategori N.

Kalimat (24) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan tujuan. Ditandai konjungtor subordinatif *untuk*. Pada kalimat (24) konjungtor subordinatif *untuk* terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *untuk* di awal kalimat diikuti oleh klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *untuk* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *biar*.

- (25) Mengatasi pandemi covid-19 ini, perlu penekanan pada biosecurity dan upaya **untuk** mencegah persebaran penyakit menular. (DNTPTP, P.9, K.1)

Tabel 4. 26 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (25)

Kalimat	mengatasi pandemi Covid-19 ini	perlu penekanan	pada biosecurity dan upaya	untuk	mencegah	persebaran	penyakit menular
FS	S	P	O	Konj.	P ₂	O ₂	Pel
KS	FN	FV	FN	Konj.	V	N	FN

Kalimat (25) terdiri dari dua klausa. Klausa pertama adalah *mengatasi pandemi covid-19 ini perlu penekanan pada biosecurity dan upaya*. Klausa kedua adalah *mencegah persebaran penyakit menular*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *untuk*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *mengatasi pandemi covid-19 ini* sebagai S diisi kategori FN, unsur *perlu penekanan* sebagai P diisi kategori FV, dan unsur *pada biosecurity dan upaya* sebagai O diisi kategori FN. Pada klausa kedua terdiri dari unsur *mencegah* sebagai P₂ diisi kategori V, unsur *persebaran* sebagai O₂ diisi kategori N, dan unsur *penyakit menular* sebagai Pel₂ diisi kategori FN.

Kalimat (25) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan tujuan. Ditandai konjungtor subordinatif *untuk*. Di kalimat (25) konjungtor subordinatif *untuk* terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *untuk* di awal kalimat diikuti klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *untuk* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *agar*.

4.2.18 Fungsi Sintaksis S-P-Ket Konjungtor P-O

- (26) Pembangunan dilakukan di zona khusus **yang** tidak mengganggu ekosistem. (KBTNK, P.9, K.2)

Tabel 4. 27 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (26)

Kalimat	pembangunan	dilakukan	di zona khusus	yang	tidak mengganggu	ekosistem
FS	S	P	Ket.	Konj.	P ₂	O
KS	N	V	Fprep.	Konj.	FV	N

Kalimat (26) memiliki dua klausa. Klausa pertama adalah *pembangunan dilakukan di zona khusus*. Klausa kedua adalah *tidak mengganggu ekosistem*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *yang*. Klausa pertama terdiri dari unsur *pembangunan* sebagai S diisi kategori N, unsur *dilakukan* sebagai P

diisi kategori V, dan unsur *di zona khusus* sebagai Ket. Tempat diisi kategori FPrep. Klausa kedua terdiri dari unsur *tidak mengganggu* sebagai P₂ diisi kategori FV dan unsur *ekosistem* sebagai O diisi kategori N.

Kalimat (26) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan atributif. Ditandai konjungtor subordinatif *yang*. Permutasi konjungtor subordinatif *yang* tidak dapat dilakukan karena akan mempengaruhi makna dan esensi kalimat. Konjungtor subordinatif *yang* pada kalimat tersebut tidak bisa diganti dengan konjungtor subordinatif lainnya.

4.2.19 Fungsi Sintaksis S-P-O Konjungtor P-O

(27) Perbaiki sirkulasi udara dalam gedung hendaknya menjadi pertimbangan **untuk** meminimalisir persebaran. (PSBBKKP, P.4, K.3)

Tabel 4. 28 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (27)

Kalimat	perbaiki sirkulasi udara dalam gedung hendaknya	menjadi	pertimbangan	untuk	meminimalisir	persebaran
FS	S	P	O	Konj.	P ₂	O ₂
KS	FN	V	N	Konj.	V	N

Kalimat (27) terdiri dari dua klausa. Klausa pertama adalah *perbaiki sirkulasi udara dalam gedung hendaknya menjadi pertimbangan*. Klausa kedua adalah *meminimalisir persebaran*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *untuk*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *perbaiki sirkulasi udara dalam gedung hendaknya* sebagai S diisi kategori FN, unsur *menjadi* sebagai P diisi kategori V, dan unsur *pertimbangan* sebagai O diisi kategori N. Klausa kedua terdiri dari *meminimalisir* sebagai P₂ diisi kategori V dan unsur *persebaran* sebagai O₂ diisi kategori N.

Kalimat (27) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan tujuan. Ditandai konjungtor subordinatif *untuk*. Konjungtor subordinatif *untuk* kalimat (27) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *untuk* di awal kalimat diikuti oleh klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *untuk* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *supaya*.

4.2.20 Fungsi Sintaksis S-P-Pel Konjungtor P-O

(28) Tindakan anarkis itu dikatakan bagian dari dakwah **untuk** memerintah pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. (LLB, P.8, K.4)

Tabel 4. 29 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (28)

Kalimat	tindakan anarkis itu	dikatakan	bagian dari dakwah	untuk	memerintah	pada kebaikan dan mencegah kemungkaran
FS	S	P	Pel ₁	Konj.	P ₂	O
KS	FN	V	FN	Konj.	V	FN

Kalimat (28) terdiri dari dua klausa. Klausa pertama adalah *tindakan anarkis itu dikatakan bagian dari dakwah*. Klausa kedua adalah *memerintah pada kebaikan dan mencegah kemungkaran*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *untuk*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *tindakan anarkis itu* sebagai S diisi kategori FN, unsur *dikatakan* sebagai P diisi kategori V, dan unsur *bagian dari dakwah* sebagai Pel diisi kategori FN. Pada klausa kedua terdiri dari unsur *memerintah* sebagai P₂ diisi kategori V dan unsur *pada kebaikan dan mencegah kemungkaran* sebagai O diisi kategori FN.

Kalimat (28) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan tujuan. Ditandai dengan konjungtor subordinatif *untuk*. Di kalimat (28) konjungtor subordinatif *untuk* terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *untuk* di awal kalimat diikuti oleh klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *untuk* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *guna*.

(29) Instrumen ini telah diterapkan banyak negara **meski** melalui strategi berbeda. (KPED, P.3, K.2)

Tabel 4. 30 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (29)

Kalimat	instrumen ini	telah diterapkan	banyak negara	meski	melalui	strategi berbeda
FS	S ₁	P ₁	Pel ₁	Konj.	P ₂	O ₁
KS	FN	FV	FN	Konj.	V	FN

Kalimat (29) memiliki dua klausa. Klausa pertama adalah *instrumen ini telah diterapkan banyak negara*. Klausa kedua adalah *melalui strategi berbeda*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *meski*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *instrumen ini* sebagai S diisi kategori FN, unsur *telah diterapkan* sebagai P diisi kategori FV, dan unsur *banyak negara* sebagai Pel

diisi kategori FN. Pada klausa kedua terdiri dari unsur *melalui* sebagai P₂ diisi kategori V dan unsur *strategi berbeda* sebagai O diisi kategori FN.

Kalimat (29) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan konsesif. Ditandai konjungtor subordinatif *meski*. Di kalimat (29) konjungtor subordinatif terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *meski* di awal kalimat diikuti oleh klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *meski* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *walaupun*.

(30) Vaksinasi Covid-19 diberikan dua dosis **sehingga** dapat membentuk antibodi. (MHMK, P.7, K.2)

Tabel 4. 31 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (30)

Kalimat	vaksinasi Covid-19	diberikan	dua dosis	sehingga	dapat membentuk	antibodi
FS	S	P	Pel	Konj.	P ₂	O
KS	FN	V	FNum.	Konj.	FV	N

Kalimat (30) memiliki dua klausa. Kalusa pertama adalah *vaksinasi Covid-19 diberikan dua dosis*. Klausa kedua adalah *dapat membentuk antibodi*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *sehingga*. Klausa pertama terdiri dari unsur vaksinasi Covid-19 sebagai S diisi kategori FN, unsur *diberikan* sebagai P diisi kategori V, dan unsur *dua dosis* sebagai Pel diisi kategori FNum. Klausa kedua terdiri dari unsur *dapat membentuk* sebagai P₂ diisi kategori FV dan unsur *antibodi* sebagai O diisi kategori N.

Kalimat (30) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan hasil. Ditandai dengan konjungtor subordinatif *sehingga*. Pada kalimat (30) konjungtor subordinatif *sehingga* terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *sehingga* di awal kalimat diikuti oleh klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *sehingga* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *maka*.

(31) Orang akan mudah terbakar emosi **karena** tidak punya banyak pilihan. (AK, P.2, K.3)

Tabel 4. 32 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (31)

Kalimat	orang	akan mudah terbakar	emosi	karena	tidak memiliki	banyak pilihan
FS	S	P	Pel	Konj.	P ₂	O ₁
KS	Pron.	FV	N	Konj.	FV	FN

Kalimat (31) memiliki dua klausa. Klausa pertama adalah *orang akan mudah terbakar emosi*. Klausa kedua adalah *tidak punya banyak pilihan*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *karena*. Klausa pertama terdiri dari unsur *orang* sebagai S diisi kategori Pron. dan unsur *akan mudah terbakar* sebagai P diisi kategori FV, dan unsur *emosi* sebagai Pel diisi kategori N. Klausa kedua terdiri dari unsur *tidak memiliki* sebagai P₂ diisi kategori FV dan unsur *banyak pilihan* sebagai O diisi kategori FN.

Kalimat (31) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan sebab. Ditandai konjungtor subordinatif *karena*. Konjungtor subordinatif kalimat (31) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *karena* di awal kalimat diikuti oleh klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *karena* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *lantaran* dan *sebab*.

(32) Upaya perlindungan kesehatan masyarakat dilakukan paralel **dengan** penyelamatan ekonomi. (PPK, P.1, K.4)

Tabel 4. 33 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (32)

Kalimat	upaya perlindungan	kesehatan masyarakat	dilakukan paralel	dengan	penyelamatan	ekonomi
FS	S	P	Pel	Konj.	P ₂	O ₁
KS	FV	FN	FV	Konj.	V	N

Kalimat (32) memiliki dua klausa. Klausa pertama adalah *upaya perlindungan kesehatan masyarakat dilakukan paralel*. Klausa kedua adalah *penyelamatan ekonomi*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *dengan*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *upaya perlindungan* sebagai S diisi kategori FV, unsur *kesehatan masyarakat* sebagai P diisi kategori FN, dan unsur *dilakukan paralel* sebagai Pel diisi kategori FV. Pada klausa kedua terdiri dari unsur *penyelamatan* sebagai P₂ diisi kategori V dan unsur *ekonomi* sebagai O diisi kategori N.

Kalimat (32) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan cara. Ditandai konjungtor subordinatif *dengan*. Konjungtor subordinatif *dengan* kalimat (32) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *dengan* di awal kalimat diikuti oleh klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *dengan* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *secara*.

(33) Peletakan batu pertama dipasrahkan kepada Rasulullah **untuk** mencegah konflik. (MPMP, P.6, K.1)

Tabel 4. 34 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (33)

Kalimat	peletakan batu pertama	dipasrahkan	kepada Rasulullah	untuk	mencegah	konflik
FS	S	P	Pel ₁	Konj.	P ₂	O
KS	FN	V	FPrep	Konj.	V	N

Kalimat (33) memiliki dua klausa. Klausa pertama adalah *peletakan batu pertama dipasrahkan kepada Rasulullah*. Klausa kedua adalah *mencegah konflik*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *untuk*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *peletakan batu pertama* sebagai S diisi kategori FN, unsur *dipasrahkan* sebagai P diisi kategori V, dan unsur *kepada Rasulullah* sebagai Pel diisi kategori FPrep. Pada klausa kedua terdiri dari unsur *mencegah* sebagai P₂ diisi kategori V dan unsur *konflik* sebagai O diisi kategori N.

Kalimat (33) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan tujuan. Ditandai dengan konjungtor subordinatif *untuk*. Pada kalimat (33) konjungtor subordinatif *untuk* terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *untuk* di awal kalimat diikuti oleh klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *untuk* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *supaya*.

4.2.21 Fungsi Sintaksis Ket-S-P Konjungtor S-P

(34) Tahun lalu, kita tak pernah membayangkan **bahwa** awal 2020 akan begitu dramatis. (VBMB, P.1, K.1)

Tabel 4. 35 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (34)

Kalimat	tahun lalu	kita	tak pernah membayangkan	bahwa	awal 2020	akan begitu dramatis
FS	Ket. Waktu	S	P	Konj.	S ₂	P ₂
KS	FN	Pron.	FV	Konj.	FNum	FAdj.

Kalimat (34) memiliki dua klausa. Klausa pertama adalah *tahun lalu kita tak pernah membayangkan*. Klausa kedua adalah *awal 2020 akan begitu dramatis*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *bahwa*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *tahun lalu* sebagai Ket. Waktu diisi kategori FN, unsur *kita* sebagai S diisi kategori Pron, dan unsur *tak pernah membayangkan* sebagai P diisi kategori FV. Pada klausa kedua unsur *awal 2020* sebagai S₂ diisi

kategori FNum dan unsur *akan begitu dramatis* sebagai P₂ diisi kategori FAdj.

Kalimat (34) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan komplementasi. Ditandai konjungtor subordinatif *bahwa*. Konjungtor subordinatif *bahwa* terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor subordinatif *bahwa* di awal kalimat tidak lazim dan tidak tepat. Konjungtor *bahwa* tidak dapat disubstitusikan dengan konjungtor lainnya.

4.2.22 Fungsi Sintaksis S-P-Pel konjungtor P-Pel-Ket

(35) Perawat bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan keluarga **agar** tidak tertular Covid-19 saat di rumah. (GMPSP, P.2, K.2)

Tabel 4. 36 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (35)

kalimat	perawat	bertanggung jawab untuk menjaga	kesehatan keluarga	agar	tidak tertular	Covid-19	saat di rumah
FS	S	P	Pel	Konj	P ₂	Pel ₂	Ket. Waktu
KS	N	FV	FN	Konj	FV	FN	FN

Kalimat (35) memiliki dua klausa. Klausa pertama adalah *perawat bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan keluarga*. Klausa kedua adalah *tidak tertular Covid-19 saat di rumah*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *agar*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *perawat* sebagai S diisi kategori N, unsur *bertanggung jawab untuk menjaga* sebagai P diisi kategori FV, dan unsur *kesehatan keluarga* sebagai Pel diisi kategori FN. Pada klausa kedua terdiri dari unsur *tidak tertular* sebagai P diisi kategori FV, unsur *Covid-19* sebagai Pel₂ diisi kategori FN, dan unsur *saat di rumah* sebagai Ket. Waktu diisi kategori FN.

Kalimat (35) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan tujuan. Ditandai konjungtor subordinatif *agar*. Konjungtor subordinatif *agar* kalimat (35) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *agar* di awal kalimat diikuti klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *agar* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *guna*.

4.2.23 Fungsi Sintaksis S-P-O Konjungtor S-P-Pel

(36) Covid-19 telah membuka permasalahan terselubung **yang** selama ini dihadapi manusia modern. (SKBD, P.3, K.1)

Tabel 4. 37 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (36)

Kalimat	Covid-19	telah membuka	permasalahan terselubung	yang	selama ini	dihadapi	manusia modern
FS	S	P	O	Konj.	S ₂	P ₂	Pel
KS	N	FV	FN	Konj.	FN	V	FN

Kalimat (36) terdiri dari dua klausa. Klausa pertama adalah *covid-19 telah membuka permasalahan terselubung*. Klausa kedua adalah *selama ini dihadapi manusia modern*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *yang*. Pada klausa pertama terdiri dari unsur *covid-19* sebagai S diisi kategori N, unsur *telah membuka* sebagai P diisi kategori FV, dan unsur *permasalahan terselubung* sebagai O dan FN. Pada klausa kedua terdiri dari unsur *selama ini* sebagai S₂ diisi kategori FN, unsur *dihadapi* sebagai P₂ diisi kategori V, dan unsur *manusia modern* sebagai Pel₁ diisi kategori FN.

Kalimat (36) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan atributif. Ditandai konjungtor subordinatif *yang*. Permutasi konjungtor subordinatif *yang* tidak dapat dilakukan karena akan mempengaruhi makna dan esensi kalimat. Konjungtor subordinatif *yang* pada kalimat tersebut tidak bisa diganti dengan konjungtor subordinatif lainnya.

(37) Indonesia masih punya ruang **karena** selama ini ekonominya bersumber dari konsumsi rumah tangga. (MPB, P.3, K.1)

Tabel 4. 38 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (37)

Kalimat	Indonesia	masih punya	ruang	karena	selama ini ekonominya	bersumber	dari konsumsi rumah tangga
FS	S	P	O	Konj.	S ₂	P ₂	Pel
KS	N	FV	N	Konj.	FN	V	FPrep.

Kalimat (37) memiliki dua klausa. Klausa pertama adalah *Indonesia masih punya ruang*. Klausa kedua adalah *selama ini ekonominya bersumber dari konsumsi rumah tangga*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *karena*. Klausa pertama terdiri dari unsur *Indonesia* sebagai S diisi kategori N, unsur *masih punya* sebagai P diisi kategori FV, dan unsur *ruang* sebagai O diisi kategori N. Klausa kedua terdiri dari unsur *selama ini ekonominya* sebagai S₂ diisi kategori FN, unsur *bersumber* sebagai P₂ diisi kategori V, dan unsur *dari konsumen* sebagai Pel₁ diisi kategori FPrep.

Kalimat (37) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan sebab. Ditandai konjungtor subordinatif *karena*. Konjungtor subordinatif kalimat (37) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *karena* di awal kalimat diikuti klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *karena* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *sebab*.

4.2.24 Fungsi Sintaksis S-P-O-Pel Konjungtor S-P-O

(38) *Entrepreneurship* mensyaratkan pelaku menerapkan manajemen diri **sebab** ia tak mengandalkan sumber daya alam. (NE, P.3, K.1)

Tabel 4. 39 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (38)

Kalimat	entrepreneurship	mensyaratkan	pelaku	menerapkan manajemen diri	sebab	ia	tak mengandalkan	sumber daya alam
FS	S	P	O	Pel	Konj.	S ₂	P ₂	O ₂
KS	N	V	N	FV	Konj.	Pron	FV	FN

Kalimat (38) memiliki dua klausa. Klausa pertama adalah *entrepreneurship mensyaratkan pelaku menerapkan manajemen diri*. Klausa kedua adalah *ia tak mengandalkan sumber daya alam*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *sebab*. Klausa pertama terdiri dari unsur *entrepreneurship* sebagai S diisi kategori N, unsur *mensyaratkan* sebagai P₂ diisi kategori V, unsur *pelaku* sebagai O diisi kategori N, dan unsur *menerapkan manajemen diri* sebagai Pel diisi kategori FV. Klausa kedua terdiri dari unsur *ia* sebagai S₂ diisi kategori Pron, unsur *tak mengandalkan* sebagai P₂ diisi kategori FV, dan unsur *sumber daya alam* sebagai O₂ diisi kategori FN.

Kalimat (38) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan sebab. Ditandai konjungtor subordinatif *sebab*. Konjungtor subordinatif *sebab* kalimat (38) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *sebab* di awal kalimat diikuti klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *sebab* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *karena*.

4.2.25 Fungsi Sintaksis S-P-O-Pel Konjungtor P-O

(39) Payung hukum itu sebagai langkah maju Indonesia dalam mempersiapkan diri **untuk** melaksanakan vaksinasi. (VC, P.1, K.2)

Tabel 4. 40 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (39)

Kalimat	payung hukum itu	sebagai langkah maju	Indonesia	dalam mempersiapkan diri	untuk	melaksanakan	vaksinasi
FS	S	P	O	Pel ₁	Konj.	P ₂	O ₂
KS	FN	FN	N	FV	Konj.	V	N

Kalimat (39) memiliki dua klausa. Klausa pertama adalah *payung hukum itu sebagai langkah maju Indonesia dalam mempersiapkan diri*. Klausa kedua adalah *melaksanakan vaksinasi*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *untuk*. Klausa pertama terdiri dari unsur *payung hukum itu* sebagai S diisi kategori FN, unsur *sebagai langkah maju* sebagai P diisi kategori FN, unsur *Indonesia* sebagai O diisi kategori N, dan unsur *dalam mempersiapkan diri* sebagai Pel diisi kategori FV. Klausa kedua terdiri dari unsur *melaksanakan* sebagai P₂ diisi kategori V dan unsur *vaksinasi* sebagai O₂ diisi kategori N.

Kalimat 39) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan tujuan. Ditandai konjungtor subordinatif *untuk*. Konjungtor subordinatif *untuk* kalimat (39) terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *untuk* di awal kalimat diikuti klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *untuk* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *agar*.

4.2.26 Fungsi Sintaksis S-P-Pel Konjungtor Ket-P-O-Pel

(40) Sandiaga Uno diyakini berkemampuan memangkas dikotomi pemerintah swasta **yang** kerap kali menjadi kendali dalam koordinasi pariwisata. (HBPI, P.11, K.1)

Tabel 4. 41 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (40)

Kalimat	Sandiaga Uno	diyakini berkemampuan memangkas	dikotomi pemerintah swasta	yang	kerap kali	menjadi	kendali dalam koordinasi	pariwisata
FS	S	P	Pel ₁	Konj.	Ket.	P ₂	O ₁	Pel ₂
KS	FN	FV	FN	Konj.	FN	V	FN	N

Kalimat (40) memiliki dua klausa. Klausa pertama adalah *sandiaga uno diyakini berkemampuan memangkas dikotomi pemerintah swasta*. Klausa kedua adalah *kerap kali menjadi kendali dalam koordinasi pariwisata*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *yang*. Klausa pertama terdiri dari unsur *sandiaga uno* sebagai S diisi kategori FN, unsur *diyakini berkemampuan* sebagai P diisi kategori FV, unsur *dikotomi pemerintah swasta* sebagai Pel diisi kategori FN. Klausa kedua terdiri dari unsur *kerap kali* menjadi Ket. dan FN. Unsur *menjadi* sebagai P diisi kategori V, unsur *kendali dalam koordinasi* sebagai O diisi kategori FN, dan unsur *pariwisata* sebagai Pel₂ diisi kategori N.

Kalimat (40) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan atributif. Ditandai konjungtor subordinatif *yang*. Permutasi konjungtor subordinatif *yang* tidak dapat dilakukan karena akan mempengaruhi makna dan esensi kalimat. Konjungtor subordinatif *yang* pada kalimat tersebut tidak bisa diganti dengan konjungtor subordinatif lainnya.

4.2.27 Fungsi Sintaksis S-P-Pel Konjungtor P-O-Pel

(41) Pancasila memang dirumuskan sebagai kesepakatan **untuk** menjaga titik keseimbangan berbagai kekuatan. (PPP, P.2, K.1)

Tabel 4. 42 Analisis FS dan KS Kalimat Majemuk Bertingkat (41)

kalimat	panca sila	memang dirumuskan	sebagai kesepakatan	untuk	menjaga	titik keseimbangan	berbagai kekuatan
FS	S	P	Pel	Konj.	P ₂	O ₂	Pel
KS	N	FV	FN	Konj.	V	FN	FN

Kalimat (41) memiliki dua klausa. Klausa pertama adalah *pancasila memang sebagai kesepakatan*. Klausa kedua adalah *menjaga titik keseimbangan berbagai kekuatan*. Kedua klausa dihubungkan konjungtor *untuk*. Klausa pertama terdiri dari unsur *pancasila* sebagai S diisi kategori N, unsur *memang dirumuskan* sebagai P diisi kategori FV, dan unsur *sebagai kesepakatan* sebagai O diisi kategori FN. Klausa kedua terdiri dari unsur *menjaga* sebagai P₂ diisi kategori V, unsur *titik keseimbangan* sebagai O₂ diisi kategori FN, dan unsur *berbagai kekuatan* sebagai Pel diisi kategori FN.

Kalimat (41) adalah kalimat majemuk bertingkat makna hubungan tujuan. Ditandai konjungtor subordinatif *untuk*. Pada kalimat (41) konjungtor subordinatif *untuk* terletak di tengah kalimat. Permutasi konjungtor *untuk* di awal kalimat diikuti klausa terikat tidak mempengaruhi makna kalimat. Konjungtor *untuk* dapat disubstitusikan dengan konjungtor *supaya*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, analisis fungsi dan kategori sintaksis kalimat majemuk bertingkat pada opini JawaPos.com edisi 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Fungsi sintaksis kalimat majemuk bertingkat pada opini JawaPos.com edisi 2020 meliputi:

Pertama, (a) Fungsi S-P Konjungtor S-P; (b) Fungsi S-P Konjungtor S-P-Pel; (c) Fungsi S-P-Pel Konjungtor S-P-Pel; (d) Fungsi S-P Konjungtor Ket-S-P; (e) Fungsi S-P Konjungtor S-P-O; (f) Fungsi S-P-O Konjungtor S-P-O; (g) Fungsi S-P-Ket Konjungtor P-O-Pel-Ket; (h) Fungsi S-P Konjungtor P-O; (i) Fungsi S-P-O-Pel Konjungtor P-O-Pel; (j) Fungsi S-P Konjungtor P-O-Pel.

Kedua, (a) Fungsi S-P Konjungtor S-P-O-Pel; (b) Fungsi Ket-P-S Konjungtor P-O; (c) Fungsi P-O Konjungtor S-P-O; (d) Fungsi S-P-O Konjungtor S-P; (e) Fungsi Ket-S-P Konjungtor P-O; (f) Fungsi S-P-O Konjungtor S-P-O-Pel; (g) S-P-O Konjungtor P-O-Pel; (h) Fungsi S-P-Ket Konjungtor P-O; (i) Fungsi S-P-O Konjungtor P-O; (j) Fungsi S-P-Pel Konjungtor P-O;

Ketiga, (a) Fungsi Ket-S-P Konjungtor S-P; (b) Fungsi S-P-Pel Konjungtor P-Pel-Ket; (c) Fungsi S-P-O Konjungtor S-P-Pel; (d) Fungsi S-P-O-Pel Konjungtor S-P-O; (e) Fungsi S-P-O-Pel Konjungtor P-O; (f) Fungsi S-P-O-Pel Konjungtor Ket-P-O-Pel; (g) Fungsi S-P-Pel Konjungtor P-O-Pel.

2. Kategori sintaksis kalimat majemuk bertingkat pada opini JawaPos.com edisi 2020 meliputi:
 - a. Kategori subjek diisi oleh N, FN, Pron, FAdj, dan FNum;
 - b. Kategori predikat diisi oleh V, FV, FN, FPrep dan FAdj;
 - c. Kategori objek diisi oleh N dan FN;
 - d. Kategori pelengkap diisi oleh V, FV, N, FN, dan Fadj, FNum, FPrep;

e. Kategori keterangan diisi oleh FPrep, FN, Adv.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi dengan judul “Analisis Fungsi dan Kategori Sintaksis Kalimat Majemuk Bertingkat pada Opini JawaPos.com Edisi 2020”, ada beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi penulis, penulis menerima saran positif seperti memperbaiki kesalahan apabila ada dan kritik yang membangun seperti nasehat dari pembaca guna evaluasi kedepannya.
2. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi contoh fungsi dan kategori sintaksis sekaligus menjadi referensi saat mempelajari sintaksis. Dapat pula dijadikan referensi bacaan untuk peneliti lain yang hendak melakukan penelitian mengenai fungsi dan kategori sintaksis.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai fungsi dan kategori sintaksis khususnya di kalimat majemuk bertingkat. Dapat pula untuk memperdalam pengetahuan mengenai fungsi dan kategori sintaksis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, NG Tirto. 2020. "Kemerdekaan Belajar yang Terkoyak". www.jawapos.com, diakses pada 13 Januari 2021
- Ahmad, Tauhid. 2020. "Sasaran Bantuan Perlu Diperluas". www.jawapos.com, diakses pada 24 Januari 2021.
- Alwi, Hasan dkk. 2010. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Amriel, Reza Indragiri. 2020. "Demostran Masa Kini adalah Polisi Masa Depan". www.jawapos.com, diakses pada 24 Januari 2021.
- _____. 2020. "Demonstran Masa Kini adalah Polisis Masa Depan". www.jawapos.com, dikases pada 25 Januari 2021.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Askandar, Brahmana. 2020. "Kembali ke Sekolah di Tengah Pandemi". www.jawapos.com, diakses pada 13 Januari 2021.
- _____. "Tantangan Buka Sekolah Saat Pandemi". www.jawapos.com, diakses pada 25 Januari 2021.
- Asmara, Dani. 2020. "Ironi Hari Anti Korupsi". www.jawapos.com, diakses pada 24 Januari 2021.
- Baskoro, Ari. 2020. "Tempat-Tempat Berisiko Penularan Covid-19". www.jawapos.com, diakses pada 13 Januari 2021.
- Biyanto. 2020. "Luas dan Luwes dalam Beragama". www.jawapos.com, diakses pada 13 Januari 2021.
- _____. 2020. "Akhlik Kepemimpinan". www.jawapos.com, diakses pada 25 Januari 2021.
- Boy, Pradana. 2020. "Jalan Panjang Islamofilia". www.jawapos.com, diakses pada 24 Januari 2021.
- Chaer, Abdul. 2009. *Sintaksis Bahasa Indonesia: Pendekatan Proses*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2014. *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Damaianti, Vismaia S. dan Nunung Sitaresmi. 2005. *Sintaksis Bahasa Indonesia*. Bandung: Univesitas Pendidikan Bahasa Indonesia.
- Della, Dinda Aisyahara. 2020. "Analisis Kalimat Majemuk Setara pada Cerpen Nayla Karya Djenar Maesa Ayu". *SENASBASA*. Volume 4, Oktober 2020. Halaman 135-140.
- Djafar, Hamsiah. 2017. "Penggunaan Kalimat Majemuk dalam Karya Tulis Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar". *Jurnal al-Kalam*. Volume IX, nomor 2, Desember 2017. Halaman 219-228.
- Fatima, Wa. 2016. Kemampuan Menentukan Fakta dan Opini Dalam Teks Tajuk Rencana Koran Kompas Siswa Kelas XI IPA SMA NEGERI 7 Kendari. *Jurnal Bastra*. Volume 1, nomor 2, Juli 2016. Halaman 1-18.
- Guyanie, Gugun. 2020. "Menyoal Dana Awal Kampanye Nol Rupiah". www.jawapos.com, diakses pada 25 Januari 2021.
- Hasan. 2014. "Relasi Temporal antarklausa dalam Kalimat Majemuk Bertingkat pada Koran Kompas Periode September-Oktober 2014". *Tesis*. Solo: UMS.
- Husada, Dominicus. 2020. "Menerjemahkan Hasil Pertama Vaksin Covid-19". www.jawapos.com, diakses pada 24 Januari 2021.
- Kasali, Rhenald. 2020. "Virus Bermutasi Manusia Beradaptasi". www.jawapos.com, diakses pada 25 Januari 2021.
- KBBI V 0.4.0 Beta (40). 2016-2020. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Khunaidi, Muh. Abid. 2020. "Dokter Nasionalis Tantangan Profesi di Tengah Pandemi". www.jawapos.com, diakses pada 24 Januari 2021.
- Kurniawan, Eka. 2020. "Ditipu Seragam". www.jawapos.com, diakses pada 25 Januari 2021.
- Lupiyanto, Ribut. 2020. "Memutus Rantai Politik Gentong Babi". www.jawapos.com, diakses pada 13 Januari 2021.
- Madasari, Okky. 2020. "Wabah dan Ujian Nalar". www.jawapos.com. Diakses pada 13 Januari 2021.
- Malik, Candra. 2020. "Nahdlatul Entrepeneur". www.jawapos.com, diakses pada 24 Januari 2021.
- Marijan, Kacung. 2020. "Korona, Pemerintah, dan Era Digital". www.jawapos.com, diakses pada 13 Januari 2021.
- Munjid, Achmad. 2020. "Perlukah Pembinaan Pancasila". www.jawapos.com, diakses pada 25 Januari 2021.

- Naibaho, Hastuti. 2020. "Etika Tenaga Penjualan dan Persepsi Konsumen Terhadap Perusahaan". www.jawapos.com, diakses pada 13 Januari 2021.
- Nasronudin, SpPD-KPTI FINASIM. 2020 "RS Harus Siap, Individu Harus Jaga Stamina". www.jawapos.com, diakses pada 13 Januari 2021.
- Parawansa, Khofifah Indar. 2020. "Menguatkan Persatuan dan Menghormati Perbedaan". www.jawapos.com, diakses pada 13 Januari 2021.
- Pranawati, Rita. 2020. "Pembelajaran Daring untuk Siswa". www.jawapos.com, diakses pada 13 Januari 2021.
- Probokusumo, Jagaddhito. 2020. "Kebangkitan Nasional Melawan Virus Korona". www.jawapos.com, diakses pada 13 Januari 2021.
- Rahayu, Aristiana P. 2020. "Menghadirkan Kembali Kasih Ibu". www.jawapos.com, diakses pada 13 Januari 2021.
- Rahmadani, Indah Cahya, F.X Samingin, Theresia Pinaka Ratna N.H. 2019. "Kalimat Majemuk dalam Judul Serial Sinetron AZAB di Indosiar dan Implementasi Pembelajarannya di SMA". *Jurnal Repetisi: Riset Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Volume 2, nomor 2, September 2019. Halaman 136-181.
- Said, M.H. Abdullah. 2020. "Vaksin Covid-19". www.jawapos.com, diakses pada 24 Januari 2021.
- Saparini, Hendra. 2020. "Memaksimalkan Peluang untuk Berlari". www.jawapos.com, diakses pada 25 Januari 2021.
- Satrya, Dewa Gde. 2020. "Kesejahteraan Bersama Di Taman Nasional Komodo". www.jawapos.com, diakses pada 24 Januari 2021.
- _____. 2020. "Harapan Baru Pariwisata Indonesia". www.jawapos.com, diakses pada 25 Januari 2021.
- Setyorakhmadi, Kardono. 2020. "Wawancara Kursi Kosong Najwa Shihab: Kegagalan Jurnalistik?". www.jawapos.com, diakses pada 13 Januari 2021.
- Soesatyo, Bambang. 2020. "Memupuk Harapan Membangun Kepastian". www.jawapos.com, diakses pada 24 Januari 2021.
- Sudaryanto. 2018. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyarto, Ryan. 2020. "Siasat Kebudayaan Baru Dari Desa", www.jawapos.com, diakses pada 25 Januari 2021.
- Susandhika, I Gusti Ngurah Mayun, I Ketut Darma Laksana, I Nyoman Suparwa. 2016. "Fungsi, Kategori, dan Peran Sintaksis dalam Talk Show Indonesia *Lawyers Club* di TV One". *Jurnal Linguistika*. Volume 23, nomor 44, Maret 2016. Halaman 20-36.
- Syafruddin. 2017. "Relasi Temporal Antarkalusa dalam Kalimat Majemuk Bertingkat pada Koran AMANAH". *Tesis*. Makassar: UNM.
- Utomo, Dwikora Novembri. 2020. "Sisi Lain Pandemi Covid-19 Momentum Berbenah Layanan Kesehatan". www.jawapos.com, diakses pada 25 Januari 2021.
- Yamani, Laura Navika. 2020. "PSBB Ketat Kembali, Perlukah?". www.jawapos.com, diakses pada 25 Januari 2021.
- Yusuf, AH. 2020. "Gangguan Mental Perawat Saat Pandemi". www.jawapos.com, diakses pada 25 Januari 2021.
- Wismanto, Agus dan Ulumuddin, Arisul. 2018. *Penulisan Kreatif*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.
- www.jawapos.com/about-us, diakses pada 22 Februari 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

1. Korona, Pemerintah, dan Era Digital

Tabel 1. 1 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	1. Salah satu upaya untuk mengendalikan pandemi korona adalah melalui instrumen ''menjaga jarak''
	2. Instrumen ini telah diterapkan banyak negara meski melalui strategi yang berbeda-beda.
	3. Yang terpenting adalah adanya seruan kepada masyarakat agar melakukan ''social distancing'' agar sebelum menyebar, virus itu lebih dahulu mati.
	4. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membicarakan strategi mana yang paling efektif di antara keduanya.
	5. Di dalam diri mereka terdapat kesadaran bahwa hidup soliter secara fisik dalam situasi itu memang harus dilakukan karena itu memang membahayakan semua pihak.
	6. Lihatlah, sejumlah pelajar dan mahasiswa yang mengikuti pelajaran dan perkuliahan secara online karena perkuliahan offline dihentikan.
	7. Hal itu tidak lepas dari realitas bahwa masyarakat kita belum mampu melepaskan ikatan-ikatan fisik di tengah-tengah situasi yang justru mengharuskan mereka melepaskannya untuk sementara.
	8. Situasi semacam itu tentu tidak bisa berlanjut, karena pandemi korona dan implikasinya sangat luar biasa.
	9. Pelibatan itu juga ditujukan untuk meredakan jatuh bangkrutnya para produsen.

2. Tempat-tempat berisiko Penularan Covid-19

Tabel 1. 2 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	10. Hal itu bukan sesuatu yang mengherankan karena Covid-19 merupakan penyakit baru
	11. Para ahli tertantang untuk mengungkap banyak hal, terutama untuk bisa menjawab bagaimana SARS-CoV-2 yang merupakan virus penyebab Covid-19 bisa ditularkan antarmanusia.
	12. Diperlukan suatu kecerdasan cara berpikir dan logika agar seseorang bisa mendeteksi keberadaan mereka, apakah aman atau tidak dari kemungkinan terjadinya risiko penularan tersebut.
	13. Informasi terdahulu yang sudah banyak dipahami masyarakat adalah tentang cara penularan virus ini melalui droplet.
	14. Ketaatan memakai masker dengan benar merupakan tantangan bagi siswa usia sekolah, apalagi siswa sekolah dasar
	15. Upaya mencegah penularan sangat penting karena data menunjukkan sebagian besar usia muda bila terkena Covid-19 tidak menunjukkan gejala.
	16. Diperlukan persiapan yang sangat matang dari sisi siswa, orang tua murid, guru, sarana dan prasarana, hingga yang terpenting persiapan budaya baru, budaya hidup sehat.
	17. Perhitungan matematis tersebut diperlukan untuk mempertimbangkan suatu kebijakan/aturan yang bisa diterapkan agar seseorang terhindar dari suatu penularan.

3. Demonstran Masa Kini adalah Polisi Masa Depan

Tabel 1. 3 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	18. Situasi unjuk rasa makin penuh tantangan karena masyarakat demonstran yang dihadapi Polri adalah kaum muda
	19. Dengan kata lain, paparan informasi tentang polisi hari-hari ini berpotensi meninggalkan kesan yang tidak begitu positif di benak kaum milenial.
	20. Tetapi juga bagaimana menciptakan institusi kepolisian yang tetap menarik sehingga para anggotanya mau terus berkarir di dalamnya.
	21. Situasi di Indonesia masih perlu ditelaah secara lebih saksama hingga beberapa waktu ke depan.
	22. Pemikiran tersebut menjadi dasar untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa posisi paling strategis di kepolisian adalah pos-pos penugasan yang memungkinkan personel berinteraksi seluas dan selangsung mungkin dengan masyarakat.
	23. Mereka harus dididik agar tumbuh menjadi manusia pembelajar.
	24. Begitu titah sang waktu agar Polri tidak kekurangan orang sekaligus bisa terus menjawab tantangan zaman

4. Sisi Lain Pandemi Covid-19 Momentum Berbenahnya Layanan Kesehatan oleh Dwikora Novembri U.

Tabel 1. 4 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	25. Tak sedikit masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri karena menganggap pelayanan serta kualitas pengobatan di luar negeri lebih unggul.
	26. Alasan lainnya bisa berupa keinginan pasien untuk mencari <i>second opinion</i> atas penyakitnya atau anggapan bahwa akomodasi rumah sakit luar negeri lebih menyenangkan.

	27. Pemerintah justru harus melihat ini sebagai momentum untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik daripada pelayanan di luar negeri.
	28. Dukungan pemerintah di sektor ini juga penting dalam memberikan regulasi yang mengatur harga alat-alat kesehatan sehingga mampu dimiliki semua rumah sakit di Indonesia.
	29. Pada awal September, masyarakat dikejutkan dengan berita tentang larangan kunjungan warga negara Indonesia (WNI) ke 59 negara.
	30. Jenis pengobatan yang dicari juga bervariasi.
	31. Larangan kunjungan WNI ke beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia tentu merugikan masyarakat yang ingin mencari pengobatan ke luar negeri.

5. Luas dan Luwes dalam Beragama

Tabel 1. 5 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	32. Dalam suatu kesempatan, almarhum Abdul Malik Fadjar pernah mengatakan bahwa beragama itu seharusnya luas dan luwes.
	33. Karakter luas dan luwes ini penting karena setiap umat beragama menghadapi tantangan yang sama, yakni pluralitas agama dan paham keagamaan.
	34. Pandangan keagamaan umat menjadi lebih terbuka sehingga terbangun kesadaran terhadap pentingnya menghargai perbedaan.
	35. Dalam kehidupan keberagamaan yang pluralistis, pandangan ini tentu sangat berbahaya karena dapat menghadirkan teror bagi orang atau kelompok lain.

Kalimat	36. Bermula dari sikap memonopoli kebenaran inilah seseorang atau kelompok mudah menyalahkan, bahkan mengafirkan mereka yang berbeda dengan dirinya.
	37. Dengan pemahaman ini, Muhammad Asad seakan ingin menegaskan bahwa perbedaan yang menghadirkan rahmat itu terjadi jika dialami mereka yang berwawasan luas.
	38. tindakan anarkistis itu dikatakan bagian dari dakwah untuk memerintah pada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

6. Menghadirkan Kembalinya Kasih Ibu

Tabel 1. 6 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	39. Seolah sebagai pesan abadi bahwa ibu adalah sosok yang penuh kelembutan, kasih sayang, dan selalu siap berkorban untuk anak-anaknya.
	40. Survei juga menemukan bahwa 21 persen ayah tidak pernah mendampingi anak belajar.
	41. Temuan lainnya, hanya 33,8 persen orang tua yang pernah mengikuti pelatihan atau memperoleh informasi tentang pengasuhan (parenting).
	42. Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung hampir setahun menjadi ujian besar bagi negara sekaligus masyarakat hingga dalam tatanan ruang terkecil, yaitu keluarga.
	43. Solidaritas sosial menjadi penting karena sebagai titik tumpu bukti kekuatan masyarakat dan bagaimana menghadapi permasalahan.

7. Pembelajaran Daring untuk Siswa

Tabel 1. 7 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	44. Tidak semua anak dapat menjalani secara konsisten pembelajaran daring karena berbagai keterbatasan.
	45. Generasi yang sangat lekat dan akrab dengan gawai atau teknologi digital.
	46. Selama ini mungkin anak-anak belum sepenuhnya menyadari bahwa era industri 4.0 membuat efisiensi waktu dan tenaga kerja.
	47. Pembelajaran tatap muka dengan bantuan teknologi internet.
	48. Peran guru berubah, tapi peran secara fisik berkurang karena penggunaan berbagai media pengajaran
	49. Guru juga akan berusaha agar semua siswa dapat mengerjakan tugas tanpa harus membebani anak-anak dan tetap memperhatikan kondisi tiap-tiap anak.
	50. Sebelum era pembelajaran jarak jauh menggunakan sistem daring, banyak orang tua yang memiliki kekhawatiran ketika anaknya memegang gawai.
	51. Saat ini anak-anak memanfaatkan gawai dan akses internet untuk proses pembelajaran.

8. Etika Tenaga Penjual dan Persepsi Konsumen terhadap Perusahaan

Tabel 1. 8 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	52. Pada penelitian mereka, kuesioner dibagikan pada tenaga penjual untuk mendapatkan informasi tentang persepsi mereka terhadap sistem imbalan di tempat mereka bekerja dan niat berperilaku etis.
	53. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sales reward systems secara signifikan mempengaruhi etika tenaga penjual.
	54. Konsumen akan memiliki persepsi positif akan perusahaan jika tenaga penjual menunjukkan perilaku

	etis dalam menawarkan/menjual produk.
	55. Perusahaan penting untuk memberikan perhatian terhadap persepsi konsumen karena persepsi konsumen akan menentukan perilaku konsumen terhadap perusahaan, seperti pembelian produk.
	56. Ketika konsumen memiliki persepsi negatif terhadap perusahaan maka konsumen akan dapat memutuskan untuk tidak membeli produk/jasa perusahaan.
	57. Merujuk pada hasil penelitian ini, penulis menyarankan kepada perusahaan agar berhati-hati dalam mendesain sistem imbalan untuk tenaga penjual agar tidak memberikan peluang terbentuknya perilaku tidak etis.
	58. Sistem imbalan yang sangat menarik bagi tenaga penjual seperti pedang bermata dua.
	59. Satu sisi dapat memotivasi tenaga penjual untuk mencapai target penjualan

9. Jalan Panjang Islamofilia

Tabel 1. 9 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	60. Sebagai orang Prancis yang mengetahui Indonesia (dan Islam Indonesia) secara mendalam, ia berniat mendirikan sebuah pusat kebudayaan Indonesia di pinggiran Prancis.
	61. Dalam diskusi itu, kami berdua akhirnya sampai kepada kesimpulan jika dipraktikkan dengan ideal, sesungguhnya ada titik temu atau paralelisme antara nilai-nilai Islam dengan praktik atau kebiasaan masyarakat Prancis dan Eropa.
	62. Laicite di Prancis merupakan pengenyahan agama dari ruang publik yang melibatkan kebijakan resmi negara.
	63. Dengan latar belakang seperti ini, tidaklah mengherankan jika laicite sering dianggap sebagai

	versi sekularisme yang antiagama.
	64. Cinta diawali dengan kedekatan dan kedekatan pastilah bermula dari mengenal.

10. Memutus Rantai Politik Gentong Babi

Tabel 1. 10 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	65. Kepolisian dan kejaksaan dapat turun tangan jika mengarah pada tindak pidana.
	66. Para tuan pemilik budak kala itu memberikan daging babi yang telah diasinkan kepada budak kulit hitam untuk diperebutkan.
	67. Masyarakat mesti memahami bahwa politik gentong babi hakikatnya adalah melecehkan dan menghina
	68. Kepolisian dan kejaksaan dapat turun jika mengarah pada tindak pidana
	69. Pembagian bantuan hanya dapat diterima jika tanpa syarat dan tanpa pemotongan.
	70. Masyarakat juga mesti melek politik guna membentengi diri dari politisasi dana yang digelontorkan pemerintah
	71. Kontribusi komponen ini ditunggu untuk mencerahkan pendidikan politik masyarakat serta menggalang kekuatan melawan politik gentong babi

11. Wabah dan Ujian Nalar oleh Okky Madasari.

Tabel 1. 11 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	72. Kebijakan itu dikeluarkan sesaat setelah WHO meningkatkan status wabah Wuhan sebagai bahaya Internasional.
Kalimat	73. Dalam situasi ini, bisa dimengerti jika kita memiliki kecurigaan bahwa seseorang berpotensi menyebarkan virus.
	74. Di Italia, seorang perempuan berteriak kepada seorang

	<p>pemuda ras Tionghoa dan mengatakan <i>bahwa</i> si pemuda akan menularkan virus.</p>
	<p>75. Di Jepang, toko-toko memasang tulisan <i>yang</i> melarang orang Tiongkok masuk.</p>

12. Ironi Hari Anti Korupsi

Tabel 1. 12 kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	<p>76. Namun ironis, di Hari Antikorupsi Internasional, negeri ini belum berbangga hati <i>karena</i> masih termasuk negara korup di dunia.</p>
	<p>77. Menurut data, <i>sejak</i> masa reformasi, tidak kurang dari 82 politikus serta 361 kepala daerah (343 bupati/wali kota dan 18 gubernur) telah terjerat lembaga antirasuah itu.</p>
	<p>78. Nyaris tidak ada instansi <i>yang</i> bersih dari korupsi di negeri ini.</p>
	<p>79. Hanya tegas <i>untuk</i> orang kecil dan tidak berdaya menjerat para penguasa serta pengusaha.</p>

13. Sasaran Bantuan Perlu Diperluas

Tabel 1. 13 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	<p>80. Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang masa restrukturisasi kredit <i>hingga</i> 31 Maret 2022 untuk berjaga-jaga.</p>
	<p>81. Yang seperti itu akan menjadi capital expenditure atau investasi <i>untuk</i> penguatan permodalan dalam fase transisi saat ini.</p>
	<p>82. Misalnya mempercepat pengadaan vaksin <i>hingga</i> distribusinya harus tepat sasaran</p>
	<p>83. Ada net interest margin <i>yang</i> masih diminta tinggi sekitar 4 persen.</p>
	<p>84. Mayoritas meminta bantuan Singapura <i>karena</i> bunganya lebih rendah. Akibatnya, utang luar negeri membengkak.</p>

14. Kebangkitan Nasional Melawan Virus Korona

Tabel 1. 14 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	85. Lebih dari 300.000 orang telah terbunuh <i>sejak</i> Covid-19 menyebar ke seluruh dunia.
	86. Dokter saat ini lebih banyak berperan sebagai agent of treatment <i>karena</i> memang kebutuhan kuratif saat pandemi lebih diperlukan masyarakat.
	87. Ini merupakan suntikan moral dan intelektual kepada para pengambil keputusan <i>agar</i> mempunyai dasar saintifik dan etis dalam menanggulangi pandemi supervirus ini.
	88. STOVIA adalah sekolah <i>untuk</i> pendidikan dokter pribumi di Batavia pada zaman kolonial Belanda
	89. Mereka percaya <i>bahwa</i> pendidikan bumiputra merupakan kunci masa depan Indonesia.
	90. Dokter mengabdikan profesinya <i>tanpa</i> terpengaruh pertimbangan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan kedudukan sosial.

15. Memperkuat Persatuan dan Menghormati Perbedaan.

Tabel 1. 15 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	91. Bisa jadi, ada hikmah <i>ketika</i> Hari Sumpah Pemuda berimpitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW.
	92. Sumpah Pemuda mengingatkan <i>untuk</i> tetap menjaga serta memperkuat persatuan dan kesatuan.
	93. Kala itu orang tua malu <i>ketika</i> memiliki anak perempuan.
	94. Peletakan batu dipasrahkan kepada Rasulullah, <i>untuk</i> menghentikan konflik.
	95. Itu dilakukan <i>untuk</i> mewujudkan satu kekuatan bersama.
	96. Tiga pernyataan tersebut menjadi amanah <i>yang</i> harus

	dijaga hingga sekarang.
--	-------------------------

16. Ditipu Seragam

Tabel 1. 16 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	97. Seorang fans dengan bangga memakai jersey kesayangannya, tentu ingin menjadi bagian dari identitas klub tersebut.
	98. Orang lain bisa menganggapnya sebagai ulama ketika seseorang mengenakan jubah putih denga serban.
	99. Bayangkan hamparan padang rumput sabana yang kering menyembunyikan tubuh singa.
	100. Tertipu seragam itu biasa karena ia memberi peluang untuk itu.

17. RS Harus Siap, Individu Harus Jaga Stamina

Tabel 1. 17 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	101. Saat ini dunia dihebohkan kehadiran strain (tipe) virus baru yang disebut novel coronavirus (nCoV).
	102. Selain itu, harus ditata kelola dengan cepat dan tepat agar tidak terjadi komplikasi.
	103. Setiap rumah sakit harus tanggap dan mempersiapkan diri untuk mengantisipasi dan melakukan tata kelola ketika menghadapi pasien terinfeksi nCoV.
	104. Hingga kini, belum ada vaksin untuk mencegah virus korona.

18. PSBB Ketat Kembali, Perlukah?

Tabel 1. 18 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	105. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi kebijakan rem darurat ketika lonjakan kasus Covid-19 terjadi di Indonesia.
	106. Perbaikan sirkulasi udara dalam gedung hendaknya menjadi pertimbangan untuk meminimalkan persebaran.
	107. Pengembangan kandidat vaksin dan obat masih terus dilakukan untuk mendapatkan vaksin yang efektif dan aman dalam waktu cepat.
	108. Jika disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan ketat belum dapat dilakukan, dipastikan peningkatan kasus akan terus terjadi.
	109. New normal menuntut kita untuk hidup berdampingan dengan korona.
	110. Ini harus diperbaiki karena masyarakat patron-client membutuhkan cermin atau contoh dalam penerapan keseharian.
	111. Bukan kucing-kucingan untuk mencari celah lemahnya aturan yang ada, terutama aspek pengawasan.
	112. Ketaatan dan kedisiplinan itu akan semakin tinggi ketika pemerintah konsisten dalam laku teks dan gerak dalam setiap kesempatan.

19. Menerjemahkan Hasil Pertama Vaksin Covid-19

Tabel 1. 19 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	113. Perusahaan pembuat sedang mengembangkan kemasan khusus untuk memperpanjang usia vaksin dalam suhu lazim tersebut.
---------	---

Kalimat	114. Efikasi vaksin hanya akan dinilai dalam tujuh hari setelah dosis kedua yang relatif pendek dibandingkan vaksin lain.
	115. perusahaan tidak bersedia karena belum semua tahap terselesaikan.
	116. Ini berarti perusahaan dapat merencanakan tahap penelitian menurut versi mereka tanpa persetujuan pemerintah.

20. Kemerdekaan Belajar yang Terkoyak

Tabel 1. 20 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	117. Sepertinya akal manusia menjadi kekuatan mahadahsyat karena mampu menciptakan iptek yang canggih.
	118. Manusia lupa bahwa di atas akal, masih ada Sang Maha Pencipta Akal.
	119. Harus ada analisis kesehatan yang cermat dan dalam untuk menghindari korban.
	120. Sekolah terpaksa/dipaksa untuk menyiapkan infrastruktur PJJ, termasuk jaringan internet.
	121. Pendidikan holistik adalah pendidikan yang mampu menumbuhkembangkan bukan hanya kecerdasan intelektual.
	122. Pengajaran bisa digantikan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

21. Wawancara Kursi Kosong Najwa Shihab: Kegagalan Jurnalis?

Tabel 1. 21 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	123. Ada sebuah paragraf terakhir di sebuah status Facebook yang membuat saya begitu gagal paham.
---------	--

	124. Dia meminta Menkes Terawan hadir untuk menjawab keresahan publik yang diserapnya.
Kalimat	125. Najwa sudah benar ketika dia dengan medianya mengundang Terawan untuk menjelaskan
	126. Dia tidak gagal sama sekali ketika Terawan tidak datang

22. Dokter Nasionalis Tantangan Profesi di Tengah Pandemi

Tabel 1. 22 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	127. Mereka berupaya meningkatkan diri menuju kedudukan intelektual, sosial, ekonomi, politik, budaya, serta gender yang lebih layak dan menjadi bagian yang integral dalam tata kehidupan masyarakat.
	128. Mengatasi pandemi covid-19 ini, perlu penekanan pada biosecurity dan upaya untuk mencegah persebaran penyakit menular.
	129. Bahkan saat ini sudah masuk dalam kondisi gawat darurat (emergensi) yang harus segera diresusitasi untuk dapat mempertahankan hidupnya.
	130. IDI mempunyai tanggung jawab yang besar di usia yang ke-70 tahun untuk mewujudkan dokter nasionalis.

23. Virus Bermutasi Manusia Beradaptasi

Tabel 1. 23 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	131. Tahun lalu kita tak pernah membayangkan bahwa awal 2020 akan begitu dramatis
	132. Pengalaman puluhan tahun mendidik mahasiswa dan belasan tahun mengembangkan PAUD/TK untuk kegiatan sosial mengantarkan saya pada satu kesimpulan.

Kalimat	133. Neuroscientist menyebutnya brain plasticity, bahwa otak manusia masih bisa berkembang meski sudah menginjak usia dewasa. Saya menyebutnya adaptasi.
	134. Dulu, banyak orang yang tak bisa mengonsumsi coklat karena harganya yang sangat mahal
	135. Ketika gelombang disrupsi terjadi, pelaku-pelaku usaha harus beradaptasi
	136. Sebagian lagi mulai menanam sayuran dengan sistem hidroponik di pekarangan rumah yang luasnya terbatas.
	137. Pelaku usaha perhotelan yang sepi karena terhentinya aktivitas turisme bisa memodifikasi layanan untuk isolasi mandiri dan sebagainya.

24. Gangguan Mental Perawat saat Pandemi

Tabel 1. 24 Kalimat Majemuk Opini JawaPos.com

Kalimat	138. Perawat bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan keluarga agar tidak tertular Covid-19 saat di rumah.
	139. Perubahan suasana mental emosional merupakan sebuah gangguan yang berdampak pada gangguan fisik dan jarang disadari oleh penderitanya.
	140. Perawat saat terganggu mental emosionalnya tidak akan datang ke faskes untuk berobat karena mereka tidak menyadari mengalami gangguan ini.
	141. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penularan secara masif dan sangat membantu tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk lebih efektif menangani pasien Covid-19.

Kalimat	142. Di sisi lain, ini menjadi koreksi bersama terhadap pembentukan kurikulum pendidikan perawat di masa depan bahwa pengendalian emosional menjadi fundamental dalam teori dan praktik keperawatan.
	143. Jagalah perilaku agar tetap selaras dan seimbang dengan lingkungan.

25. Siasat Kebudayaan Baru di Desa

Tabel 1. 25 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	144. Covid-19 telah membuka permasalahan terselubung yang selama ini dihadapi manusia modern.
	145. Pandemi menyadarkan kita bahwa industri kesehatan yang dianggap canggih pun ternyata gagal melindungi warga.
	146. Masyarakat kehilangan sumber pekerjaan karena hilangnya aktivitas ekonomi.
	147. Covid-19 menyadarkan bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan.
	148. Pandemi bagi desa adalah kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih bermartabat, berkeadilan, dan berkesetaraan.

26. Penegakan Protokol Kesehatan

Tabel 1. 26 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	149. Upaya perlindungan kesehatan rakyat dilakukan paralel dengan penyelamatan ekonomi.
	150. Peraturan ini dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang mengatur tentang PSBB dan ditetapkan oleh menteri kesehatan.

Kalimat	151. Presiden menegaskan bahwa pencegahan dan penindakan terhadap potensi-potensi kegiatan yang melanggar protokol kesehatan harus ditegakkan sejak dini.
	152. Di sisi lain, pembentukan perda juga akan lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat karena ada pelibatan dan partisipasi publik di dalamnya.

27. Tantangan Buka Sekolah saat Pandemi

Tabel 1. 27 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	153. Hal ini menunjukkan bahwa usia anak sekolah tetap mempunyai risiko terpapar Covid-19.
	154. Sekolah tatap muka dilaksanakan bila telah betul-betul siap, tidak bisa memakai prinsip trial and error karena menyangkut kesehatan.
	155. Masker diturunkan hanya menutup mulut tanpa menutup hidung.
	156. Memakai face shield tanpa masker tidak efektif mencegah penularan Covid-19
	157. Jaga jarak 1–2 meter dapat mengurangi transmisi virus karena droplet yang keluar tidak mencapai orang lain, jatuh ke bawah akibat gravitasi.

28. Memkasimalkan Peluang untuk Berlari

Tabel 1. 28 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	158. Indonesia masih punya ruang karena selama ini ekonominya bersumber dari konsumsi rumah tangga.
	159. Kebijakan pemerintah yang tidak memukul rata PSBB di semua wilayah di Indonesia juga tepat.

Kalimat	160. Yang harus diingat, Indonesia memiliki peluang untuk tidak terjadi 'hard landing'.
	161. Penyebabnya, tentu shock pada ekonomi yang dampaknya membuat realisasi pertumbuhan ekonomi menjadi minus

29. Memupuk Harapan Membangun Kepastian

Tabel 1. 29 Kalimat Mejemuk Bertingkat jawaPos.com

Kalimat	162. vaksinasi Covid-19 diberikan dua dosis per orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan (antibodi).
	163. Di urutan berikutnya adalah peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang jumlahnya 86,6 juta orang lebih.
	164. Wajar jika semua elemen masyarakat berharap skenario pemerintah sebagaimana tergambar dari Perpres No.99/2020 itu bisa diwujudkan, karena dari situ bisa dibangun kepastian baru.

30. Nahdlatul Entrepreneur

Tabel 1. 30 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	165. wirausaha bisa dikembangkan dengan berpegang teguh pada empat pilar karakter utama Muhammad SAW.
	166. Entrepreneurship mensyaratkan pelaku menerapkan manajemen diri sebab ia tak mengandalkan sumber daya alam.
	167. Entrepreneurship oleh kalangan santri, yang hari ini disebut santripreneurship, bukanlah sesuatu yang sama sekali baru di dunia pesantren.

31. Kesejahteraan Bersama di Taman Nasional Komodo

Tabel 1. 31 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	168. Benang merah pertentangan dari gagasan untuk memperkuat dan menumbuhkan kualitas destinasi berbasis ekowisata tersebut terletak pada beberapa hal.
	169. pembangunan dilakukan di zona khusus yang tidak mengganggu ekosistem
	170. Wacana itu dipicu fakta bahwa setiap tahun binatang mengalami penderitaan karena eksploitasi dan penganiayaan.
	171. Terkait hal tersebut, perlulah diingat kembali lima kebebasan binatang (the five freedoms) untuk meminimalisasi praktik kekerasan atas satwa.
	172. Kiranya, pada momen Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional ini, ditemukan benang merah yang menyejahterakan masyarakat dan ekosistem di area TNK menyertai pembangunan Jurassic Park.

32. Vaksin Covid-19

Tabel 1. 32 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	173. Payung hukum itu sebagai langkah maju Indonesia dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan vaksinasi
	174. Uji klinis fase ketiga itu merupakan pengembangan dari calon vaksin yang diproduksi Sinovac Biotech Ltd, perusahaan farmasi Tiongkok.
	175. Kerja sama dengan lembaga/badan internasional untuk pengadaan vaksin hanya terbatas untuk penyediaan vaksin Covid-19
	176. Tiongkok menjadi satu-satunya negara di dunia yang telah menjalankan program vaksinasi Covid-19 sejak Juli 2020 terhadap beberapa kelompok.

33. Kembali Sekolah di Tengah Pandemi

Tabel 1. 33 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	177. Hal itu menunjukkan bahwa para orang tua masih khawatir sekolah mempunyai risiko penularan.
	178. Terinfeksi virus SARS-CoV-2 mungkin tidak menimbulkan gejala pada usia muda, tapi menjadi masalah ketika siswa tersebut menularkan ke orang tuanya, kakek-neneknya, dan saudaranya di rumah
	179. Diperlukan persiapan yang sangat matang dari sisi siswa, orang tua murid, guru, sarana dan prasarana, hingga yang terpenting persiapan budaya baru, budaya hidup sehat.
	180. Hal itu merupakan tantangan tersendiri bagi sekolah, mengingat kapasitas lahan yang terbatas dan jumlah murid yang ada.

34. Harapan Baru Pariwisata Indonesia

Tabel 1. 34 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	181. Sekaligus, spirit kementerian pariwisata selayaknya diarahkan untuk mendorong perjalanan wisata di luar Jawa dan Bali.
	182. Sebagaimana halnya target kepariwisataan negara-negara lain, target kepariwisataan Indonesia saat ini sulit tercapai karena menghadapi sedikitnya tiga tantangan utama.
	183. Sandiaga Uno diyakini berkemampuan memangkas dikotomi pemerintah-swasta yang kerap kali menjadi kendala dalam koordinasi pariwisata.
	184. Dalam sambutannya setelah diperkenalkan presiden, Sandiaga menyatakan strategi kementerian yang akan dia pimpin tidak hanya survive, tetapi juga <i>thrive</i> .

35. Menyoal Dana Kampanye Nol Rupiah

Tabel 1. 35 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	185. Instrumen hukum untuk mengatur dana kampanye sudah disiapkan, bahkan mengalami penyempurnaan secara perlahan-lahan.
	186. Pengaturan dana kampanye tidak bermaksud untuk menutup pintu donasi kepada pasangan calon (paslon) pilkada
	187. Rezim UU Pilkada mengatur bahwa dana kampanye bukan hanya uang.
	188. Pihak pasangan calon dan timnya tidak jujur karena rekening pendanaan kampanye tidak hanya satu, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.
	189. Soal pendanaan kampanye, sudah bukan barang tabu lagi ketika seorang investor, korporasi, dan para kontraktor terlibat dalam "sumbangan gelap" untuk para kandidat.
	190. Indikator keberhasilan pilkada, yang paling utama adalah menghadang oligarki memupuk suburnya politik uang.

36. Akhlak Kepemimpinan

Tabel 1. 36 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	191. Dalam kondisi kelaparan, orang akan mudah terbakar emosi karena tidak memiliki banyak pilihan
	192. Dampak yang paling mengerikan adalah jika terjadi pandemi politik.
	193. Agar dampak musim pandemi tidak semakin luas, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat (<i>powerful</i>).

Kalimat	194. Hal itu penting <i>karena</i> selama musim pandemi persoalan koordinasi kepemimpinan masih menjadi titik lemah. Setiap level kepemimpinan seperti berjalan sendiri-sendiri.
	195. Usul penundaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak <i>hingga</i> kondisi pandemi melandai seperti angin lalu.
	196. Pemerintah cukup menjawab kritik <i>dengan</i> perbaikan kinerja.

37. Perlukah Pembinaan Pancasila?

Tabel 1. 37 Kalimat Majemuk Bertingkat Opini JawaPos.com

Kalimat	197. Pancasila memang dirumuskan sebagai kesepakatan <i>untuk</i> menjaga titik keseimbangan berbagai kekuatan.
	198. Ketegangan yang membayang itu menunjukkan <i>bahwa</i> sekarang keseimbangan sedang terganggu
	199. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno merumuskan Pancasila <i>untuk</i> menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat tentang dasar negara
	200. Ia tak pernah menyebut Pancasila sebagai ideologi, termasuk <i>ketika</i> memberikan uraian rinci dalam kursus-kursus Pancasila pada 1958–1959 yang dibukukan menjadi Pantja Sila sebagai Dasar Negara.
	201. Mari kembalikan Pancasila sebagai kesepakatan <i>untuk</i> menjaga keseimbangan.

Lampiran 2. Teks Opini JawaPos.com Edisi 2020

Luas dan Luwes dalam Beragama Oleh Biyanto

DALAM suatu kesempatan, almarhum Abdul Malik Fadjar pernah mengatakan bahwa beragama itu seharusnya luas dan luwes. Penting ditegaskan, yang harus diperluas dan diperluwes bukan agamanya, melainkan pemahaman umat terhadap ajaran agama. Karena itulah, setiap pemeluk agama dan pengikut paham keagamaan penting memiliki wawasan dan pergaulan yang luas. Dengan wawasan dan pergaulan yang luas, akan terbangun cara berpikir, bersikap, dan berperilaku yang luwes dalam beragama.

Karakter luas dan luwes ini penting karena setiap umat beragama menghadapi tantangan yang sama, yakni pluralitas agama dan paham keagamaan. Karakter luas dan luwes itulah yang membuat umat memiliki kesiapan untuk hidup dalam suasana yang majemuk. Pandangan keagamaan umat menjadi lebih terbuka sehingga terbangun kesadaran terhadap pentingnya menghargai perbedaan (respect to diversity). Kondisi itulah yang disebut Abdul Mukti Ali (1989) dengan bersepakat dalam perbedaan (agree in disagreement).

Sementara orang yang tidak memiliki karakter luas dan luwes dalam beragama akan selalu berpandangan: He who is not with me is against me (Orang yang tidak sama dengan saya adalah musuh saya). Dalam kehidupan keberagamaan yang pluralistis, pandangan ini tentu sangat berbahaya karena dapat menghadirkan teror bagi orang atau kelompok lain. Dampaknya, mereka yang terteror mengalami ketakutan dan kengerian yang luar biasa. Pandangan ini pada saatnya juga akan melahirkan "khawarij gaya baru/neokhawarij" yang memandang enteng penderitaan, bahkan kematian orang lain.

Dalam perspektif Yusuf Al Qardhawi (2007), kelompok-kelompok keagamaan yang radikal itu disebut sebagai "Dhahiriyyah Baru". Mereka memiliki enam karakter utama: pemahaman agama yang literal, keras dan menyulitkan, sombong terhadap pendapat mereka, tidak menerima perbedaan pendapat, mengafirkan orang di luar kelompoknya, serta tidak peduli pada fitnah. Enam karakter itu mengakibatkan mereka selalu berpandangan binaris dalam berbagai persoalan keagamaan. Umat digolongkan menjadi kelompok kami (ingroup, minna) dan kelompok mereka (outgroup, minhum).

Sikap memutlakkan pandangan diri dan kelompoknya sebagai yang paling benar akan mengakibatkan terjadinya klaim kebenaran (truth claim). Bermula dari sikap memonopoli kebenaran inilah seseorang atau kelompok mudah menyalahkan, bahkan mengafirkan mereka yang berbeda dengan dirinya. Sikap ini muncul umumnya disebabkan kurang luasnya wawasan dan pergaulan. Jika menggunakan bahasa gaul anak-anak muda sekarang, mereka yang tidak luas dan luwes dalam beragama karena "kurang jauh ngopinya". Istilah "kurang jauh ngopinya" dapat dipahami dalam konteks miskin wawasan dan pergaulan.

Berkaitan dengan sikap luas dan luwes dalam beragama, penting diperhatikan pandangan Muhammad Asad (Leopold Weiss) tatkala memahami kata hikmah: ikhtilafu ummatiy rahmah (perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat). Muhammad Asad memahami pernyataan ini dengan "perbedaan di kalangan umatku yang terpelajar merupakan rahmat".

Dengan pemahaman ini, Muhammad Asad seakan ingin menegaskan bahwa perbedaan yang menghadirkan rahmat itu terjadi jika dialami mereka yang berwawasan luas. Sebaliknya, perbedaan akan menjadi bencana jika terjadi pada orang-orang yang tidak terdidik dan miskin pergaulan.

Harus diakui, secara sosiologis wijhah (pandangan/orientasi keagamaan) Islam di negeri tercinta ini berwajah banyak (dzu wujuh). Hal itu dapat diamati dari berbagai aliran/paham keagamaan yang tumbuh kembang dengan pesat. Namun, akhir-akhir ini wajah Islam Indonesia diwarnai munculnya kelompok-kelompok keagamaan yang mudah sekali menyalahkan pihak lain. Bahkan, tidak jarang kelompok tersebut menggunakan jalan kekerasan dalam berdakwah. Ironisnya, tindakan anarkistis itu dikatakan bagian dari dakwah untuk memerintah pada kebaikan dan mencegah kemungkaran (al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar).

Pandangan itu merupakan sikap yang berlebihan dalam menerjemahkan ajaran dakwah amar makruf nahi mungkar. Apalagi, tugas amar makruf nahi mungkar sejatinya tidak boleh dilakukan sembarang orang. Pembaru (mujadid) muslim ternama Jalaluddin Al Suyuthi berpendapat bahwa tidak semua orang dapat menyuruh pada yang makruf (apa saja yang dipandang baik dan diperintahkan syara') dan melarang yang mungkar (apa saja yang dipandang buruk, diharamkan, dan dibenci syara').

Al Suyuthi menegaskan bahwa hanya ulama dan penguasa yang berhak untuk menjalankan tugas amar makruf nahi mungkar. Ulama berhak menjalankan tugas tersebut karena memiliki ilmu. Sedang penguasa dipandang dapat menunaikan tugas itu karena memiliki kekuasaan.

Salah satu tugas pemerintah adalah membawa bangsa ke arah kemuliaan dan menyelamatkannya dari kerusakan. Tugas pemerintah ini akan efektif jika disertai integritas aparat penegak hukumnya. Dengan kekuasaan dan integritas yang dimiliki aparat, pemerintah memiliki kewibawaan untuk memerintahkan yang baik serta melarang dan menghukum pelaku kemungkaran.

Al Suyuthi juga menegaskan bahwa tugas amar makruf nahi mungkar harus dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip kasih sayang dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Itu berarti untuk menjalankan prinsip mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran tidak boleh disertai dengan melakukan kemungkaran yang serupa. Karena itulah, berdakwah seharusnya dilakukan dengan tanpa kekerasan. Bukankah prinsip dalam berdakwah semestinya mengajak dan merangkul?

Nabi Muhammad SAW juga berpesan agar dalam berdakwah kita selalu berpegang pada prinsip untuk mempermudah dan tidak mempersulit, menggembirakan dan tidak menakut-nakuti. Prinsip itu penting menjadi pegangan para pengemban misi dakwah Islam (mubalig/dai). Untuk menjalankan tugas penting itulah, para mubalig harus membekali diri dengan wawasan keagamaan yang luas dan luwes dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan.

Para mubalig memiliki posisi penting untuk menghadirkan wajah Islam Indonesia yang ramah, bukan Islam yang penuh amarah. Jika dakwah keagamaan dilakukan dengan luas dan luwes, pada saatnya akan membentuk karakter umat yang moderat (wasathiyah) dan berpikiran terbuka.

Memutus Rantai Politik Gentong Babi Oleh Ribut Lupiyanto

DINAMIKA demokrasi lokal pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak semakin hangat. Puncak pilkada serentak ketiga ini akan dilaksanakan oleh 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota pada 9 Desember 2020. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) telah disetujui DPR dan kesepakatan terjadi bahwa pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember tersebut. Namun bisa diundur lagi jika kondisi pandemi tidak memungkinkan.

Sebagaimana diketahui, puncak pilkada awalnya akan berlangsung pada 23 September 2020. Namun, karena kondisi pandemi, tahapan pilkada dihentikan dan diundur.

Di luar itu, pilkada selalu rawan dengan politisasi APBD/APBN. Beragam program bantuan digelontorkan pemerintah pusat maupun daerah, mulai bantuan Covid-19, BLT dana desa, bantuan jaminan hidup, bantuan sembako, hibah APBD, hingga alokasi khusus APBN. Implementasi ini secara umum simultan dengan mobilisasi ASN oleh petahana atau keluarga petahana.

Upaya pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 layak diapresiasi. Namun, guna keseimbangan dan optimalisasi realisasi, tetap dibutuhkan pengawasan. Politik gentong babi di daerah pelaksana pilkada jangan sampai terjadi dengan alasan memanfaatkan penanggulangan pandemi. Untuk itu, politik gentong babi pilkada harus diawasi agar terputus rantainya di ranah eksekusi.

Asal Usul Istilah

Diksi ”gentong babi” muncul dari adanya praktik memberikan daging babi asin kepada para budak kulit hitam pada masa perang saudara di AS 1861–1865 (Maxey, 1919). Para tuan pemilik budak kala itu memberikan daging babi yang telah diasinkan kepada budak kulit hitam untuk diperebutkan. Nah, perilaku politikus atau pemimpin yang mencari subsidi pemerintah untuk kepentingan politik pribadi bisa disamakan dengan perilaku para budak yang memperebutkan daging tersebut.

Politik gentong babi kali pertama terjadi di AS melalui program Bill Bonus. Wakil Presiden AS John C. Calhoun pada era 1817 mengusulkan Bill Bonus yang isinya penggelontoran dana untuk pembangunan jalan raya yang menghubungkan timur dan selatan ke barat AS. Dananya diambil dari laba bonus Second Bank of

the United States (Bank Kedua AS). RUU tersebut akhirnya diveto Presiden James Madison.

Politik gentong babi biasanya dilakukan calon incumbent. Teddy Lesmana dalam bukunya, Politik Pork Barrel dan Kemiskinan, menuturkan, praktik politik gentong babi terkait dengan perilaku politikus yang menggunakan uang negara untuk kepentingan politiknya serta tidak semata-mata untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya. Banyak kebijakan atau program yang dimanfaatkan sebagai sumber "gentong babi", misalnya dana bantuan sosial dan dana aspirasi.

Modus politik gentong babi terdiri atas tiga bentuk (Musa, 2014). Pertama, dalam bentuk fiktif atas usulan yang ada. Kedua, diterima tetapi tidak sesuai besaran yang ada karena dipotong aparat di depan. Ketiga, modusnya berhubungan dengan proses politik di suatu tempat.

Maraknya politik gentong babi umumnya terjadi jelang pemilu dan pilkada, misalnya jelang pilkada 2020 nanti. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan kenaikan drastis alokasi bantuan sosial yang dianggarkan kementerian-kementerian dan pemerintah daerah di setiap jelang hajatan demokrasi, baik pusat maupun daerah. Daerah-daerah yang petahananya atau keluarganya akan maju pada pilkada 2020 menjadi daerah paling rawan terjadinya politik gentong babi dari kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 maupun program pembangunan umum lainnya.

Strategi Mitigasi

Politik gentong babi yang klasik, kompleks, dan sistematis mesti dilawan dengan upaya terpadu dan frontal. Semua elemen penting berkontribusi dan bergandengan tangan dalam merealisasikannya.

Pertama, masyarakat. Masyarakat mesti memahami bahwa politik gentong babi hakikatnya adalah melecehkan dan menghinakan. Sumber dana yang digunakan adalah milik rakyat dan digunakan untuk menyuap rakyat. Pembagian bantuan hanya dapat diterima jika tanpa syarat dan tanpa pemotongan. Masyarakat juga mesti melek politik guna membentengi diri dari politisasi dana yang digelontorkan pemerintah.

Kedua, aparat penegak hukum. Penegak hukum mesti peka dan proaktif mengawasi kemungkinan terjadinya politik gentong babi. Kepolisian dan Kejaksaan dapat turun jika mengarah pada tindak pidana. Inspektorat kementerian atau dinas diharapkan semakin ketat mengatur dan mengawasi pengoperasian

penyaluran dana bantuan sosial atau dana lain ke masyarakat. DPR sebagai pengawas pemerintah mesti menjalankan fungsinya secara optimal.

Ketiga, penyelenggara pemilu dan pilkada. Penyelenggara pemilu mesti mengatur masalah pendanaan kampanye secara terperinci. Regulasi penting mendorong akuntabilitas dan transparansi dana kampanye serta mengantisipasi manipulasi pelaporan. Bawaslu/panwaslu harus senantiasa membuka mata dan mengawasi potensi pelanggaran pemilu akibat politik gentong babi.

Keempat, kontestan. Elemen ini menjadi pihak yang berpotensi terdakwa terkait dengan politik gentong babi. Pendidikan politik dan ideologisasi internal dari parpol ke kontestan mesti ditanamkan kuat. Politik gentong babi mengakibatkan persaingan tidak sehat antara calon baru dan petahana. Jika tidak diantisipasi, politik gentong babi dapat menjadi bibit konflik horizontal.

Kelima, komponen lainnya seperti akademisi, LSM, mahasiswa, dan gerakan sipil. Kontribusi komponen ini ditunggu untuk mencerahkan pendidikan politik masyarakat serta menggalang kekuatan melawan politik gentong babi. Kerelawanan dan perlawanan masifnya dinantikan demi penyehatan demokrasi.

Politik gentong babi menjadi ujian dan saringan dalam proses demokrasi modern. Cara ini dapat menjadi bumerang dan berujung kekalahan bagi kontestan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dapat mengantarkannya ke balik jeruji besi. Politik gentong babi mesti dijadikan musuh bersama dalam demokrasi. Kehadiran politik gentong babi melalui bantuan sosial penanganan pandemi maupun memanfaatkan program hasil pajak rakyat jelas tidak berperikemanusiaan.

Menguatkan Persatuan dan Menghormati Perbedaan Oleh Khofifah Indar Parawansa

DUA momentum penting yang saling berimpitan jatuh di akhir Oktober. Hari Sumpah Pemuda dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Keduanya memiliki makna yang luar biasa.

Hari Sumpah Pemuda merupakan cikal bakal tumbuhnya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Kesamaan tekad para pemuda Indonesia. Jong Java, Jong Sumatera, Jong Betawi, dan beberapa organisasi pemuda lainnya menggelar kongres. Mereka menyatakan tiga ucapan. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak saat itu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tumbuh. Pernyataan yang dicetuskan para pemuda. Momentum yang menjadi kebanggaan. Bukti betapa pemuda memiliki pengaruh yang luar biasa di tengah masa penjajahan.

Tentu perjuangan untuk menyatukan tekad itu tidak mudah. Bisa dibayangkan, perbedaan daerah dengan beragam karakter bisa menyatu. Masing-masing mengesampingkan ego dan fanatisme kedaerahan. Itu dilakukan untuk mewujudkan satu kekuatan bersama. Satu tekad bersama meraih kemerdekaan.

Tiga pernyataan tersebut menjadi amanah yang harus dijaga hingga sekarang. Persatuan yang membalut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hari Sumpah Pemuda ditetapkan pemerintah bukan sekadar peringatan kongres yang berlangsung pada 1928 itu. Tapi, ada makna yang patut dipahami.

Yakni sebagai reminder atau pengingat semua orang. Bahwa dulu ada pemuda-pemuda yang atas inisiatif sendiri berjuang mewujudkan persatuan itu. Sepatutnya, masyarakat Indonesia memahami jerih payah pemuda di masa itu. Cara memahami yang cukup sederhana, menjaga agar persatuan dan kesatuan ini tetap utuh.

Perbedaan memang sebuah kepastian. Pada zaman Rasulullah, ada cerita yang mengulas penempatan Hajar Aswad. Kala itu Rasulullah masih berusia 30 tahun. Beliau berhadapan dengan konflik antarsuku memperebutkan siapa yang pantas meletakkan Hajar Aswad.

Untuk menghentikan konflik, peletakan batu dipasrahkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah yang mendapat kesempatan itu tidak egoistis. Beliau meminta kain, lalu mempersilakan perwakilan dari masing-masing golongan untuk memegang ujung kain tersebut.

Selanjutnya, Rasulullah meletakkan batu pada kain itu. Perwakilan golongan tersebut kemudian membawa batu yang diletakkan di tengah kain itu. Ide yang sangat mulia. Tidak ada yang merasa tersisih dan masing-masing merasa mendapat kesempatan. Teladan yang patut ditiru.

Rasulullah saat itu dalam usia yang masih muda, tapi tidak egoistis. Beliau lebih mementingkan persatuan umat. Pembelajaran luar biasa di masa itu. Tak ayal, Michael Hart, penulis tersohor asal Amerika Serikat, menempatkan Nabi Muhammad sebagai 100 orang berpengaruh sepanjang masa. Bahkan, lelaki yang pernah menjadi guru besar astronomi dan fisika di Universitas Maryland, AS, tersebut menempatkan Nabi Muhammad di urutan paling atas.

Kelahiran Nabi Muhammad juga kerap disebut sebagai akhir zaman jahiliah (zaman kebodohan). Kala itu orang tua malu ketika memiliki anak perempuan. Alasannya, anak perempuan tidak bisa berperang. Memiliki anak perempuan adalah aib.

Banyak kejadian orang tua kecewa ketika anak yang lahir dari rahim sang istri itu berjenis kelamin perempuan. Tak jarang mereka membunuhnya. Karena itu, banyak bayi perempuan yang tidak selamat. Kalaupun selamat, kelak anak perempuan tersebut menjadi pemuas nafsu kaum lelaki.

Kelahiran Rasulullah memberikan harapan baru. Peradaban yang dibawa putra Abdullah dan Aminah itu membuka pemikiran orang pada zaman jahiliah. Kesetaraan gender diperkuat. Penilaian orang terhadap perempuan pun kembali seperti semula. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan pun tak lagi diperdebatkan.

Tentu, pembentukan karakter seperti Nabi Muhammad tidaklah mudah. Beliau merupakan nabi terakhir. Rasul Allah. Setiap jejak langkahnya dimaksum atau dijaga oleh Allah. Tapi, setidaknya umat Islam patut meneladani perilaku Rasulullah.

Masih banyak cerita lain tentang keteladanan Rasulullah. Misalnya, di masa usia 12 tahun, Rasulullah ikut Abu Thalib (pamannya) berdagang ke negeri Syam. Pada kesempatan itu, Rasulullah belajar tentang kewirausahaan. Sisi lain yang

patut ditiru kelompok milenial di masa kini. Memanfaatkan masa muda untuk berkarya, berinovasi, dan memupuk bekal masa depan. Pemuda yang mandiri bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sesuai sabda Rasulullah: "Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain."

Bisa jadi, ada hikmah ketika Hari Sumpah Pemuda berimpitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Allah mengingatkan umat Islam di Indonesia pada dua momentum yang bersejarah itu. Sumpah Pemuda mengingatkan untuk tetap menjaga serta menguatkan persatuan dan kesatuan. Maulid Nabi Muhammad mengingatkan umat Islam untuk senantiasa meneladani perilaku Rasulullah. Wallahu a'lam bish-shawab.

Wawancara Kursi Kosong Najwa Shihab: Kegagalan Jurnalistik?

Oleh: Wartawan Jawa Pos Kardono Setyorakhmadi

Ada sebuah paragraf terakhir di sebuah status Facebook yang membuat saya begitu gagal paham. Yakni, ucapan seorang dosen komunikasi yang menyebut bahwa kalau seorang narasumber tidak mau berbicara, maka yang pertama kali boleh disebut gagal adalah si jurnalis. Membuat orang mau berbicara, adalah tugas seorang jurnalis. Dan hal pertama yang membuat saya gagal paham adalah yang menulis status itu adalah seorang jurnalis sendiri.

Ya, bisa ditebak. Status itu sebenarnya kritikan terhadap wawancara bangku kosongnya Najwa Shihab. Dan seperti bisa ditebak pula, banyak dukungan yang kemudian mengalir ke status tersebut. Apalagi disajikan dengan sangat bagus. Sah-sah saja, meskipun saya pribadi menganggapnya berbahaya.

Kenapa berbahaya? Yang pertama, saya belum pernah mendengar teori itu. Jika ada narsum yang tak mau bicara, maka yang gagal adalah si jurnalis itu sendiri. Saya ingin tahu bagaimana dan dalam konteks seperti apa dosen itu berbicara.

Setahu saya, jurnalis gagal adalah jurnalis yang tidak bisa menggali informasi dari narsumnya. Mungkin karena kurang menyiapkan bahan wawancara, mungkin karena manner yang buruk sehingga narsum menjadi ilfeel, atau apapunlah. Tapi, syaratnya: jurnalis dan narsum-nya sudah harus bersama dan terjadi proses wawancara.

Tapi, tidak pernah saya mendengar ada pejabat publik tidak mau ngomong ke publik, lalu yang disalahkan adalah jurnalisnya. Ada memang kasus-kasus di mana jurnalisnya malas ke narsum yang sebenarnya accessible. Dan itu memang kegagalan. Tapi, tidak dalam kasus Najwa Shihab ini.

Jika kredonya ini kemudian menjadi prinsip kebenaran, maka enak saja jadi pejabat publik. Karena apa? Sependek pengalaman saya menjadi jurnalis selama 16 tahun, para pejabat ini sebenarnya lebih suka untuk tidak perlu harus menjelaskan apa pun ke publik.

Menjelaskan ke publik itu berarti banyak hal. Itu berarti pejabat yang bersangkutan sudah harus menyiapkan bahannya, sudah berani mempertanggungjawabkan kebijakannya, dan sudah memberlakukan transparansi dalam kebijakan yang diambil.

Tak mungkin dong, menyatakan kebijakan publik yang diambil berbeda dengan yang di lapangan. Misalnya, ada pejabat bilang ngurus KTP di daerah saya

hanya sehari jadi, padahal fakta di lapangan baru seminggu jadi. Bicara ke publik itu berarti dia bisa mempertanggungjawabkan akuntabilitas kerjanya.

Dengan tidak adanya keharusan untuk menjawab wawancara jurnalis, maka memungkinkan para pejabat mendasarkan kebijakannya pada *deal-deal under the table*. *Toh*, tidak ada akuntabilitas publik yang harus dipertanggungjawabkan. Dan kita semua tahu bahwa deal-deal seperti itu sangat berbahaya. Kita tidak akan tahu apa yang diketahui sepenuhnya oleh Terawan, apa yang tidak bisa atau belum dilakukannya, dan hal-hal lain yang seharusnya publik tahu bagaimana kementerian mengelola sistem kesehatan nasional.

Dalam konteks Menteri Kesehatan Terawan, itu jelas sekali banyak bolongnya. Pernyataannya yang kontroversial, ketidakjelasan strategi mitigasi pandemi, penanganan pandemi di Indonesia yang secara umum masih buruk. Bahkan, Presiden Jokowi saja berani mengkritik terbuka Terawan melalui video YouTube. (Meski saya juga heran, kenapa juga tidak segera direshuffle).

Mau tidak mau, Terawan sebagai pejabat publik harus mau menjawab semua keresahan publik terkait hal tersebut. Salah satu bagian dari pejabat publik ya memang itu: menjawab ke publik. Jika memang tidak suka dengan gaya wawancara Najwa, boleh-boleh saja Terawan memilih panggung dan media lain. Tapi, yang terpenting, banyak pertanyaan publik harus segera dia jawab.

Saya benar-benar ingin tahu kenapa Terawan tak segera muncul dan menjawab panjang lebar terkait itu? Padahal, wawancara *doorstop* singkat sangatlah misleading, dan penanganan pandemi di Indonesia bagaimanapun juga telah membuat 59 negara menolak kedatangan WNI dan mengeluarkan travel warning.

Sejauh ini, saya membaca ada sejumlah komentar dan status yang membenarkan paragraf terakhir kegagalan si jurnalis itu. Intinya, menyebut Najwa telah memermalukan Terawan dan juga dirinya sendiri karena gagal menghadirkan Terawan. Sesuatu yang sebenarnya mengandung kontradiksi. Dengan logika itu, Najwa pun bahkan belum terbilang gagal. Karena wawancara bangku kosong itu bisa dianggap sebagai upaya untuk membuat Terawan bicara, kok.

Oh ya, silakan jika menganggap saya membela Najwa Shihab. Saya tak ambil pusing. Tapi, sebenarnya kritikan yang terjadi mungkin tak sedikit orang yang sudah tidak suka dengan gaya wawancara Najwa. Yang dianggap terlalu lebay dan

menyudutkan. Nah, kalau ini, silakan kritik. Saya sendiri pun juga sering merasa Najwa berlebihan ketika melakukan interview.

Jadi mungkin reaksi yang terjadi setelah status itu apa yang seperti tergambar dalam etika empirisme A. J. Ayer. Yakni, argumentasi ilmiah dari problem etika itu sebenarnya bungkus dari suara-suara purba Hore, Huu yang membuat Ayer disebut sebagai Filsul Hore-Huu (hurrah/boo theory).

Ayer mencontohkan ketika berargumentasi terkait apakah pemberian sesembahan itu salah, maka sebenarnya yang muncul adalah yang setuju akan bilang: memberikan persembahan itu horeeee. Sedangkan yang tidak setuju bilang, memberikan persembahan itu huuuuu.

Kasus Najwa Shihab sebenarnya sederhana saja. Dia meminta Menkes Terawan hadir untuk menjawab keresahan publik yang diserapnya. Terawan tidak datang-datang. Dan dia memperlakukan situasi tersebut dengan cara baru. Lalu, apakah masyarakat setuju dengan cara Najwa memancing Terawan?

Yang tidak suka Najwa: huuuuuu, yang setuju Najwa: horeeeeeee

Tapi, lepas dari itu. Terawan adalah pejabat publik. Dan dia harus menjawab banyak pertanyaan publik untuk itu. Baik melalui Najwa atau melalui panggung yang lain. Najwa sudah benar ketika dia dengan mediana mengundang Terawan untuk menjelaskan. Dia tidak gagal sama sekali ketika Terawan tidak datang.

Kemerdekaan Belajar yang Terkoyak

Oleh NG. Tirto Adi M.P.

DALAM sejarah, baru kali ini peringatan HUT RI berbarengan dengan pandemi Covid-19. Momentum pandemi adalah waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi dan refleksi. Selama ini, dengan kemajuan iptek yang dimiliki, negara maju begitu jemawa. Sepertinya akal manusia menjadi kekuatan mahadahsyat karena mampu menciptakan iptek yang canggih.

Secara historis, pandangan itu berasal dari paradigma positivistik Rene Descartes (1596-1650): Cogito, Ergo Sum. Aku Berpikir, maka Aku Ada. Paradigma tokoh rasionalis Descartes tersebut diikuti para pengikutnya. Manusia lupa bahwa di atas akal, masih ada Sang Maha Pencipta Akal. Saatnya paradigma itu didekonstruksi menjadi Deus Est, Ergo Sum, Cogito. Tuhan Ada, Aku Ada, maka Aku Berpikir.

Keterbatasan akal manusia itu begitu nyata saat negara begitu gagap menghadapi Covid-19. Lebih dari satu semester, belum ada penemuan vaksin. Pandemi meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan, tak terkecuali Indonesia. Dunia pendidikan begitu terimbas dampaknya. Yang paling kentara adalah berubahnya pembelajaran tatap muka (PTM) yang berbasis kelas menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara online. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang diusung Mendikbud Nadiem A. Makarim begitu terkoyak.

Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran/Akademik 2020-2021 di Masa Pandemi Covid-19 menegaskan bahwa daerah zona merah dilarang membuka sekolah dengan PTM. Hanya daerah hijau yang boleh membuka PTM. Itu pun harus dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Karena itu, ketika Mendikbud membolehkan daerah zona oranye dan kuning membuka PTM, banyak pihak menilai kebijakan itu inkonsisten dan riskan. Membuka sekolah dengan PTM tidak boleh dilakukan dengan coba-coba. Harus ada analisis kesehatan yang cermat dan dalam untuk menghindari korban.

Di sisi lain, kebijakan tidak boleh membuka PTM juga menyisakan permasalahan. Sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan begitu repot dibuatnya. Orang tua dan peserta didik terkena imbasnya. Sekolah terpaksa/dipaksa untuk menyiapkan infrastruktur PJJ, termasuk jaringan internet. Sementara guru harus merancang dan mempersiapkan materi dalam konteks PJJ. Orang tua perlu

menyiapkan waktu pendampingan bagi anak. Anak, demikian pula, harus siap belajar ala sekolah/madrasah kendati ada di rumah.

Pelaksanaan PJJ tidak sesederhana yang dibayangkan. Tidak semua satuan pendidikan siap dengan infrastruktur PJJ. Belum lagi area yang tidak terjangkau atau jangkauan sinyal internetnya tidak bagus. Guru juga tidak seluruhnya siap. Baik kesiapan dalam melakukan PJJ maupun dalam merancang materi pembelajaran yang adaptif dengan PJJ.

PJJ menyisakan banyak permasalahan. Bagi guru, persiapan PJJ membutuhkan waktu dan kemampuan khusus dalam merencangnya. Perlu penyederhanaan kurikulum menjadi materi ajar yang adaptif. Terkait kemampuan memanfaatkan aplikasi PJJ macam kanal You Tube, aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, Moodle, Canvas, Etmodo, belum semua guru cakap menggunakannya. Demikian pula sistem pembelajaran daring macam Kelas Pintar, Microsoft Teams, Quipper, Ruang Guru, Zenius, maupun Rumah Belajar (yang dapat diakses di <https://belajar.kemdikbud.go.id>), belum seluruh guru terampil memakainya. Tidak semua siswa memiliki ponsel Android. Belum lagi jaringan internet yang mumpuni.

Bagi orang tua yang bekerja di luar rumah, PJJ merupakan persoalan serius. Orang tua yang bekerja tidak bisa melakukan pendampingan pagi hingga siang hari kepada putra-putrinya. Bisanya pada malam hari. Dengan energi yang tersisa, orang tua cenderung berperilaku sensitif. Bawaannya menjadi uring-uringan melulu, keluh sang anak. Anak pun demikian. Dalam kondisi normal PTM, malam hari adalah waktu untuk me-review materi ajar yang diberikan pada pagi-siang hari. Tetapi, dengan PJJ, malam hari harus menjadi hari dan jam belajar ala sekolah/madrasah bagi anak.

Pendidikan (Nir)Karakter?

PJJ adalah model sebuah pengajaran bukan pendidikan. Pendidikan yang nirkarakter. Itu yang harus menjadi keprihatinan bagi semua. Pendidikan adalah upaya mencerdaskan anak-anak bangsa secara holistik. Pendidikan holistik adalah pendidikan yang mampu menumbuhkembangkan bukan hanya kecerdasan intelektual. Secara bersamaan, pendidikan juga harus mengembangkan kecerdasan kinestetik dan emosional-sosial, di samping kecerdasan spiritual.

Singkatnya, pendidikan tidak hanya menjadikan anak-anak manusia sehat dan cerdas. Tetapi juga mendidik anak-anak menjadi insan berkarakter. Dan itu bisa

terjadi manakala pendidikan berlangsung dengan tatap muka antara guru dan siswa. Pengajaran bisa digantikan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tetapi, pendidikan yang di dalamnya sarat akan penanaman nilai (*value*), pembimbingan, dan muatan karakter, sampai kapan pun dan dengan kemajuan teknologi secanggih apa pun, tidak akan pernah bisa menggantikan peran dan kehadiran guru. Di sinilah urgensi kehadiran sosok guru profesional tidak bisa ditawar. Benarlah sinyalemen Hargreaves & Fullan (2003) bahwa *for better or worse is and always has been in the hands of teachers*.

Membangun insan yang cerdas dan berkarakter adalah esensi dari pendidikan seutuhnya. Keduanya tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua keping sisi mata uang. Insan yang cerdas tapi tidak berkarakter adalah manusia yang membahayakan. Persona yang berkarakter tetapi tidak cerdas adalah manusia yang lemah. Karena itu, Mahatma Gandhi (1869-1948), pemimpin spiritual dan politikus India, memperingatkan, satu di antara tujuh dosa fatal yang tidak boleh dilakukan adalah *education without character*, menyelenggarakan pendidikan dengan menafikan nilai-nilai karakter.

Bahkan, Presiden Ke-26 AS Theodore Roosevelt (1858-1919) menunjukkan betapa bahayanya penyelenggaraan pendidikan yang mengabaikan nilai-nilai karakter. Menurut Roosevelt, *to educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society*. Mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan pada aspek moral adalah ancaman marabahaya kepada masyarakat. Supaya menginternal dan menjadi milik diri, Ki Hajar Dewantara menyerukan agar penanaman nilai karakter atau budi pekerti dilakukan dengan pembiasaan yang *occasional* oleh sekalian pamong atau pendidik.

Di sinilah perlunya mengevaluasi secara menyeluruh dengan segera kebijakan implementasi PJJ di masa pandemi Covid-19 ini sebelum kejenuhan dan kehampaan praksis pembelajaran itu berlangsung kian mendalam. Langkah cepat dan bijak perlu segera diambil sebelum keluhan orang tua/wali murid, guru, dan peserta didik terhadap PJJ itu meratap kian berkepanjangan. Dilematis memang, membuka PTM atau melanjutkan PJJ. Tetapi harus dipilih secara cepat dan tepat. Bukankah begitu?

Tempat-Tempat Berisiko Penularan Covid-19

Oleh ARI BASKORO

MUNGKIN, pada pandemi Covid-19 seperti yang saat ini kita alami, berdampingan dengan seseorang yang sedang batuk atau bersin lebih menakutkan daripada gonggongan anjing galak. Bagi orang yang cukup literasinya tentang perkembangan Covid-19 dari waktu ke waktu, sikap itu tidak berlebihan.

Hampir setiap waktu muncul informasi baru terkait Covid-19. Hal itu bukan sesuatu yang mengherankan karena Covid-19 merupakan penyakit baru. Berdampak sangat luas. Tidak hanya dari sisi medis, namun juga pada hampir semua sendi kehidupan. Para ahli tertantang untuk mengungkap banyak hal, terutama untuk bisa menjawab bagaimana SARS-CoV-2 yang merupakan virus penyebab Covid-19 bisa ditularkan antarmanusia.

Penularan Covid-19 sangat sulit dipastikan dari mana asalnya. Namun, ada beberapa tempat yang disebut-sebut mempunyai risiko lebih tinggi untuk terjadinya penularan. Diperlukan suatu kecerdasan cara berpikir dan logika agar seseorang bisa mendeteksi keberadaan mereka, apakah aman atau tidak dari kemungkinan terjadinya risiko penularan tersebut.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang merupakan kiblat para ahli di bidang kesehatan pada 9 Juli 2020 menyatakan bahwa penularan Covid-19 dapat terjadi melalui udara (*airborne transmission*). Artinya, partikel virus yang berasal dari seseorang yang di dalam tubuhnya mengandung virus dapat menularkannya kepada orang lain melalui aktivitasnya seperti bernapas, berbicara, menyanyi, bersiul, tertawa, apalagi saat batuk atau bersin. Informasi terdahulu yang sudah banyak dipahami masyarakat adalah tentang cara penularan virus ini melalui droplet. Dengan pola penularan yang dari sisi siswa, diperlukan perubahan budaya dalam menjaga kesehatan. Memakai masker bisa menjadi hal yang tidak nyaman bagi anak-anak usia sekolah. Ketidaknyamanan itu bisa menyebabkan pemakaian masker menjadi tidak benar secara kesehatan. Masker diturunkan sehingga tidak menutup hidung. Selain itu, berkali-kali memegang masker, kemudian tanpa cuci tangan memegang makanan, hidung, dan mulut. Ketaatan memakai masker dengan benar merupakan tantangan bagi siswa usia sekolah, apalagi siswa sekolah dasar. Siapa yang akan mengawasi siswa telah memakai masker dengan benar di kelas, di halaman sekolah, atau di kantin sekolah. Cara bersin yang benar juga

harus dikawal betul pelaksanaannya oleh semua siswa. Sebab, cara bersin yang sembarangan juga risiko menularkan virus penyebab Covid-19. Lalu, siapa yang bertugas mengawal? Upaya mencegah penularan sangat penting karena data menunjukkan sebagian besar usia muda bila terkena Covid-19 tidak menunjukkan gejala. Dengan demikian, siswa yang tampak sehat pun bisa menularkan ke sekitarnya. Bila seorang siswa tertular di sekolah, siswa tersebut juga bisa membawa virus tersebut ke lingkungan rumah. Terinfeksi virus SARS-CoV-2 mungkin tidak menimbulkan gejala pada usia muda, tapi menjadi masalah ketika siswa tersebut menularkan ke orang tuanya, kakek-neneknya, dan saudaranya di rumah. Persebaran Covid-19 akan makin luas bila protokol kesehatan di sekolah tidak dipatuhi secara baik.

Persiapan kembali ke sekolah harus dipersiapkan secara matang, bisa dilakukan ketika angka kejadian Covid-19 sudah terkendali atau paling tidak telah melewati puncak. Sampai saat ini, kurva Covid-19 belum menampakkan puncaknya, laporan harian masih naik turun. Di sisi lain, memutuskan kembali ke sekolah tidak hanya melihat angka absolut orang yang positif di suatu daerah. Sebab, bisa saja di daerah tersebut kasusnya sedikit karena jumlah tes yang dilakukan sedikit. Diperlukan persiapan yang sangat matang dari sisi siswa, orang tua murid, guru, sarana dan prasarana, hingga yang terpenting persiapan budaya baru, budaya hidup sehat. Pembuat keputusan di pusat dan di daerah perlu menggandeng para pakar kesehatan masyarakat, pakar dari Ikatan Dokter Indonesia, pakar pendidikan, dan tokoh masyarakat untuk duduk bersama, berdiskusi untuk memutuskan waktu ideal kembali ke sekolah di daerah masing-masing. Dengan demikian, pendidikan bisa berjalan baik dan tetap memperhatikan faktor kesehatan. Semoga pandemi Covid-19 membawa budaya baru di sekolah, budaya sehat gunakan sabun atau disinfektan berbasis alkohol, serta menggunakan masker dan pelindung wajah (face shield) merupakan cara-cara pencegahan penularan yang cukup optimal. Dengan informasi terbaru cara penularan secara airborne, apakah tindakan preventif yang disebutkan tadi telah mencukupi?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, ada suatu data penelitian yang menguraikannya secara matematis. Berdasar studi terhadap jenis virus korona lainnya, beberapa peneliti memperkirakan, untuk terjadinya suatu infeksi, dibutuhkan sedikitnya 1.000 partikel virus (PV) SARS-CoV-2 yang bisa

memasuki tubuh seseorang (bisa melalui saluran napas, selaput lendir mata, ataupun selaput lendir saluran cerna). Sejumlah PV tersebut dapat diperoleh melalui 10 kali menghirup udara (inhalasi), di mana setiap kali inhalasi memasukkan 100 PV atau bisa juga melalui 100 kali inhalasi. Masing-masing inhalasi mengandung 10 PV. Masing-masing situasi tersebut dapat melukiskan bagaimana pola penularan terjadi. Dengan pola ilustrasi yang kurang lebih serupa, setiap kali seseorang pembawa virus mengalami batuk akan dapat melepaskan 3.000 droplet dengan kecepatan 50 mil/jam. Ukuran droplet setidaknya 5 mikron dan karena relatif berukuran besar akan lebih cepat mengikuti gaya gravitasi dan menempel pada benda-benda sekitarnya. Droplet hanya bisa terbang mencapai 1-2 meter dalam waktu 6 detik.

Di sisi lain, bersin dapat melepaskan sekitar 30.000 droplet dengan kecepatan yang cukup fantastis: 200 mil/jam! Apabila dianalisis lebih mendalam, seseorang yang telah terinfeksi Covid-19 dan mengalami sekali batuk atau bersin mampu melepaskan sekitar 200 juta PV yang akan tersebar merata di lingkungan sekitarnya.

Persoalan yang lebih pelik adalah pada seseorang yang telah terinfeksi Covid-19 tanpa menampakkan suatu gejala (kasus konfirmasi tanpa gejala) merupakan individu infeksius tanpa orang lain tahu bahwa yang bersangkutan adalah pembawa virus. Sama dengan orang yang menampakkan gejala klinis. Keduanya saat bernapas biasa mampu melepaskan 50-5.000 droplet. Karena kekuatan mengeluarkan udara pernapasan relatif kecil, pernapasan biasa tidak akan melibatkan sekret dari saluran napas bagian bawah yang populasi PV-nya sangat padat. Diperkirakan, kondisi demikian hanya melepaskan 20 PV per menit. Sedangkan berbicara dapat mengeluarkan 200 PV per menit.

Berdasar ilustrasi perhitungan matematis di atas, dapat diformulasikan sebagai berikut: seseorang yang tertular adalah akibat banyaknya PV dikalikan faktor waktu.

Sebagai contohnya, bila seseorang mengalami batuk atau bersin, 200 juta PV akan tersebar. Beberapa PV di antaranya akan bertahan melayang-layang di udara. Sebagian lainnya akan mengikuti gravitasi dan menempel pada suatu permukaan benda. Ada juga yang jatuh di tanah atau lantai. Jadi, kalau seseorang secara tatap muka berbicara atau sedang batuk/bersin langsung di hadapan orang lainnya, akan dengan mudah menghirup 1.000 PV untuk mengakibatkan suatu penularan.

Di pihak lain, melalui suatu pernapasan biasa, akan mampu mengeluarkan 20 PV per menit. Untuk mengakibatkan suatu penularan, 1.000 PV dibagi 20 PV/menit akan diperoleh waktu 50 menit. Dengan cara perhitungan yang sama, berbicara secara tatap muka akan memerlukan waktu 5 menit untuk dapat menularkan (perhitungannya: 1.000 PV dibagi 200 PV/menit).

Perhitungan matematis tersebut diperlukan untuk mempertimbangkan suatu kebijakan/aturan yang bisa diterapkan agar seseorang terhindar dari suatu penularan. Disiplin menjalankan protokol kesehatan masih merupakan tulang punggung tindakan preventif. Meski demikian, ada beberapa faktor lainnya yang layak diperhitungkan seperti adanya aliran udara melalui ventilasi yang mencukupi karena cara ini dapat mengurangi kepadatan PV. Rancangan suatu ruangan juga harus mempertimbangkan sinar matahari yang cukup, temperatur ruang, serta kelembapan tertentu yang dapat memengaruhi ketahanan PV yang pada gilirannya dapat meminimalkan terjadinya penularan.

Dengan rangkaian penjelasan di atas, kita bisa memperkirakan potensi penularan yang terjadi bila seseorang berada pada suatu area tertentu seperti bar, menghadiri suatu pesta pernikahan, restoran, kantor/tempat kerja, latihan paduan suara, pusat kebugaran (indoor sports), tempat ibadah masjid, taman hiburan, basket, kolam renang, salon kecantikan, bioskop, naik pesawat, transportasi umum, mal, dan tempat-tempat lainnya yang dapat mendatangkan massa untuk berkumpul.

Kembali ke Sekolah di Tengah Pandemi

Oleh Brahmana Askandar

SEJAK Maret 2020, anak sekolah belajar dari rumah dan menyelesaikan tugas dari rumah dalam rangka memotong rantai penularan Covid-19. Tahun ajaran baru segera tiba, sedangkan angka positif Covid-19 terus menanjak setiap hari. Berdasar hasil survei yang dilakukan, sebagian besar orang tua masih takut melepas putra-putrinya kembali ke sekolah saat ini. Hal itu menunjukkan bahwa para orang tua masih khawatir sekolah mempunyai risiko penularan Covid-19.

Data nasional pada 30 Mei 2020 memperlihatkan, angka positif Covid-19 sebanyak 25.216 orang. Dari jumlah tersebut, 2,3 persen berusia 0-5 tahun dan 5,6 persen berusia 6-17 tahun atau terdapat 1.412 anak usia sekolah 6-17 tahun yang positif. Belum termasuk anak yang tergolong ODP atau PDP. Kalo cakupan tes lebih luas lagi, angka itu bisa jadi lebih tinggi. Anak sekolah merupakan generasi penerus, perlu kehati-hatian dalam memutuskan siswa kembali ke sekolah.

Dalam aktivitas sekolah, memang bisa terjadi banyak kontak. Kontak antara sesama murid, murid dengan guru, sesama guru, murid dengan pegawai sekolah, guru dengan pegawai sekolah, murid dengan penjual makanan di kantin sekolah. Belum lagi kontak murid dalam perjalanan ke sekolah. Bisa kontak dengan sesama penumpang di kendaraan umum, bisa kontak dengan pengemudi kendaraan umum, dan masih banyak lagi kemungkinan kontak. Tidak cukup hanya memikirkan jaga jarak di antara sesama teman saat berada di sekolah atau kelas.

Saat kembali ke sekolah di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir, diperlukan protokol kesehatan khusus dan sering disebut dengan new normal, mulai menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, hingga menjaga kebersihan. Apakah siswa dapat menerapkan protokol kesehatan tersebut dengan baik? Semakin muda usia siswa, penerapan protokol tersebut akan semakin sulit, memerlukan supervisi ketat. Protokol kesehatan yang diterapkan pada sekolah tidak bisa hanya meliputi jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan, tapi memerlukan perubahan budaya menyeluruh di semua sektor yang berkaitan dengan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah.

Beberapa upaya sekolah dalam menyambut new normal harus dilakukan dari sisi kesehatan. Tempat cuci tangan harus mencukupi untuk semua siswa, menjaga

hygiene kamar mandi, disinfeksi rutin dengan frekuensi tertentu alat sekolah, meja belajar, bangku, dan alat-alat fasilitas umum. Menyiapkan kantin sekolah yang higienis, mulai cara memasak, cara menyajikan, hingga pengaturan antrean saat jam makan. Jaga jarak aman 1-2 meter juga harus diterapkan agar virus tidak menular melalui droplet. Hal itu merupakan tantangan tersendiri bagi sekolah, mengingat kapasitas lahan yang terbatas dan jumlah murid yang ada. Bagaimana mengatur tempat duduk di kelas, bagaimana mengatur acara olahraga, bagaimana mengatur pelaksanaan upacara. Penerapan protokol kesehatan tidak mudah dilakukan di setiap sekolah. Tiap-tiap sekolah mempunyai kendala, mengingat tidak semua memiliki fasilitas yang memungkinkan untuk mengikuti protokol kesehatan secara penuh.

Dari sisi siswa, diperlukan perubahan budaya dalam menjaga kesehatan. Memakai masker bisa menjadi hal yang tidak nyaman bagi anak-anak usia sekolah. Ketidannyamanan itu bisa menyebabkan pemakaian masker menjadi tidak benar secara kesehatan. Masker diturunkan sehingga tidak menutup hidung. Selain itu, berkali-kali memegang masker, kemudian tanpa cuci tangan memegang makanan, hidung, dan mulut. Ketaatan memakai masker dengan benar merupakan tantangan bagi siswa usia sekolah, apalagi siswa sekolah dasar. Siapa yang akan mengawasi siswa telah memakai masker dengan benar di kelas, di halaman sekolah, atau di kantin sekolah. Cara bersin yang benar juga harus dikawal betul pelaksanaannya oleh semua siswa. Sebab, cara bersin yang sembarangan juga risiko menularkan virus penyebab Covid-19. Lalu, siapa yang bertugas mengawal? Upaya mencegah penularan sangat penting karena data menunjukkan sebagian besar usia muda bila terkena Covid-19 tidak menunjukkan gejala. Dengan demikian, siswa yang tampak sehat pun bisa menularkan ke sekitarnya. Bila seorang siswa tertular di sekolah, siswa tersebut juga bisa membawa virus tersebut ke lingkungan rumah. Terinfeksi virus SARS-CoV-2 mungkin tidak menimbulkan gejala pada usia muda, tapi menjadi masalah ketika siswa tersebut menularkan ke orang tuanya, kakek-neneknya, dan saudaranya di rumah. Persebaran Covid-19 akan makin luas bila protokol kesehatan di sekolah tidak dipatuhi secara baik.

Persiapan kembali ke sekolah harus dipersiapkan secara matang, bisa dilakukan ketika angka kejadian Covid-19 sudah terkendali atau paling tidak telah melewati puncak. Sampai saat ini, kurva Covid-19 belum menampakkan puncaknya, laporan harian masih naik turun. Di sisi lain, memutuskan kembali ke

sekolah tidak hanya melihat angka absolut orang yang positif di suatu daerah. Sebab, bisa saja di daerah tersebut kasusnya sedikit karena jumlah tes yang dilakukan sedikit. Diperlukan persiapan yang sangat matang dari sisi siswa, orang tua murid, guru, sarana dan prasarana, hingga yang terpenting persiapan budaya baru, budaya hidup sehat. Pembuat keputusan di pusat dan di daerah perlu menggandeng para pakar kesehatan masyarakat, pakar dari Ikatan Dokter Indonesia, pakar pendidikan, dan tokoh masyarakat untuk duduk bersama, berdiskusi untuk memutuskan waktu ideal kembali ke sekolah di daerah masing-masing. Dengan demikian, pendidikan bisa berjalan baik dan tetap memperhatikan faktor kesehatan. Semoga pandemi Covid-19 membawa budaya baru di sekolah, budaya sehat.

Kebangkitan Nasional Melawan Virus Korona

Oleh JAGADDHITO PROBOKUSUMO

PARA dokter kini kembali berada dalam pusaran sejarah besar. Tak kalah penting dibandingkan peran dokter Soetomo dan kawan-kawan yang menginisiasi gerakan kebangsaan Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, yang kelak diresmikan sebagai Kebangkitan Nasional.

Kini para dokter berusaha membangkitkan semangat hidup bangsa, bahkan dunia, di saat rundungan sengit pandemi supervirus Covid-19. Kalau dulu para dokter pelopor gerakan kebangsaan menghadapi penjajah, kini mereka menghadapi virus yang tidak mengenal siapa lawan dan siapa kawan.

Virus ini dengan mudah masuk ke Indonesia. Tak hanya merusak kesehatan, tetapi juga ekonomi, bahkan kemanusiaan. Sampai-sampai Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut pandemi virus Covid-19 merupakan krisis global terburuk sejak Perang Dunia II.

Lebih dari 300.000 orang telah terbunuh sejak Covid-19 menyebar ke seluruh dunia. Yang sangat terasa, pandemi ini menyebabkan kehancuran ekonomi yang dampaknya akan membawa resesi yang mungkin tidak ada tandingannya di masa lalu.

Menyuntikkan Moral

Sebagai sebuah profesi, selain mengobati penyakit, para dokter juga memiliki fungsi sebagai trias agent. Yakni, agen perubahan (agent of change), agen pembangunan (agent of development), dan agen pengobatan (agent of treatment). Dokter yang ideal tidak hanya mengobati orang sakit (terapi dan rehabilitasi), namun juga mampu memberikan intervensi moral dan sosial di tengah masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (promosi dan prevensi).

Berdirinya Boedi Oetomo sebagai tonggak Kebangkitan Nasional merupakan implementasi dari peran dokter sebagai agen perubahan dan agen pembangunan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merangkumnya dalam "The Five Stars Doctor", yaitu dokter sebagai community leader, communicator, manager, decision maker, dan care provider.

Dokter saat ini lebih banyak berperan sebagai agent of treatment karena memang kebutuhan kuratif saat pandemi lebih diperlukan masyarakat. Kalau masyarakat adalah garda depan, dokter adalah benteng terakhir dalam penanganan

pandemi ini. Tenaga medis mempunyai risiko terpapar virus korona yang sama dengan masyarakat. Semakin tinggi kasus Covid-19 yang terdeteksi dan semakin tinggi masyarakat yang dirawat di rumah sakit akan berpotensi meningkatkan jumlah korban di tenaga medis.

Dulu dokter adalah pejuang intelektual yang berkontribusi terhadap pemikiran dan aksi perjuangan bangsa. Saat ini perjuangan pemikiran pun tetap dibutuhkan, namun dalam konteks untuk memberikan kontribusi dalam strategi penanganan Covid-19. Para dokter, baik individual maupun melalui wadah organisasi profesi, kerap menyampaikan pemikiran dan strategi agar kita menang melawan Covid-19. Ini merupakan suntikan moral dan intelektual kepada para pengambil keputusan agar mempunyai dasar saintifik dan etis dalam menanggulangi pandemi supervirus ini.

Coba kita tengok bagaimana dokter Soetomo dan kawan-kawan memberikan hal yang sama ketika bangsa ini dirundung penjajahan. Hari itu, 20 Mei 1908, 112 tahun yang lalu pukul 9 pagi, puluhan mahasiswa kedokteran berkumpul di School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA), lebih tepatnya di ruang anatomi. STOVIA adalah sekolah untuk pendidikan dokter pribumi di Batavia pada zaman kolonial Belanda (saat ini telah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia).

Dalam pertemuan itu, seperti dijelaskan dalam buku "Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta", para mahasiswa kedokteran STOVIA seperti Soetomo, M. Soeradji Tirtonegoro, Gondo Soewarno, Goenawan Mangoenkoesoemo, R. Angka Prodjosoeirdjo, Mochammad Saleh, dan R. Mas Goembrek sepakat mendirikan organisasi yang bernama Boedi Oetomo atau "tabiat yang luhur".

Boedi Oetomo memperjuangkan peningkatan kesempatan pendidikan bagi pria dan wanita muda di Jawa. Mereka percaya bahwa pendidikan bumiputra merupakan kunci masa depan Indonesia. Gagasan Soetomo mendirikan organisasi ini terinspirasi dari dokter Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa.

Dokter sebagai kaum intelektual di masanya mempergunakan pengetahuannya untuk membentuk fondasi bangsa Indonesia dengan semangat nasionalisme dan kesadaran berbangsa. Ini tidak terlepas dari watak yang

dibentuk melalui proses pendidikan kedokteran yang disertai sumpah serta etika yang harus dipatuhi sepanjang hayat oleh dokter.

Dokter mengabdikan profesinya tanpa terpengaruh pertimbangan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan kedudukan sosial. Sarat dengan nilai kesetaraan (justice). Nilai ini yang menjadi dasar tumbuhnya rasa ketertindasan yang sama akibat proses penjajahan yang akhirnya menimbulkan rasa nasionalisme. Keluhan rakyat adalah hal yang kami dengar dan kami tangani sehari-hari. Hal ini menjadikan dokter sebagai profesi yang termasuk paling dekat dengan penderitaan rakyat. Seperti juga yang terjadi di saat musim pandemi ini.

Jangan Sampai Terserah

Kini suara para dokter dalam dinamika menangani pandemi yang sudah berlangsung lima bulan ini banyak digaungkan oleh organisasi profesinya. Di negara mana pun, masukan organisasi profesi selalu diperhitungkan. Sebab, selalu berdasar problem riil di lapangan dari terus-menerus bersentuhan dengan permasalahan masyarakat. Bila satu keputusan besar yang menyangkut kepentingan masyarakat diambil tanpa mendengarkan pendapat si pelaku utama, sungguh amat janggal.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memiliki kewajiban untuk melakukan advokasi kebijakan pemerintah dan sarana pemecahan problem masyarakat. Sudah menjadi tanggung jawab IDI untuk memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Problem Covid-19 adalah problem kesehatan.

Sudah seyogianya referensi yang diambil pemerintah adalah referensi dari dokter. Pemerintah akan memahami problem riil masyarakat bila memperhitungkan saran dari dokter. Para dokter inilah pelaku intelektual terdepan yang menanggung risiko dalam penanganan langsung segala dinamika pandemi ini.

Para dokter melalui IDI telah meminta pemerintah agar tidak melonggarkan PSBB. Sampai ada data yang tepat untuk dijadikan indikator dan kriteria berdasar aspek medis-epidemiologis yang menjadi basis acuan sistem-sistem yang lain bisa dijalankan.

Evaluasi penanganan secara nasional dan per wilayah harus dibedakan sehingga fokus intervensi berdasar evaluasi medis-epidemiologis serta berbasis data yang kuat dan tepercaya. Yakni, data lapangan yang valid, ide solusi inovatif, dan murni kepentingan bangsa, bebas kepentingan sempit.

Menilik kebijakan pemerintah yang maju-mundur, pun abai terhadap rekomendasi organisasi profesi, mau dibawa ke mana Indonesia? Sulit rasanya bagi kami para dokter menerima imbauan presiden untuk berdamai dengan virus korona di saat kurva belum melandai, masih membubung. Tak heran para dokter dan tenaga medis menyuarkan kegelisahannya di media sosial dengan tagar ”Indonesia Terserah”. Ini bahaya. Ayo dengarkan seruan logis dan etis para dokter. Agar kita bersama tetap mampu menjaga semangat ”kebangkitan nasional” melawan supervirus Covid-19! (*)

Dokter dan Sejarah Indonesia

PADA 20 Mei 1908, para dokter turut menandai pergerakan nasional menghadapi rezim kolonial. Satu abad berselang, mereka kini kembali di garda depan palagan yang lain. Para mahasiswa kedokteran di STOVIA, kata Prof Hans Pols dari University of Sydney dalam kuliah umum di UGM tiga tahun silam, sebenarnya beridentitas *hybrid*.

Kenapa mereka akhirnya ”berpikir politik dan revolusioner?” Sebab, kata Prof Hans, mereka bersinggungan langsung dengan para pasien. Mereka tahu kondisi sebenarnya rakyat. Para calon dokter di STOVIA yang dipelopori, antara lain, Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, dan R. Mas Goembrek itu akhirnya sepakat mendirikan Boedi Oetomo (BO) pada 20 Mei 1908. Dalam rapat pada 9 September 1909, dokter Tjipto Mangoenkoesoemo mendorong BO agar menjadi organisasi kebangsaan yang terbuka bagi siapa saja. Dokter Tjipto ini yang turut berjasa membasmi wabah pes di Malang.

Setelah 1920, saat rezim kolonial kian represif, para dokter pribumi pun kian berani. Jurnal ditulis ”Generasi itu kemudian menjadikan kesehatan sebagai alat perjuangan dan kemajuan sosial,” kata Hans. Kini, 112 tahun kemudian, para dokter kembali berperan krusial dalam sejarah Indonesia. Berada di garda depan pertarungan melawan virus korona. Puluhan di antara mereka, termasuk perawat, meninggal dalam palagan ini.

Pembelajaran Daring untuk Siswa

Oleh: Rita Pranawati

SELALU ada hikmah pada setiap musibah. Pandemi Covid-19 memaksa kita untuk tetap tinggal di rumah. Terjadi perubahan mendasar pada situasi hari ini. Aktivitas orang tua dan anak menjadi satu di rumah. Sementara itu, pembelajaran yang biasanya dijalani dengan bertatap muka kini melalui daring.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memutuskan, seluruh proses pembelajaran anak usia sekolah dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring selama masa darurat Covid-19. Memang tidak semua anak dapat menjalani secara konsisten pembelajaran daring karena berbagai keterbatasan. Misalnya, ketiadaan fasilitas gawai (ponsel, laptop, dan tablet), rendahnya pemahaman tentang media digital, terbatasnya kemampuan membeli pulsa, dan keterbatasan sinyal. Namun, hampir sebagian besar siswa telah merasakan pembelajaran daring.

Proses Adaptasi

Mendikbud menyebut pembelajaran daring sebagai proses beradaptasi dengan teknologi. Adaptasi dengan teknologi bagi anak-anak adalah hal yang jauh lebih mudah. Apalagi, saat ini sekolah berhadapan dengan generasi Z. Generasi yang sangat lekat dan akrab dengan gawai atau teknologi digital. Karena itu, sebenarnya anak-anak lebih mudah beradaptasi untuk menggunakan teknologi.

Adaptasi teknologilah yang kemudian mendorong anak-anak untuk mudah bermigrasi ke era industri 4.0. Selama ini mungkin anak-anak belum sepenuhnya menyadari bahwa era industri 4.0 membuat efisiensi waktu dan tenaga kerja.

Dalam hal ini, anak tidak harus pergi ke sekolah dengan menggunakan moda transportasi, tapi dapat langsung melalui online ketika belajar. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, teknologi menjadi penghubung utama dalam proses belajar. Dunia maya yang selama ini sudah dijelajahi anak-anak menjadi dunia yang benar-benar hadir sebagai sebuah proses pembelajaran. Pembelajaran tatap muka dengan bantuan teknologi internet.

Bukan hanya siswa yang beradaptasi, guru pun beradaptasi dengan perubahan ini. Peran guru berubah, tapi peran secara fisik berkurang karena penggunaan berbagai media pengajaran. Guru juga dipaksa belajar teknologi baru dengan berbagai media pembelajaran. Guru mulai membuat video, aplikasi Moodle,

Google Classroom, dan berbagai aplikasi yang terhubung dengan institusi pendidikannya.

Guru juga beradaptasi untuk melakukan asesmen seberapa banyak materi, nilai, dan value yang akan dijadikan bahan ajar agar anak-anak tetap belajar dalam situasi yang nyaman dan menyenangkan. Guru juga akan berusaha agar semua siswa dapat mengerjakan tugas tanpa harus membebani anak-anak dan tetap memperhatikan kondisi tiap-tiap anak.

Literasi Digital

Sebelum era pembelajaran jarak jauh menggunakan sistem daring, banyak orang tua yang memiliki kekhawatiran ketika anaknya memegang gawai. Kekhawatiran tersebut, antara lain, anak akan kecanduan gawai, main game, bahkan berpotensi melihat konten dewasa dan konten yang mengandung kekerasan. Kekhawatiran itu semakin menjadi karena nyatanya memang ada anak-anak yang terjerumus dalam penyalahgunaan gawai dan teknologi informasi hingga kecanduan dan mengalami gangguan kesehatan mental.

Saat ini anak-anak memanfaatkan gawai dan akses internet untuk proses pembelajaran. Anak-anak mulai belajar bagaimana memanfaatkan media sosial untuk tatap muka daring dengan guru sekaligus bersua secara virtual dengan teman-temannya. Anak-anak juga mengasah keterampilan TIK (teknologi informasi dan komunikasi)-nya mulai dari mengetik tugas dengan Microsoft Word, membuat paparan dengan Power Point, membuat gambar atau poster, membuat video pendek, dan keterampilan teknologi informasi lainnya.

Anak-anak juga belajar menggunakan surat elektronik, mengunduh materi, memasukkan lampiran ke dalam surat elektronik, dan memasukkan tugas ke dalam aplikasi tertentu. Mereka juga belajar mencari informasi melalui dunia maya untuk menunjang pembelajaran.

Pembelajaran dengan teknologi informasi pada era Covid-19 ini merupakan proses literasi digital yang tidak disadari banyak anak-anak kita. Selama ini proses literasi digital berlangsung lambat dan parsial. Namun, hari-hari ini anak-anak mengalami pembelajaran yang luar biasa untuk memahami apa itu gawai, bagaimana pemanfaatan gawai dan teknologi informasi secara baik. Anak-anak juga belajar bagaimana memanfaatkan media sosial dan aplikasi-aplikasi lain untuk mendukung pembelajaran jarak jauh yang mereka jalani. Sebuah proses literasi digital yang sangat luar biasa positif bagi anak-anak.

Kemampuan Mengatur Diri

Dalam proses literasi digital, selain aspek positif, anak-anak perlu mengetahui potensi negatif dalam proses mengakses internet. Anak-anak perlu memahami dampak jika bermain game terlalu lama dan mengakses konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi. Anak-anak perlu menghentikan jika tiba-tiba ada pop-up iklan yang mengandung unsur pornografi dan kekerasan.

Guru memiliki fungsi yang penting agar anak dapat mengatur dan mengelola diri dalam memanfaatkan gawai dan koneksi internet. Guru memberikan tugas-tugas agar anak-anak dapat mengelola diri, memanfaatkan gawai dan internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Guru juga bertugas mengontrol aktivitas pembelajaran daring sekaligus memberikan masukan agar siswa terus memanfaatkan gawai, aplikasi, dan koneksi internet untuk mengembangkan pengetahuan.

Orang tua pun memiliki tanggung jawab mendampingi, memberikan masukan, dan mengawasi anak-anak dalam memanfaatkan penggunaan gawai pada era pembelajaran daring ini. Orang tua perlu membuka komunikasi yang dialogis dan membangun keterbukaan agar anak dapat menyeimbangkan belajar daring dan refreshing.

Hal itu mengingatkan anak mengakses internet di rumah dan tidak jarang pula di tengah-tengah belajar atau sesudah belajar anak-anak berselancar di dunia maya, bermain game, atau mengakses media sosial lainnya. Orang tua perlu mendorong anak-anak agar dapat bertanggung jawab terhadap pemanfaatan gawai untuk hal-hal yang produktif. Kemampuan mengatur diri itu akan menjadi kecerdasan emosi anak untuk menghadapi era industri 4.0.

Akhirnya, selalu ada hikmah dalam setiap peristiwa. Semoga pembelajaran daring bagi anak-anak membawa kebermanfaatan bagi masa depan mereka untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) unggul Indonesia

Korona, Pemerintah, dan Era Digital

Oleh Kacung Marijan

PERSEBARAN virus korona (Covid-19) sangatlah cepat. Virus itu mampu menerobos semua orang tanpa memandang golongan, ras, agama, dan negara. Akibatnya, semua orang, kelompok, dan negara sibuk dan bingung bagaimana mencegah dan mengatasinya.

Masih beruntung, pandemi korona itu terjadi pada era digital. Bisa dibayangkan jika itu terjadi pada era-era sebelumnya, misalnya kesulitan di dalam mencegah dan mengatasi implikasinya, akan lebih besar lagi. Instrumen mengendalikan dan bagaimana masyarakat beradaptasi di dalam situasi menyeramkan itu akan lebih sedikit.

Salah satu upaya untuk mengendalikan pandemi korona adalah melalui instrumen "menjaga jarak". Instrumen ini telah diterapkan banyak negara meski melalui strategi yang berbeda-beda. Tiongkok, Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lain telah menggunakan strategi lockdown dalam menjaga jarak secara sangat ketat.

Sementara itu, negara-negara lain, termasuk Indonesia, menggunakan strategi yang lebih lunak. Yang terpenting adalah adanya seruan kepada masyarakat agar melakukan "social distancing" agar sebelum menyebar, virus itu lebih dahulu mati.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membicarakan strategi mana yang paling efektif di antara keduanya. Yang ingin dibicarakan adalah anggota masyarakat maupun pemerintah yang membuat kebijakan masih bisa leluasa melakukan adaptasi di tengah-tengah penggunaan instrumen "menjaga jarak" itu.

Pada masa lalu, ketika lockdown di suatu wilayah atau negara diterapkan, masyarakatnya benar-benar terisolasi. Tidak ada ruang untuk berinteraksi dengan masyarakat di luarnya. Pada era digital, komunikasi itu bisa dilakukan oleh sesama anggota masyarakat yang terisolasi dan dengan orang lain di luarnya.

Karena itu, ketika ada orang atau kelompok yang mengalami kekurangan logistik, mereka relatif cepat diketahui dan mudah diatasi sepanjang supply barang yang dibutuhkan tersedia tidak jauh dari tempatnya. Bukan hanya itu. Masyarakat yang terisolasi itu, dalam derajat tertentu, juga masih bisa melakukan interaksi dan transaksi bisnis.

Di dalam situasi semacam itu, instrumen menjaga jarak dalam menangani pandemi korona, baik melalui lockdown maupun bukan, tidak serta-merta membuat ekonomi mati. Jelas, korona telah meruntuhkan bangunan ekonomi individu, perusahaan, maupun negara. Namun, korona tidak serta-merta menghentikan denyut nadi perekonomian seketika.

Hanya, bagaimana anggota masyarakat melakukan adaptasi di tengah-tengah instrumen menjaga jarak itu, bergantung pada tingkat budaya yang dimilikinya. Di dalam masyarakat digital, setiap individu seperti berperilaku soliter, bergerak sendiri-sendiri seolah tanpa membutuhkan orang lain.

Namun, dalam masyarakat digital yang matang, perilaku soliter itu sebenarnya hanyalah semu. Masing-masing sebenarnya juga menyadari bahwa mereka itu tidak bisa hidup berdiri sendiri, melainkan saling bersinergi satu sama lain meskipun seperti ada jarak yang memisahkan.

Dalam situasi pandemi korona, masyarakat yang memiliki karakter budaya semacam itu bisa lebih efektif dalam mencegah memburuknya situasi dan dalam taraf tertentu mampu beradaptasi serta bersahabat terhadap situasi yang buruk tersebut. Di dalam diri mereka terdapat kesadaran bahwa hidup soliter secara fisik dalam situasi itu memang harus dilakukan karena itu memang membahayakan semua pihak.

Namun, melalui akses informasi dan komunikasi yang dimiliki, mereka masih mungkin memiliki kemampuan mengatasi kesulitan-kesulitannya seperti untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman dan bahkan masih bisa berbisnis.

Di dalam masyarakat yang budaya digitalnya belum matang, perilaku seperti itu tidak sepenuhnya terjadi. Di masyarakat kita, misalnya, justru kita temukan realitas bahwa tidak sedikit orang yang tetap hidup di dalam keramaian, berkelompok, tetapi secara "psikologis" sebenarnya mereka hidup soliter. Lihatlah di warung-warung atau tempat orang berkumpul, mereka hanya sebentar berinteraksi, tetapi pikiran mereka menjauh antara satu dan lainnya.

Dalam situasi seperti itu, imbauan pemerintah, para pejabat, dan tokoh-tokoh masyarakat agar semua pihak menggunakan instrumen menjaga jarak dengan strategi social distancing masih berhenti pada tataran psychological distancing. Lihatlah, sejumlah pelajar dan mahasiswa yang mengikuti pelajaran dan perkuliahan secara online karena perkuliahan offline dihentikan. Pada awal-awal

pembelajaran itu dilakukan, mereka justru berkelompok di rumah, kos-kosan, warung, atau kafe dengan alasan memanfaatkan wifi gratis.

Situasi semacam itulah, antara lain, yang menjadikan strategi social distancing yang kita gaungkan belum cukup kuat membendung laju pandemi korona di negara kita. Jumlah yang dicurigai dan positif korona meningkat secara tajam. Hal itu tidak lepas dari realitas bahwa masyarakat kita belum mampu melepaskan ikatan-ikatan fisik di tengah-tengah situasi yang justru mengharuskan mereka melepaskannya untuk sementara.

Karena pandemi korona dan implikasinya sangat luar biasa, situasi semacam itu tentu tidak bisa berlanjut. Pemerintah yang menjadi panglima terdepan memiliki peran yang sangat penting. Setidaknya, ada dua hal yang bisa dilakukan di luar kebijakan ekonomi makro dan mikro yang sudah dilakukan.

Pertama, menjamin keberlangsungan jalannya masyarakat digital melalui kemudahan akses informasi dan komunikasi. Agar para mahasiswa dan orang lain yang kekurangan finansial tidak sibuk mencari wifi gratis, pemerintah bisa memberikan subsidi "data gratis" kepada mereka dalam kurun waktu tertentu.

Akses itu tidak hanya untuk mempermudah proses belajar-mengajar, tetapi juga untuk proses-proses sosial dan ekonomi di tengah-tengah situasi untuk "menjaga jarak". Akses itu akan menjadi "nyawa". Bukan hanya alat berkomunikasi, melainkan juga untuk terus menjaga kehidupannya. Kebutuhan hidup sehari-hari masih mungkin dipenuhi melalui berbagai aplikasi "antar jemput" barang dan jasa secara digital.

Kedua, pemerintah membuat kebijakan tentang adanya jaminan keamanan di dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya jaminan makanan dan minuman. Ketiadaan jaminan logistik semacam itu masih memungkinkan adanya orang yang nekat melanggar social distancing hanya karena tidak mau "mati kelaparan".

Agar lebih efektif dan melibatkan partisipasi publik, proses ketersediaan logistik itu bisa melibatkan para penyedia seperti petani dan pabrikan sebagai supplier atas kebutuhan itu dan pendistribusiannya melibatkan komunitas di sekitarnya. Pelibatan itu juga ditujukan untuk meredakan jatuh bangkrutnya para produsen. Tentu, dalam proses itu, protokol "menjaga jarak" tetap dilakukan melalui penggunaan perangkat digital.

Melalui kebijakan dan sinergi semacam itu, upaya mengatasi implikasi pandemi korona ini akan menjadi gerakan bersama, bukan hanya gerakan yang dilakukan pemerintah. Semoga.

Wabah dan Ujian Nalar

Oleh Okky Madasari

BERADA di Singapura, di tengah wabah virus mematikan yang menyebar cepat dari Kota Wuhan ke berbagai belahan dunia, menyadarkan saya pada dua hal penting. Pertama, bagaimana mitigasi bencana penyakit menular harus dilakukan. Kedua, bagaimana wabah virus menguji nalar dan kemanusiaan kita; apakah kita bisa tetap adil dan rasional ataukah kita akan tergelincir dalam kebencian, rasisme, dan xenophobia?

Dalam hal mitigasi, Singapura adalah salah satu negara yang sejak awal sigap melakukan pencegahan. Dua minggu sebelum pemerintah Tiongkok memutuskan mengisolasi Kota Wuhan dan perbincangan tentang virus Wuhan mendunia, pemerintah Singapura telah memberikan peringatan kepada warganya. Setiap lembaga pendidikan, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, melakukan pendataan siapa saja bagian dari lembaga tersebut yang baru saja pulang dari Tiongkok. Padahal, saat itu belum ada kasus terkonfirmasi virus Wuhan di Singapura. Bahkan, belum ada pernyataan resmi dari Beijing dan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang bagaimana virus itu menyebar dan seberapa banyak kasus yang telah terjadi di Tiongkok.

Sesaat setelah Wuhan diisolasi, berbagai tindakan mitigasi makin digiatkan secara masif dan terstruktur. Mulai peringatan untuk tak melakukan perjalanan ke Tiongkok, kewajiban untuk mengisolasi diri sendiri selama 14 minggu bagi siapa pun yang baru kembali dari Tiongkok, hingga persiapan fasilitas karantina. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah perintah untuk mengosongkan beberapa gedung di tiga universitas di Singapura untuk dijadikan fasilitas karantina. Di National University of Singapore, misalnya, empat gedung apartemen 13 lantai dikosongkan dalam waktu 24 jam. Penghuninya dipindahkan ke gedung lain.

Kebijakan terakhir Singapura yang cukup mengejutkan adalah melarang kedatangan semua orang dari Tiongkok atau yang tercatat baru melakukan perjalanan dari Tiongkok untuk masuk ke Singapura. Kebijakan itu dikeluarkan sesaat setelah WHO meningkatkan status wabah Wuhan sebagai darurat internasional.

Kesigapan dalam mitigasi bencana wabah bukan karena ketakutan yang berlebihan atau sekadar gaya-gayaan. Selain karena fakta merupakan kota

internasional yang dihuni dan disinggahi banyak orang dari berbagai negara, Singapura memiliki trauma mendalam atas wabah SARS tahun 2003 yang menelan lebih dari 800 korban di seluruh dunia. Saat itu perekonomian langsung terpukul, pariwisata mandek, semua orang takut untuk datang ke Singapura, sebagaimana orang juga tak mau datang ke Hongkong dan Tiongkok. Karena itu, bisa dimengerti pula kenapa kini otoritas tertinggi Hongkong memutuskan untuk menutup perbatasan dengan Tiongkok. Bicara tentang wabah bukan sekadar bicara angka kematian. Dampak kesehatan juga tak sesederhana mati atau tidak mati.

Ujian Nalar

Situasi krisis seperti wabah selalu menguji nalar dan kemanusiaan individu. Ketika sudah menjadi fakta bahwa virus itu berasal dari Tiongkok, tentu sudah menjadi naluri bertahan hidup setiap orang untuk mewaspadaai bahwa setiap orang yang baru kembali dari Tiongkok memiliki kemungkinan terkena virus tersebut dan akan menularkannya kepada orang lain. Tentu sudah naluri juga jika kita memilih untuk menghindari, untuk tidak bersalaman, untuk selalu memakai masker ketika berada di keramaian atau berinteraksi dengan siapa saja. Dalam situasi ini, bisa dimengerti jika kita memiliki kecurigaan bahwa seseorang berpotensi menyebarkan virus. Bisa dipahami juga jika kita –juga masyarakat di seluruh dunia– mengkritik dan menggugat penanganan wabah yang dilakukan pemerintah Tiongkok.

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana timbangan nalar dan rasa kemanusiaan kita mampu mengendalikan rasa takut dan waspada agar tidak bermuara pada generalisasi, labelisasi, stereotipe, kebencian, apalagi rasisme dan xenophobia. Ujian nalar ini bukan hanya persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat di berbagai negara, termasuk Singapura.

Sebagaimana di Indonesia, ujaran-ujaran yang menunjukkan kebencian dan *xenophobia* pada orang Tiongkok yang baru datang dari daratan mengemuka di linimasa media sosial publik Singapura seiring datangnya wabah. Di Italia, seorang perempuan berteriak kepada seorang pemuda ras Tionghoa dan mengatakan bahwa si pemuda akan menularkan virus. Nyatanya, si pemuda lahir dan besar di Italia dan tak pernah ke Tiongkok seumur hidup. Di Jepang, toko-toko memasang tulisan yang melarang orang Tiongkok masuk.

Ketika fakta menunjukkan virus korona berasal dari Tiongkok, apakah itu serta-merta membuat kita menganggap bangsa Tiongkok dan semua yang rasnya Tionghoa adalah pembawa penyakit yang harus ditolak keberadaannya? Ketika melihat video orang Tiongkok makan kelelawar, apakah itu kita artikan bahwa semua orang Tiongkok suka makan kelelawar, tikus, dan aneka macam satwa lainnya? Ketika kita tahu ada diskriminasi pada muslim Uighur, apakah kita akan simpulkan bahwa wabah itu merupakan azab karena telah menyiksa orang muslim?

Apakah wabah akan menjadi alasan bagi kita untuk menyalakan kebencian dan sikap rasis? Itulah ujian nalar dan rasa yang dihadapkan pada kita di tengah wabah virus korona.

RS Harus Siap, Individu Harus Jaga Stamina
Oleh Prof dr Nasronudin SpPD-KPTI FINASIM

SAAT ini dunia dihebohkan kehadiran strain (tipe) virus baru yang disebut novel coronavirus (nCoV). Strain virus baru itu mulai dikenal dari pasar seafood Huanan, Wuhan, Tiongkok. Novel coronavirus merupakan strain baru dari virus korona. Memiliki kerabat yang sama dengan MERS-CoV (kedekatan 88 persen), juga dengan virus penyebab sindrom pernapasan akut (SARS, kedekatan 89 persen). Wuhan novel coronavirus termasuk genus beta coronavirus dan subgenus sarbecovirus.

Persebaran semula terjadi pada penduduk Wuhan dan sekitarnya. Termasuk Beijing, Shanghai, dan Goangdong. Kemudian, menyebar ke berbagai negara seperti Thailand, Jepang, Korea, dan lain-lain. Virus korona semula dikenal dengan jenis virus zoonosis. Penularannya terjadi dari hewan ke manusia. Namun, perkembangan terkini, penularan terjadi dari manusia ke manusia.

Transmisi atau penularan nCoV umumnya berlangsung cepat karena itu, harus disikapi dan diantisipasi dengan cepat dan sedini mungkin. Dengan begitu, dapat segera dideteksi keberadaannya, ditegakkan atau dipastikan diagnosisnya melalui pemeriksaan laboratorium.

Selain itu, harus ditata kelola dengan cepat dan tepat agar tidak terjadi komplikasi. Sebab, komplikasi yang berat dapat menimbulkan pneumonia. Yakni, suatu infeksi paru yang berkembang pesat dan berat. Akibatnya pun bisa berakhir fatal.

Mengingat perkembangan pneumonia berat yang cenderung menjadi gagal napas sangat besar, rumah sakit perlu mempersiapkan alat bantu pernapasan bila sewaktu-waktu diperlukan. Tujuannya, menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Setiap rumah sakit harus tanggap dan mempersiapkan diri untuk mengantisipasi dan melakukan tata kelola ketika menghadapi pasien terinfeksi nCoV. Apalagi, novel coronavirus saat ini telah menjadi masalah global.

Rumah sakit perlu melakukan sosialisasi kepada para petugas kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan, menyediakan perlengkapan universal precaution, mempersiapkan dan menyediakan ruangan isolasi guna membatasi transmisi atau penularan infeksi.

Ruang isolasi harus memenuhi persyaratan khusus. Di antaranya, tersedia tekanan positif, tekanan negatif, dilengkapi alat detektor tekanan ruangan otomatis, hypafilter, serta memiliki perlengkapan universal precaution.

Individu juga perlu menjaga kesehatan dan stamina dengan baik. Beristirahat cukup, mengonsumsi nutrisi yang sehat, mempertahankan pola hidup sehat, menjaga tradisi mencuci tangan dengan sabun, memakai penutup hidung dan mulut, terutama di area keramaian. Khususnya, ketika berada di daerah endemis nCoV.

Bila individu baru berkunjung dari daerah endemis nCoV atau kontak dengan penderita yang kemudian mengalami tanda-tanda infeksi seperti panas badan, nyeri tulang dan otot, sakit kepala, batuk pilek, menggigil, mual, muntah, sesak napas, segeralah menghubungi rumah sakit terdekat.

Hingga kini, belum ada vaksin untuk mencegah virus korona. Karena itu, pencegahan lebih ditekankan pada upaya meningkatkan kekebalan tubuh. Bila ingin bepergian ke daerah endemis nCoV, sebaiknya mempersiapkan diri sebaik-baiknya.

Jika memungkinkan, menanggukkan kepergian ke tempat endemis tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika masyarakat Indonesia kontak dengan individu yang baru datang dari daerah endemis, termasuk mitra kerja dari daerah endemis yang menunjukkan tanda-tanda infeksi pernapasan, perlu meningkatkan kewaspadaan diri.

Etika Tenaga Penjual dan Persepsi Konsumen Terhadap Perusahaan

Oleh Hastuti Naibaho

PERSEPSI konsumen terhadap perusahaan memegang peran yang semakin penting di era bisnis digital saat ini karena konsumen dapat dengan mudah melakukan publikasi atas pengalaman negatif konsumen dengan tenaga penjual melalui media digital seperti sosial media. Ketika konsumen berinteraksi dengan tenaga penjual maka identitas sosial yang dibawa oleh tenaga penjual adalah identitas organisasi sehingga ketika konsumen mengalami ketidakpuasan terhadap layanan tenaga penjual, persepsi negatif yang timbul adalah persepsi negatif terhadap nama perusahaan.

Tenaga penjual merupakan backbone employee karena tenaga penjual yang berinteraksi dengan konsumen untuk menjual produk/jasa perusahaan sehingga ada cash in bagi perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku tenaga penjual adalah sistem imbalan (sales reward system) yang diberlakukan oleh perusahaan terhadap capaian kinerja tenaga penjual. Ketika sistem imbalan seperti bonus didasarkan pada terjadinya transaksi penjualan maka tenaga penjual akan melakukan segala cara agar terjadi transaksi penjualan untuk mendapatkan bonus. Terkadang, tenaga penjual tidak mengungkapkan beberapa informasi kepada calon konsumen yang perkiraan oleh tenaga penjual bahwa informasi tersebut berpotensi membuat konsumen memutuskan lebih lama atau bahkan tidak jadi membeli produk/jasa yang ditawarkan tenaga penjual. Hal ini yang menyebabkan beberapa konsumen kecewa dan merasa tertipu setelah transaksi pembelian terjadi. Pada kondisi ini, yang dirugikan adalah perusahaan (reputasi perusahaan), bukan tenaga penjual tersebut karena konsumen melakukan pembelian didasarkan atas kepercayaan terhadap nama (kredibilitas) perusahaan.

Suyoto, Naibaho, dan Pitaloka (2020) melakukan penelitian tentang sales reward systems, sales ethical behavior dan consumer perception on corporate pada tenaga penjual di perbankan kawasan Jabodetabek. Tenaga penjual dalam penelitian ini adalah tenaga penjual yang menjual produk-produk keuangan perbankan seperti kartu kredit, pinjaman kredit dengan agunan maupun tanpa agunan serta pinjaman kredit untuk rumah. Pada penelitian mereka, kuesioner dibagikan pada tenaga penjual untuk mendapatkan informasi tentang persepsi mereka terhadap sistem imbalan di tempat mereka bekerja dan niat berperilaku

etis. Pertanyaan yang diajukan seperti “saya tidak menjawab pertanyaan yang diajukan konsumen ketika saya tidak tahu jawabannya hanya untuk mendapatkan bonus (insentif) dari penjualan. Penelitian ini juga melibatkan konsumen melalui pembagian kuesioner kepada konsumen perbankan untuk mengetahui persepsi dari konsumen terhadap citra perusahaan yang direpresentasikan oleh perilaku tenaga penjual. Pertanyaan yang diajukan seperti “perusahaan mentaati aturan-aturan moral terkait dengan pelayanan konsumen”. Total responden penelitian ini adalah 354 yang terdiri dari 177 responden mewakili tenaga penjual dan 177 responden mewakili konsumen yang berinteraksi dengan tenaga penjual tersebut.

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sales reward systems secara signifikan mempengaruhi etika tenaga penjual (sales ethical behavior). Hal ini menunjukkan bahwa sales reward systems dapat merubah perilaku tenaga penjual, yaitu dapat menimbulkan perilaku tidak etis tenaga penjual dalam menawarkan/menjual produk. Temuan lainnya adalah sales ethical behavior memberikan pengaruh pada persepsi konsumen terhadap kredibilitas perusahaan (consumer perception on corporate). Persepsi konsumen akan perusahaan dapat terbentuk dari perilaku tenaga penjual. Konsumen akan memiliki persepsi positif akan perusahaan jika tenaga penjual menunjukkan perilaku etis dalam menawarkan/menjual produk. Salah satu pernyataan dari hasil rekapitulasi jawaban kuesioner menunjukkan bahwa bahwa konsumen banyak merasa terganggu dengan perilaku tenaga penjual karena ketidakjelasan informasi yang diberikan tenaga penjual. Tenaga penjual hanya fokus pada terjadinya transaksi penjualan.

Perusahaan penting untuk memberikan perhatian terhadap persepsi konsumen karena persepsi konsumen akan menentukan perilaku konsumen terhadap perusahaan, seperti pembelian produk. Hawkins & Mothersbaugh (2010) menyatakan bahwa persepsi, pembelajaran, ingatan, motif, kepribadian, emosi dan sikap memiliki pengaruh terhadap terbentuknya perilaku. Persepsi konsumen terhadap perusahaan dipahami sebagai apa yang orang pikirkan tentang atribut-atribut yang melekat pada perusahaan (Schiffman & Kanuk, 2007). Ketika konsumen memiliki persepsi negatif terhadap perusahaan maka konsumen akan dapat memutuskan untuk tidak membeli produk/jasa perusahaan.

Robertson & Anderson (1993) menyatakan bahwa perilaku dinyatakan etis (tidak etis) apabila perilaku tersebut konsisten (tidak konsisten) dengan norma kemasyarakatan yang diterima secara luas (misalnya, kejujuran dan tanggungjawab). Meskipun perilaku penjualan etis (tidak etis) itu merupakan sesuatu yang tidak mudah dipahami dan sangat sering tergantung pada situasi tertentu (kontekstual). Perilaku etis/tidak etis penjual didefinisi sebagai perilaku tenaga penjualan yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan atau tidak menguntungkan (mengorbankan) pelanggan yang dilayani. Sales ethical behavior adalah tindakan tenaga penjualan untuk meyakinkan konsumen, baik aktual atau potensial, agar konsumen bersedia melakukan pembelian produk yang ditawarkan meskipun menutupi sebagian informasi kepada calon konsumen. Perilaku ini dapat terjadi karena imbalan (kompensasi) yang diharapkan tenaga penjual dapat diperolehnya dari perusahaan untuk transaksi penjualan.

Merujuk pada hasil penelitian ini, penulis menyarankan kepada perusahaan agar berhati-hati dalam mendesain sistem imbalan untuk tenaga penjual agar tidak memberikan peluang terbentuknya perilaku tidak etis. Sistem imbalan yang sangat menarik bagi tenaga penjual seperti pedang bermata dua. Satu sisi dapat memotivasi tenaga penjual untuk mencapai target penjualan tetapi jika prosedur pelaksanaan kerja sesuai dengan etika bisnis tidak dikaitkan dengan sistem/prosedur imbalan maka sistem imbalan ini akan memberikan konsekuensi negatif kepada perusahaan.

Menghadirkan Kembalinya Kasih Ibu **Oleh Aristiana Rahayu**

LIRIK lagu Kasih Ibu karya S.M. Mochtar begitu melegenda. Menggambarkan ibu sebagai sosok yang sempurna. Kasihnya tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak pernah mengharap kembali. Sosok ibu pun digambarkan sebagai sang surya yang menyinari dunia.

Lagu itu seperti sudah melekat dengan anak-anak usia dini. Dinyanyikan di setiap rumah dan sekolah dengan rasa bahagia. Berpuluh-puluh tahun kemudian, lirik lagu itu tak pernah hilang dari ingatan. Seolah sebagai pesan abadi bahwa ibu adalah sosok yang penuh kelembutan, kasih sayang, dan selalu siap berkorban untuk anak-anaknya.

Namun, deskripsi tentang sosok ibu yang demikian indah itu serasa porak-poranda saat muncul berita pembunuhan sadis di Dusun 2, Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara (9/12). Seorang ibu berinisial MT, 30, tega membunuh tiga anak kandungnya sendiri yang masih balita. Ketiga korban diketahui berinisial YL, 5; SL, 4; dan DL, 2.

Setelah membunuh tiga anaknya itu, pelaku sempat berusaha bunuh diri. Caranya menggorok leher sendiri dengan parang. Penyebab aksi keji itu diduga impitan masalah ekonomi dan hubungan yang kurang harmonis dengan suaminya.

Sebelumnya, masyarakat juga dikejutkan berita seorang ibu di Lebak, Banten, yang tega menganiaya putrinya hingga meninggal. Alasannya, si ibu kesal karena anaknya susah memahami pembelajaran daring.

Kasus memilukan ini menyadarkan kita, baik sebagai orang tua, perempuan, maupun bagian dari elemen masyarakat, sudah sedemikian beratkah beban yang ditanggung para ibu saat ini? Sehingga nalar sehat dan kodrat kasih sayang mereka tak mampu membendung derasnya impitan tekanan hidup atau kemarahan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut kekerasan terhadap anak, salah satunya, disebabkan beratnya beban ibu saat pandemi Covid-19. Hal ini dikuatkan dengan hasil survei KPAI terhadap orang tua maupun anak. Survei itu menyorot responden orang tua perempuan lebih besar, yaitu 74,4 persen, dan

laki-laki 25,6 persen. Survei secara online mulai 8–14 Juni 2020 melibatkan 25.146 anak dan 14.169 orang tua yang tersebar di 34 provinsi Indonesia.

Temuan hasil survei kepada anak, pengasuhan dominan dilakukan ibu. Para ibu mengedukasi anak seperti memberi tahu tentang protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19, mendampingi anak saat belajar, mendampingi anak beraktivitas, termasuk mengajak beribadah, hingga membangun rasa kepedulian kepada sesama.

Survei juga menemukan bahwa 21 persen ayah tidak pernah mendampingi anak belajar. Lalu, 17,5 persen ayah tidak pernah menemani anak beraktivitas. Temuan lainnya, hanya 33,8 persen orang tua yang pernah mengikuti pelatihan atau memperoleh informasi tentang pengasuhan (parenting).

Pandemi, Ketangguhan Keluarga dan Kepedulian

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung hampir setahun menjadi ujian besar bagi negara sekaligus masyarakat hingga dalam tatanan ruang terkecil, yaitu keluarga. Berbagai kasus kekerasan yang dilakukan ibu kepada anak tidak bisa dilepaskan dari beratnya beban psikologis, domestik, sekaligus beban pengasuhan yang harus ditanggung. Peran ini semakin berat apabila tidak ada kerja sama yang baik antara ibu dan ayah dalam keluarga.

Dalam banyak kasus kekerasan kepada anak, baik yang terjadi sebelum atau selama pandemi Covid-19, salah satu pintu masuknya adalah ketidakseimbangan pembagian peran dalam rumah tangga. Pengasuhan anak sesungguhnya tidak hanya menjadikan perempuan sebagai penanggung jawab utama. Namun, peran ayah di dalamnya juga sangat penting.

Hart (2002) menegaskan bahwa ayah memiliki peran keterlibatan dalam pengasuhan anak. Di antaranya, economic provider (ayah dianggap sebagai pendukung finansial dan perlindungan bagi keluarga), caregiver (ayah dianggap mampu memberikan stimulasi afeksi dalam berbagai bentuk sehingga mampu memberikan rasa nyaman penuh kehangatan), teacher and role model (sebagaimana ibu, ayah juga bertanggung jawab terhadap apa saja yang dibutuhkan anak untuk masa mendatang melalui latihan dan teladan yang baik), serta resources (melalui berbagai cara dan bentuk, ayah mendukung keberhasilan anak dengan memberikan dukungan di belakang layar).

Dalam kasus kekerasan ibu kepada anak yang penulis temukan di lapangan, pintu masuk masalah ini adalah kehadiran ayah yang ada dalam keluarga, namun absen dalam perannya.

Keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, pendidikan rendah, dan pemahaman serta pengaplikasian nilai-nilai spiritualitas rendah memiliki risiko lebih besar akan terjadinya kekerasan dalam keluarga. Dalam kondisi seperti ini, sangat penting membangun solidaritas sosial.

Solidaritas sosial menjadi penting karena sebagai titik tumpu bukti kekuatan masyarakat dan bagaimana menghadapi permasalahan. Para ibu di berbagai kota di Indonesia, dengan fitrah kasih sayang dan kemanusiaannya, telah menjadi bagian penting dalam mengambil peran sebagai pembawa solusi terhadap berbagai persoalan sosial di masyarakat melalui bantuan kesehatan, pangan, maupun penciptaan lapangan kerja (ekonomi).

Namun, melihat kembali fakta banyaknya kasus kekerasan dalam keluarga yang justru dilakukan para ibu mengharuskan kita semua makin sadar diri. Bahwa membangun solidaritas bukan semata-mata membantu masalah kesehatan, pangan, dan ekonomi. Namun juga membangun komunikasi antartetangga sebagai sikap peduli dan empati.

Selain itu, penting dilakukan gerakan edukasi pola pengasuhan anak dengan pola dan sistem yang bisa diakses secara mudah dan diterima semua lapisan masyarakat. Selamat Hari Ibu.

IRONI HARI ANTIKORUPSI

Oleh Dani Asmara

SETIAP 9 Desember warga dunia memperingati Hari Antikorupsi Internasional. Hari Antikorupsi Internasional itu ditetapkan berdasar Resolusi PBB Nomor 58/4 pada 31 Oktober 2003. Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB tentang Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada 18 Desember 2003 dan meratifikasinya pada 19 September 2006 sehingga negara kita harus mendukung gerakan antikorupsi internasional.

Namun ironis, di Hari Antikorupsi Internasional, negeri ini belum berbangga hati karena masih termasuk negara korup di dunia. Dalam Global Corruption Barometer Asia yang dirilis Transparency International akhir November 2020, Indonesia merupakan negara terkorup ketiga di Asia setelah India dan Kamboja. Kita pun menyaksikan, dalam dua pekan terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua menteri dan dua kepala daerah. Yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, serta Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo.

Gelombang korupsi dari pejabat tinggi itu sungguh memilukan sekaligus memalukan. Sebab, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu menegaskan, "Stop korupsi, untuk siapa pun." Namun, manisnya harta sepertinya menjadi godaan yang tidak tertahankan di tengah kekuasaan yang nyaris tanpa batas. Sehingga kasus pejabat tinggi yang tersapu tsunami korupsi terus terjadi di negeri ini. Menurut data, sejak masa reformasi, tidak kurang dari 82 politikus serta 361 kepala daerah (343 bupati/wali kota dan 18 gubernur) telah terjerat lembaga antirasuah itu.

Sungguh menyedihkan, menyaksikan orang dengan harta miliaran dan gaji ratusan juta rupiah, tetapi masih korupsi di mana-mana. Sementara 19 juta penduduk tidur dengan perut yang lapar. Nyaris tidak ada instansi yang bersih dari korupsi di negeri ini. Sampai-sampai dana untuk ibadah haji dan bantuan sosial bencana pun dikorupsi juga. Aksi konyol korupsinya para pejabat yang sesungguhnya kaya raya tentu bisa disebabkan banyak hal. Mulai kebiasaan bagi-bagi, upeti, balas jasa, mahalnya ongkos politik, hingga penyalahgunaan wewenang.

Namun, bila dicermati, aksi rakus pejabat tinggi yang terus saja korupsi menunjukkan tiga hal. Pertama, keserakahan. Para pejabat sudah tidak merasa bersalah, malu, dan takut kepada Tuhan. Perilaku tamak mereka dalam mengambil untung dari setiap pengadaan, terlebih menyunat bantuan sosial ketika bencana, jelas sangat menyakitkan. Apalagi dilakukan pada saat kondisi sebagian besar masyarakat dilanda kesusahan ulah wabah korona, PHK, dan beragam bencana seperti erupsi gunung berapi, banjir, serta tanah longsor. Untung, sebagian besar masyarakat miskin yang hanya didekati ketika pemilu dan pilkada masih bisa bersikap sabar, tabah, dan cenderung pasrah.

Kedua, krisis keteladanan. Sejak Orde Reformasi, sesungguhnya keteladanan ini yang betul-betul dalam krisis. Telah lama bangsa ini tidak memiliki figur pemimpin yang memberikan teladan. Tidak ada panutan, tidak ada teladan, kita kehilangan *exemplary center*. Generasi muda kehilangan panutan yang perkataannya sesuai dengan sikap dan perbuatan. Mental para pejabat saat ini tampaknya masih seperti yang disampaikan Mochtar Lubis (1981), dipenuhi mental hipokrit (munafik). Lain perkataan dengan perbuatan.

Para pejabat tinggi sepertinya sangat biasa berpura-pura bersih mendukung KPK, padahal bisa jadi mereka sedang menunggu giliran ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka juga ikut memaki-maki korupsi, padahal mereka sendiri bagian dari lingkaran setan korupsi.

Bukankah para koruptor dulunya pernah mengusulkan hukuman mati atau hukuman potong jari bagi pencuri uang negara. Atau beberapa koruptor juga pernah membintangi iklan "Katakan tidak pada korupsi". Sungguh, sepertinya tujuan menjadi pejabat negara bukan lagi ingin mengabdikan, tetapi ujung-ujungnya ingin cepat kaya raya dan berkuasa.

Ketiga, sanksi atau hukuman yang dipandang ringan. Menurut data ICW, pada 2013 hukuman bagi koruptor rata-rata hanya 2 tahun 11 bulan. Kemudian pada 2014 turun menjadi rata-rata 2 tahun 8 bulan. Bahkan, selama setengah tahun pertama 2015, rata-rata hakim menjatuhkan vonis pidana korupsi hanya 2 tahun 1 bulan penjara.

Padahal, sesuai dengan pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, hukuman bagi pelaku korupsi adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 200 juta

dan paling banyak Rp 1 miliar. Atau masih sesuai pasal 2 UU 31/1999 itu, bila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, hukumannya bisa pidana mati.

Pantas bila syahwat korupsi para pejabat tinggi kian menjadi-jadi, tidak terkendali, dan sulit dihentikan karena bisa jadi selama ini hukumannya sangat ringan. Hukum kita masih seperti pisau, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hanya tegas untuk orang kecil dan tidak berdaya menjerat para penguasa serta pengusaha.

Padahal, untuk menimbulkan efek jera, hukuman yang berat seharusnya dihadiahkan kepada pejabat tinggi yang masih nekat bermain mata dengan korupsi. Seperti yang pernah dilakukan hakim Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar, yang berani memberikan putusan hukum yang berlipat ganda, memiskinkan dan mencabut hak politik pejabat tinggi yang korupsi.

Melalui peringatan Hari Antikorupsi Internasional, sejatinya kita harus meredam aksi korupsi melalui kampanye hidup sederhana dan menghadirkan keteladanan dari para pemimpin. Juga sikap berani dari para penegak hukum untuk menuntut dan memvonis berat para koruptor. Sehingga kita benar-benar mendukung gerakan antikorupsi internasional. Semoga. (*)

Menerjemahkan Hasil Pertama Vaksin Covid-19

Oleh Dominicus Husada

PADA 9 November 2020, Pfizer/BioNTech mengeluarkan pernyataan bahwa vaksin mereka menunjukkan hasil menggembirakan dengan perlindungan sekitar 90 persen. Hasil ini disambut gembira, termasuk yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks harga saham. Sekalipun demikian, penafsiran terhadap hasil ini harus dilakukan dengan cermat agar tidak terjebak dalam euforia palsu.

Vaksin ini adalah satu di antara dua vaksin pertama yang akan mengeluarkan analisis awal mereka November ini. Ada enam vaksin Amerika Serikat yang masuk dalam Operation Warp Speed dan semuanya akan mengeluarkan analisis awal uji klinis tahap III dalam enam minggu ke depan.

Vaksin yang digarap oleh tiga perusahaan, yaitu Pfizer dari Amerika Serikat, BioNTech dari Jerman, dan Fosun Pharma dari China, ini berbasis mRNA. Ini adalah platform baru dalam dunia vaksin dan hingga kini belum ada satu pun vaksin di dunia yang menggunakannya.

Ada beberapa keuntungan dari vaksin mRNA. Satu di antaranya adalah produksi yang jauh lebih cepat daripada semua vaksin dengan platform yang lain. Kecepatan produksi adalah salah satu hal yang mutlak diperlukan dalam produksi vaksin Covid-19. Pfizer menjanjikan dapat memproduksi sekitar 1,3 miliar dosis sepanjang 2021. Sejauh ini, komitmen pembelian sudah diperoleh dari AS, Jepang, dan Uni Eropa.

Kelebihan lain vaksin ini adalah rentang usia yang dimasukkan dalam sampel penelitian. Kelompok tua sangat terwakili. Untuk anak, usia termuda adalah 12 tahun (satu-satunya vaksin dalam uji klinis yang melibatkan sampel di usia muda ini). Sekali lagi, tidak semua vaksin yang diuji saat ini memasukkan kelompok usia yang sangat muda dan tua.

Adapun kelemahan vaksin mRNA, selain sebagai platform baru, adalah harga yang relatif mahal serta kebutuhan rantai dingin yang lebih rumit. Vaksin ini membutuhkan suhu minus 70 derajat Celsius yang tidak mungkin dapat dipenuhi di lapangan dalam skala besar. Beberapa perusahaan berusaha membuat modifikasi, namun belum sepenuhnya berhasil. Pada suhu rantai dingin yang lazim digunakan saat ini, 2–8 derajat Celsius, vaksin ini hanya akan bertahan

beberapa saat. Perusahaan pembuat sedang mengembangkan kemasan khusus untuk memperpanjang usia vaksin dalam suhu lazim tersebut.

Evaluasi vaksin meliputi beberapa cara. Yang paling sederhana adalah mengukur kadar antibodi. Evaluasi ini biasanya dilakukan pada penyakit yang jarang, atau bila diperlukan hasil dalam waktu yang singkat. Yang paling umum digunakan adalah menghitung jumlah yang sakit dari kelompok penerima vaksin dan selanjutnya membandingkan dengan jumlah yang sakit dari kelompok pembanding. Istilah yang digunakan adalah efikasi.

Dalam protokol uji klinis tahap III, Pfizer merencanakan analisis interim dalam empat tahap, yaitu setelah terjadi kasus sebanyak 32-62-92-120. Tujuan akhir mereka adalah 160 kasus. Yang dilakukan hari ini adalah pada tahap 92 kasus (tepatnya mereka sudah mendapat 94). Hingga tahap ini, efikasi vaksin mencapai 90 persen, termasuk untuk kelompok tua.

Angka ini sangat tinggi, namun bukannya tanpa kelemahan, terutama dalam definisi kasus serta lama rentang waktu untuk menilai efikasi. Boleh dibayangkan semua vaksin dalam tahap III menggunakan definisi kasus yang relatif ringan sehingga harapan untuk melihat vaksin yang benar-benar kuat tidak akan mudah tampak.

Uji klinis pada manusia tahap I dan III dilakukan sejak Mei dengan dua versi vaksin. Yang dipilih untuk maju ke tahap III adalah BNT162b2 karena efek simpang yang lebih sedikit. Uji klinis tahap III dilakukan pada awalnya terhadap 30 ribu orang di Amerika Serikat, Argentina, Brasil, dan Jerman. Pada September 2020 diputuskan menaikkan jumlah sampel hingga maksimal 43 ribu.

Vaksin diberikan dua kali dengan jarak 28 hari. Efikasi vaksin hanya akan dinilai dalam tujuh hari setelah dosis kedua yang relatif pendek dibandingkan vaksin lain.

Masih ada minimal satu tahap lagi dan Pfizer akan menunggu hingga terkumpul 120–160 kasus sebelum mengumumkan hasil yang lebih final. Sejauh ini juga pengumuman tidak dilakukan melalui publikasi kedokteran ilmiah, namun baru melalui pengumuman media.

Sekalipun demikian, optimisme tidak dapat disembunyikan dan bahkan perkiraan tanggal mengajukan izin emergency use authorization ke badan otoritas di Amerika sudah disebutkan, sekitar akhir November 2020.

Di antara enam vaksin Amerika Serikat yang paling maju, hanya vaksin ini yang menolak dana partisipasi dari pemerintah. Ini berarti perusahaan dapat merencanakan tahap penelitian menurut versi mereka tanpa persetujuan pemerintah. Donald Trump bahkan dikabarkan mendesak Pfizer untuk mengajukan izin sebelum 3 November 2020 (hari pilpres AS). Namun, perusahaan tidak bersedia karena belum semua tahap terselesaikan.

Sebagai vaksin darurat, tentu masih cukup banyak pertanyaan yang belum bisa diungkap dengan memuaskan. Berapa lama kekebalan akan bertahan belum diketahui. WHO mensyaratkan sedikitnya satu tahun. Durasi proteksi adalah salah satu misteri terbesar pada infeksi virus korona karena data yang ada selama ini bervariasi.

Secara umum, kekebalan dari virus korona yang sering menyerang manusia tidak panjang. Pada orang yang sudah terinfeksi Covid-19 yang ditarget menjadi donor plasma, ternyata cukup banyak yang tidak lagi memiliki kadar antibodi tinggi. Menjadi tanda tanya berapa lama kekebalan akibat vaksinasi bisa tetap bagus.

Sekalipun masih menyisakan banyak pertanyaan, keberhasilan selangkah lebih maju kali ini perlu disambut gembira. Juga walaupun vaksin mRNA tidak termasuk dalam kelompok vaksin yang dibeli oleh pemerintah kita. Bagaimanapun, vaksin sangat mungkin menjadi satu-satunya solusi yang ampuh dalam persoalan menghadapi Covid-19. (*)

Jalan Panjang Islamofilia

Oleh PRADANA BOY ZTF

SEORANG kawan, warga negara Prancis, berbagi cerita. Ia lama tinggal dan bekerja di Indonesia. Suatu saat, ia pulang ke Prancis. Saat berada di negaranya itu, ia menerima kunjungan kolega dari Indonesia, sepasang suami istri muslim. Pada suatu malam, seorang warga datang ke rumahnya, memprotes kehadiran perempuan berjilbab di kompleks tempat tinggal mereka. Pemrotes mengkhawatirkan kehadiran perempuan muslim berjilbab itu akan membawa masalah keamanan bagi mereka.

Namun, dengan sabar dan telaten, kawan ini memberikan pengertian bahwa tak semua muslim seperti yang ia bayangkan. Muslim yang dibayangkan sebagai ancaman sesungguhnya hanya kelompok kecil dalam Islam. Ia mengakui, si pemrotes sulit menerima keterangannya. Namun, dengan memberikan jaminan bahwa dia akan bertanggung jawab jika ada hal-hal yang terjadi akibat kehadiran tamu muslim itu, sang tetangga akhirnya bisa menerima.

Di kala lain, kawan ini juga terlibat dalam diskusi kecil dengan saya. Sebagai orang Prancis yang mengetahui Indonesia (dan Islam Indonesia) secara mendalam, ia berniat mendirikan sebuah pusat kebudayaan Indonesia di pinggiran Prancis. Tak hanya budaya Indonesia, namun dengan sendirinya nilai-nilai Islam akan dipromosikan kepada masyarakat Prancis melalui usaha itu.

”Tanpa harus menampilkan simbol.” Begitu ia merancang strategi. Lebih jauh, dia meminta pandangan saya tentang bagaimana cara menampilkan nilai Islam dan Indonesia itu tanpa simbol karena simbol Islam akan membuat orang Prancis menjauh sejak awal.

Setelah merenung sejenak, saya berbagi pikiran. Jika pusat kebudayaan itu memang sudah berdiri, kata saya, ambillah muslim Indonesia sebagai pegawai. Mintalah mereka menjalankan fungsi sebagai pegawai itu dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam seperti penghargaan pada waktu, salam, sapa, senyum, profesionalisme, dan kebersihan.

Saya membayangkan, jika nilai-nilai itu bisa dijalankan dengan baik, lambat laun pandangan masyarakat Prancis yang mengunjungi pusat kebudayaan itu akan berubah. Mereka mungkin akan berpikir, ”Oh, ternyata Islam seperti ini...”

Ini memang imajinasi. Tetapi sesungguhnya sangat mungkin menjadi kenyataan. Nilai-nilai seperti disebutkan di atas adalah juga nilai-nilai yang

dipraktikkan oleh masyarakat Prancis dan Eropa pada umumnya. Dalam diskusi itu, kami berdua akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa jika dipraktikkan dengan ideal, sesungguhnya ada titik temu atau paralelisme antara nilai-nilai Islam dengan praktik atau kebiasaan masyarakat Prancis dan Eropa.

Jika demikian, lalu kenapa ketakutan dan sikap anti-Islam begitu mengemuka di Prancis dan Eropa? Dalam kasus Prancis, pada mulanya adalah laicite. Secara sederhana, istilah ini bisa diterjemahkan dengan sekularisme. Akan tetapi, laicite Prancis lebih dari sekadar sekularisme.

Olivier Roy (2005), seorang ilmuwan politik asal Prancis, menyebut bahwa sementara sekularisasi pada umumnya merujuk kepada proses di mana pemisahan hal-hal yang bersifat sakral dari urusan publik tanpa ada penolakan secara mendasar kepada agama. Laicite di Prancis merupakan pengenyahan agama dari ruang publik yang melibatkan kebijakan resmi negara.

Singkatnya, di Prancis, laicite adalah menolak kehadiran semua agama di ruang publik, dan bukan hanya Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tahun 1905. Merujuk kepada Undang-Undang Tahun 1905 itu, sesungguhnya ada kerangka normatif tentang kebebasan beragama yang digariskan.

Pasal 1 UU 1905 menyebutkan bahwa republik menjamin kebebasan berkeyakinan dan memastikan kebebasan praktik beragama yang sejalan dengan sejumlah pembatasan yang berkaitan dengan tatanan publik. Sementara pasal 2 menyatakan bahwa republik tidak mengakui maupun mendanai agama apa pun.

Sejarawan dan sosiolog Prancis Jean Bauberot menyimpulkan bahwa laicite adalah upaya menyingkirkan kekuasaan (politik) gereja Katolik dan pada saat yang sama mempromosikan kebebasan beragama.

Namun, dengan Islam, persoalannya agak berbeda. Nadia Kiwal (2020) menyebut Islam di Prancis secara umum dianggap sebagai isu politik. Maka, laicite awal yang dimaksudkan sebagai jaminan kebebasan beragama itu lalu berubah menjadi sikap antimuslim.

Jean Bauberot menyebut ini sebagai laicite baru. Ini terjadi karena kelompok sayap kanan politik Prancis membajak laicite untuk kepentingan politik. Tokoh-tokoh politik seperti Marine Le Pen dan Sarkozy menjadikan laicite sebagai perangkat politik. Sarkozy bahkan memandang muslim sebagai kambing hitam dan menghadirkan ancaman bagi republik yang satu dan bersatu melalui permintaan mereka untuk memakai jilbab di sekolah, konsumsi makanan halal,

dan membangun masjid-masjid baru. Dengan latar belakang seperti ini, tidaklah mengherankan jika laicite sering dianggap sebagai versi sekularisme yang antiagama.

Nadia Kiwal (2020) dalam *Secularism, Islam and Public Intellectual in Contemporary France* mengungkapkan, sejumlah intelektual publik muslim berusaha mendefinisikan Islam dengan beragam cara dan menunjukkan bagaimana mereka mengadopsi sekularisme kritis dalam konteks keyakinan yang beragam maupun konteks nonagama. Misalnya, dengan mengembangkan bentuk-bentuk baru keterlibatan publik dan harmonisasi antara nilai-nilai agama dan tradisi humanisme sekuler.

Usaha-usaha pada level intelektual semacam ini berpotensi besar mempersempit jarak dan prasangka terhadap Islam. Hal yang tak juga boleh dilupakan adalah usaha-usaha kultural seperti yang dilakukan oleh seorang kawan yang saya ceritakan di awal tulisan ini. Kehadiran dan peran agen-agen intelektual dan kultural seperti ini sangat penting dan perlu dipertebal lapisannya sehingga politik tidak menjadi pendekatan dominan dalam memahami hubungan Islam dan Prancis atau Eropa pada umumnya.

Tentu masih panjang jalan yang harus ditempuh agar Islamofobia (takut kepada Islam) di Prancis khususnya dan Eropa pada umumnya berubah menjadi Islamofilia (meminjam istilah Andrew Shryock, 2010), yakni rasa cinta kepada Islam. Cinta diawali dengan kedekatan dan kedekatan pastilah bermula dari mengenal. Jalan memang masih panjang. Namun, jalan menuju Islamofilia itu harus terus diusahakan melalui berbagai saluran. (*)

PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN

Oleh Soekarwo

SEJAK diumumkan kali pertama oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020, lebih dari 500 ribu orang Indonesia terjangkit Covid-19 di 34 provinsi dan 505 dari 514 kabupaten/kota. Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per 27 November 2020 menunjukkan, dari 522.581 orang yang terpapar Covid-19, 437.456 orang telah sembuh dan 16.521 orang meninggal.

Sejak awal pemerintah terus berupaya dengan secepat kemampuan untuk mengendalikan persebaran virus ini. Upaya perlindungan kesehatan rakyat dilakukan paralel dengan penyelamatan ekonomi. Salah satu upaya penting dalam pengendalian dan pencegahan persebaran Covid-19 adalah membatasi aktivitas masyarakat dan mendorong masyarakat hidup disiplin dengan memberlakukan peraturan penegakan protokol kesehatan di level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Di tingkat nasional, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020. Peraturan ini dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang mengatur tentang PSBB dan ditetapkan oleh menteri kesehatan. Pemerintah daerah diperbolehkan membuat aturan pembatasan aktivitas warga di wilayah masing-masing berdasar persetujuan menteri kesehatan. Pemberlakuan PSBB ini juga berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Penegakan Protokol Kesehatan

Saat memimpin rapat terbatas membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada 23 November 2020, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran pemerintah pusat maupun daerah agar disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan. Presiden menegaskan bahwa pencegahan dan penindakan terhadap potensi-potensi kegiatan yang melanggar protokol kesehatan harus ditegakkan sejak dini.

Penegasan presiden itu penting mengingat tren penambahan Covid-19 dalam seminggu terakhir mengalami kenaikan. Di antaranya, terjadi penambahan kluster baru akibat pertemuan masal di Jakarta, penambahan karena dampak libur panjang, dan potensi penambahan karena pengumpulan orang saat kampanye menjelang pilkada pada 9 Desember 2020.

Di daerah, penegakan disiplin protokol kesehatan untuk mengendalikan persebaran Covid-19 juga sudah dikeluarkan gubernur, bupati, maupun wali kota. Sebagian besar berbentuk peraturan gubernur, peraturan wali kota, dan peraturan bupati. Secara umum isinya mengatur pemakaian masker dan sanksi denda ataupun sanksi sosial jika terjadi pelanggaran.

Namun, efektivitas penegakan disiplin melalui peraturan-peraturan tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Selain masyarakat kurang disiplin, peraturan-peraturan yang ada memiliki kelemahan dan keterbatasan karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Rendahnya disiplin dan buruknya tingkat kepatuhan publik terhadap protokol kesehatan Covid-19 juga bisa dilihat dari hasil studi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) yang menyebutkan bahwa penggunaan masker di DKI Jakarta sekitar 70 persen. Gubernur Jawa Barat kepada media mengatakan hanya 50 persen warganya yang patuh memakai masker.

Kondisi lebih ekstrem bisa kita lihat di sejumlah daerah, di mana penggunaan masker dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan belum menjadi budaya baru. Untuk itu, perlu dipikirkan terobosan-terobosan dalam melahirkan peraturan-peraturan yang lebih efektif, memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan lebih diterima publik, baik implementasi maupun sanksinya.

Partisipasi Publik

Penegakan disiplin protokol kesehatan melalui peraturan kepala daerah yang memuat sanksi administratif maupun pidana berupa denda pada dasarnya memiliki kelemahan. Utamanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Peraturan itu baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasar kewenangan.

Peraturan gubernur, peraturan wali kota, dan peraturan bupati tidak boleh memuat ketentuan pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pasal 15 disebutkan, materi yang mengatur ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah.

Ketentuan sanksi dan pidana perda juga diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 238 tertulis, pertama, perda dapat

memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000. Ketiga, perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau denda selain yang dimaksud pada ayat dua sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut hukum tata negara dan hukum administrasi negara, pengenaan sanksi sebagai bentuk pengurangan hak seseorang atau warga negara dan karena merupakan pengurangan hak, produknya harus dihasilkan oleh pemerintah dan wakil rakyat. Dalam hal ini, untuk provinsi, kabupaten/kota oleh pemerintah daerah dengan DPRD.

Dengan demikian, pemberlakuan peraturan mengenai pidana dan denda pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 hanya bisa diimplementasikan dengan mendasarkan kepada peraturan daerah (perda). Hal ini berarti pula bahwa aturan penanggulangan Covid-19 tidak bisa dijalankan hanya dalam bentuk peraturan gubernur, peraturan bupati, maupun peraturan wali kota.

Di sisi lain, pembentukan perda juga akan lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat karena ada pelibatan dan partisipasi publik di dalamnya. Melalui DPRD, masyarakat dimungkinkan untuk menyalurkan aspirasinya. Bila peraturan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, penolakan terhadap suatu produk hukum tentu dapat dihindarkan. Hal ini juga akan memperkuat legitimasi pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan sehingga dapat berlaku efektif.

Hingga saat ini tercatat baru enam provinsi yang telah membuat perda terkait dengan penegakan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19. Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Gorontalo, Riau, dan DKI Jakarta. Daerah lain, terlebih lagi tingkat kota dan kabupaten, perlu membuat perda Covid-19 agar penanganan protokol kesehatan bisa lebih efektif. Semoga. (*)

DOKTER NASIONALIS TANTANGAN PROFESI DI TENGAH PANDEMI

Oleh Muh. Abid Khumaidi

DULU dokter dianggap profesi yang sangat mulia. Orang yang memiliki profesi dokter dianggap “perwakilan Tuhan” yang diturunkan ke bumi untuk membantu manusia mengatasi penyakit dan penderitaannya. Karena kemuliaan profesi itulah, dokter ditempatkan pada strata tertinggi dalam status sosialnya.

Tapi, zaman telah berubah. Lompatan teknologi, perubahan lingkungan, cara transaksi ekonomi, serta kondisi pandemi Covid-19 saat ini membutuhkan kehadiran sistem kerja baru. Adaptasi kebiasaan baru dalam menjalankan profesi menjadi bagian dari professional defense and resilience. Yaitu ketahanan dan pertahanan profesi dalam upaya melakukan perlindungan dan keselamatan serta upaya meminimalkan risiko bagi dokter dalam menghadapi pandemi ini. Sebuah masa yang juga dikenal sebagai era disrupsi (disruption).

Menurut Clayton M. Christensen, the concept of disruption is about competitive response, it is not theory of growth . Its adjacent to growth. But it is not about growth. Dibutuhkan manusia baru yang mampu mengikuti semua perubahan dan selalu menjadi trendsetter, bukan semata-mata follower.

Fakta sejarah membuktikan bahwa proses pembentukan fondasi negara Indonesia pada awal abad ke-20 sehingga melahirkan semangat berdirinya Boedi Oetomo diawali dengan sebuah gagasan besar dari para emansipator bangsa yang tumbuh sebagai proses di dalam kelompok sosial masyarakat. Mereka berupaya meningkatkan diri menuju kedudukan intelektual, sosial, ekonomi, politik, budaya, serta gender yang lebih layak dan menjadi bagian yang integral dalam tata kehidupan masyarakat.

Salah satu komponen emansipator bangsa tersebut adalah kelompok dokter pribumi. Mereka menjadi pelopor semangat nasionalisme dan kesadaran berbangsa. Peran dan keberadaan para dokter pada saat itu tidak terlepas dari watak yang dibentuk melalui proses pendidikan kedokteran disertai sumpah serta etika yang harus dipatuhinya sebagai seorang dokter nasionalis.

Saat ini para dokter Indonesia yang nasionalis tengah membangun sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, meninggalkan keterlibatan politik, serta berfokus secara eksklusif pada kesehatan dan pengobatan saja. Pada saat yang sama, profesi dokter dihadapkan dengan tantangan yang sangat luar biasa, bahkan

ancaman terhadap eksistensi profesi yang dapat dibagi menjadi tantangan yang berasal dari dalam maupun luar.

Tantangan dari dalam terutama terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kedokteran. Ini terkait dengan beberapa isu yang kerap kali diangkat media massa, misalnya dugaan malapraktik dokter, buruknya mutu pelayanan dokter (terutama di fasilitas kesehatan tertentu), dan isu kolusi gratifikasi yang dinilai menghilangkan independensi dokter. Di sisi lain, saat ini dokter di Indonesia menjadi profesi yang sangat diharapkan berperan sangat besar dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Sedangkan tantangan dari luar saat ini adalah tuntutan globalisasi berupa mekanisme pasar bebas yang telah masuk dalam area jasa pelayanan kesehatan. Kondisi itu menjadi ancaman dalam era industrialisasi pelayanan kesehatan atau era korporasi medis. Selain itu munculnya pendekatan baru dalam tantangan kesehatan internasional, yaitu kesehatan global yang sudah dimulai pada 1990-an. Kesehatan global cenderung mendukung program vertikal, intervensi teknologi, dan inovasi di bidang farmasi.

Semua itu terbangun akibat penyakit tertentu yang menular (emerging dan reemerging disease), mengancam kehidupan manusia melewati batas-batas negara, serta membutuhkan respons yang kuat dan terkoordinasi yang melebihi kapasitas pemerintah nasional. Salah satunya yang saat ini terjadi di seluruh dunia, yaitu Covid-19.

Mengatasi pandemi Covid-19 ini perlu penekanan pada biosecurity dan upaya untuk mencegah persebaran penyakit menular. Termasuk meningkatkan perhatian pada inisiatif horizontal, seperti program jangka panjang untuk memperkuat layanan kesehatan nasional, pelayanan kesehatan primer, pendidikan kesehatan masyarakat, atau keterlibatan masyarakat dalam penyusunan inisiatif kesehatan.

Problematika profesi kedokteran di Indonesia sepertinya sudah mencapai titik nadir yang harus segera mendapatkan penyelesaian. Bahkan saat ini sudah masuk dalam kondisi gawat darurat (emergensi) yang harus segera diresusitasi untuk dapat mempertahankan hidupnya (life saving). Mengembalikan pamor dokter Indonesia yang nasionalis menjadi urgensi yang saat ini harus dilakukan.

IDI mempunyai tanggung jawab yang besar di usia yang ke-70 tahun untuk mewujudkan dokter nasionalis. Seperti halnya fondasi yang sudah diletakkan para dokter nasionalis pendahulu yang manfaatnya bukan hanya untuk masyarakat

profesi, tapi juga dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Semangat itu sudah tertulis di mukadimah Anggaran Dasar IDI, yaitu menjadi organisasi yang memiliki nilai-nilai profesionalisme, integritas etik dan moral, pengabdian, independensi, serta kesejawatan untuk melakukan upaya-upaya memajukan, menjaga, dan meningkatkan harkat dan martabat dokter Indonesia. (*)

SASARAN BANTUAN PERLU DIPERLUAS

Oleh Tauhid Ahmad

SAYA kira ini hal positif. Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang masa restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2022 untuk berjaga-jaga.

Pertama, memitigasi potensi peningkatan risiko kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) ketika periode relaksasi tidak diperpanjang. Kedua, mempertimbangkan kondisi arus kas keuangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang secara umum belum pulih. Harus dilihat lagi pada sektor atau karakteristik UMKM tertentu.

Dalam situasi pagebluk Covid-19, ada beberapa UMKM yang berjalan positif. Yang seperti itu akan menjadi capital expenditure atau investasi untuk penguatan permodalan dalam fase transisi saat ini. Bisa juga melalui restrukturisasi kredit. Pengusaha bisa menambal kerugian di awal-awal masa pandemi.

Di sisi lain, memang kalau kita lihat market masih belum pulih. Indeks keyakinan konsumen (IKK) Bank Indonesia pada September tercatat masih di level 83,4. Belum 100, yang artinya masih pesimistis. Terus, kinerja penjualan riil juga belum mencapai titik 0. Masih minus 9,2 persen dibandingkan tahun lalu (year-on-year/yoy).

Tentu memang negatifnya, saat ini permintaan kredit sedang dalam tren menurun. Sebab, pengusaha masih memanfaatkan fasilitas yang ada dulu. BI mencatat pertumbuhan penyaluran kredit pada September hanya 0,12 persen. Lebih rendah dari Agustus yang mencapai 1,04 persen.

Menurut saya, restrukturisasi kredit merupakan hal penting. Tapi jangan gebyah uyah. Agar tidak disalahgunakan untuk hal lain yang bukan untuk memperkuat permodalan. Sebenarnya, mungkin para pengusaha UMKM punya uang, tapi tidak berani menambah modal dan barang karena demand (permintaan) rendah. Otomatis, mereka memilih menyimpan dananya. Baik berupa tabungan maupun deposito jangka pendek. Makanya, dana pihak ketiga (DPK) perbankan naik. Dari 11,64 persen yoy pada Agustus menjadi 12,88 persen yoy. Artinya, lebih banyak masyarakat yang menabung. Tapi, itu akan berubah ketika pemulihan ekonomi nasional berlangsung cepat.

Apa syarat demand kembali tumbuh? Ya ekonomi harus kembali normal. Kuncinya, pemerintah harus benar-benar fokus menyelesaikan secepatnya persebaran Covid-19 ini. Itu tentu bukan perkara mudah. Banyak hal yang harus dilakukan. Misalnya mempercepat pengadaan vaksin hingga distribusinya harus tepat sasaran.

Memang tidak mudah karena jumlah penduduk Indonesia banyak sekali. Makanya, perlu membangun infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar. Sebab, ketika angka kasus harian berhasil ditekan, daya beli masyarakat akan naik. Orang-orang akan percaya diri keluar belanja tanpa khawatir terpapar virus.

Di samping itu, bantuan sosial (bansos) menjadi hal yang sangat strategis. Itu harus diperpanjang. Jangan hanya sampai Desember 2020. Begitu pula, nominal bansos berupa uang tunai harus diperbesar. Jangan cuma Rp 600 ribu per bulan. Setidaknya Rp 1–1,5 juta. Sebab, proses pemulihan di masyarakat menengah bawah ini tidak cepat. Pandemi membuat mereka kehilangan pendapatan. Ditambah saving money yang sangat tipis. Jadi, susah untuk mengontrol daya beli kelompok masyarakat tersebut kalau nyatanya kemampuan bertahan mereka satu hingga tiga bulan saja.

Saya juga melihat realisasi restrukturisasi kredit tidak terlalu besar. Sebab, masih banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki akses ke perbankan maupun lembaga pembiayaan. Pertama, mungkin tidak terdata. Kedua, mereka tidak bankable dan belum terkoneksi dengan sistem digital, itu juga problem.

Berdasar data OJK hingga 28 September, realisasi restrukturisasi perbankan untuk sektor UMKM sebesar Rp 359,98 triliun kepada 5,82 juta debitor. Angka tersebut kapitalisasinya kecil dibanding sektor non-UMKM dengan nilai Rp 544,31 triliun kepada 7,5 juta debitor. Menurut saya, sasaran restrukturisasi itu harus bisa diperluas. Terutama untuk kelompok nasabah di atas Rp 10 miliar. Tapi dengan syarat yang agak ketat. Sebab, hotel, restoran, mal, dan sektor perdagangan lainnya banyak yang hancur.

Jalan terbaiknya, pemerintah perlu instrumen moneter di tengah situasi saat ini. BI sudah menurunkan suku bunga acuannya dari 5 persen menjadi 4 persen. Namun, transmisinya ke suku bunga pinjaman perbankan menjadi masalah yang berkisar 10 hingga 11 persen. Ini yang tak jalan. Biasanya memang tidak

langsung. Ada net interest margin yang masih diminta tinggi sekitar 4 persen. Seharusnya bisa diturunkan.

Intinya, saya setuju UMKM prioritas. Tapi, jika melihat keseimbangan ekonomi agar pemulihan ekonomi cepat, industri besar harus kena sasaran. Kalau tidak, akhirnya perusahaan swasta nasional banyak meminjam modal ke luar negeri. Mayoritas meminta bantuan Singapura karena bunganya lebih rendah. Akibatnya, utang luar negeri membengkak.

DEMOSTRASI MASA KINI ADALAH POLISI MASA DEPAN

Oleh Reza Indragiri A.

SITUASI unjuk rasa makin penuh tantangan karena masyarakat demonstran yang dihadapi Polri adalah kaum muda. Sebagian di antaranya bahkan masih berusia kanak-kanak. Mereka adalah mahasiswa dan pelajar.

Kaum muda tersebut adalah warganet sekaligus kaum milenial. Mereka sangat mengandalkan media sosial dan aplikasi komunikasi berbasis gawai sebagai rujukan informasi. Informasi yang hadir di dua wahana itu niscaya lalu-lalang dengan deras dan tanpa disunting sama sekali.

Bahwa kaum belia (mahasiswa dan pelajar) kemudian menjadi rawan bias memang bisa demikian. Yang jelas, sebagaimana riset Christina Conkling (2019), semakin banyak waktu yang digunakan kaum belia untuk menyimak informasi di media sosial dan aplikasi komunikasi berbasis gawai, semakin tinggi pula penolakan mereka terhadap penggunaan kekerasan oleh polisi. Dengan kata lain, paparan informasi tentang polisi hari-hari ini berpotensi meninggalkan kesan yang tidak begitu positif di benak kaum milenial. Padahal, mereka sesungguhnya merupakan sumber daya manusia kepolisian pada masa yang akan datang.

Minat Menjadi Polisi

Secara nasional, jumlah peminat kerja sebagai polisi di Negeri Paman Sam (Amerika Serikat) telah menurun hingga ke level yang disebut sebagai krisis. Kecenderungan serupa berlangsung di Jepang, Inggris, dan berbagai negara lain. Bukan hanya jumlah pendaftar yang kian lama kian rendah. Jumlah personel kepolisian yang mengundurkan diri ternyata juga meningkat.

Jadi, persoalan yang mengemuka bukan hanya bagaimana memikat warga negara agar mau bergabung ke dalam organisasi kepolisian. Tetapi juga bagaimana menciptakan institusi kepolisian yang tetap menarik sehingga para anggotanya mau terus berkarir di dalamnya.

Situasi di Indonesia masih perlu ditelaah secara lebih saksama hingga beberapa waktu ke depan. Namun, animo masyarakat untuk mengikuti seleksi Akademi Kepolisian (Akp) Republik Indonesia (RI) tergambar pada penurunan dari 15 ribu pendaftar pada 2017 ke 13 ribu setahun setelahnya. Berkurangnya peminat seolah mengindikasikan bahwa publik tidak terangsang untuk menjadi jago-jago penumpas teror, ahli pemberantasan kejahatan siber, pasukan peringkus

penjahat ekonomi, tribrata pembasmi kejahatan seksual anak, dan posisi-posisi lain yang sesungguhnya membuat Polri lebih berwarna dewasa ini.

Satu kemungkinan yang penting dikaji, berkurangnya angka peminat menjadi polisi merupakan imbas dari bermunculannya para calon tenaga kerja baru yang membawa tabiat khas mereka selaku generasi milenial. Kepribadian mereka bertolak belakang dengan atmosfer kerja kepolisian yang dinamikanya tidak banyak berubah. Institusi kepolisian terus bersentuhan, bahkan menjadikan bahaya sebagai menu hariannya. Sementara warga ulayat digital (kaum milenial) menggemari pekerjaan yang penuh kesenangan.

Institusi kepolisian juga sangat hierarkis dengan kesiagaan tingkat tinggi, sedangkan pekerja pendatang baru di era milenial menyukai format kerja yang lentur. Juga, terlebih pada waktu-waktu belakangan ini, anggota kepolisian acap terekspose ke publik laksana personel paramiliteristik. Padahal, para calon profesional milenial lebih gandrung akan gaya hidup yang sedang "in", sedang "happening", sedang "viral".

Sentuhan Personal

Problematika masyarakat kian pelik. Lembaga kepolisian bisa saja menetapkan standar-standar pencapaian kinerja. Tapi, pada akhirnya penilaian masyarakat yang menjadi penentu.

Pemikiran tersebut menjadi dasar untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa posisi paling strategis di kepolisian adalah pos-pos penugasan yang memungkinkan personel berinteraksi seluas dan selangsung mungkin dengan masyarakat. Kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan berkomunikasi personel saat berhadapan dengan masalah orang per orang atau situasi per situasi dituntut sangat tinggi. Business as usual, kerja berbasis prosedur tetap, dikhawatirkan tidak lagi laris. Polisi yang tidak kreatif, tidak sigap mengolah informasi, dan tidak komunikatif akan diabaikan, bahkan harus bersiap menerima sinisme masyarakat.

Atas dasar itu, berbahagialah anggota kepolisian yang bekerja sebagai petugas yang saban hari ronda dan bercengkerama dengan warga. Merekalah yang semestinya bisa diasumsikan sebagai pekerja yang memiliki kelengkapan berupa kreativitas tertinggi, paling cakap berpikir, dan paling komunikatif.

Bahkan, dengan keinsafan bahwa mustahil setiap persoalan diselesaikan seorang diri, personel bersangkutan juga sepatutnya paling cekatan membangun

kolaborasi dengan individu dan kelompok terkait. Para petugas di lini itu pula yang sesungguhnya paling berkesesuaian dengan karakter para digital natives. Yaitu menempatkan kepatuhan pada atasan sebagai agenda berikutnya setelah memberikan sentuhan personal kepada masyarakat.

Karena mereka berada di ujung tombak, kriteria bagi para petugas tersebut tidak boleh sekadar normatif. Tempaan bagi mereka pun tidak selayaknya sebatas menggugurkan kewajiban. Mereka harus dididik agar tumbuh menjadi manusia pembelajar. Ringkasnya, para petugas kepolisian yang dalam keseharian mereka berada di lini terdepan itu adalah (idealnya) personel kelas satu.

Secara spesifik, konsekuensinya, jabatan mereka pun dicap sebagai posisi paling prestisius yang diincar setiap orang yang berminat menjadi anggota kepolisian. Paralel dengan itu, secara umum, lewat tulisan ini cukuplah ditandakan, lembaga kepolisian pun mesti menjelma sebagai lingkungan kerja yang sungguh-sungguh kolaboratif, lebih terbuka, serta lebih memberikan peluang bagi para warga milenial untuk menerapkan ilmu dan keahlian mereka.

Sekian banyak harapan serta gambaran tentang insan dan organisasi kepolisian seperti dijabarkan di atas sesungguhnya bukan hal yang benar-benar baru. Bedanya, kini desakan agar lembaga kepolisian terus mereformasi dirinya datang tak lagi melulu dari ujaran kaum cerdik cendekia. Tapi juga, tak terelakkan, dari perkembangan teknologi dan pengaruhnya terhadap lahirnya golongan digital natives, yakni kaum muda dengan tabiatnya yang serbakhas serbalugas.

Rebut hati kaum muda milenial, latih pikiran mereka. Begitu titah sang waktu agar Polri tidak kekurangan orang sekaligus bisa terus menjawab tantangan zaman. Allahu a'lam.

VAKSIN COVID-19

Oleh M.H. Said Abdullah

PADA 5 Oktober 2020 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang-undangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Payung hukum itu sebagai langkah maju Indonesia dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan vaksinasi terhadap seluruh rakyat.

Saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendukung penuh pelaksanaan uji klinis tahap ketiga vaksin Covid-19 yang dilaksanakan PT Bio Farma dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Uji klinis fase ketiga itu merupakan pengembangan dari calon vaksin yang diproduksi Sinovac Biotech Ltd, perusahaan farmasi Tiongkok.

Kita mendoakan upaya besar tersebut berhasil sehingga pemulihan kehidupan seperti sediakala, seperti sebelum ada pandemi, segera kita dapati. Sebab, bila pandemi berkepanjangan, harga sosial, ekonomi, dan kesehatannya sangat besar, terutama bagi kelompok rentan.

Deret pertanyaan pasti akan muncul bila sudah ada vaksin. Bagaimana mekanisme vaksinasi? Siapa yang divaksin terlebih dahulu? Apakah vaksinasi dikenai biaya? Siapa yang menanggung biaya? Dan seterusnya.

Perpres 99/2020 telah mengatur beberapa hal terkait vaksin dan vaksinasi. Kemenkes yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis, jumlah, dan harga pembelian vaksinnya. Serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memberikan izin edarnya. Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dilakukan tahun 2020 hingga 2022. Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dapat memperpanjang pengadaan vaksin dan vaksinasi bila menteri kesehatan mengusulkan.

Apabila pengadaan vaksin sudah bisa diproduksi di dalam negeri, pemerintah memprioritaskan vaksin produksi dalam negeri. Pelaksanaan pengadaan vaksin diatur pemerintah dengan cara penugasan terhadap badan usaha milik negara dalam hal ini PT Bio Farma, penunjukan langsung badan usaha penyedia, dan/atau kerja sama dengan lembaga/badan internasional. Kerja sama dengan lembaga/badan internasional untuk pengadaan vaksin hanya terbatas untuk penyediaan vaksin Covid-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk

vaksinasi Covid-19. Untuk menopang kemudahan pengadaan vaksin dan vaksinasi Covid-19, pemerintah menjamin pemberian kemudahan fasilitas fiskal seperti cukai, perpajakan, kepebeanaan atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi vaksin Covid-19, serta peralatan untuk pelaksanaan vaksinasi.

Lantas, siapa yang melaksanakan vaksinasi? Perpres 99/2020 mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan Kemenkes. Lebih jauh, presiden memberikan kewenangan bagi Kemenkes untuk menetapkan kriteria dan penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan pemberian vaksin, serta standar pelayanan vaksinasi. Untuk mengantisipasi dampak kesehatan pascavaksinasi, Presiden Jokowi menugaskan Kemenkes, BPOM, dan pemda melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutannya.

Saya mengusulkan agar peraturan menteri kesehatan nanti mengedepankan kelompok rentan seperti manula, terutama penderita komorbid, ibu hamil, anak usia balita, tenaga medis, guru, anak sekolah, tenaga kerja pada sektor strategis, termasuk petugas pemakaman pasien Covid-19, yang mendapatkan prioritas pertama. Kawasan yang perlu mendapatkan prioritas vaksinasi adalah kawasan yang positive rate Covid-19-nya tinggi, termasuk yang fatality rate-nya tinggi.

Anggaran Vaksin dan Vaksinasi

Untuk mendukung program vaksin dan vaksinasi, pemerintah bersama DPR telah menyepakati ditanggung oleh APBN dengan tahun jamak. Bila rencana pengadaan vaksin dan vaksinasi hingga 2022, Badan Anggaran DPR akan memberikan dukungan penuh untuk menyukseskan pemulihan kesehatan rakyat ini. Pada anggaran 2020 dan 2021, DPR telah memberikan persetujuan kepada pemerintah terkait rencana kerja anggaran untuk pelaksanaan uji klinis vaksin, pengadaan vaksin, vaksinasi, serta pengadaan alat untuk vaksin dan vaksinasi.

Selain dari APBN, pemerintah membuka sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya dari hibah internasional. Melalui Perpres 99/2020 pemerintah juga menginstruksi pemerintah daerah mendukung pemberian pendanaan bagi daerahnya untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah masing-masing.

Tahun ini pemerintah mengalokasikan pengadaan vaksin Covid-19 sebesar Rp 3,8 triliun. Pada 2021, sesuai rencana kerja, pemerintah akan mengalokasikan pendanaan untuk pengadaan vaksin sebanyak Rp 37 triliun. Dengan dukungan

anggaran tersebut, pada 2022 masih ada kebutuhan anggaran kembali untuk program pengadaan vaksin dan vaksinasi.

Sebagai perbandingan, harga vaksin CNBG milik Tiongkok berkisar 150–180 renminbi atau setara Rp 325 ribu sampai Rp 400 ribu. Tiongkok menjadi satu-satunya negara di dunia yang telah menjalankan program vaksinasi Covid-19 sejak Juli 2020 terhadap beberapa kelompok. Kelompok prioritas yang mendapat vaksinasi adalah petugas kesehatan dan perbatasan.

Kita semua senang bila benar pernyataan direktur utama Bio Farma beberapa hari lalu kepada media yang memperkirakan harga vaksin Covid-19 produksi PT Bio Farma berkisar Rp 200 ribu per dosis. Indonesia membutuhkan kurang lebih 340 juta dosis. Bagi saya vaksin murah itu perlu, tetapi tidak murahan. Artinya, jangan karena harga murah, lantas mengorbankan kualitas dan standar kesehatan yang memang sangat ketat ketentuannya. Jika harga vaksin per dosis Rp 200.000 dan dibutuhkan 340 juta dosis, negara harus menyediakan anggaran setidaknya Rp 68 triliun. Anggaran itu belum termasuk biaya vaksinasi dan pengadaan alat untuk menopang vaksinasi.

Secara prinsip, saya selaku ketua Badan Anggaran DPR akan mendukung penuh upaya pemerintah ini. Kita tidak boleh ”berbisnis” demi kesehatan rakyat. Di pihak lain, saya juga mengharapkan mereka yang mampu secara ekonomi untuk berswadaya membiayai vaksin secara mandiri. Saya amat yakin rakyat kita akan tergerak untuk hal itu. Gotong royong adalah jiwa bangsa kita. Tantangannya, jika demand atas vaksin Covid-19 tinggi, pemerintah harus mampu melakukan percepatan pengadaan jumlah vaksin, juga alat dan tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi. Kita berharap ikhtiar tersebut berjalan sukses. (*)

KESEJAHTERAAN BERSAMA DI TAMAN NASIONAL KOMODO

Oleh Dewa Gde S.

HARI Cinta Puspa dan Satwa Nasional merupakan sebuah event tahunan yang diperingati secara nasional setiap 5 November. HCPSN dicanangkan sejak 20 tahun lalu, tepatnya pada 5 November 1993, melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993. Sejak tahun itu pula, telah ditetapkan puspa dan satwa kebanggaan Indonesia (nasional, langka, dan pesona) serta menetapkan puspa dan satwa sebagai identitas daerah.

Sebagai bagian HCPSN kali ini, permenungan akan satwa di Indonesia memiliki relevansi pada sorotan publik pada pembangunan Jurassic Park di salah satu kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), yakni Pulau Rinca.

Benang merah pertentangan dari gagasan untuk memperkuat dan menumbuhkan kualitas destinasi berbasis ekowisata tersebut terletak pada beberapa hal. Pertama, kekhawatiran publik akan tekanan dan gangguan habitat komodo sebagai dampak pembangunan fasilitas. Praktik konservasi yang selama ini melekat dan terjaga di TNK dikhawatirkan akan terganggu.

Kedua, para pemangku kepentingan di area terdekat dan terdampak dari pembangunan Jurassic Park, yakni masyarakat lokal, merasa tidak dilibatkan dalam rencana pembangunan. Dua hal itu senantiasa mengiringi dinamika pembangunan di area konservasi. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan negara.

Taman Nasional (TN) Komodo telah resmi masuk 7 Keajaiban Baru di Dunia. Proses panjang untuk mendapat pengakuan dunia tersebut memiliki beberapa catatan penting yang menunjukkan betapa besar ikatan emosional warga bangsa kepada TNK.

Tahun 2010 lalu, bertepatan dengan tahun keanekaragaman hayati, TNK ditetapkan UNESCO sebagai 7 Keajaiban Baru di Dunia bernuansa alam. Ia berhasil menyisihkan 440 kontestan dari 220 negara. Semangat dari status tersebut adalah pengakuan dunia atas keanekaragaman hayati yang khas dimiliki TNK.

Lembaga pariwisata dunia, UN-World Tourism Organization, menekankan pentingnya peran keanekaragaman hayati sebagai salah satu aset terbesar dalam industri pariwisata. Industri pariwisata yang sehat seharusnya mampu melindungi dan mengonservasi keanekaragaman tersebut, menjadikannya nilai jual dan

andalan yang tetap dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Aspek tersebut sebagian benang merah dari kekhawatiran publik menyertai rencana Jurassic Park.

Sejarah mencatat, Belanda telah menamai pulau di sisi selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu dengan sebutan Pulau Komodo sejak 1910. Kemudian, pemerintah Indonesia menjadikannya sebagai taman nasional pertama di Indonesia pada 1980. Komodo termasuk anggota famili biawak varanidae dan taxicofera (jenis kadal beracun) serta merupakan kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2–3 meter. Di TNK tidak hanya terdapat kawanan satwa liar komodo, tetapi juga rusa, babi hutan, kuda liar, kerbau liar, dan sekitar 300 spesies burung yang bersanding dengan ragam tumbuhan khas di Kepulauan Nusa Tenggara.

Tahun-tahun sebelumnya, TNK menargetkan maksimal turis masuk ke kawasan itu sebanyak 600 orang per hari atau 219.000 orang per tahun. Kenaikan secara tajam pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) terjadi pada tahun-tahun awal setelah penetapan TNK sebagai 7 keajaiban baru. Menyertai prestasi TNK, sebuah grup hotel sudah membuka hotel di kawasan Labuan Bajo dan saat ini Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Kesejahteraan Satwa

Dari pemberitaan media, pemerintah berhati-hati dalam menjalankan pembangunan Jurassic Park ini. Selain diawasi UNESCO, pembangunan dilakukan di zona khusus yang tidak mengganggu ekosistem. Instansi pemerintahan terkait juga telah turun ke lapangan. Melakukan dialog dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain perlu mempertimbangkan keterlibatan masyarakat, elemen inti dari ekowisata yang merupakan “napas” dari TNK adalah environment sustainability. Kesejahteraan satwa diyakini juga menjadi pertimbangan penting yang telah diperhitungkan.

Wacana kesejahteraan binatang sebenarnya semakin marak di negara-negara dunia ini. Wacana itu dipicu fakta bahwa setiap tahun binatang mengalami penderitaan karena eksploitasi dan penganiayaan. Di Indonesia, dengan keragaman satwa yang sangat khas (sekitar 17 persen satwa di seluruh dunia terdapat di Indonesia), ada perlakuan kejam dan eksploitasi dalam bentuk

perdagangan terlarang. Binatang juga menderita ketika mereka tidak diperlakukan dengan baik atau tidak dihiraukan.

Terkait hal tersebut, perlulah diingat kembali lima kebebasan binatang (the five freedoms) untuk meminimalisasi praktik kekerasan atas satwa. Pertama, freedom from hunger and thirst (kebebasan dari kelaparan dan kehausan). Artinya, binatang harus diberi makanan dan minuman yang cukup untuk menjamin mereka sehat. Kedua, freedom from discomfort (kebebasan dari ketidaknyamanan). Praktiknya, kita wajib memberikan kondisi lingkungan yang sesuai bagi binatang dan yang menyenangkan.

Ketiga, freedom from pain, injury and disease (kebebasan dari kesakitan, luka-luka, dan penyakit). Perwujudannya adalah mencegah kemungkinan satwa jatuh sakit atau menderita luka-luka sebanyak mungkin. Jika satwa masih jatuh sakit atau menderita luka-luka, maka harus ada jaminan bahwa hewan itu dapat diperiksa oleh dokter hewan dan diobati.

Keempat, freedom to behave normally (kebebasan untuk bertindak dengan biasa sebagai seekor binatang). Satwa berhak mendapatkan lingkungan yang luas, yang memungkinkan mereka melakukan gerakan alami dan bergaul dengan binatang lain yang sejenis sama. Kelima, freedom from fear and distress atau kebebasan dari ketakutan dan stres. Perwujudannya adalah menjamin dilakukannya perlakuan yang baik untuk menghindarkan satwa dari ancaman kebosanan, stres, ketakutan, dan kesusahan.

Kiranya, pada momen Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional ini, ditemukan benang merah yang menyejahterakan masyarakat dan ekosistem di area TNK menyertai pembangunan Jurassic Park. Selamat Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2020.

NAHDLATUL ENTREPENEUR

Oleh Candra Malik

DUNIA adalah ladang untuk bercocok tanam yang hasilnya kelak kita panen di akhirat. Tidak melulu dengan menanam dalil dan dalih agamis, tapi juga dengan menandur ilmu dan amal yang benih-benihnya niscaya akan tumbuh subur sebagai jariah. Tak putus-putus. Tidak hanya dipanen oleh penanamnya, tapi juga oleh generasi-generasi berikutnya.

Dan oleh karena itulah, selayaknya kita bersekutu, berkelompok, berorganisasi, berserikat, atau apa pun sebutannya, dalam kebenaran dan kebaikan. Suatu usaha dalam skala kecil maupun besar, termasuk di dalamnya wirausaha, atau yang populer disebut entrepreneurship, adalah ikhtiar dari hulu ke hilir yang tak bisa mengandalkan satu kekuatan saja.

Dari pangkal hingga ujung, wirausaha ialah satu kesatuan yang utuh. Didasari ayat tentang perniagaan yang agung, yakni beriman kepada Allah dan rasul-Nya, dan berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan jiwa (QS [61]: 10-11), wirausaha bisa dikembangkan dengan berpegang teguh pada empat pilar karakter utama Muhammad SAW.

Kanjeng nabi telah meneladankan sifat sidik, amanah, tablig, dan fatanah. Jujur, dapat dipercaya, menyampaikan kebenaran, dan cerdas. Inilah fondasi entrepreneurship dalam mengolah dan mengelola kreativitas dan inovasi yang berbasis kemaslahatan, bersumber daya kearifan lokal, berjejaring kebaikan, dan bertujuan kemandirian. Kukuh, berakar.

Entrepreneurship, dari kata *entreprende* dalam bahasa Prancis, yang bermakna *to undertake, to set about, to begin, to attempt*, yang artinya memulai usaha, menghendaki pelaku wirausaha menjadi penjelajah kreativitas, pencipta inovasi, pengelola usaha, dan pengambil risiko. Ia menambah khazanah kewirausahaan jika otentik, baru, khas, dan berbeda.

Entrepreneurship mensyaratkan pelaku menerapkan manajemen diri, Sebab, ia tak mengandalkan sumber daya alam belaka. Lebih dari itu, entrepreneurship mengutamakan sumber daya manusia. Bukan otot, tapi otak. Bukan okol, tapi akal. Oleh karena itu, manajemen SWOT (*strength, weakness, opportunity, threats*) selalu kontekstual dan relevan.

Santripreneurship

Pesantren adalah entitas luhur yang dilahirkan bukan untuk memikirkan diri sendiri dan hal-hal duniawi belaka. Ia ikut membidani lahirnya Indonesia. Turut pula meletakkan dasar-dasar berpikir dan bertindak dalam berbangsa dan bernegara, pesantren mendidik santri untuk tidak bergantung pasif kepada negara, namun untuk berperan aktif.

Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) merupakan wujud ejawantah dari tiga embrio utama, yaitu taswirul afkar (kebangkitan pemikiran), nahdlatul wathan (kebangkitan tanah air), dan nahdlatul tujjar (kebangkitan para saudagar). Sejak awal, kebebasan berpikir, kemerdekaan berbangsa dan bernegara, serta kemandirian ekonomi dijadikan dasar kebangkitan ulama.

Entrepreneurship oleh kalangan santri, yang hari ini disebut santripreneurship, bukanlah sesuatu yang sama sekali baru di dunia pesantren. Yang membedakan pesantren dengan entitas lainnya ialah akar tradisi yang terjaga dan terpelihara dengan kuat. Secara keilmuan maupun pengamalan, pesantren tak mau putus sanad keilmuan dan keguruannya.

Segala sesuatu memiliki riwayat, juga kemandirian pesantren, wabailkhusus kemandirian usaha. Makalah Kiai Haji Abdul Wahab Chasbullah, yaitu Syirkatul 'Inan Murabathah Nahdlatul Tujjar, yang menandai pendirian perserikatan kerja Syirkatul 'Inan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada akhir bulan Rajab 1336 Hijriah merupakan pegangan penting.

Kiai Abdul Wahab dari Tambakberas, yang menjadi bendahara Syirkatul 'Inan, membangkitkan semangat kemandirian dengan sabda dan sikap tegas. "Wahai pemuda tanah air yang cerdas cendekia! Wahai para ustad yang mulia! Mengapa engkau sekalian tak mendirikan saja perserikatan kerja? Satu daerah, satu perserikatan yang mandiri," serunya.

Sebagian hasil dari perserikatan untuk ulama dan kelompok terdidik, menurut Kiai Wahab, diperuntukkan membangun Darun Nadwah seperti dicontohkan para sahabat nabi. Dalam perserikatan diberlakukan pembagian keuntungan tahunan. Separo dibagi berdasar besaran modal masing-masing, separo lagi untuk pengembangan perserikatan.

Pesantren Entrepreneurship

Dulu Syirkatul 'Inan bergerak di bidang pertanian. Perniagaan bukan prioritas karena dianggap sukar dan tak terbiasa. Kini bukan hanya program rumah pangan

santri untuk peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi pesantren, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama juga menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Jejaring kerja sama, akses permodalan, dan rantai pasokan yang baik dan kuat bisa menjadikan pesantren episentrum ekonomi keumatan. Terlebih, penerapan ekonomi syariah kini semakin menjadi pilihan. Selain empat sifat nabi SAW, sikap al adla (adil), atta'awun (saling bantu), dan istiqamah (konsisten) juga menjadi prinsip dalam kewirausahaan.

Menurut catatan Kementerian Agama, 26.973 pesantren tersebar merata di 34 provinsi di Indonesia pada 2020. Mulai yang tertinggi Jawa Barat dengan 8.343 pesantren, disusul Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah di kisaran 3–4 ribu pesantren, hingga Maluku dengan 16 pesantren. Pesantren salaf terjaga, pesantren modern terus bertumbuh.

Empat tahun lalu Hasanuddin Ali dari Alvara Research Center merilis hasil survei nasional bahwa penduduk muslim yang berafiliasi dengan NU berjumlah 79,04 juta jiwa dan 22,46 juta jiwa yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. KH Abdurrahman Wahid mengklaim jumlahnya lebih besar, yaitu 50 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau 120 juta jiwa.

Besarnya potensi penduduk muslim dan santri adalah momentum bagi nahdlatul entrepreneur, kebangkitan pewirausaha. KH Yusuf Chudlori menangkap peluang dengan mengembangkan API (Asrama Perguruan Islam) Tegalrejo, Magelang. Awalnya pesantren salaf sejak 1944, dipadu pesantren modern pada awal 1990, kini didirikan pula pesantren entrepreneur.

Di Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, wirausaha pertanian dan kelautan, toserba, konfeksi, dan olah makanan berkembang pesat. Yang lebih muda, Pesantren Fathul Ulum, Jombang, yang didirikan Kiai Habibul Amin pada 2006 memadu pendidikan salaf dan entrepreneurship. Santri tidak harus menjadi kiai, petuah Kiai Habib, tapi harus menjadi manusia bermanfaat. (*)

MEMUPUK HARAPAN MEMBANGUN KEPASTIAN

Oleh Bambang Soesatyo

UPAYA bersama mengendalikan wabah corona, SARS-CoV-2, maju satu langkah lagi setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. Langkah ini tidak hanya membangun harapan, tetapi juga menjadi modal penting untuk mengakhiri ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

Di tengah ketidakpastian akibat lonjakan kasus Covid-19 yang tampak masih sulit dikendalikan, memupuk harapan bagi pulihnya dinamika kehidupan bersama harus terus diupayakan. Cepat atau lambat, daya rusak pandemi ini terhadap kehidupan umat manusia harus bisa dihentikan dengan akal dan budi. Dengan memperkuat harapan, semua orang terdorong untuk terus berupaya sehingga terhindar dari jebakan putus asa. Dengan berharap dan berupaya, kepastian akan mudah diraih.

Memang, ketika Presiden menandatangani Perpres itu, vaksin penangkal Covid-19 baru memasuki tahap persiapan produksi skala besar, karena bahan bakunya masih harus didatangkan dari Tiongkok. PT Bio Farma mendapatkan komitmen dari partnernya, Sinovac, pasokan untuk 50 juta dosis vaksin corona. Bahan baku vaksin corona itu dijadualkan tiba bertahap di tanah air mulai November 2020 hingga Maret 2021.

Namun, uji klinis vaksin ini di dalam negeri telah dilakukan dengan cermat. Uji klinis fase III oleh Bio Farma sejak 11 Agustus 2020 yang melibatkan ratusan relawan itu berjalan lancar. Tidak ada laporan mengenai efek samping dari uji klinis itu. Semua proses ini diawasi dan mendapatkan pengawalan regulatory oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Perpres No. 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi untuk penanggulangan Pandemi Covid-19 itu ditandatangani Presiden pada Senin (5/10) dan diundangkan sehari setelahnya. Perpres ini otomatis menggambarkan tingginya tingkat keyakinan pemerintah. Maka, ketika pemerintah sudah dengan berani menunjukkan optimismenya, seluruh elemen masyarakat pun diharapkan optimis menghadapi hari-hari mendatang. Ibarat badai permasalahan, tekanan yang bersumber dari pandemi Covid-19 plus resesi ekonomi sekarang ini pasti bisa dilalui jika semua orang berani memupuk harapan dan terus berupaya.

Perpres itu memang belum secara tegas mencantumkan waktu pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Namun, mencermati jadual dan rencana produksi Bio Farma, bisa dipastikan bahwa vaksinasi akan direalisasikan pada kuartal pertama 2021. Oleh karena pemerintah begitu optimis, Perpres ini bahkan sudah merinci mekanisme pengadaan, pendanaan, tata cara vaksinasi hingga target vaksinasi serta peran dan fungsi kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah.

Kementerian kesehatan diberi wewenang melaksanakan vaksinasi, dan karenanya berwenang pula menetapkan kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, Jadwal dan tahapan pemberian vaksin, serta standar pelayanan vaksinasi. vaksinasi Covid-19 diberikan dua dosis per orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan (antibodi) terhadap Covid-19 secara optimal.

Perpres yang sama juga menetapkan bahwa prioritas pemberian vaksin ditujukan kepada petugas medis, paramedis contact tracing, TNI/Polri serta aparat hukum yang jumlahnya mencapai hampir 3,5 juta orang. Prioritas berikutnya meliputi pemuka agama dan tokoh masyarakat, aparatur daerah (kecamatan, desa, RT/RW), serta sebagian pelaku ekonomi. Jumlah kelompok ini mencapai lebih dari 5,6 juta orang.

Berikutnya adalah para guru/tenaga pendidik dari tingkat PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang berjumlah lebih dari 4,3 juta orang. Aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif) juga mendapat prioritas. Jumlahnya lebih dari 2,3 juta orang. Di urutan berikutnya adalah peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang jumlahnya 86,6 juta orang lebih. Kelompok lain yang juga diprioritaskan mencapai lebih dari 57,5 juta orang.

Target minimal dari program vaksinasi corona mencapai 160 juta warga. Untuk itu, pemerintah menyiapkan vaksin dari dua produsen. Vaksin Bio Farma-Sinovac diberikan kepada 102.451.500 orang yang masuk kelompok prioritas di Pulau Jawa. Sedangkan vaksin dari kerja sama PT Kimia Farma – Sinopharm (Tiongkok) – G42 dari Uni Emirat Arab akan diberikan kepada 27 juta sasaran prioritas di luar pulau Jawa.

Berarti, masih ada sekitar 30,5 juta warga yang juga harus disiapkan vaksin-nya. Salah satu alternatif yang telah dijajaki oleh pemerintah adalah pengadaan vaksin dari GAVI-CEPI yang harganya relatif murah. Vaksin GAVI

(Global Alliance for Vaccines and Immunization) dan CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation) bisa disebut sebagai hasil kerja sama multilateral karena melibatkan sejumlah negara dan institusi.

Di tengah rivalitas global yang cukup sengit untuk mendapatkan vaksin corona yang volume produksinya masih sangat terbatas, upaya pemerintah menargetkan vaksinasi bagi 160 juta warga terbilang luar biasa dan progresif. Sebab, dengan target seperti itu, harus tersedia minimal 320 juta dosis vaksin, karena per orang harus menerima dua kali vaksinasi. Kalau produksi global untuk vaksin corona berjalan sesuai skenario, di penghujung tahun 2021 nanti baru tersedia hanya dua miliar dosis. Dengan total penduduk bumi 7,7 miliar sekarang ini, jelas bahwa volume produksi global itu masih jauh dari total kebutuhan. Dan, dari total produksi vaksin corona sekarang ini, sekitar 30 persennya sudah diborong negara-negara kaya.

Jika skenario pemerintah mem-vaksinasi 160 juta warga pada awal 2021 bisa direalisasikan, kekebalan kelompok (herd immunity) bisa terwujud. Pencapaian ini akan menguatkan harapan sekaligus menjadi awal dari upaya mengakhiri ketidakpastian. Wajar jika semua elemen masyarakat berharap skenario pemerintah sebagaimana tergambar dari Perpres No.99/2020 itu bisa diwujudkan, karena dari situ bisa dibangun kepastian baru. Komunitas global, termasuk Indonesia, butuh kepastian baru untuk keluar dari zona resesi 2020 sekarang ini.

SISI LAIN PANDEMI COVID-19 MOMENTUM BERBENAH LAYANAN KESEHATAN

Oleh Dwikora Novembri Utomo

DUNIA saat ini disibukkan dengan kehadiran virus korona SARS-CoV-2 yang mengakibatkan pandemi global yang lebih dikenal dengan nama Covid-19 (coronavirus disease 2019). Virus ini tidak hanya memengaruhi dunia kesehatan, tetapi juga aspek lain seperti ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan politik.

Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan, hingga September 2020, jumlah kasus yang terkonfirmasi telah melebihi angka 200.000. Tentu saja harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh masyarakat.

Pada awal September, masyarakat dikejutkan dengan berita tentang larangan kunjungan warga negara Indonesia (WNI) ke 59 negara. Antara lain negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia serta negara-negara lain di Benua Asia, Amerika, Eropa, dan Afrika. Keputusan negara-negara tersebut didasari pertimbangan kasus Covid-19 yang masih tinggi di Indonesia.

Dampak dari larangan ini diprediksi cukup merugikan, terutama di bidang ekonomi. Akibat langsung dari larangan ini pasti dirasakan WNI yang akan berkunjung ke negara-negara tersebut, baik untuk perjalanan bisnis maupun sebagai pekerja.

Dari kacamata kesehatan, dampak lain dari larangan ini adalah makin terbatasnya pilihan masyarakat untuk mencari layanan kesehatan ke luar negeri. Mengutip data yang dihimpun dari Patients Beyond Borders, BBC Indonesia, dan The ASEAN Post, terdapat peningkatan jumlah pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri hampir 100 persen dalam satu dekade terakhir (350.000 pada 2006 menjadi 600.000 pasien pada 2015).

Negara-negara tujuan utama adalah Malaysia dan Singapura. Data dari Malaysia Healthcare Travel Council menyebutkan, ada sekitar 670.000 orang Indonesia yang berobat ke rumah sakit-rumah sakit di Malaysia pada 2018. Pasien dari Indonesia mendominasi, yakni 60 persen, dari jumlah pasien asing yang berobat ke Malaysia.

Jenis pengobatan yang dicari juga bervariasi. Misalnya, bedah kosmetik, pengobatan kanker, pengobatan tulang, bedah tulang belakang, dan pengobatan jantung. Terdapat berbagai alasan pasien Indonesia memilih berobat ke luar negeri. Alasan yang cukup dominan adalah mencari pelayanan dengan teknologi

yang lebih baru yang belum tersedia di Indonesia. Tak sedikit masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri karena menganggap pelayanan serta kualitas pengobatan di luar negeri lebih unggul.

Alasan lainnya bisa berupa keinginan pasien untuk mencari second opinion atas penyakitnya atau anggapan bahwa akomodasi rumah sakit luar negeri lebih menyenangkan. Alasan terakhir ini yang memunculkan suatu istilah medical tourism, di mana pasien dapat berobat sekaligus berlibur.

Apa pun alasan pasien Indonesia berobat ke luar negeri haruslah menjadi perhatian pemerintah dan stakeholder tentang pelayanan kesehatan di Indonesia. Larangan kunjungan WNI ke beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia tentu merugikan masyarakat yang ingin mencari pengobatan ke luar negeri.

Di balik musibah ini, akan lebih bijak bila kita bersama-sama dapat mengambil hikmah. Pemerintah justru harus melihat ini sebagai momentum untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik daripada pelayanan di luar negeri.

Langkah nyata pertama yang dapat dilakukan, pemerintah bersama-sama dengan stakeholder seperti pengelola rumah sakit terus meningkatkan promosi kesehatan kepada masyarakat. Promosi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang layanan kesehatan apa saja yang sebenarnya sudah bisa dilakukan di Indonesia sekaligus meyakinkan bahwa layanan kesehatan yang ada di Indonesia tidak tertinggal dari luar negeri.

Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai media, baik cetak maupun digital. Promosi kesehatan dapat berisi hal spesifik yang menyangkut edukasi preventif suatu penyakit dan tata laksana terkini suatu penyakit.

Langkah selanjutnya adalah menjembatani kebutuhan masyarakat dan rumah sakit, salah satunya dalam hal pembiayaan. Salah satu alasan pasien kita berobat ke luar negeri adalah biaya yang lebih murah dengan tindakan serupa. Sebagai contoh, untuk operasi penggantian sendi, beberapa rumah sakit di Malaysia berani mempromosikan paket operasi dengan harga yang lebih terjangkau daripada yang ada di kota besar seperti Jakarta, Medan, atau Surabaya.

Perbedaan biaya ini disebabkan banyak faktor seperti harga alat implan (yang sampai saat ini kita masih harus impor). Alternatif solusi masalah ini, pajak untuk alat implan perlu ditinjau ulang agar harga yang harus ditanggung pasien lebih

terjangkau. Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangat diperlukan di sini.

Promosi dan regulasi pemerintah yang sudah disebutkan sebelumnya perlu didukung kemampuan rumah sakit dan tenaga kesehatan sebagai garda pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan dokter berkewajiban untuk terus meningkatkan hard skill dan soft skill. Yang dimaksud hard skill di sini adalah pengetahuan dan keterampilan yang selalu mengikuti perkembangan temuan ilmiah baru, baik dalam hal diagnostik, terapeutik, maupun rehabilitasi. Dengan kemudahan akses informasi saat ini, hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil sehingga wajib dilakukan semua tenaga kesehatan.

Rumah sakit juga harus terus berupaya meningkatkan fasilitas diagnostik dan terapeutik sesuai dengan perkembangan teknologi. Dukungan pemerintah di sektor ini juga penting dalam memberikan regulasi yang mengatur harga alat-alat kesehatan sehingga mampu dimiliki semua rumah sakit di Indonesia.

Sinergi antara tenaga kesehatan, rumah sakit, dan pemerintah tentu akan makin meyakinkan masyarakat bahwa layanan kesehatan di Indonesia tidak kalah atau bahkan lebih baik daripada di luar negeri. Semua hal konkret ini harus didukung *service excellence*. Karena itu, semua tenaga kesehatan wajib meningkatkan soft skill, antara lain kemampuan berkomunikasi kepada pasien, keterbukaan informasi terhadap pasien, dan profesionalitas dalam setiap tindakan.

MEMAKSIMALKAN PELUANG UNTUK BERLARI

Oleh Hendra Saparini

INDONESIA pernah mengalami momen pertumbuhan ekonomi yang negatif. Penyebabnya, tentu shock pada ekonomi yang dampaknya membuat realisasi pertumbuhan ekonomi menjadi minus.

Secara teori, jika pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut, memang akan terjadi resesi. Tapi, sebenarnya dalam kondisi seperti ini pertumbuhan ekonomi negatif sangat mungkin terjadi. Ini bukan pembenaran. Memang kondisinya begitu.

Yang harus diingat, Indonesia memiliki peluang untuk tidak terjadi 'hard landing'. Atau, kalau terjadi shrinking atau penyusutan, tidak akan terlalu dalam. Kenapa? Karena Indonesia memiliki ruang yang lebih luas, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Di negara lain, pertumbuhan ekonomi negatifnya diprediksi sampai lebih dari 20 persen.

Indonesia masih punya ruang karena selama ini ekonominya bersumber dari konsumsi rumah tangga. Artinya, kalau kita tahu bahwa dampak Covid-19 itu jangka panjang, yang harus dilakukan ialah menjaga sumber pertumbuhan ekonomi itu. Diharapkan juga, konsumsi rumah tangga tersebut memanfaatkan produk-produk dalam negeri.

Indonesia masih bisa 'lari' ke sana kemari. Tinggal bagaimana memaksimalkan strategi. Dengan begitu, harapannya, ekonomi bisa berangsur membaik. Kemudian, kita juga harus punya strategi yang komprehensif. Stimulus yang diberikan kan juga besar. Nah, pertanyaannya, dari angka yang besar itu, lantas berapa yang menjadi captive market pada produk dalam negeri? Kalau stimulusnya besar, tapi larinya tidak ke produk dalam negeri, ya nggak bener. Jadi, jangan fokus saja ke negatifnya. Toh, setelah negatif akan rebound dengan struktur ekonomi yang lebih baik.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang saat ini terjadi tentu berpengaruh pada konsumsi masyarakat. Beberapa hal bisa dilakukan untuk jangka pendek. Yakni, melalui penguatan bantuan langsung tunai (BLT). Sementara itu, untuk jangka menengah dan panjang, bantuan bisa dilakukan dengan tidak hanya membeli produk pabrikan besar, tapi justru lebih ke UMKM. Jadi, jutaan UMKM yang mayoritas dari masyarakat menengah ke bawah bisa dimaksimalkan dan terjadi multiplier effect.

Kebijakan pemerintah yang tidak memukul rata PSBB di semua wilayah di Indonesia juga tepat. Strategi per daerah memang harus berbeda-beda. Tidak bisa disamaratakan. Sebab, kasus Covid-19 di tiap daerah juga berbeda.

Hanya saja, setelah itu harus juga dipikirkan bagaimana satu daerah bisa men-support daerah lain. Misalnya, ada daerah yang bisa dioptimalkan sumber pangannya melalui produk pertanian. Strategi itu belum ada, tapi tentu ke depan bisa dilakukan.

PSBB KETAT KEMBALI, PERLUKAH?

Oleh Laura Navika Yamani

PEMBATASAN sosial berskala besar (PSBB) menjadi kebijakan rem darurat ketika lonjakan kasus Covid-19 terjadi di Indonesia. Salah satunya akan diterapkan di DKI Jakarta per 14 September 2020. Keputusan ini memunculkan pro dan kontra. Apakah merupakan langkah tepat untuk pengendalian kasus Covid-19 yang terus meningkat? Masih menjadi pertanyaan besar.

Tren kenaikan kasus di DKI Jakarta memang sangat memprihatinkan, bahkan mengkhawatirkan. Kenaikan itu mengakibatkan kapasitas tempat tidur di rumah sakit semakin banyak terpakai menyusul makin banyaknya pasien Covid-19. ICU penuh, rumah sakit rujukan full (Jawa Pos, 10/9/2020).

Kecepatan penambahan bed ataupun fasilitas Covid-19 saling berkejaran dengan kecepatan kenaikan kasus. Tidak mudah menambah fasilitas kesehatan dengan mobilitas masyarakat yang semakin cepat sebagai potensi penularan Covid-19. Ini terbukti dengan peningkatan positivity rate kasus Covid-19 yang terus terjadi, bahkan melebihi 10 persen di atas rekomendasi WHO. Padahal, kapasitas testing dan tracing pun sudah diperbanyak, dan DKI Jakarta sebagai penyumbang terbanyak jumlah pemeriksaan secara nasional sekitar 40 persen.

Penularan Covid-19 melalui udara atau airborne transmission sebenarnya masih misterius. Sebagian besar ilmuwan tetap meyakini bahwa droplet dan kontaminasi benda masih menjadi sumber penularan utama. Kecepatan persebaran Covid-19, khususnya di Indonesia, dengan adanya risiko penularan udara juga dipertanyakan.

Namun, kemunculan banyaknya klaster perkantoran di DKI Jakarta perlu diperhatikan. Kondisi ventilasi yang buruk dari gedung perkantoran menjadi sorotan adanya kemungkinan penularan melalui udara. Perbaikan sirkulasi udara dalam gedung hendaknya menjadi pertimbangan untuk meminimalkan persebaran.

Selain itu, kemunculan informasi strain mutasi D164G dari SARS-2-CoV sebagai agen penyebab Covid-19 beberapa waktu lalu menjadi pembahasan hangat. Bahkan, ada yang mengaitkan mutasi dengan persebaran yang cepat di Indonesia. Pemicunya adalah persebaran yang cepat di Eropa dan Amerika bersamaan dengan penemuan strain mutasi D164G yang mendominasi. Bahkan, mutasi ini ditemukan 77 persen secara global.

Gambaran ini sebenarnya belum bisa disamakan dengan kondisi di Indonesia, walaupun mutasi tersebut ditemukan pada sekitar 36 persen dari strain yang ter-submit di GISAID. Hal ini disebabkan minimnya data isolat SARS-CoV-2 strain dari Indonesia yang ter-submit di GISAID karena laboratorium masih berfokus pada pemeriksaan penemuan kasus. Karena itu, karakteristik dari isolat Indonesia belum dapat ditarik.

Ini menjadi tantangan peneliti Indonesia untuk memaksimalkan apa pun penelitian terkait Covid-19, termasuk penelusuran genetik korona yang sedang berkembang di Indonesia. Tidak hanya menemukan mutasi yang serupa dengan penemuan di dunia, tetapi juga spesifik mutasi di Indonesia. Sehingga dapat juga dikaitkan dengan kondisi persebaran, keberhasilan vaksin, maupun obat yang dikembangkan.

Langkah Serius

Pengembangan kandidat vaksin dan obat masih terus dilakukan untuk mendapatkan vaksin yang efektif dan aman dalam waktu cepat. Sembari menunggu itu semua, penerapan protokol kesehatan ketat menjadi cara ampuh untuk pengendalian persebaran Covid-19. Jika disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan ketat belum dapat dilakukan, dipastikan peningkatan kasus akan terus terjadi.

Jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya intervensi, akan memperburuk kondisi kesehatan masyarakat Indonesia, termasuk akan terjadi overload pada fasilitas kesehatan. Dampaknya, terjadi ketidakmampuan penanganan pasien Covid-19 yang mengakibatkan kenaikan pada kasus kematian pasien positif.

Pilihan sulit antara sektor kesehatan dan ekonomi pada masa pandemi ini ibarat buah simalakama. New normal menuntut kita untuk hidup berdampingan dengan korona. Roda perekonomian diaktifkan bersama penerapan protokol kesehatan sebagai langkah antisipasi persebaran. Namun, hal itu memunculkan peningkatan kasus, khususnya di DKI Jakarta, bahkan semakin sulit untuk dikendalikan.

Langkah-langkah yang lebih serius harus dijalankan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat ketika protokol kesehatan tidak berhasil meredam kasus. Maka, pembatasan pergerakan masyarakat perlu dilakukan sebagai rem darurat. PSBB ketat adalah solusi terbaik saat ini.

Dengan persiapan yang jauh lebih baik dibanding fase awal pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, tentu PSBB akan efektif. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat wajib dilakukan demi pengendalian kasus yang cepat.

Selama sekitar enam bulan, pemerintah tentu memiliki data lengkap dan kuat terkait faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan ketat. Pertama, kerap kali oknum pemerintah di berbagai level mempertontonkan tindakan bertentangan dengan kampanyenya sendiri. Misalnya, menciptakan kerumunan dan tidak memakai masker walau untuk kepentingan foto.

Bahkan, para influencer dan buzzer pemerintah di program media sosial tidak menjadi contoh. Padahal, tindakan visual di tengah fakta masyarakat rendah literasi menjadi alat ampuh kampanye. Ini harus diperbaiki karena masyarakat patron-client membutuhkan cermin atau contoh dalam penerapan keseharian.

Kedua, pihak swasta harus patuh dengan aturan. Bukan kucing-kucingan untuk mencari celah lemahnya aturan yang ada, terutama aspek pengawasan. Tetapi, kuncinya tentu tetap pada masyarakat. Jika masyarakat taat dan disiplin serta mampu bersabar atas keputusan ini, pengendalian kasus dapat terjadi.

Ketaatan dan kedisiplinan itu akan semakin tinggi ketika pemerintah konsisten dalam laku teks dan gerak dalam setiap kesempatan. Sehingga masyarakat merasakan betul bahwa pandemi Covid-19 ini nyata. Jangan sampai tercipta ruang untuk ngadi-ngadi sebagaimana kerap didengungkan para pesohor yang tak percaya karena malas membaca dan lemah data. PSBB ketat, sinergi dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci presisi menuju segera berakhirnya pandemi. Semoga!

GANGGUAN MENTAL PERAWAT SAAT PANDEMI

Oleh AH. Yusuf

PANDEMI Covid-19 membuat banyak korban. Bukan hanya masyarakat awam, melainkan juga tenaga kesehatan, khususnya perawat. Berdasar data Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jatim, hingga Agustus 2020, perawat yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 727 orang dan meninggal 20 orang. Hal itu membuat rumah sakit (RS) mulai kekurangan tenaga perawat. Beban kerja perawat menjadi meningkat dan rawan tertekan secara psikologis. Hal ini menyebabkan tingginya kebutuhan kesehatan mental emosional perawat di RS. Program pemerintah dengan memberikan tunjangan dan penghargaan lain menjadi salah satu suntikan moril dan materiil bagi mereka.

Profesi keperawatan mengajarkan untuk memiliki jiwa penuh kasih dan ikhlas melayani sesama. Perawat bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan keluarga agar tidak tertular Covid-19 saat di rumah. Di sisi lain, perawat memiliki tantangan dalam melakukan perawatan di RS seperti interaksi emosional, psikologis yang intens dan berkelanjutan dengan pasien, keluarga, serta penunggu lainnya.

Gangguan mental dapat berbentuk cemas, khawatir berlebihan, takut, mudah tersinggung, sulit konsentrasi, ragu atau merasa rendah diri, kecewa, pemarah, dan agresif. Reaksi fisik dapat berupa jantung berdebar, otot tegang, sakit kepala, gangguan regulasi hormonal, hipertensi, diabetes melitus, asam urat, kolesterol, dan masalah imunologis lainnya.

Perubahan suasana mental emosional merupakan sebuah gangguan yang berdampak pada gangguan fisik dan jarang disadari oleh penderitanya. Perawat saat terganggu mental emosionalnya tidak akan datang ke faskes untuk berobat karena mereka tidak menyadari mengalami gangguan ini. Mereka hanya merasa kurang nyaman, tidak tahu harus bagaimana, harus berbuat apa, mulai dari mana. Perut lapar, tetapi tidak ingin makan. Ngantuk, tetapi tidak bisa tidur. Di keramaian ingin menyepi, di kesepian ingin mencari keramaian, dan sebagainya. Akibatnya, banyak pekerjaan yang tertunda, kualitas kerja terganggu, kualitas hidup terganggu, dan produktivitas terganggu.

Covid-19 adalah virus yang baru diidentifikasi dan bukti masih bermunculan tentang dampak patofisiologis dan epidemiologi serta implikasi demografis dari pandemi. Faktor-faktor perawat mengalami status gangguan mental, stres,

kecemasan, gejala depresi, insomnia, penyangkalan, kemarahan, dan ketakutan disebabkan mereka memiliki risiko tinggi potensi terinfeksi virus, perlindungan yang tidak memadai, jam kerja yang panjang, kelelahan fisik dan mental, diskriminasi, isolasi, perawatan pasien yang kompleks, dan kurangnya kontak dengan keluarga semakin menambah rentetan penyebab stres perawat.

RS bukan lagi menjadi garis depan, tetapi garis akhir pertahanan untuk melawan Covid-19. Pemerintah memutuskan berbagai langkah konkret untuk mencegah penularan seperti kampanye sering mencuci tangan pakai sabun, bermasker saat keluar rumah, menghindari sentuhan, jangan sentuh area wajah, etika bersin dan batuk, hindari berbagi barang pribadi, bersihkan perabot rumah menggunakan disinfektan, physical distancing, selalu mencuci bahan makanan, dan tingkatkan imunitas tubuh. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penularan secara masif dan sangat membantu tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk lebih efektif menangani pasien Covid-19.

Kemampuan adaptasi psikososial perawat dipengaruhi oleh penilaian terhadap stresor dan kondisi orang yang menilai. Tujuan akhirnya adalah hadapi atau lari dari kenyataan (fight or flight). Penilaian terhadap stresor ditentukan oleh kondisi pikiran, perasaan, fisiologis tubuh, perilaku, dan keadaan lingkungan sekitar. Kondisi orang yang menilai dipengaruhi oleh kebiasaan personal, dukungan sosial, kepemilikan aset materi, dan keyakinan positif. Menurut hemat saya, tambahkan nilai-nilai spiritual yang dapat memperkuat meaning of lifes karena prinsip keyakinan spiritual akan berupaya mempertahankan keharmonisan, keselarasan dengan dunia luar. Keyakinan spiritual menjadi motivator internal dalam berjuang untuk menjawab, mendapatkan kekuatan ketika sedang menghadapi musibah, penyakit fisik, stres emosional, keterasingan sosial, bahkan ketakutan menghadapi ancaman kematian.

Solusi mencegah terjadinya gangguan mental emosional perawat selama pandemi adalah melatih kemampuan adaptasi, bangun pikiran, perasaan, dan kebiasaan hidup positif, dapatkan dukungan sosial, serta perkuat keyakinan spiritual yang akan membantu menemukan makna hidup. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing untuk bersama berjuang melawan pandemi. Biarlah kita terhindar dari masalah gangguan mental emosional dan tetap sehat jiwa. Di sisi lain, ini menjadi koreksi bersama terhadap

pembentukan kurikulum pendidikan perawat di masa depan bahwa pengendalian emosional menjadi fundamental dalam teori dan praktik keperawatan.

Jiwa yang sehat memang sulit didefinisikan. Menurut UU RI No 18 Tahun 2014, sehat jiwa adalah suatu kondisi saat individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. WHO memberikan kriteria sehat jiwa adalah orang yang dapat (1) menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan, meskipun kenyataan itu buruk; (2) merasa bebas secara relatif dari ketegangan dan kecemasan; (3) memperoleh kepuasan dari usahanya atau perjuangan hidupnya; (4) merasa lebih puas untuk memberi daripada menerima; (5) berhubungan dengan orang lain secara tolong-menolong dan saling memuaskan; (6) mempunyai daya kasih sayang yang besar; (7) menerima kekecewaan untuk digunakan sebagai pelajaran di kemudian hari; dan (8) mengarahkan rasa permusuhan pada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif.

Jiwa sebagai sistem perilaku, indikator kesehatannya adalah berfungsinya diri pada kehidupan nyata pada lingkungan. Jiwa yang sehat adalah soal menjaga perasaan, jangan sampai menyinggung atau melukai perasaan yang lain. Menjaga pikiran untuk tetap konsisten pada pikiran positif, apa yang ada dalam pikiran akan menentukan makna hidup, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi yang lain. Jagalah perilaku agar tetap selaras dan seimbang dengan lingkungan. Salam sehat jiwa. (*)

TANTANGAN BUKA SEKOLAH SAAT PANDEMI

Oleh **Brahmandia Askandar**

SEJAK Maret 2020 sekolah tatap muka terhenti akibat pandemi Covid-19. Tahun ajaran baru 2020/2021 pun dilakukan secara daring. Kementerian Pendidikan membolehkan kegiatan sekolah tatap muka dengan empat syarat. Yakni, dilakukan di daerah yang berstatus zona hijau yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, bila pemerintah daerah memberikan izin, hanya jika telah memenuhi daftar periksa yang ditentukan, dan bila ada persetujuan orang tua.

Berdasar data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada 6 Agustus 2020, akumulasi orang terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 118.753. Dengan perincian, 2,3 persen untuk pasien berusia 0–5 tahun dan 6,8 persen berusia 6–18 tahun. Sedangkan angka kematian pada kasus Covid-19 mencapai 5.521. Menariknya, 1 persen dari jumlah kematian tersebut berusia 0–5 tahun dan 1,1 persen berusia 6–18 tahun.

Data American Academy of Pediatrics menunjukkan, terdapat 338.982 kasus Covid-19 pada anak (0–24 tahun) atau 8,8 persen dari semua kasus Covid-19 di Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa usia anak sekolah tetap mempunyai risiko terpapar Covid-19 dan bisa berakibat kematian.

Protokol Kesehatan

Bila sekolah tatap muka terpaksa dibuka, protokol kesehatan harus disiapkan dan dibudayakan. Untuk sampai menjadi budaya, perlu pelatihan yang terus-menerus, baik siswa, guru, maupun orang tua siswa. Sekolah tatap muka dilaksanakan bila telah betul-betul siap, tidak bisa memakai prinsip trial and error karena menyangkut kesehatan. Pencegahan dasar penularan Covid-19 melalui droplet meliputi memakai masker bagi semua orang, jaga jarak 1–2 meter antarorang, dan cuci tangan secara rutin.

Meski aturan tersebut sederhana, pelaksanaannya tidak mudah. Orang dewasa saja sering lengah. Masker diturunkan hanya menutup mulut tanpa menutup hidung. Bahkan diturunkan sampai leher. Siswa, petugas, dan guru sekolah harus mempunyai budaya memakai masker dengan benar. Bukan asal memakai masker. Masker harus dipakai menutup hidung dan mulut dan tidak boleh dilepas selama berinteraksi dengan orang lain.

Di televisi, banyak kita lihat seseorang hanya memakai face shield yang terbuat dari plastik tanpa menggunakan masker. Hal itu keliru. Face shield hanya merupakan proteksi tambahan setelah memakai masker, bukan menggantikan masker. Memakai face shield tanpa masker tidak efektif mencegah penularan Covid-19. Face shield harus dipakai bersama masker. Protokol wajib memakai masker dengan benar merupakan syarat sekolah tatap muka, tidak bisa digantikan dengan face shield.

Aktivitas di sekolah yang mengharuskan lepas masker seperti makan bersama harus dilarang. Perlu diperhatikan juga, semakin banyak udara yang keluar dari tubuh seseorang yang terpapar virus, kemungkinan transmisi semakin besar. Berteriak lebih banyak virus yang keluar daripada berbicara. Acara menyanyi bersama juga sebaiknya ditiadakan. Jaga jarak 1–2 meter dapat mengurangi transmisi virus karena droplet yang keluar tidak mencapai orang lain, jatuh ke bawah akibat gravitasi.

Prinsip tersebut diterapkan di sekolah dengan cara membatasi jumlah murid yang masuk pada saat bersamaan, agar jarak tetap terjaga. Orang tua siswa harus dilarang bergerombol saat menunggu atau antar jemput anaknya. Demikian pula siswa, tidak bergerombol menunggu dijemput saat usai sekolah. Guru juga tidak berkerumun di kantor setelah jam sekolah. Pada prinsipnya, sebisa mungkin mengurangi interaksi antarorang, kecuali diperlukan. Sekolah tatap muka sebaiknya dibuat sesingkat mungkin untuk mengurangi paparan, hanya untuk materi-materi yang sulit diberikan secara daring.

Cuci tangan penting untuk mencegah virus masuk ke hidung dan mulut melalui tangan yang terkontaminasi virus. Sekolah harus menyediakan tempat cuci tangan dalam jumlah cukup, mencegah kerumunan antre. Ventilasi yang baik sangat penting. Kelas tertutup dengan ventilasi buruk mengakibatkan risiko penularan menjadi lebih tinggi. Sekolah dengan kelas berventilasi buruk sebaiknya menunda aktivitas sekolah tatap muka. Bila menggunakan pendingin udara, WHO memberikan saran agar secara teratur dibersihkan dan dirawat pihak sekolah.

Komorbidity

Sehubungan dengan aktivitas sekolah tatap muka, perlu identifikasi penyakit komorbid seperti usia tua, obesitas, hipertensi, diabetes melitus, penyakit paru kronis, kanker, dan lain lain. Identifikasi dilakukan pada siswa, guru, maupun

orang tua/saudara siswa di rumah. Data Centers For Disease Control and Prevention (CDC) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa orang dengan obesitas, diabetes melitus, penyakit kardiovaskuler, penyakit paru kronis, kanker, dan gangguan ginjal meningkatkan risiko terjadinya gejala berat Covid-19.

Menurut European Society of Cardiology, orang dengan hipertensi mempunyai risiko kematian dua kali lipat lebih besar dibanding orang normal bila terkena Covid-19. Identifikasi penyakit komorbid pada guru dan orang yang tinggal serumah dengan siswa penting dilakukan. Bila siswa terpapar Covid-19 di sekolah, mereka bisa menularkan ke orang tua atau saudara mereka di rumah. Tentunya, bila kebetulan orang tua atau saudara mempunyai komorbid, bisa berakibat fatal.

Bagi siswa atau orang tua atau saudaranya serumah yang memiliki komorbid, sebaiknya aktivitas sekolah tetap secara daring. Guru yang mempunyai komorbid sebaiknya tidak melakukan aktivitas tatap muka di sekolah. Bila identifikasi ini tidak dilakukan, angka kematian Covid-19 bisa makin meningkat.

Pemeriksaan swab harus dilakukan secara rutin untuk guru dan semua petugas sekolah. Tidak cukup satu kali tes saja. Bila ditemukan ada yang positif, aktivitas sekolah secara tatap muka harus ditutup sementara agar bisa dilakukan tracing dan sterilisasi. Pelaksanaan sekolah tatap muka harus diperhitungkan dengan cermat waktunya sambil terus dilakukan pelatihan dan simulasi. Peran guru sebagai role model dan pengawas sangat penting. Semoga Covid-19 segera berakhir dan sekolah kembali ke normal yang sesungguhnya.

SIASAT KEBUDAYAAN BARU DARI DESA

Oleh Ryan Sugiarto

ANGKA kasus positif Covid-19 terus naik dan belum jelas tanda-tanda bakal mereda. Lonjakan kasus yang makin tidak terkontrol tentu menimbulkan kekhawatiran bagi banyak sektor kehidupan masyarakat. Data Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu memperkirakan, kerugian ekonomi akibat Covid-19 mencapai Rp 316 triliun.

Estimasi itu didasarkan pada besaran pertumbuhan dalam situasi normal yang mencapai 5 persen, sementara pada faktanya tingkat pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama sebesar 2,97 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pada tingkatan global, IMF memproyeksikan kerugian perekonomian global akibat adanya Covid-19 mencapai USD 12 triliun yang didasarkan pada akumulasi dua tahun (2020 dan 2021).

Covid-19 telah membuka permasalahan terselubung yang selama ini dihadapi manusia modern. Infrastruktur kesehatan di negara-negara maju ternyata rapuh. Jerman yang sukses menekan angka pandemi memiliki 2.000 rumah sakit (RS) dengan populasi penduduk sebesar 83 juta dengan rasio ranjang di ICU paling banyak, yakni 8,2.

Sementara itu, Indonesia memiliki 2.813 RS dengan populasi tiga kali lipat dibanding Jerman, yakni 267 juta jiwa. Padahal, persoalan besar pandemi ini adalah terbatasnya infrastruktur kesehatan, tenaga medis, dan alat pelindung diri (APD). Pandemi menyadarkan kita bahwa industri kesehatan yang dianggap canggih pun ternyata gagal melindungi warga.

Belum ditemukannya vaksin membuat hari ke depan penuh dengan ketidakpastian. Wabah menjungkirbalikkan seluruh tatanan masyarakat, sentuhan fisik, dan gerak manusia. Relasi dan aktivitas sosial atau komunal dibatasi. Masyarakat kehilangan sumber pekerjaan karena hilangnya aktivitas ekonomi. Jaring pengaman sosial diperkuat di mana pemerintah merealokasi dana dengan menaikkan anggaran penanganan Covid-19 sampai Rp 677,2 triliun dari sebelumnya Rp 405,1 triliun.

Pemerintah membuat berbagai protokol untuk persiapan new normal. Namun, berjalannya tatanan normal baru ini menimbulkan dilema antara kepentingan ekonomi dan kesehatan warga. Belum lagi, tatanan era normal baru ini kerap

disederhanakan pada jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Padahal, membuat tatanan normal baru membutuhkan siasat-siasat kebudayaan.

Gamangnya pemerintah mengonstruksi tatanan normal baru bukan tanpa sebab. Covid-19 telah mengubah tatanan yang ada tanpa teriakan revolusi. Covid-19 menyadarkan bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Kapitalisme sebagai buah gagasan telah menghancurkan dirinya sendiri. Konsepsi neoliberalisme luluh lantak oleh Covid-19.

Ideologi sistem ekonomi pasar, kapitalisme, dan sistem demokrasi dunia mengindikasikan kegagalan dalam membangun industri kesehatan untuk menghormati martabat manusia. Indikasinya, kapasitas basis ideologi pembangunan ekonomi tidak dapat menjamin keselamatan, martabat manusia, dan keadilan sosial. Sementara itu, sosialisme juga gagal menawarkan solusi saat pandemi.

Kesimpulannya, ideologi ekonomi dan paradigma pembangunan kesehatan manusia dengan fakta empiris pandemi Covid-19 mengonfirmasi yang dikatakan dalam buku *The End of Ideology* (1960) oleh Daniel Bell. Ia menuturkan bahwa ideologi grand-humanistik yang lebih tua, yang berasal dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah habis dan ideologi baru yang lebih baik segera muncul. Bell berpendapat bahwa ideologi ekonomi, demokrasi, dan sistem politik menjadi tidak relevan di antara orang-orang yang "masuk akal" dan pemerintahan masa depan akan didorong oleh penyesuaian dekonstruksi tatanan baru.

Pandemi ini adalah momentum yang tepat untuk mendekonstruksi atas isme-isme dan instrumen pelaksanaan yang ada. Tatanan baru perlu dirumuskan. Meminjam konsep filsafat analitik pascamodern oleh Jacques Derrida (1930-2004), 'dekonstruksi' ditujukan pada upaya pembongkaran terhadap kemapanan pemaknaan simbol dan bahasa (analitik) yang melekat kesadaran manusia.

Dekonstruksi istilah gerak sosial dalam konteks bencana wabah justru membatasi gerak persinggungan fisik yang bermuara pada jalinan sosial, bertentangan dengan pemaknaan yang selama ini melekat kesadaran masyarakat, sebagaimana aktivitas jabat tangan, berpelukan, atau aktivitas fisik lain. Gerak sosial tersebut kemudian dapat diarahkan pada aktivitas akal budi, melibatkan segenap instrumen ruhiyah yang meliputi rasa, karsa, dan cipta, untuk memproduksi konsep gerak sosial baru.

Covid-19 sering kali dinilai dari sisi negatif sebagai sebuah ancaman, tapi satu hal yang luput dari kesadaran kita adalah Covid-19 telah mendekonstruksi semua tatanan. Berangkat dari kenyataan ketika pemerintah tidak membangun perencanaan baik yang kemudian tata ruang itu diambil alih oleh swasta, sehingga kemudian yang mengatur adalah swasta dan kekuatan modal, tebersit di pikiran, apakah Covid-19 diciptakan bukan bebas nilai? Apakah ada gelombang baru pasca-Covid-19? Apakah ada sebuah upaya dekonstruksi dan konstruksi lain yang disiapkan?

Ada satu entitas yang selama ini kuat dari guncangan Covid-19, yakni desa. Desa-desa di Nusantara adalah komunitas yang paling kuat bantalannya. Saat kota diserbu Covid-19 dan segalanya luluh lantak, orang-orang desalah yang justru menopang logistik warga kota. Mereka pun bisa beradaptasi secara subsisten.

Orang-orang desa juga sigap menjaga keamanan lahir batin. Dan lagi-lagi, desalah penolong bagi para perantau ketika mereka “dipaksa” pulang karena tak ada rezeki di kota. Warga desa yang bergerak adalah gelombang baru yang membawa harapan Indonesia. Selama berabad-abad desa telah membuktikan dirinya sebagai penopang bangsa yang se_sungguhnya. Desa adalah manifestasi dari konstruksi masa depan baru atas tatanan Covid-19 itu sendiri.

Apa yang membuat desa ke depan bisa menjadi penopang konstruksi tatanan baru? Jauh sejak Indonesia belum lahir, desa telah me_ngonstruksi kekuatan gotong royong sebagai puncak relasi sosial. Ekonomi desa bergerak karena konstruksi relasi yang dibangun antar manusianya adalah kerja sama. Kegamangan terkait representasi politik negara dijawab desa dengan cara musyawarah antarwarga. Tiga hal yang selama ini coba direnggut oleh liberalisme dan kapitalisme dari desa.

Desa sewajarnya bermusyawarah mencarikan formula tatanan Indonesia baru. Tujuannya, memformulasikan tatanan baru itu dari pengetahuan dan nilai-nilai yang hidup di desa. Siasat-siasat kebudayaan berupaya dibuat dengan mengonstruksi kembali tema-tema kehidupan masyarakat desa dari segala aspek. Di antaranya, ekonomi berkeadilan, pendidikan, kesehatan semesta, keamanan dan ketertiban, pemberdayaan perempuan dan anak, kedaulatan pangan, serta lingkungan hidup.

Pandemi bagi desa bukanlah waktu berpangku tangan. Pandemi bagi desa adalah kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih bermartabat, berkeadilan, dan berkesetaraan.

DITIPU SERAGAM

Oleh Eka Kurniawan

“TNI gadungan tipu banyak wanita.” Demikian berita utama sebuah media. Modusnya gampang, cuma modal seragam, meskipun kalau diteliti, jelas seragamnya “KW” alias palsu. Cuma modal loreng-loreng hijau. Saya teringat berita semacam itu setelah tempo hari ramai pembicaraan tentang pilih pacar yang berseragam. Seragam di sini tak hanya mengacu pada tentara, tapi terutama pada keamanan karir orang yang mengenakannya.

Tentu untuk kebanyakan orang tak mudah membedakan mana seragam tentara yang asli dan mana yang kaleng-kaleng. Seragam itu tak hanya menipu gadis-gadis lugu, tapi juga bisa memberinya sejenis hak di masyarakat yang biasanya diperoleh tentara sungguhan.

Sebegitu ampuhnya sehelai seragam? Ya. Seragam dalam hal tertentu seperti bahasa. Ia penanda, mewakili berbagai predikat, sifat, nilai.

Itulah kenapa tentara sungguhan, bahkan ketika ia pulang kampung, harus tetap memakai seragamnya agar ia juga menjaga nilai-nilai yang dilekatkan pada seragam tersebut.

Dalam industri sepak bola, penghasilan terbesar sebuah klub di luar sponsor dan jual beli pemain adalah jualan jersey, sebutan lain untuk kaus seragam klub. Sebuah klub tentu mewakili banyak hal: prestasi, komunitas lokal, juga nilai.

Bayangkan berapa banyak dalam minggu-minggu ini fans membeli jersey Liverpool yang baru saja menjuarai Liga Inggris. Jersey musim ini bukan jersey biasa saja. Ia memiliki nilai yang langka: tentang penantian tiga puluh tahun, misalnya.

Sebagai penanda, ia berkembang menjadi identitas. Timbal balik, seragam juga bisa menciptakan imaji kepada yang diwakilinya. Seorang fans dengan bangga memakai jersey kesayangannya, tentu ingin menjadi bagian dari identitas klub tersebut.

Dalam hidup sehari-hari, bahkan orang partikelir sekalipun, sulit terbebas dari seragam. Setiap Lebaran, adik-adik saya merepotkan diri membuat baju seragam keluarga. Setiap reuni, kita memperoleh kaus seragam. Mau gowes hari Minggu dengan tetangga kompleks saja, kadang kita merepotkan diri bikin seragam.

Imajinasi kita dalam banyak hal memang membutuhkan perwujudan. Seperti produk membutuhkan merek, negara membutuhkan lagu kebangsaan hingga

bendera, seperti grup musik membutuhkan logo nama. Seragam berfungsi kurang lebih seperti itu. Karena seragam umumnya dikenakan manusia, ia juga membentuk ikatan imajinasi di antara pemakainya. Yang memakai baju tentara, tentu ia mengkhayal dirinya sebagai tentara. Yang memakai jersey Real Madrid, ia bisa memberi batas-batas imajinasinya: "Saya bukan penggemar Barcelona", misalnya.

Di balik seragam, segala perwujudan individu melebur menjadi perwujudan kelompok. Ketika seseorang mengenakan jubah putih dengan serban, orang lain bisa menganggapnya sebagai "ulama". Melakukan tindakan kriminal pun bisa dibela hanya karena nilai-nilai keagamaan yang melekat.

Di titik inilah kasus semacam "TNI gadungan tipu banyak wanita" bisa terjadi, ketika seseorang memanipulasi imajinasi orang dengan seragam. Seperti si kerudung merah dalam cerita Charles Perrault tertipu oleh serigala yang "berseragam" baju neneknya. Seragam tak hanya menciptakan identitas bagi sebuah kelompok di mana semua individu lebur di dalamnya. Dengan sifatnya yang seperti itu, ia juga bisa menjadi lanskap luas tempat keunikan individu lenyap, dan karenanya tersembunyi.

Bayangkan warna kulit pohon yang menyembunyikan bunglon. Bayangkan hamparan padang rumput sabana yang kering menyembunyikan tubuh singa. Hijau dedaunan menyembunyikan ular.

Para politikus merupakan sekelompok orang yang paling jago memperlakukan identitas melalui baju seragam ini, untuk menciptakan hamparan padang sabana yang ideal mengubur segala keunikan individu. Masih ingat seragam kotak-kotak gubernur DKI? Seragam putih kampanye Jokowi? Partai politik sadar akan seragam semacam ini. PDIP identik dengan segala baju berwarna merah, sebagaimana Golkar dengan warna kuning. Seragam itu tentu, sekali lagi, mewakili imajinasi tentang nilai-nilai politik yang diusung. Kita bergabung, memilih mereka, juga dengan bayangan memilih nilai-nilai tersebut.

Bagaimana jika ternyata kita tertipu oleh nilai-nilai seragam putih bersih "revolusi mental" ala Jokowi, misalnya? Ya, biasa saja. Anggap saja kita gadis-gadis lugu yang mudah terpesona oleh lelaki tegap berseragam tentara yang cuma dibeli di Tanah Abang.

Tertipu seragam itu biasa karena ia memberi peluang untuk itu. Lagi pula, kadang kita suka menipu diri sendiri dengan seragam. Berapa banyak suami istri

bermesraan sambil bermain cosplay? Istri pura-pura pakai baju perawat, suami pakai baju petugas ledeng? Setidaknya di video dewasa, hal demikian terjadi.

Wong saya sendiri kadang senang dan terharu jika di setiap kesempatan melihat Pak Presiden mengenakan pakaian adat daerah dari berbagai tempat. Wah, saya pikir, kita sangat menghargai keberagaman. Wah, negara sangat memperhatikan masyarakat adat. Saya bisa menitikkan air mata saking terharu.

VIRUS BERMUTASI MANUSIA BERADAPTASI

Oleh Prof. Rhenald Kasali

TAHUN lalu kita tak pernah membayangkan bahwa awal 2020 akan begitu dramatis. Pada awal Januari, virus korona yang menyerang sistem pernapasan mulai mewabah di Wuhan, Tiongkok.

Dalam waktu singkat, jumlah penderita Covid-19, penyakit yang disebabkan virus tersebut, melonjak secara eksponensial. Globalisasi dan interkoneksi transportasi membuat virus tersebut menyebar cepat ke berbagai negara. Pada 11 Maret 2020, wabah ini sudah menjangkiti 114 negara hingga WHO menetapkan status pandemi global.

Kemampuan SARS-CoV-2 menyebar ke berbagai penjuru dunia ternyata disebabkan virus ini sangat hebat dalam bermutasi. Lebih hebat jika dibandingkan dengan virus SARS yang memicu wabah sebelumnya.

Ilmuwan menyebutkan, SARS-CoV-2 setidaknya sudah bermutasi 3 kali. Karena itu, karakter virus di berbagai negara berbeda-beda. Artinya, SARS-CoV-2 memiliki kemampuan canggih untuk beradaptasi di lingkungan yang berbeda-beda.

Karena itulah, persebarannya sangat cepat. Upaya penemuan vaksin maupun obatnya pun makin sulit. Bahkan, pasien yang sebelumnya dinyatakan sembuh ternyata bisa terjangkiti lagi. Jumlah penderita Covid-19 di dunia sudah lebih dari 2,39 juta orang. Sebanyak 6 ribu lebih di antaranya ada di Indonesia.

Kemampuan Adaptif

Apakah kemampuan mendasar yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita? Sebagai pendidik, itu menjadi pertanyaan krusial yang terus saya pikirkan. Pengalaman puluhan tahun mendidik mahasiswa dan belasan tahun mengembangkan PAUD/TK untuk kegiatan sosial mengantarkan saya pada satu kesimpulan. Bahwa kemampuan mendasar yang dibutuhkan itu adalah adaptif.

''Survival of the fittest''. Demikian kata Charles Darwin. Fittest berarti mampu beradaptasi dengan lingkungan. Jadi, kunci survive itu bukan yang paling kuat atau paling cerdas, tapi yang paling adaptif. Konsep ini sudah berlangsung jutaan tahun.

Demikian pula otak. Di London, para sopir taksi Black Cab harus menghafalkan 25 ribu ruas jalan, 50 ribu persimpangan, dan lebih dari 20 ribu

gedung serta landmark yang tersebar di seantero London. Tes untuk para sopir taksi itu disebut The Knowledge.

Riset neuroscientist pada para sopir taksi Black Cab menunjukkan, ukuran posterior hippocampus, bagian otak yang berhubungan dengan kemampuan memori, membesar setelah menempuh berbagai proses dalam tes The Knowledge. Neuroscientist menyebutnya brain plasticity, bahwa otak manusia masih bisa berkembang meski sudah menginjak usia dewasa. Saya menyebutnya adaptasi.

Adaptasi Pandemi

Pola pikir maupun cara pandang manusia sebelum dan saat di tengah krisis ternyata berbeda. Ketika awal muncul Covid-19, banyak orang yang berpikiran bahwa penyakit ini hanya seperti flu biasa yang bisa sembuh dengan sendirinya. Bahwa virus ini akan mati di cuaca panas. Bahwa kita bisa kebal karena rajin mengonsumsi empon-empon atau rempah-rempah.

Cara pandang underestimate ini terjadi di hampir semua negara, termasuk di negara maju seperti Amerika Serikat. Karena itu, kini bukan saatnya lagi saling mengolok-olok karena memang yang dihadapi saat ini adalah virus yang memiliki kemampuan canggih dalam bermutasi.

Ketika sekarang berada di tengah krisis, cara pandang kebanyakan orang bergeser dari underestimate menjadi overestimate. Seakan-akan, dunia akan kiamat, ekonomi hancur berantakan. Sikap pesimistis semacam ini bisa dimaklumi. Tapi, jangan sampai berlarut-larut.

Semua tahu, kita sedang dan akan menghadapi masa-masa sulit dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi, bukan berarti kita tak bisa berbuat apa-apa. Dalam kondisi uncertainty inilah kemampuan adaptif sangat kita butuhkan.

Inovasi sering kali muncul saat manusia dihadang kesulitan. Dulu, banyak orang yang tak bisa mengonsumsi cokelat karena harganya yang sangat mahal. Pada 1963, Michele Ferrero dari Italia berinovasi mencampur cokelat yang mahal dengan gula, minyak, susu, dan kacang hazelnut. Lahirlah Nutella yang kemudian mendunia sebagai alternatif pengganti cokelat untuk dimakan bersama roti.

Ketika gelombang disrupsi terjadi, pelaku-pelaku usaha harus beradaptasi. Kini, tekanan untuk memiliki kemampuan adaptif itu masuk sampai ke ruang-ruang keluarga. Work from home dan school from home mendorong pemanfaatan teknologi komunikasi digital seperti video conference. Kini, semua hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Pola interaksi kita dengan lingkungan sosial dan pekerjaan berubah. Begitu pula interaksi di dalam keluarga. Karena itu, semua harus cepat beradaptasi. Termasuk, beradaptasi dengan kondisi perekonomian yang baru. Kuncinya adalah inovasi.

Gelombang PHK pasti terjadi. Karena itu, keluarga harus bisa menyesuaikan neraca pemasukan dan pengeluaran. Idealnya, pengeluaran ditekan, pemasukan ditambah. Apakah mungkin? Mungkin saja. Di tengah kondisi saat ini, kita menyaksikan tumbuhnya kekuatan entrepreneurship.

Ibu-ibu giat berjualan sayur, makanan, dan kebutuhan medis seperti masker serta disinfektan melalui grup-grup WhatsApp dan media sosial. Sebagian lagi mulai menanam sayuran dengan sistem hidroponik di pekarangan rumah yang luasnya terbatas.

Pelaku usaha di sektor-sektor yang terdampak juga harus beradaptasi. Ketika bisnisnya sepi karena turunnya permintaan, pelaku usaha harus bisa memodifikasi produk atau jasanya. Contohnya, pelaku usaha garmen atau konfeksi yang lincah bergerak menjadi produsen alat pelindung diri (APD) maupun masker. Pelaku usaha seperti restoran dan pedagang yang biasanya mengandalkan pembeli datang juga makin banyak yang masuk ke jaringan marketplace. Pelaku usaha perhotelan yang sepi karena terhentinya aktivitas turisme bisa memodifikasi layanan untuk isolasi mandiri. Dan sebagainya.

Ketika nanti pandemi berakhir dan masuk masa recovery, kondisi new normal akan terjadi. Orang sudah terbiasa dengan cara kerja digital. Bekerja online, belajar online, belanja online, dan sebagainya. Individu, korporasi, dan institusi harus siap beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Kemampuan beradaptasi itu akan muncul beriringan dengan daya inovasi. Karena itu, dalam situasi sulit seperti ini, bukan waktunya lagi untuk memelihara kenyinyiran dan pesimisme. Inilah saatnya memupuk optimisme untuk terus bergerak, beradaptasi, dan berinovasi menyongsong dunia yang terus berubah. (*)

Harapan Baru Pariwisata Indonesia

Oleh Dewa Gde S.

SANDIAGA Uno mendapat kepercayaan sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif (Menparekraf) menggantikan Wishnutama. Kementerian tersebut memimpin dan mengelola industri yang mendapat tekanan terberat dan mengalami keterpurukan terdalam sepanjang perjalanan sejarah bangsa ini.

Artinya, siapa pun yang menjadi Menparekraf haruslah didukung seluruh pihak, tidak dituntut berlebihan, dan tidak dibebankan seluruh harapan pemulihan. Sebab, sebagaimana kepariwisataan itu sendiri adalah lintas sektoral, maka kinerja kementeriannya pun multisektor.

Sekaligus, spirit kementerian pariwisata selayaknya diarahkan untuk mendorong perjalanan wisata di luar Jawa dan Bali. Percepatan pembangunan lima destinasi superprioritas, di mana hanya satu yang ada di Jawa, yakni Borobudur. Empat lainnya berada di luar Jawa (Toba, Likupang, Mandalika, dan Labuan Bajo), menyiratkan pemerataan pembangunan pariwisata agar tidak Bali sentris.

Kursi panas Menparekraf saat ini tidak semata-mata karena kepariwisataan terpuruk dan pada waktu yang bersamaan diharapkan menjadi andalan pemulihan ekonomi bangsa. Tetapi, terlebih menjaga gairah dan antusiasme publik di berbagai daerah di tanah air untuk bersama-sama memperkuat kepariwisataan RI melalui peningkatan daya saing kepariwisataan daerah masing-masing.

Sebagaimana halnya target kepariwisataan negara-negara lain, target kepariwisataan Indonesia saat ini sulit tercapai karena menghadapi sedikitnya tiga tantangan utama. Yakni, adanya perubahan perilaku dan keinginan wisatawan dalam menghadapi wabah global; pencitraan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, teliti, dan tepat dalam mengelola Covid-19; serta ketersediaannya kapasitas dan kualitas produk wisata.

Pandemi Covid-19 mendorong terjadinya reorientasi beberapa hal. Di antaranya, jalur perjalanan wisatawan jarak jauh (long haul) ke jarak menengah dan pendek (medium and short haul trip). Lalu, menurunnya tingkat pengeluaran, lama tinggal, dan jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan ke luar negeri karena mereka lebih memilih berwisata di dalam negeri.

Pola serupa terjadi ketika krisis global beberapa tahun yang lalu. Karena itu, ada sejumlah poin penting bagi Menparekraf untuk mengakselerasi sumber daya

yang dimiliki guna mengatasi tantangan yang ada dan mempercepat pencapaian target yang dicanangkan.

Pertama, sebagaimana menteri agama yang memiliki track record dalam menjaga keberagaman dan menjadikan agama sebagai inspirasi, demikian pula Menparekraf, sekiranya menjadi sosok pemersatu. Sebagaimana diketahui, stakeholder kepariwisataan terdiri atas sektor privat, pemerintah, asosiasi, akademisi, dan masyarakat umum.

Lewat Menparekraf yang baru, diharapkan muncul teamwork swasta-pemerintah untuk mengatasi kendala aturan dan ritme kerja birokrasi. Terlebih, mengatasi situasi sulit pandemi Covid-19 yang menekan pelaku usaha pariwisata dan perhotelan serta menambah pengangguran.

Diperlukan juga kecepatan dalam pengambilan keputusan yang cermat dan tepat, mengawasi, dan mengevaluasi penerapan CHSE (cleanliness, healthy, safety, environment sustainability) sampai ke "lorong-lorong" yang tak terlihat di permukaan. Sandiaga Uno diyakini berkemampuan memangkas dikotomi pemerintah-swasta yang kerap kali menjadi kendala dalam koordinasi pariwisata. Mentalitas birokrasi (birokrat) dalam konteks itu sepatutnya ditanggalkan. Ambil contoh Sinergi erat privat-publik di berbagai negara maju, atau paling tidak tetangga kita Singapura, Malaysia, dan Thailand yang menghasilkan ritme kerja cepat-tepat-efisien.

Kedua, Menparekraf ke depan juga semakin diharapkan sebagai sosok yang lebih andal dalam melakukan lobi di tingkat internasional. Dalam situasi normal, diplomasi internasional setingkat menteri diperlukan untuk memenangkan bidding MICE (meeting, incentive, conference, exhibition), misalnya. Juga melawan keputusan-keputusan politik otoritas negara asing yang merugikan kita seperti travel warning dan larangan terbang bagi maskapai Indonesia di area negara lain. Diplomasi dan lobbying personal yang dijalankan seorang menteri pariwisata sangatlah efektif untuk hal-hal semacam itu.

Saat ini, area-area diplomasi kebudayaan atau biasa dikenal diplomasi soft power dipercaya berdaya efektif bagi pemulihan dan peningkatan citra Indonesia secara luas, dan khususnya dampaknya bagi pariwisata negeri kita. Jejaring bisnis dan pemerintahan asing dipastikan sudah dimiliki Sandiaga Uno, maka tinggal dirawat dan diefektifkan.

Kiprah Menparekraf Sandiaga Uno ke depan haruslah semakin memperkuat jaringan di tingkat internasional, baik dari kalangan buyer, government, investor, maupun pelaku bisnis pariwisata. Pun halnya, lembaga-lembaga internasional, di mana Indonesia tergabung di dalamnya. Misalnya, UN World Tourism Organization, G20, serta perlu semakin dikelola dan ditargetkan untuk keuntungan turisme Indonesia.

Ketiga, Menparekraf Sandiaga Uno diharapkan juga semakin memahami peta bisnis (pasar) wisatawan domestik yang diperlukan pada jangka pendek maupun wisatawan global di jangka panjang. Dalam sambutannya setelah diperkenalkan presiden, Sandiaga menyatakan strategi kementerian yang akan dia pimpin tidak hanya survive, tetapi juga thrive. Artinya, tidak hanya bertahan, tetapi juga menangkap peluang pasar wisatawan. Karena itu, sekalipun diprediksikan bahwa market wisatawan asing di Indonesia bergeser ke segmen medium dan short haul seperti negara-negara Asia Pasifik dan ASEAN, dengan inovasi, itu memungkinkan untuk membuka pasar-pasar wisatawan global yang selama ini tertutup atau tidak optimal.

Kiranya Menparekraf baru bisa menjadi harapan para pelaku usaha dan pekerja di bidang pariwisata serta siapa pun yang bergantung pada sektor pariwisata, untuk memimpin sektor pariwisata di masa-masa sulit saat ini. Termasuk, melakukan normalisasi pada waktunya nanti.

Menyoal Dana Kampanye Nol Rupiah

Oleh Gugun El Guyanie

SALAH satu problem paling serius selama empat kali gelombang pemilihan kepala daerah serentak adalah soal transparansi dan akuntabilitas dana kampanye. Instrumen hukum untuk mengatur dana kampanye sudah disiapkan, bahkan mengalami penyempurnaan secara perlahan-lahan. Tetapi, tentu saja lubang-lubang kelemahan regulasi, baik dari UU Pilkada maupun peraturan teknis di KPU, tetap menjadi celah yang mengancam kualitas pesta demokrasi lokal dari oligarki sipil.

Pengaturan dana kampanye tidak bermaksud untuk menutup pintu donasi kepada pasangan calon (paslon) pilkada. Tetapi, untuk mengawal calon kepala daerah dalam mendapatkan sumbangan yang sah tanpa mengurangi kemandiriannya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat (Edwing and Issacharoff: 2006).

Sesuai ketentuan pasal 20 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye, setiap paslon wajib melaporkan tiga hal. Yakni, laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Laporan awal dana kampanye pilkada 2020 wajib disusun ketika awal masa kampanye, yaitu 26 September. Di pertengahan masa kampanye, LPSDK wajib dilaporkan sekitar 31 Oktober. LPPDK dilaporkan pada akhir masa kampanye, 6 Desember mendatang.

KPU mencatat bahwa dari 739 pasangan calon (paslon), terdapat 31 pasangan yang melaporkan LADK nol rupiah. Juga, terdapat 35 pasangan calon yang melaporkan penerimaan sumbangan nol rupiah.

Problem utama dana kampanye memang berkaitan dengan kepatuhan dan kejujuran. Bagaimana mungkin ada paslon yang melaporkan dana kampanye nol rupiah? Padahal, ketika tahapan kampanye berjalan, KPU dan Bawaslu, bahkan masyarakat, bisa menghitung sendiri. Berapa juta untuk pengadaan alat peraga kampanye, billboard, hingga kaus? Lalu, berapa juta untuk kampanye rapat terbuka, berapa ratus juta jasa konsultan, iklan media, dan pengadaan mobil operasional kampanye yang dipakai?

Rezim UU Pilkada mengatur bahwa dana kampanye bukan hanya uang, melainkan bisa berupa barang dan jasa yang diberikan parpol, gabungan parpol pengusung, atau perseorangan dan kelompok atau badan hukum swasta.

Lantas, siapa yang menjadi aktor di balik sulitnya mengatur transparansi dana kampanye? Jawabannya, dua belah pihak. Pihak pasangan calon termasuk tim penghubung, juga pihak penyumbang, terutama korporasi dan kaum pemodal.

Pihak pasangan calon dan timnya tidak jujur karena rekening pendanaan kampanye tidak hanya satu, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020. Di luar rekening khusus yang dilaporkan ke penyelenggara pemilu, paslon juga memiliki rekening pribadi, rekening anggota parpol, rekening anggota keluarga, bahkan rekening tim yang tidak dilaporkan. Sumbangan "dana kampanye siluman" itulah yang masuk di luar rekening khusus yang tidak bisa diakses KPU, Bawaslu, dan masyarakat luas.

Soal pendanaan kampanye, sudah bukan barang tabu lagi ketika seorang investor, korporasi, dan para kontraktor terlibat dalam "sumbangan gelap" untuk para kandidat. Di Kabupaten Jepara, salah seorang kontraktor jasa konstruksi mendatangi pengurus parpol pengusung calon kepala daerah agar ikut membantu pendanaan kampanye. Tentu dengan menjanjikan imbalan dimenangkan tendernya ketika kandidat yang dibantu menang menjadi bupati.

Penulis mewawancarai asosiasi jasa konstruksi, yang sebagian besar terkoneksi dengan parpol dan para kandidat pilkada. Bos-bos dan pemborong itu mengaku kesulitan memenangkan tender pemerintah di daerah kalau tidak diamankan oleh elite politik lokal. Sebaliknya, jika para kandidat bupati dan parpol mencari dana kampanye lewat para pemborong, peluangnya lebih mudah dan besar. Di salah satu kabupaten di Jogjakarta, taipan papan atas dari Jakarta juga dikabarkan ikut menjadi bandar salah satu kandidat bupati. Dengan dalih berinvestasi untuk sektor pariwisata strategis, salah satu calon didanai untuk memenangkan pemilihan bupati serentak tahun ini.

Mungkinkah para kontraktor besar dan taipan, bos tambang, dan para investor hanya menyumbang di bawah angka yang diatur dalam UU Pilkada? Rezim UU Pilkada membatasi sumbangan kampanye dari perseorangan maksimal Rp 75 juta. Dari partai politik, kelompok, atau badan hukum swasta, sumbangan maksimal Rp 750 juta. Tapi, berapa pun UU Pilkada mematok limitasi sumbangan, mereka

tidak akan puas. Maka, siasat mengelabui norma-norma tentang dana kampanye selalu berkembang semakin licik.

Filosofi pembatasan dana kampanye tidak lain adalah untuk mencegah korupsi kepala daerah. Semakin banyak donatur menyumbang kemenangan kepala daerah, semakin tergadai kedaulatan politik seorang bupati dan wali kota. Untuk membalas budi para donatur, kepala daerah sering menjualbelikan izin usaha, izin tambang, kemudahan berinvestasi, yang menabrak hukum, membuka pintu korupsi sumber daya alam, dan merugikan kepentingan rakyat.

Pilkada tanpa pembatasan dana kampanye akan menjerumuskan demokrasi lokal ke dalam oligarki. Jika menggunakan terminologi Jeffrey Winters dalam studinya *Oligarchy* (Cambridge University Press; 2011), kaum oligark akan berupaya mempertahankan kekayaan, salah satunya melalui pangsung kekuasaan. Para oligark lokal akan bertarung sendiri menjadi calon kepala daerah atau mendukung pencalonan kerabat dekatnya. Jika tidak memungkinkan, mereka akan mendukung calon yang potensial mengambil kebijakan, melahirkan perda yang menguntungkan pertahananannya.

Indikator keberhasilan pilkada, yang paling utama adalah menghadang oligarki memupuk suburnya politik uang. Jika kita bisa berharap banyak pada KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum untuk mengawasi dana kampanye, masa depan pilkada akan semakin berkualitas. Tidak perlu melacak rekening ilegal. Dengan menghitung instrumen pengeluaran kampanye pasangan calon, sudah bisa dilacak, apakah pembiayaan dan sumber pembiayaan sudah sesuai antara LADK, LPSDK, LPPDK, dan kondisi riil

Akhlak Kepemimpinan

Oleh Biyanto

PANDEMI Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Lebih dari itu, musim pandemi juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, bahkan politik. Karena itulah, banyak pihak yang mengingatkan agar pemerintah lebih fokus menangani masalah pandemi. Jika pemerintah gagal fokus menentukan prioritas, musim pandemi dapat mengakibatkan dampak sosial ekonomi yang lebih besar. Salah satunya adalah terjadinya ontran-ontran (huru-hara atau keonaran).

Peristiwa ontran-ontran akan menjadi kenyataan jika kondisi ekonomi rakyat terus memburuk. Kondisi itu pasti berakibat pada peningkatan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan. Dalam kondisi kelaparan, orang akan mudah terbakar emosi karena tidak memiliki banyak pilihan. Yang dikhawatirkan banyak kalangan tentu jika dampak sosial ekonomi musim pandemi merembet ke panggung politik. Dampak yang paling mengerikan adalah jika terjadi pandemi politik.

Persoalan pandemi politik itulah yang harus diantisipasi sejak dini. Agar dampak musim pandemi tidak semakin luas, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat (powerful). Kepemimpinan yang kuat meniscayakan kemampuan untuk mengoordinasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal itu penting karena selama musim pandemi persoalan koordinasi kepemimpinan masih menjadi titik lemah. Setiap level kepemimpinan seperti berjalan sendiri-sendiri.

Dampaknya, muncul banyak kebijakan yang tumpang-tindih, bahkan saling bertabrakan, antarlevel kepemimpinan di pemerintahan. Selain persoalan koordinasi, kepemimpinan yang kuat mensyaratkan kemampuan untuk mengelola konflik yang terjadi antarelite. Harus diakui, ketegangan antarelite akhir-akhir ini terus meningkat. Jika ketegangan antarelite terus terjadi, akibatnya dapat meluas hingga ke basis massa. Apalagi, ruang dialog antarelite untuk saling mendengar kini terasa tertutup rapat.

Suara elite agama yang terhimpun di berbagai ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga nyaris tidak didengar. Usul penundaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak hingga kondisi pandemi melandai seperti angin lalu. Masukan berbagai kalangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja juga tidak terakomodasi

dengan baik. Dengan pendekatan demokrasi kuantitas DPR seperti kejar tayang untuk mengesahkan UU omnibus law. Padahal, secara prosedur dan substansi RUU tersebut masih memantik perdebatan.

Pertanyaannya, jika suara pilar civil society yang nir kepentingan politik-kekuasaan diabaikan, kepada siapa lagi elite negeri ini mau mendengar? Pada konteks itulah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengilustrasikan bahwa elite negeri sedang mengalami lockdown nurani politik. Elite politik nyaris kehilangan nurani sehingga mengakibatkan bebal kuasa. Mereka dininabobokan pesona dunia. Tuhan pun mengunci hati mereka yang nir kebenaran. Dalam kondisi itu, jangankan suara rakyat, suara Tuhan pun tidak akan didengar.

Pemerintah juga tidak seharusnya mereaksi kritik secara berlebihan. Apalagi dengan menghabiskan dana besar untuk membiayai buzzer atau influencer. Targetnya, para pendengung suara profesional itu membuat narasi positif terhadap kebijakan pemerintah. Pemanfaatan jasa pendengung suara justru kontraproduktif karena masyarakat semakin melek informasi sehingga dapat memilah berita yang benar dan yang pesanan. Pemerintah cukup menjawab kritik dengan perbaikan kinerja. Tetapi, harus diakui, tidak mudah menunjukkan kinerja terbaik di tengah pandemi.

Di tengah pandemi inilah komitmen elite untuk merajut kebersamaan penting diwujudkan. Spirit kebersamaan juga harus dibangun antara pemimpin dan rakyatnya. Jika belajar dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, persoalan kebersamaan pemimpin dan yang dipimpin sangat penting. Muhammad Husain Haekal dalam Hayatu Muhammad (1999) mengisahkan bahwa pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad memimpin pasukan Perang Badar. Pasukan nabi berkekuatan 305 orang dengan 70 kendaraan unta.

Dengan transportasi yang terbatas, nabi dan pasukannya bergerak meninggalkan Madinah menuju Badar. Jarak perjalanan Madinah–Badar diperkirakan 150 kilometer. Mengingat sulitnya medan dan terbatasnya sarana transportasi, setiap ekor unta harus dinaiki tiga atau empat orang secara bergantian. Nabi juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan sahabat lain. Selama perjalanan, para sahabat beberapa kali menawari nabi dengan kendaraan khusus satu ekor unta. Tawaran itu ditolak nabi dengan alasan bahwa pada masa sulit yang dibutuhkan adalah kebersamaan.

Teladan nabi penting menjadi spirit pejabat dan elite negeri. Nabi jelas menunjukkan teladan bahwa tidak sepatutnya pemimpin meminta fasilitas lebih saat rakyat menghadapi kesulitan hidup akibat pandemi Covid-19. Tuntutan fasilitas berlebih justru mengakibatkan tergerusnya kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya (low trust society). Karena itulah, para pemimpin negeri penting menunjukkan keteladanan. Ketegangan antarelite juga harus diminimalkan melalui dialog yang dilakukan secara tulus dan nirprasangka.

Peristiwa Perang Badar juga menunjukkan pentingnya dukungan rakyat kepada pemimpin. Tatkala pasukan nabi telah berhadap-hadapan dengan pasukan Quraisy yang berkekuatan hampir 1.000 orang dengan fasilitas transportasi dan senjata yang berlimpah, nabi meminta pendapat para sahabat. Nabi berseru dengan suara bergetar: "Wahai para sahabat, berikanlah kepadaku saran dan pertimbangan. Apakah kita terus maju melawan pasukan Quraisy atau sebaliknya?"

Dalam situasi menegangkan itu, seorang sahabat dari golongan Muhajirin bernama Miqdad bin Amr maju seraya berkata: "Rasulullah, teruskan apa yang diperintahkan Allah. Kami akan berjuang bersama tuan. Kami tidak akan bersikap seperti Bani Israil kepada Nabi Musa yang mengatakan 'Pergilah kamu sendiri bersama Tuhanmu dan berperanglah'." Komitmen serupa juga ditegaskan Sa'ad bin Mu'adz dari golongan Anshar. Dukungan sahabat utama terhadap nabi dapat menjadi teladan bagi elite negeri tercinta.

Komitmen sahabat utama itu mengajarkan bahwa semua elemen seharusnya memberikan dukungan kepada pemimpin, siapa pun orangnya dan dari partai mana pun. Tetapi, penting diingatkan, pemimpin yang didukung harus benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat. Sebaliknya, rakyat harus mengingatkan pemimpin yang hanya berjuang untuk keluarga, kelompok, dan partai pendukungnya.

Jika pemimpin dan kelompok elite gagal mewujudkan kebersamaan untuk mengatasi persoalan yang muncul di tengah pandemi, bangsa ini berpotensi menjadi negara gagal (failed state). Karena itulah, seluruh elemen bangsa, terutama kelompok elite dan pilar civil society, harus bersinergi untuk menyelamatkan negeri tercinta. (*)

Perluah Pembinaan Ideologi Pancasila?

Oleh ACHMAD MUNJID

SEPTEMBER kembali jadi ajang rutin ribut-ribut soal Partai Komunis Indonesia (PKI). Kegaduhan polemik seputar RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) memang surut setelah ia diganti RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Tapi, ketegangan tetap membayang. Di satu sisi, ada kelompok yang menierakkan adanya ancaman serius ideologi radikal (Islam). Di sisi lain, ada kelompok (Islam) yang menierakkan bahaya kembalinya komunisme. Tak pelak, Pancasila kembali diperebutkan.

Pancasila memang dirumuskan sebagai kesepakatan untuk menjaga titik keseimbangan berbagai kekuatan. Di situlah Indonesia berdiri. Ketika keseimbangan terganggu, Indonesia terancam. Ketegangan yang membayang itu menunjukkan bahwa sekarang keseimbangan sedang terganggu.

Betulkah solusinya adalah pembinaan ideologi seperti ditawarkan RUU BPIP yang kini digodok DPR?

Dasar Negara

Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno merumuskan Pancasila untuk menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat tentang dasar negara. Dalam istilah Soekarno (1947:1), Pancasila adalah filosofische grondslag, fondasi filosofis, "oentoek di atasnja didirikan gedoeng Indonesia Merdeka jang kekal dan abadi".

Soekarno juga menyebut Pancasila sebagai weltanschauung (pandangan dunia) yang bisa disetujui semua pihak, alat pemersatu yang bisa diterima golongan agama, nasionalis, sosialis, dan lainnya. Tapi, ia tak pernah menyebut Pancasila sebagai ideologi, termasuk ketika memberikan uraian rinci dalam kursus-kursus Pancasila pada 1958–1959 yang dibukukan menjadi Pantja Sila sebagai Dasar Negara.

Dalam pidato berjudul "Ilmu dan Amal" ketika menerima gelar doktor honoris causa dari UGM pada 1951 berkat jasanya sebagai "pencipta Pancasila", Soekarno konsisten tak pernah menyebut Pancasila sebagai ideologi. Pancasila memang lebih besar daripada ideologi.

Orang yang mungkin pertama menyebut Pancasila sebagai "ideologi" adalah Radjiman Wedyodiningrat dalam pengantar buku Lahirnja Pantja Sila, versi tertulis pidato Soekarno 1 Juni 1945. Di situ Pancasila disebut sebagai

”Demokratisch Beginssel, soeatoe Beginssel jang mendjadi Dasar Negara kita, jang mendjadi Rechtsideologie Negara kita...”

”Rechtsideologie” di situ berarti ideologi hukum, sistem gagasan yang menjadi dasar hukum, sumber dari segala sumber hukum. Jelas, itu bukan ideologi sebagaimana lazim dipahami sekarang.

Ideologi

Di antara yang pertama menyebut Pancasila sebagai ideologi dalam pengertian yang lazim sekarang adalah Roeslan Abdulgani. Dalam ceramah pada 1975 yang kemudian dibukukan menjadi Pengembangan Pancasila di Indonesia (1979), Roeslan bahkan membicarakan pentingnya ”pembinaan ideologi Pancasila” demi ketahanan nasional yang mantap, antara lain, dengan merujuk pengalaman Vietnam. Meski kuantitas dan kualitas persenjataan Vietnam Utara yang komunis lemah, mereka bisa mengalahkan Vietnam Selatan dukungan Amerika Serikat berkat ”ketahanan mental ideologis yang besar sekali” (h. 23). Roeslan adalah kepala BP7 pada 1978–1992.

Khususnya sejak 1965, Pancasila memang makin digemparkan sebagai ideologi guna memerangi komunisme dan Islam politik, dua musuh ideologis utama Orde Baru (Orba). Dalam konteks itu, Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai seperangkat nilai, keyakinan, atau paham tentang prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi bahkan menjadi doktrin yang tertutup, dengan tafsir yang kaku, tunggal, untuk dipahami dan tinggal diamalkan. Itulah pengertian Pancasila sebagai ideologi yang lazim sekarang, yang efektif menjadi instrumen politik penguasa.

Lewat berbagai jalur, semasa Orba setiap warga negara wajib mengikuti indoktrinasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Setiap organisasi kemasyarakatan, lembaga agama, asosiasi profesi, partai, atau perkumpulan apa pun wajib menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal atau dibubarkan. Meski disebut sebagai ideologi terbuka, Pancasila sebagai Ideologi (1991) suntingan Oetojo Oesman melukiskan bagaimana upaya Orba mengumpulkan pemikiran guna menjustifikasi doktrin Pancasila sebagai alat kontrol ketat berbagai bidang kehidupan.

Betapapun, setelah sekian banyak energi, anggaran, sumber daya, dan waktu dikerahkan, apa hasil indoktrinasi Pancasila dari 1978–1998? Gatot, gagal total! Betulkah setelah reformasi pemahaman masyarakat terhadap Pancasila luntur dan

solusinya adalah pembinaan ideologi? Bagi saya itu salah diagnosis, keliru resep. Maukah kita terperosok lagi ke lubang sejarah yang sama?

Pembinaan Ideologi

Saya khawatir justru di sinilah problem utama RUU HIP dan RUU BPIP yang cenderung menempatkan Pancasila sebagai ideologi dalam arti doktrin. Padahal, mengikuti Radjiman, bukankan Pancasila dirancang sebagai demokratisch beginsel (prinsip demokrasi), sebagai paradigma? Kenapa begitu obsesif terhadap pembinaan ideologi, suatu upaya kontrol pikiran yang lazim dilakukan negara-negara komunis dan rezim Islam yang justru ditolak Pancasila?

Penggunaan istilah dan definisi "pembinaan ideologi" (pasal 1) serta tujuannya (pasal 3) menunjukkan bahwa orientasi RUU BPIP tidak jauh berbeda dengan P4: normativisasi Pancasila. Di situ Pancasila bukan menjadi paradigma bersama yang memberdayakan setiap warga negara, sebagai pijakan dan penuntun "mengapa, bagaimana, dan untuk apa" kita menjadi sebuah bangsa.

Mari kembalikan Pancasila sebagai kesepakatan untuk menjaga keseimbangan. Yang kita perlukan bukan "apa" tafsir Pancasila yang baik dan benar, tapi "bagaimana" mengembangkan model penafsiran yang konstruktif bagi kehidupan bersama. Dengan demikian, religiusitas dan kebebasan beragama, humanisme, dan hak-hak asasi manusia, nasionalisme, demokrasi, serta keadilan sosial sebagai nilai-nilai pokok Pancasila bisa terus diterjemahkan melalui pergumulan dengan realitas hari ini dan dipandu komitmen sejarah serta cita-cita bersama sebagai bangsa.

Untuk sila pertama, misalnya, yang terpenting bukan mengurus apa itu agama dengan segala kriterianya yang kerap berbuntut penyesatan, bahkan kriminalisasi minoritas, tapi bagaimana setiap pribadi dan kelompok menikmati kebebasan beragama dengan jaminan kepastian hukum. Pengembangan paradigma dan model penafsiran konstruktif terhadap Pancasila tak membutuhkan pembinaan ideologi. Pembinaan ideologi justru akan melumpuhkannya.

Lampiran 3. Lembar Usulan Tema dan Pembimbingan



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
JALAN GAJAH RAYA NO. 40 SEMARANG

USULAN TEMA DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yth. Ketua Program Studi *)

1. Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
2. Pend. Bahasa dan Sastra Inggris
3. Pend. Bahasa dan Sastra Jawa di Semarang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

N a m a : Aris Wipa

N P M 17410151

bermaksud mengajukan tema skripsi dengan judul :

"Analisis Fungsi dan Kategori Sintaksis Kalimat Majemuk Bertingkat pada Opini JawaPos.com Edisi 2020"

.....
.....
.....
.....
.....

Selanjutnya, dosen pembimbing skripsi kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Progd., dengan keputusan pembimbing :

1. Nanik Setyawati, S.S., M.Hum.
2. Eva Ardiana Indrariansi, S.S., M.Hum.

Menyetujui,
Ketua Program Studi,


Semarang, 11 Januari 2021

Yang mengajukan,

Eva Ardiana Indrariansi, S.S., M.Hum.

NIDN 0607088702

Aris Wipa


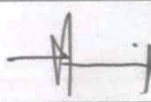

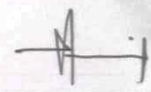

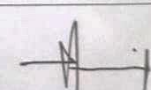
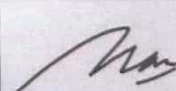
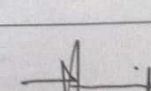
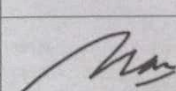
*) lingkari salah satu





Lampiran 4. Rekapitulasi Pembimbingan Proposal Skripsi



PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
 FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
 UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
 Jalan Gajah Raya 40 Semarang
 Telepon (024) 8316377, Faksimile 8449217

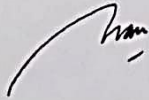
REKAPITULASI PROSES PEMBIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NO	TGL. BLN. TAHUN	KEGIATAN	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	23-02-2021	Usulan Proposal skripsi ke pembimbing I (<i>disetujui/perbaiki</i> *) Revisi		X
2.	17-03-2021	Usulan Proposal skripsi ke pembimbing II (<i>disetujui/perbaiki</i> *) Revisi	X	
3.	08-03-2021	Usulan Proposal skripsi ke pembimbing I (<i>disetujui/perbaiki</i> *) Revisi		X
4.	19-03-2021	Usulan Proposal skripsi ke pembimbing II (<i>disetujui/perbaiki</i> *) Revisi	X	
5.	25-03-2021	Usulan Proposal skripsi ke pembimbing I (<i>disetujui/perbaiki</i> *) Revisi		X
6.	24-03-2021	Usulan Proposal skripsi ke pembimbing II (<i>disetujui/perbaiki</i> *) Revisi	X	
7.	09-04-2021	Usulan Proposal skripsi ke pembimbing I (<i>disetujui/perbaiki</i> *) Revisi		X
8.	09-04-2021	Usulan Proposal skripsi ke pembimbing II (<i>disetujui/perbaiki</i> *) ACC	X	
9.	28-04-2021	Usulan Proposal skripsi ke pembimbing I (<i>disetujui/perbaiki</i> *) Revisi		X

10.	-	Usulan Proposal skripsi ke pembimbing II (disetujui/perbaiki)*	X	
11.	05-05-2021	Pengajuan Proposal Skripsi ke pembimbing I (disetujui/perbaiki)* Revisi		X
12.	-	Pengajuan Proposal Skripsi ke pembimbing II (disetujui/perbaiki)*	X	
13.	04-06-2021	Pengajuan Proposal Skripsi ke pembimbing I (disetujui/perbaiki)* Revisi		X
14.	-	Pengajuan Proposal Skripsi ke pembimbing II (disetujui/perbaiki)*	X	
15.	18-06-2021	Pengajuan Proposal Skripsi ke pembimbing I (disetujui/perbaiki)* Revisi		X
16.	-	Pengajuan Proposal Skripsi ke pembimbing II (disetujui/perbaiki)*	X	
17.	27-07-2021	Pengajuan Proposal Skripsi ke pembimbing I (disetujui/perbaiki)* ACC		X

*) coret yang tidak perlu

Mengetahui,
Pembimbing I



Nanik Setyawati, S.S., M.Hum.
NPP 997101150

Jadwa Rutin Bimbingan

hari :Pukul:
hari :Pukul:
di ruang dosen PBSI

Mengetahui,
Pembimbing II

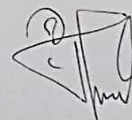


Eva Ardiana Indrariansi, S.S., M.Hum.
NPP 118701358

Jadwa Rutin Bimbingan

hari : Rabu Pukul: 13.00 WIB
hari : Jumat Pukul: 10.00 WIB
di ruang dosen PBSI

Semarang,2021
Mahasiswa,



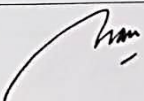




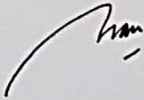
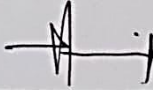
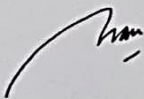
Aris Wipa
NPM 17410151

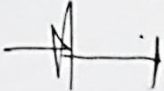






Lampiran 5. Rekapitulasi Pembimbingan Skripsi



PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
 FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
 UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
 Jalan Gajah Raya 40 Semarang
 Telepon (024) 8316377, Faksimile 8449217

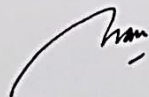
REKAPITULASI PROSES PEMBIMBINGAN SKRIPSI

NO	TGL, BLN. TAHUN	KEGIATAN	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	30-07-2021	Bab I, II, III ke Pembimbing I (disetujui/diperbaiki) ACC		X
2.	30-07-2021	Bab I, II, III ke Pembimbing II (disetujui/diperbaiki) ACC	X	
3.	23-08-2021	Bab IV ke Pembimbing I (disetujui/diperbaiki) Revisi		X
4.	13-08-2021	Bab IV ke Pembimbing II (diperbaiki) Revisi	X	
5.	-		-	X
6.	19-08-2021	Bab IV ke Pembimbing II (diperbaiki) Revisi	X	
7.	03-09-2021	Bab IV ke Pembimbing I (diperbaiki) Revisi		X
8.	25-08-2021	Bab IV ke Pembimbing II (diperbaiki) Revisi	X	
8.	07-09-2021	Bab IV ke Pembimbing I (disetujui/diperbaiki) Revisi		X

9.	09-09-2021	Bab IV ke Pembimbing II (disetujui) ACC	X	
10.	14-09-2021	Bab IV ke Pembimbing I (disetujui/diperbaiki) Revisi		X
11.	-	-	X	-
12.	20-09-2021	Bab IV ke Pembimbing I (disetujui/diperbaiki) Revisi		-
13.	07-10-2021	Bab V ke Pembimbing II (disetujui/diperbaiki) Revisi	-	
14.	23-09-2021	Bab IV ke Pembimbing I (disetujui/diperbaiki) Revisi		-
15.	26-11-2021	Bab V ke Pembimbing II (disetujui/diperbaiki) ACC	-	
16.	24-01-2022	Bab IV dan V ke Pembimbing I (disetujui/diperbaiki) ACC		-

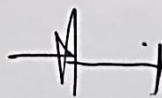
*) coret yang tidak perlu

Mengetahui,
Pembimbing I



Nanik Setyawati, S.S., M.Hum.
NPP 997101150

Mengetahui,
Pembimbing II




Eva Ardiana Indrariansi, S.S., M.Hum.
NPP 118701358

Semarang,2021
Mahasiswa,



Aris Wipa
NPM 17410151

Lampiran 6. Lembar Pengajuan Ujian Skripsi

 YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI

PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI

Diajukan Oleh :

N a m a : Aris Wipa

N P M : 17410151

Jurusan : 1. Pend. Bahasa Inggris
 2. Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia
 3. Pend. Bahasa dan Sastra Daerah

Tema Skripsi :
Analisis Fungsi dan Kategori Sintaksis Kalimat Majemuk Berlingkat
Pada Opini Jawapos.com edisi 2020

Untuk dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 11 Maret 2022

W a k t u : 08.30 - 09.30

Ruang : 307


Adapun sebagai penguji :

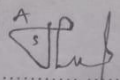
1. Penguji I : Nanik Setyowati, S.S., M.Hum.

2. Penguji II : Eva Ardiana Indrariansi, S.S., M.Hum.


3. Penguji III : Arisul Ulumuddin, S.pd., M.Pd.

Semarang, 7 Maret 2022

Menyetujui,
Ketua Program Studi,

Eva Ardiana Indrariansi, S.S., M.Hum.
NPP 118701358

Yang mengajukan,

Aris Wipa
NPM 17410151

Lampiran 7. Lembar Berita Acara Ujian Skripsi

 YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
Kampus : Jalan Sidodadi Timur Nomor 24 Semarang Indonesia. Telp. (024) 8448217, 8316377
Faks. (024)8448217 Website: www.upgris.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Jumat 11 Maret 2022, berdasarkan susunan tim penguji Skripsi :

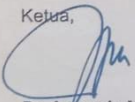
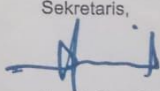
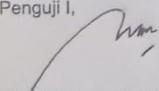

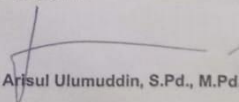
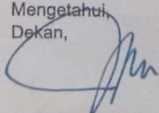
1. Nama : Dr. Asropah, M.Pd.
Jabatan : Ketua
2. Nama : Eva Ardiana Indrariansi, S.S., M.Hum.
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Nanik Setyawati, S.S., M.Hum
Jabatan : Anggota (Penguji I)
4. Nama : Eva Ardiana Indrariansi, S.S., M.Hum.
Jabatan : Anggota (Penguji II)
5. Nama : Arisul Ulumuddin, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Anggota (Penguji III)

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah telah diuji skripsinya.
Nama : Aris Wipa Fakultas : FPBS
N.P.M : 17410151 Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Program Pendidikan : Strata 1

Judul Skripsi :
ANALISIS FUNGSI DAN KATEGORI SINTAKSIS KALIMAT MAJEMUK BERTINGKAT PADA OPINI
JAWAPOS.COM EDISI 2020

Nilai : **86 (A)**

Demikian berita Acara Ujian Skripsi dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

<p>Ketua,</p>  Dr. Asropah, M.Pd.	<p>Sekretaris,</p>  Eva Ardiana Indrariansi, S.S., M.Hum.	
<p>Penguji I,</p>  Nanik Setyawati, S.S., M.Hum	<p>Penguji II,</p>  Eva Ardiana Indrariansi, S.S., M.Hum.	<p>Penguji III,</p>  Arisul Ulumuddin, S.Pd., M.Pd.
<p>Mengetahui, Dekan,</p>  Dr. Asropah, M.Pd. NPP/NIP 936601104		

Lampiran 8. Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aris Wipa
NPM : 17410151
Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas : Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi akademik atas perbuatan tersebut.

Semarang, 22 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Aris Wipa

NPM 17410151